



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN  
METROPOLITAN CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI  
TAHUN 2020-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing, perlu upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan arahan strategi pengembangan kawasan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan menyiapkan ruang investasi untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi meliputi perencanaan pembangunan Kawasan Industri, penyediaan infrastruktur Industri, pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri, pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri, sehingga diperlukan perencanaan terpadu dalam mewujudkan pengembangan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN METROPOLITAN CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI TAHUN 2020-2030.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang wilayah/sebagian wilayah administratifnya termasuk ke dalam delineasi Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat yang wilayah/sebagian wilayah administratifnya termasuk ke dalam delineasi Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati.
6. Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
7. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Kawasan Metropolitan REBANA adalah rumusan arahan pengembangan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

## Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan Kawasan Metropolitan REBANA menuju pencapaian indikator utama pembangunan kawasan.

## Pasal 3

Sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, untuk mewujudkan:

- a. tersedianya rencana aksi pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
- b. tersedianya rencana aksi peningkatan daya saing investasi kawasan;
- c. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan sumber daya manusia inovatif; dan
- d. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem pendukung.

#### Pasal 4

Kedudukan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagai :

- a. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkesinambungan di Kawasan Metropolitan REBANA sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. acuan bagi para pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

#### BAB II

#### ISI DAN URAIAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA

#### Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA disusun dengan sistematika, yang meliputi :

- a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup.

- b. BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Memuat kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.

- c. BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Memuat kondisi sosial, profil potensi dan peluang ekonomi, delineasi kawasan Metropolitan REBANA, serta kondisi lahan peruntukan kawasan Metropolitan REBANA.

- d. BAB IV ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA

Memuat tujuan dan sasaran pengembangan kawasan, indikator utama capaian pengembangan kawasan, arahan pengembangan sektor unggulan dan klaster industri, arahan pengembangan struktur ruang kawasan, dan arahan pengembangan kelembagaan.

e. BAB V RENCANA AKSI

Memuat indikasi program dan kegiatan, yang meliputi :

1. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
2. Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan;
3. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan Sumber Daya Manusia inovatif;
4. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung.

f. BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Memuat indikator penilaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

g. BAB VII PENUTUP

- (2) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, Gubernur membentuk Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengarah;
  - c. Sekretariat Dewan Pengarah; dan
  - d. Pelaksana.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan REBANA yang sesuai dengan arah pengembangan serta indikasi program dan kegiatan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator utama pembangunan di Kawasan Metropolitan REBANA.
- (3) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA minimal 1 kali dalam setahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, dan menjadi bahan laporan Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 November 2020  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

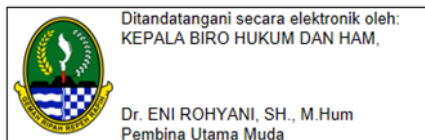
Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 84 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020  
TENTANG : RENCANA AKSI PENGEMBANGAN  
KAWASAN METROPOLITAN  
CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI  
TAHUN 2020-2030

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN  
CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI TAHUN 2020-2030

## Kata Pengantar

Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030 disusun untuk menjawab kebutuhan akan adanya suatu arahan pembangunan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Kawasan Metropolitan REBANA. Integrasi pembangunan ini penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan tepat sasaran. Beragamnya kepentingan dan peran antar-pelaku pembangunan perlu diselaraskan agar tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kolaborasi juga menjadi bagian penting dari upaya pencapaian target-target rencana aksi ini. Disadari bahwa kemampuan pendanaan pemerintah tidak sepenuhnya mencukupi untuk mewujudkan setiap gagasan pembangunan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya mengajak pihak-pihak lain di luar pemerintah agar bermitra menghela pembangunan khususnya di Jawa Barat.

Kawasan Metropolitan REBANA diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Semoga Rencana Aksi ini menjadi salah satu pendorong terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 11

DAFTAR TABEL ..... 14

DAFTAR GAMBAR ..... 16

BAB I PENDAHULUAN ..... 20

1.1 Latar Belakang..... 20

1.2 Tujuan dan Sasaran..... 22

1.3 Ruang Lingkup..... 22

1.3.1 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Aksi ..... 22

1.3.2 Ruang Lingkup Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA ..... 23

1.3.3 Ruang Lingkup Wilayah..... 23

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ..... 23

2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional..... 24

2.1.1 Kebijakan dalam RPJMN 2020 – 2024 ..... 24

2.1.2 Kebijakan di dalam RTRWN 2008 – 2028 ..... 26

2.1.3 Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 ..... 26

2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat..... 27

2.2.1 Kebijakan di Dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018 – 2023..27

2.2.2 Kebijakan di Dalam RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029 .....28

2.2.3 Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 ..... 29

2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon..... 30

2.3.1 Kabupaten Cirebon..... 30

2.3.2 Kabupaten Indramayu ..... 33

2.3.3 Kabupaten Majalengka ..... 35

2.3.4 Kabupaten Subang ..... 37

2.3.5 Kabupaten Sumedang ..... 39

2.3.6 Kabupaten Kuningan..... 41

2.3.7 Kota Cirebon ..... 44

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH..... 45

3.1 Kondisi Sosial Kawasan Metropolitan REBANA ..... 45

3.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk..... 45

3.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 50

3.1.3 Tingkat Kemiskinan..... 54

3.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ..... 59

3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... 63

3.2 Profil Ekonomi di Kawasan Metropolitan REBANA ..... 67

|                                                               |                                                                                                |     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.1                                                         | Produk Domestik Regional Bruto .....                                                           | 67  |
| 3.2.2                                                         | Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                 | 78  |
| 3.2.3                                                         | Sektor Basis .....                                                                             | 81  |
| 3.3                                                           | Delineasi Kawasan Metropolitan REBANA.....                                                     | 88  |
| 3.4                                                           | Kondisi Lahan Peruntukan Kawasan Metropolitan REBANA .....                                     | 89  |
| 3.4.1                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Patimban .....                                                         | 93  |
| 3.4.2                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Cipali Subang Barat.....                                               | 95  |
| 3.4.3                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Cipali Subang Timur .....                                              | 97  |
| 3.4.4                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Cipali Indramayu .....                                                 | 99  |
| 3.4.5                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Patrol.....                                                            | 101 |
| 3.4.6                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Losarang .....                                                         | 103 |
| 3.4.7                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Balongan .....                                                         | 105 |
| 3.4.8                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Tukdana .....                                                          | 107 |
| 3.4.9                                                         | Penggunaan Lahan di KPI Krangkeng .....                                                        | 109 |
| 3.4.10                                                        | Penggunaan Lahan di KPI Kertajati-Jatitujuh .....                                              | 111 |
| 3.4.11                                                        | Penggunaan Lahan di KPI Jatiwangi .....                                                        | 113 |
| 3.4.12                                                        | Penggunaan Lahan di KPI Butom.....                                                             | 115 |
| 3.4.13                                                        | Penggunaan Lahan di KPI Cirebon.....                                                           | 117 |
| <b>BAB IV ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA</b> |                                                                                                |     |
|                                                               | .....                                                                                          | 120 |
| 4.1                                                           | Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan.....                                                   | 120 |
| 4.2                                                           | Indikator Utama Capaian Pengembangan Kawasan .....                                             | 124 |
| 4.2.1                                                         | Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat .....                               | 124 |
| 4.2.2                                                         | Penyerapan Tenaga Kerja.....                                                                   | 136 |
| 4.3                                                           | Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan .....                                              | 138 |
| 4.4                                                           | Arahan Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster industri ...                                   | 140 |
| 4.4.1                                                         | Arahan Pengembangan Sektor .....                                                               | 140 |
| 4.4.2                                                         | Arahan Pengembangan Klaster Industri.....                                                      | 142 |
| 4.5                                                           | Arahan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah .....                                               | 151 |
| 4.5.1                                                         | Sistem Pusat-pusat Pertumbuhan .....                                                           | 152 |
| 4.5.2                                                         | Sistem Jaringan Transportasi .....                                                             | 165 |
| 4.5.3                                                         | Infrastruktur Dasar .....                                                                      | 182 |
| 4.6                                                           | Arahan Pengembangan Kelembagaan Kawasan .....                                                  | 202 |
| <b>BAB V RENCANA AKSI</b> .....                               |                                                                                                | 208 |
| 5.1                                                           | Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi .....                             | 208 |
| 5.2                                                           | Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan; .....                                   | 215 |
| 5.3                                                           | Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan Sumber Daya Manusia inovatif ..... | 215 |
| 5.4                                                           | Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung .....                                               | 215 |

**BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....244**  
**BAB VII PENUTUP .....246**

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cirebon.....                                    | 45  |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indramayu.....                                  | 46  |
| Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Majalengka .....                                | 46  |
| Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Subang.....                                     | 47  |
| Tabel 3.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang .....                                  | 48  |
| Tabel 3.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang .....                                  | 49  |
| Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Cirebon                                              | 49  |
| Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon.....                                | 55  |
| Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu.....                              | 55  |
| Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka .....                           | 56  |
| Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Subang.....                                | 57  |
| Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang .....                             | 57  |
| Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan.....                              | 58  |
| Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon.....                                    | 59  |
| Tabel 3.15 PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .....    | 67  |
| Tabel 3.16 PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .....  | 69  |
| Tabel 3.17 PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) ..... | 70  |
| Tabel 3.18 PDRB Kabupaten Subang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .....     | 72  |
| Tabel 3.19 PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .....   | 74  |
| Tabel 3.20 PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .....   | 75  |
| Tabel 3.21 PDRB Kota Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....          | 77  |
| Tabel 3.22 Analisis LQ Kabupaten Cirebon .....                                                                | 82  |
| Tabel 3.23 Analisis LQ Kabupaten Indramayu.....                                                               | 83  |
| Tabel 3.24 Analisis LQ Kabupaten Majalengka.....                                                              | 84  |
| Tabel 3.25 Analisis LQ Kabupaten Subang.....                                                                  | 84  |
| Tabel 3.26 Analisis LQ Kabupaten Sumedang .....                                                               | 85  |
| Tabel 3.27 Analisis LQ Kabupaten Kuningan .....                                                               | 86  |
| Tabel 3.28 Analisis LQ Kota Cirebon .....                                                                     | 87  |
| Tabel 4.1 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat .....                          | 126 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.2 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon.....                             | 129 |
| Tabel 4.3 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indramayu.....                           | 130 |
| Tabel 4.4 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Majalengka .....                         | 131 |
| Tabel 4.5 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Subang .....                             | 132 |
| Tabel 4.6 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang .....                           | 133 |
| Tabel 4.7 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kuningan.....                            | 134 |
| Tabel 4.8 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cirebon.....                                  | 135 |
| Tabel 4.9 Skenario Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Metropolitan REBANA .....                               | 137 |
| Tabel 4.10 Matriks Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.....                       | 138 |
| Tabel 4.11 Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRW Kabupaten .....                                                   | 154 |
| Tabel 4.12 Arahan Fungsi Kawasan .....                                                                        | 158 |
| Tabel 4.13 Tata Guna Lahan, Jumlah Penduduk Perumahan, Dan Tenaga Kerja di KPI Metropolitan REBANA.....       | 184 |
| Tabel 4.14 Sumber Air Baku Kabupaten Cirebon .....                                                            | 185 |
| Tabel 4.15 Sumber Air Baku Kabupaten Indramayu .....                                                          | 186 |
| Tabel 4.16 Sumber Air Baku Kabupaten Majalengka.....                                                          | 186 |
| Tabel 4.17 Sumber Air Baku Kabupaten Subang .....                                                             | 187 |
| Tabel 4.18 Sumber Air Baku Kabupaten Sumedang.....                                                            | 187 |
| Tabel 4.19 Sumber Air Baku Kabupaten Kuningan .....                                                           | 188 |
| Tabel 4.20 Total Sumber Air Baku Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA .....                               | 188 |
| Tabel 4.21 Total Debit Alternatif Sumber Air Baku di Kawasan Metropolitan REBANA.....                         | 193 |
| Tabel 4.22 Kebutuhan Air Baku di Kawasan Metropolitan REBANA .....                                            | 194 |
| Tabel 4.23 Kapasitas IPAL Metropolitan Cirebon .....                                                          | 195 |
| Tabel 4.24 Kapasitas IPLT Eksisting.....                                                                      | 195 |
| Tabel 4.25 Produksi Air Limbah di Kawasan Metropolitan REBANA (liter/detik) .....                             | 196 |
| Tabel 4.26 Kapasitas TPS Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA.....                                        | 197 |
| Tabel 4.27 TPA Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA.....                                                  | 197 |
| Tabel 4.28 Timbulan Sampah Industri di Kawasan Metropolitan REBANA .....                                      | 199 |
| Tabel 4.29 Timbulan Sampah di Kawasan Metropolitan REBANA.....                                                | 200 |
| Tabel 4.30 Pengembangan kelistrikan di Kawasan Metropolitan REBANA .....                                      | 201 |
| Tabel 4.31 Kebutuhan Listrik di Kawasan Metropolitan REBANA.....                                              | 201 |
| Tabel 4.32 Peran Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Metropolitan REBANA .....                | 203 |
| Tabel 5.1 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi.....             | 209 |
| Tabel 5.2 Program dan Indikator Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan .....                   | 216 |
| Tabel 5.3 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif..... | 227 |
| Tabel 5.4 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung .....                              | 231 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Delineasi Kawasan Metropolitan REBANA.....                                    | 23 |
| Gambar 2.1 Wilayah Pengembangan Jawa Barat .....                                         | 29 |
| Gambar 3.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten<br>Cirebon 2015-2019 .....   | 45 |
| Gambar 3.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....                                  | 46 |
| Gambar 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten<br>Majalengka 2015-2019..... | 47 |
| Gambar 3.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten<br>Subang 2014-2018 .....    | 47 |
| Gambar 3.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten<br>Sumedang 2015-2019.....   | 48 |
| Gambar 3.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten<br>Kuningan 2015-2019 .....  | 49 |
| Gambar 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon<br>2015-2019 .....        | 50 |
| Gambar 3.8 Perbandingan IPM dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019                        | 50 |
| Gambar 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2014 –<br>2019 .....             | 51 |
| Gambar 3.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu 2014<br>– 2019 .....          | 51 |
| Gambar 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka 2014<br>– 2019 .....         | 52 |
| Gambar 3.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang 2014 –<br>2019 .....             | 52 |
| Gambar 3.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang 2014 –<br>2019 .....           | 53 |
| Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuningan 2014 –<br>2019 .....           | 53 |
| Gambar 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon 2014 – 2019                          | 54 |
| Gambar 3.16 Perbandingan Kemiskinan dengan Provinsi Jawa Barat (%)<br>Tahun 2019 .....   | 54 |
| Gambar 3.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon (%) 2015 – 2019 .                       | 55 |
| Gambar 3.18 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu (%) 2015 – 2019<br>.....              | 56 |
| Gambar 3.19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka (%) 2015 – 2019<br>.....             | 56 |
| Gambar 3.20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Subang (%) 2015 – 2019..                        | 57 |
| Gambar 3.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang (%) 2015 – 2019<br>.....               | 58 |
| Gambar 3.22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan (%) 2015 – 2019<br>.....               | 58 |
| Gambar 3.23 Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon (%) 2015 – 2019 .....                        | 59 |
| Gambar 3.24 Perbandingan RLS dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019<br>.....              | 59 |
| Gambar 3.25 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon 2014 – 2019                         | 60 |
| Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indramayu 2014 – 2019<br>.....              | 60 |
| Gambar 3.27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka 2014 –<br>2019 .....             | 61 |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.28 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Subang 2014 – 2019                                                    | 61 |
| Gambar 3.29 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang 2014 – 2019                                                  | 62 |
| Gambar 3.30 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kuningan 2014 – 2019                                                  | 62 |
| Gambar 3.31 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cirebon 2014 – 2019                                                        | 63 |
| Gambar 3.32 Perbandingan TPT dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019                                                 | 63 |
| Gambar 3.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon (%) 2014 – 2019                                         | 64 |
| Gambar 3.34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indramayu (%) 2014 – 2019                                       | 64 |
| Gambar 3.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka (%) 2014 – 2019                                      | 65 |
| Gambar 3.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang (%) 2014 – 2019                                          | 65 |
| Gambar 3.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang (%) 2014 – 2019                                        | 66 |
| Gambar 3.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuningan (%) 2014 – 2019                                        | 66 |
| Gambar 3.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon (%) 2014 – 2019                                              | 67 |
| Gambar 3.40 PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019    | 68 |
| Gambar 3.41 PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019  | 70 |
| Gambar 3.42 PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019 | 72 |
| Gambar 3.43 PDRB Kabupaten Subang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019     | 73 |
| Gambar 3.44 PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019   | 75 |
| Gambar 3.45 PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019   | 76 |
| Gambar 3.46 PDRB Kota Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019         | 78 |
| Gambar 3.47 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2014-2019                                                   | 78 |
| Gambar 3.48 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu 2014-2019                                                 | 79 |
| Gambar 3.49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 2014-2019                                                | 79 |
| Gambar 3.50 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang 2014-2019                                                    | 80 |
| Gambar 3.51 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang 2014-2019                                                  | 80 |
| Gambar 3.52 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan 2014-2019                                                  | 81 |
| Gambar 3.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon 2014-2019                                                        | 81 |
| Gambar 3.54 Peta Delineasi Kawasan Metropolitan REBANA                                                             | 89 |
| Gambar 3.55 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Metropolitan REBANA Berdasarkan Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat  | 90 |
| Gambar 3.56 Luas Pola Ruang Kabupaten Subang                                                                       | 90 |
| Gambar 3.57 Luas Pola Ruang Kabupaten Sumedang                                                                     | 91 |
| Gambar 3.58 Luas Pola Ruang Kabupaten Cirebon                                                                      | 91 |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3.59 Luas Pola Ruang Kabupaten Indramayu .....                                                  | 92  |
| Gambar 3.60 Luas Pola Ruang Kabupaten Majalengka .....                                                 | 92  |
| Gambar 3.61 Luas Pola Ruang Kabupaten Kuningan .....                                                   | 93  |
| Gambar 3.62 Luas Pola Ruang Kota Cirebon .....                                                         | 93  |
| Gambar 3.63 Peta Rencana Pola Ruang KPI Patimban .....                                                 | 94  |
| Gambar 3.64 Peta Tutupan Lahan KPI Patimban .....                                                      | 95  |
| Gambar 3.65 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Subang Barat .....                                      | 96  |
| Gambar 3.66 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Subang Barat .....                                           | 97  |
| Gambar 3.67 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Subang Timur .....                                      | 98  |
| Gambar 3.68 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Subang Timur .....                                           | 99  |
| Gambar 3.69 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Indramayu .....                                         | 100 |
| Gambar 3.70 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Indramayu .....                                              | 101 |
| Gambar 3.71 Peta Rencana Pola Ruang KPI Patrol .....                                                   | 102 |
| Gambar 3.72 Peta Tutupan Lahan KPI Patrol .....                                                        | 103 |
| Gambar 3.73 Peta Rencana Pola Ruang KPI Losarang .....                                                 | 104 |
| Gambar 3.74 Peta Tutupan Lahan KPI Losarang .....                                                      | 105 |
| Gambar 3.75 Peta Rencana Pola Ruang KPI Balongan .....                                                 | 106 |
| Gambar 3.76 Peta Tutupan Lahan KPI Balongan .....                                                      | 107 |
| Gambar 3.77 Peta Rencana Pola Ruang KPI Tukdana .....                                                  | 108 |
| Gambar 3.78 Peta Tutupan Lahan KPI Tukdana .....                                                       | 109 |
| Gambar 3.79 Peta Rencana Pola Ruang KPI Krangkeng .....                                                | 110 |
| Gambar 3.80 Peta Tutupan Lahan KPI Krangkeng .....                                                     | 111 |
| Gambar 3.81 Peta Rencana Pola Ruang KPI Kertajati-Jatitujuh .....                                      | 112 |
| Gambar 3.82 Peta Tutupan Lahan KPI Kertajati-Jatitujuh .....                                           | 113 |
| Gambar 3.83 Peta Rencana Pola Ruang KPI Jatiwangi .....                                                | 114 |
| Gambar 3.84 Peta Tutupan Lahan KPI Jatiwangi .....                                                     | 115 |
| Gambar 3.85 Peta Rencana Pola Ruang KPI Butom .....                                                    | 116 |
| Gambar 3.86 Peta Tutupan Lahan KPI Butom .....                                                         | 117 |
| Gambar 3.87 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cirebon .....                                                  | 118 |
| Gambar 3.88 Peta Tutupan Lahan KPI Cirebon .....                                                       | 119 |
| Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Investasi di<br>Jawa Barat Tahun 2020 – 2030 ..... | 128 |
| Gambar 4.2 Titik Pengembangan Kawasan pada Kawasan Metropolitan<br>REBANA .....                        | 140 |
| Gambar 4.3 KPI Cipali Subang Barat .....                                                               | 143 |
| Gambar 4.4 KPI Cipali Subang Tmur .....                                                                | 144 |
| Gambar 4.5 KPI Patimban .....                                                                          | 144 |
| Gambar 4.6 KPI Patrol .....                                                                            | 145 |
| Gambar 4.7 KPI Losarang .....                                                                          | 146 |
| Gambar 4.8 KPI Balongan .....                                                                          | 146 |
| Gambar 4.9 KPI Cipali Indramayu .....                                                                  | 147 |
| Gambar 4.10 KPI Tukdana .....                                                                          | 148 |
| Gambar 4.11 KPI Krangkeng .....                                                                        | 148 |
| Gambar 4.12 KPI Kertajati-Jatitujuh .....                                                              | 149 |
| Gambar 4.13 KPI Jatiwangi .....                                                                        | 150 |
| Gambar 4.14 KPI Butom .....                                                                            | 150 |
| Gambar 4.15 KPI Cirebon .....                                                                          | 151 |
| Gambar 4.16 Arah Struktur Ruang .....                                                                  | 165 |
| Gambar 4.17 Peta Jaringan Jalan Eksisting di Kawasan Metropolitan<br>REBANA .....                      | 166 |
| Gambar 4.18 Peta Jalan Tol yang Sedang Dibangun di Kawasan<br>Metropolitan REBANA .....                | 168 |
| Gambar 4.19 Seksi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu .....                                                | 169 |
| Gambar 4.20 Peta Jalan Non-Tol yang Sedang Dibangun di Kawasan<br>Metropolitan REBANA .....            | 170 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.21 Pembangunan Akses Jalan Non-Tol Menuju Pelabuhan Patimban .....                       | 171 |
| Gambar 4.22 Peta Jalan Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA .....                | 172 |
| Gambar 4.23 Pembangunan Akses Tol Patimban .....                                                  | 172 |
| Gambar 4.24 Peta Jalan Non-Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA .....            | 174 |
| Gambar 4.25 Pembangunan Flyover Tol Cisumdawu.....                                                | 174 |
| Gambar 4.26 Jaringan Rel Kereta Api yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA .....       | 176 |
| Gambar 4.27 Jaringan Rel Kereta Api Pagaden – Patimban .....                                      | 177 |
| Gambar 4.28 Jaringan Rel Kereta Api Pagaden – Patimban .....                                      | 178 |
| Gambar 4.29 Jaringan Rel Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari.....                                  | 179 |
| Gambar 4.30 Pembangunan Rel Kereta Semi Cepat Jakarta – Surabaya .....                            | 180 |
| Gambar 4.31 Rel Kereta Api Logistik Patimban–Kertajati.....                                       | 181 |
| Gambar 4.32 Rel Kereta Api Logistik Patimban–Kertajati.....                                       | 181 |
| Gambar 4.33 Rel Kereta Api Logistik Patimban–Kertajati.....                                       | 182 |
| Gambar 4.34 Waduk/Bendungan Cipunagara .....                                                      | 189 |
| Gambar 4.35 Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik .....                                           | 190 |
| Gambar 4.36 Pembangunan Waduk/Bendungan Sadawarna.....                                            | 191 |
| Gambar 4.37 Pembangunan SPAM Jatigede.....                                                        | 192 |
| Gambar 4.38 Pembangunan Waduk Cileuweung.....                                                     | 192 |
| Gambar 4.39 Pembangunan TPPAS Ciayumajakuning .....                                               | 198 |
| Gambar 4.40 Peta Rencana Utilitas Air Bersih dan Persampahan di Kawasan Metropolitan REBANA ..... | 200 |
| Gambar 4.41 Fase Pengembangan Kelembagaan Kawasan Metropolitan REBANA .....                       | 202 |
| Gambar 4.42 Konsep Koordinasi Kelembagaan Kawasan Metropolitan REBANA .....                       | 203 |
| Gambar 6.1 Skema Pemantauan dan Evaluasi.....                                                     | 245 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara tradisional, permukiman-permukiman manusia yang secara geografis terletak berdekatan akan membentuk suatu sistem kerjasama antara satu sama lain sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing permukiman untuk mencapai efektivitas. Fenomena ini, berdasarkan skala dan karakteristik anggotanya dikenal juga dengan sistem kota-kota atau konektivitas regional. Salah satu upaya untuk mengefektifkan konektivitas regional adalah dengan memastikan kalau setiap wilayah dalam kawasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda agar tidak saling bersaing satu sama lain dan justru saling bermanfaat satu sama lain. Untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan fungsi ini, maka dibutuhkan perencanaan kawasan regional.

Perencanaan skala regional memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat berbeda dibandingkan perencanaan skala kota maupun perkotaan. Selain dikarenakan lingkup kawasan yang luas dimana memiliki jenis-jenis kegiatan dengan variasi yang lebih banyak dan populasi yang lebih besar, permasalahan skala regional juga dapat disebabkan oleh tanggungan untuk menyamakan kepentingan pemerintahan yang melewati batas yurisdiksi administratif, seperti kota, kabupaten, provinsi, dan untuk beberapa kasus, negara. Variasi pemangku kepentingan tersebut dapat menghasilkan pertikaian bila tidak dijaga oleh peraturan yang adil dan jelas. Oleh karena itu, mayoritas ahli menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan regional harus dilihat sebagai pelapisan dari beberapa jaringan, seperti jaringan komunitas, jaringan ruang terbuka, jaringan sistem ekonomi, jaringan peradaban, dan jaringan-jaringan lainnya.

Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang kemudian disebut sebagai Kawasan Metropolitan REBANA merupakan salah satu contoh kawasan regional yang perlu direncanakan dengan benar agar berbagai aktivitas yang terdapat di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Kawasan ini juga dicanangkan sebagai 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat menyerap kejenuhan yang terjadi di Kawasan Bodebekkarpur yang saat ini sudah melewati batas. Pembangunan 13 KEK dengan basis industri memastikan Kawasan Metropolitan REBANA akan terus bertumbuh di masa yang akan datang, seperti yang disebutkan Teori *Propulsive Industry*, bahwa kegiatan industri dapat memicu perkembangan kawasan. Kepastian pertumbuhan ini juga didukung oleh keberadaan tiga kota yang dapat berfungsi sebagai daya tarik dan pintu masuk investasi kawasan, yaitu Kota Cirebon, Kota Maritim Patimban dan *Aerocity* Kertajati. Maka dari itu, konektivitas antara 13 KEK dan tiga kota tersebut perlu direncanakan dengan baik untuk membangun kawasan dengan daya saing tinggi.

Kawasan Metropolitan REBANA terletak di Provinsi Jawa Barat, yaitu provinsi dengan jumlah populasi tertinggi di Indonesia, jumlah populasi yang tinggi dapat diartikan sebagai jumlah kepentingan yang bervariasi dan setiap kepentingan harus dipertimbangkan dalam merencanakan provinsi ini. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Barat bertumpu di bagian barat dan tengah akibat letaknya yang secara geografis berdekatan dengan DKI Jakarta, ibukota negara sekaligus *Primate City* di Indonesia. Kawasan Metropolitan REBANA, yang terletak di bagian timur dan utara Provinsi Jawa Barat belum dioptimalkan karena tumpuan ini. Upaya untuk mengakselerasi pembangunan di utara dan timur Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Isu strategis lain dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, yakni melambatnya kontribusi PDB atas dasar harga konstan sektor industri terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2014 Kontribusi PDB Industri mencapai 21,65%, namun mengalami penurunan sebesar 0,11% sehingga hanya mencapai 21,04% pada tahun 2018. Kemudian kebijakan Pemerintah mengembangkan industri 4.0 berdampak pada revitalisasi industri manufaktur dan mempercepat implementasi program-program *Fourth Industrial Revolution* (4IR). Inisiatif *Making Indonesia 4.0* ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak kesempatan kerja, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia. Peluang ini yang akan ditangkap oleh Kawasan Metropolitan REBANA sehingga kawasan tersebut menjadi *engine of economic growth* baru di Jawa Barat.

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA juga direncanakan untuk dapat mengatasi permasalahan tingginya kepadatan industri di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Berdasarkan Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, terdapat 2.952 Usaha Menengah Besar (UMB) di Kabupaten Karawang, 5.198 UMB di Kabupaten Bekasi, dan 9.437 UMB di Kota Bekasi. Daya dukung lingkungan untuk area Bodebekkarpur diindikasikan sudah melampaui ambang batas, sehingga dengan adanya Kawasan Metropolitan REBANA kepadatan di Bodebekkarpur dapat berkurang sebab arah investasi dan pengembangan industri terdistribusi ke timur Jawa Barat.

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon yang saat ini beberapa capaian indikator kesejahteraan masyarakatnya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Salah satunya dengan kolaborasi bersama industri yang nantinya berbisnis di Kawasan Metropolitan REBANA untuk meningkatkan IPM Daerah melalui SMK Juara. SMK Juara adalah inovasi layanan pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Beberapa strategi program ini adalah penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri serta pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kegiatan strategis lainnya adalah memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja menjadi pusat pelatihan masyarakat lokal Kawasan Metropolitan REBANA agar dapat terserap industri atau menjadi wirausaha yang mampu memanfaatkan peluang.

Adapun peluang dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA adalah keunggulan konektivitas wilayah. Terdapat beberapa pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang dapat menunjang aktivitas di Kawasan Metropolitan REBANA, diantaranya adalah Bandara Internasional Jawa Barat beserta Aerocity, Pelabuhan Patimban, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Rencana Tol Patimban, Rencana Jalur KA Tanjungsari – BIJB – Aryawinangun, dan Rencana Jalur KA Patimban.

Keunggulan komparatif dari sisi upah tenaga kerja adalah upah yang lebih rendah dibanding daerah industri lain di Jawa Barat. Pada tahun 2020, rata-rata UMK di Jawa Barat mencapai Rp 2.963.497,40. Sementara itu, UMK Kabupaten Indramayu mencapai Rp 2.297.931,11; Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36; Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09; Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37; Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00; Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36; dan Kota Cirebon Rp Rp 2.219.487,67.

Berbagai peluang dan tantangan tersebut memerlukan suatu pedoman perencanaan pengembangan agar Kawasan Metropolitan REBANA selaras dengan kebijakan pembangunan di pusat, provinsi dan kabupaten sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai tujuan. Rencana Aksi REBANA ini juga menjadi dasar kerja sama dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang ingin berkontribusi turut memajukan Kawasan Metropolitan REBANA bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi REBANA ini adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan Kawasan Metropolitan REBANA menuju pencapaian indikator utama pembangunan kawasan. Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Aksi ini adalah:

1. Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
2. Tersedianya Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan;
3. Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif;
4. Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung.

## **1.3 Ruang Lingkup**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA**

Rencana Aksi REBANA meliputi Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, dan ruang lingkup; Tinjauan Kebijakan Pembangunan; Gambaran Umum Wilayah; Arahkan Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA; Rencana Aksi; Sistem Pemantauan dan Evaluasi; dan Penutup.

1.3.2 Ruang Lingkup Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA

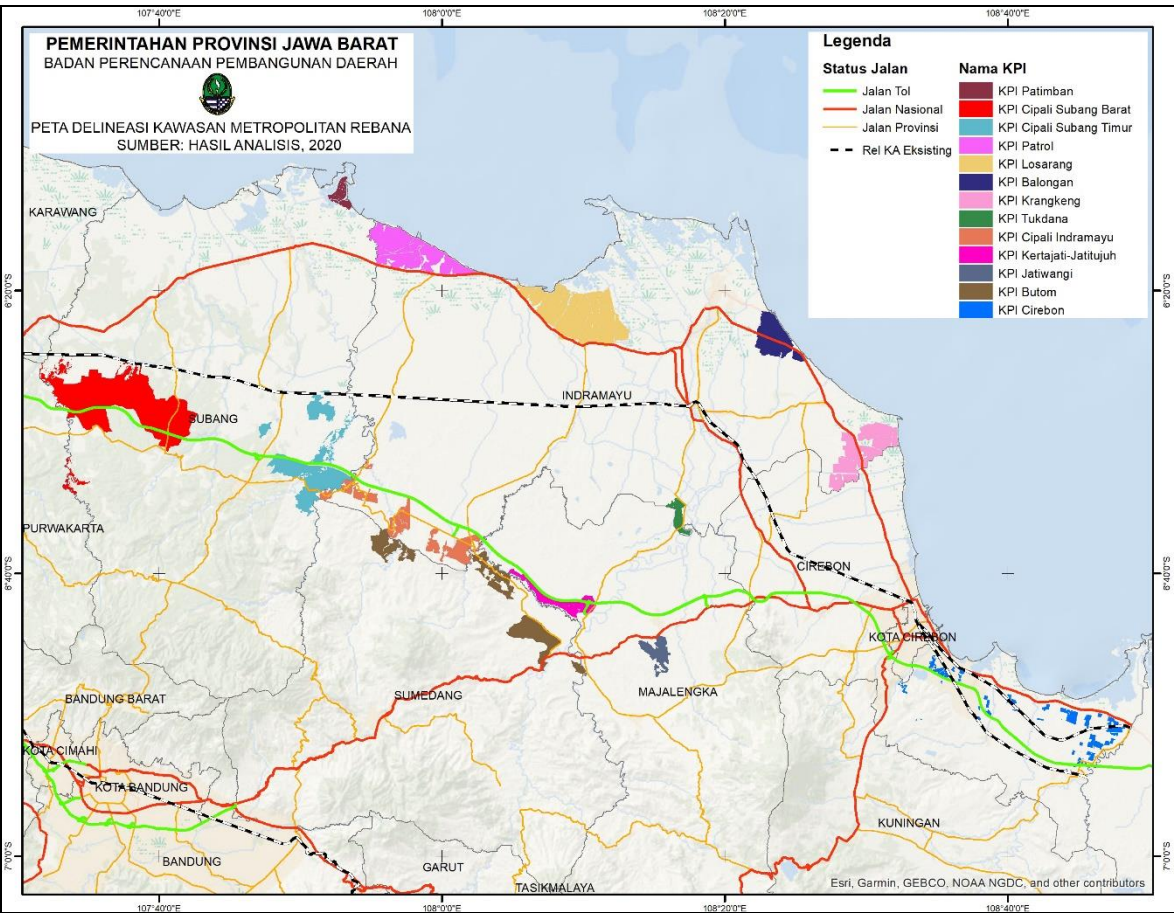
Rencana pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA diarahkan pada:

- 1. Tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;
- 2. Pengembangan industri dan investasi;
- 3. Pengembangan struktur ruang wilayah;
- 4. Pengembangan kelembagaan.

1.3.3 Ruang Lingkup Wilayah Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA

Ruang lingkup Kawasan Metropolitan REBANA mencakup beberapa deliniasi kawasan yang ditentukan dengan fungsi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan fungsi pendukung. Deliniasi KPI tersebar di Kabupaten Subang seluas 15.755,47 ha, Kabupaten Indramayu seluas 19.863,16 ha, Kabupaten Majalengka seluas 2.386,77 ha, Kabupaten Sumedang seluas 4.092,25 ha, dan Kabupaten Cirebon seluas 1.815,29 ha, dengan total luas KPI yaitu 43.912,94 ha. Sedangkan fungsi pendukung di Kawasan Metropolitan REBANA yaitu Kabupaten Kuningan sebagai pendukung sumber daya air, pusat produksi dan pengolahan pertanian, pendukung sumber daya alam, dan pusat pariwisata, serta Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dengan fungsi kegiatan perkotaan meliputi pusat perdagangan dan jasa, serta simpul transportasi untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Deliniasi KPI di Metropolitan REBANA tercantum dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1 Delineasi Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Hasil Analisis, 2020

## BAB II

### TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kebijakan pembangunan perlu penyelarasan agar optimal. Bagian ini membahas tentang tinjauan kebijakan, baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan Kawasan Metropolitan REBANA.

#### 2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional

##### 2.1.1 Kebijakan dalam RPJMN 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Penjelasan dari kelima arahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembangunan SDM. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- Pembangunan Infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- Penyederhanaan Regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- Penyederhanaan Birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

- Transformasi Ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arah kebijakan di atas relevan dengan kebutuhan di Kawasan Metropolitan REBANA. Wilayah Pantura Jawa Barat dan bagian timur Jawa Barat selama ini mengalami persoalan SDM. Data tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia daerah-daerah di Kawasan Metropolitan REBANA sebesar 66,66 poin berada di bawah rata-rata Jawa Barat (IPM Jawa Barat 70,69 poin). Tingkat kemiskinan di kawasan tersebut sebesar 10,51% juga di atas rata-rata Jawa Barat (tingkat kemiskinan Jawa Barat 7,25%), sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kawasan Metropolitan REBANA hanya 6,59 tahun atau berada di bawah rata-rata Jawa Barat yang sudah mencapai 8,15 tahun.

Berdasarkan kondisi SDM tersebut maka sudah tepat jika isu pembangunan SDM menjadi agenda prioritas di Kawasan Metropolitan REBANA. Keberadaan infrastruktur strategis harus dapat mendorong percepatan pembangunan SDM di Kawasan Metropolitan REBANA.

Kebijakan pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan lanjutan dari kebijakan RPJMN periode sebelumnya. Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah telah dan sedang membangun beberapa proyek infrastruktur di Jawa Barat, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede, Bendungan Cipanas, dan Pembangunan *Double Track* Rel Kereta Api Jawa Selatan. Proyek-proyek tersebut telah mengubah konstelasi tata ruang Jawa Barat, khususnya Kawasan Metropolitan REBANA. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menginternalisasi dampak pembangunan proyek infrastruktur tersebut menjadi sebuah kekuatan pendorong kemajuan daerah.

Pelaksanaan optimalisasi kawasan Ciayumajakuning dan sekitarnya dalam RTRWN akan diwujudkan dalam bentuk Metropolitan REBANA yang perlu menjadikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) REBANA. Hal ini sejalan pula untuk mencapai misi Nawacita ke-3 dan ke-4 yaitu penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Sebab pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data empiris menunjukkan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan kesempatan kerja. hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-

fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Misi terakhir Nawacita, yaitu transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi juga sejalan dengan rencana pengembangan REBANA, dimana kawasan peruntukan industri yang akan dikembangkan disana merupakan industri hijau yang berdaya saing tinggi.

### 2.1.2 Kebijakan di dalam RTRWN 2008 – 2028

Pada konteks spasial, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Metropolitan REBANA berada di sekitar PKN Cirebon dan PKW Indramayu serta Kadipaten.

PKN memiliki kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

Sedangkan PKW memiliki kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

### 2.1.3 Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Virus tersebut pertama kali dikonfirmasi di China dan menyebar ke hampir seluruh negara. Pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka Pemerintah Pusat bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan penyesuaian/perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021.

## **2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat**

### **2.2.1 Kebijakan di Dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018 – 2023**

Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 - 2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Tujuan penataan ruang Jawa Barat dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

- Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
- Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
- Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan

yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat. Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat yang diterapkan sebagai pendekatan spasial meliputi Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. Pembagian WP meliputi WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Sukabumi dsk, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan Timur dan Pangandaran. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, dan fokus peningkatan keunggulan tiap WP.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyusun Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan dasar:

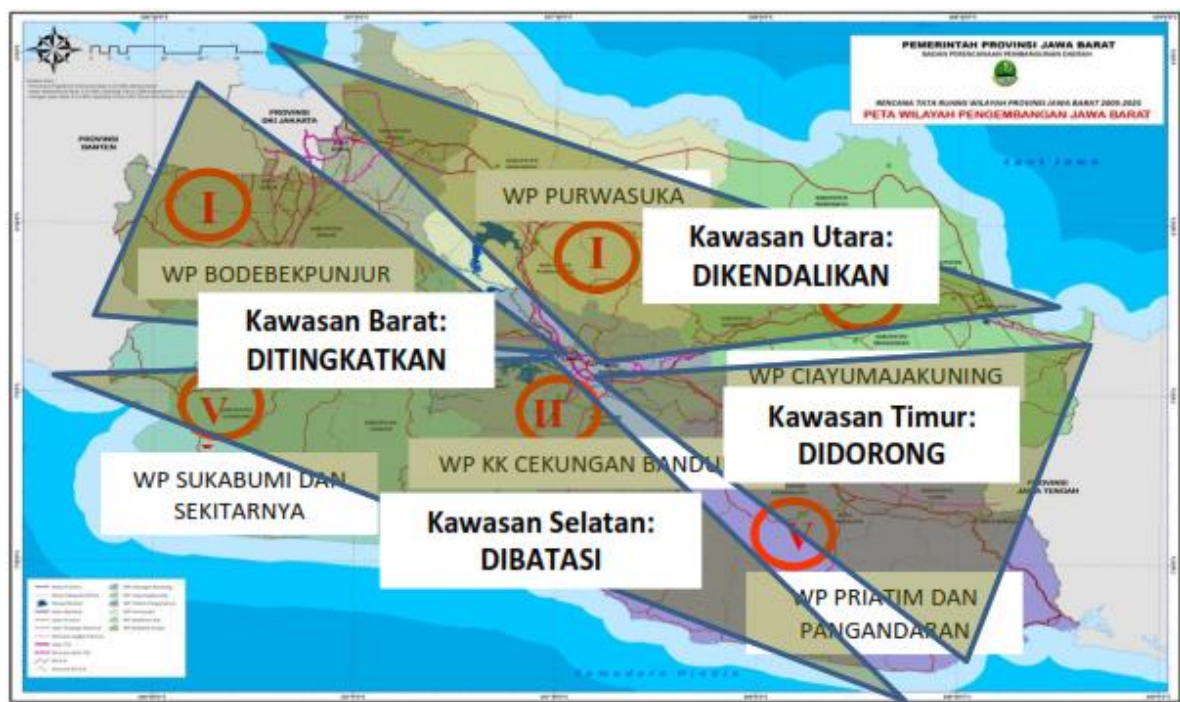
1. Perubahan peraturan perundangan yang menyebabkan perlunya penyesuaian-penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan RPJMD saat ini;
2. Dinamika yang terjadi saat ini, yaitu saat dampak pandemi COVID-19 menyebabkan struktur pendanaan pemerintah daerah berubah mengikuti kebutuhan akan pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi.

#### 2.2.2 Kebijakan di Dalam RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029

Kawasan Metropolitan REBANA terletak di bagian utara atau masuk dalam Wilayah Pengembangan Purwasuka dan Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning. Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, kawasan timur akan didorong dengan cara memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut. Kawasan utara akan dikendalikan dengan cara membatasi perkembangan kegiatan pada pola ruang budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis sehingga dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diwujudkan dengan rencana struktur ruang (rencana sistem perkotaan dan jaringan prasarana), rencana pola ruang (rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya), penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), indikasi program utama, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan 24 KSP dan rencana penataan ruangnya. Rancangan akhir revisi RTRW Provinsi Jawa Barat setelah melalui kajian menetapkan 5 KSP eksisting dan menambahkan KSP BIJB dan *Aerocity*. Kemudian dalam mengakomodasi kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Metropolitan REBANA, dirumuskan penambahan kawasan strategis nasional di lokasi tersebut.

Gambar 2.1 Wilayah Pengembangan Jawa Barat



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019

2.2.3 Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19

Sementara itu berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 di Jawa Barat, berdasarkan data BPS, perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan I Tahun 2019 tumbuh 2,73 persen (*y-on-y*) melambat dibanding capaian triwulan I Tahun 2019 sebesar 5,39 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 24,89 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 4,33 persen. Ekonomi Jawa Barat triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya menurun sebesar 0,95 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, penurunan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 59,51 persen.

Kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan mobilitas dan aktivitas, *Work From Home (WFH)*, sekolah dari rumah, dan sebagainya, telah berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin meluas di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan data sampai dengan akhir April 2020 terdapat sejumlah 1.674 perusahaan yang terkena dampak yang menyebabkan pekerja dirumahkan atau di-PHK sebanyak 69.260 pekerja.

## **2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon**

### **2.3.1 Kabupaten Cirebon**

#### **2.3.1.1 Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031**

Penataan ruang Kabupaten Cirebon bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan. Adapun kebijakan penataan ruang di Kabupaten Cirebon meliputi:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu;
- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumber daya alam;
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia, strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
- b. Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah; dan
- c. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Cirebon terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 2.000 ha, meliputi:
  - Kecamatan Mundu berupa industri manufaktur;
  - Kecamatan Astanajapura berupa industri manufaktur dan industri hasil tambang;
  - Kecamatan Pangenan berupa industri manufaktur dan industri hasil tambang;
  - Kecamatan Babakan berupa industri gula;
  - Kecamatan Lemahabang berupa industri gula;
  - Kecamatan Gempol berupa industri semen dan industri hasil tambang;
  - Kecamatan Gebang berupa industri manufaktur dan industri penunjang wisata bahari;

- Kecamatan Losari berupa industri manufaktur, industri penunjang pertanian, dan industri penunjang perikanan.
- b. Kawasan peruntukan industri menengah, meliputi:
  - Kecamatan Ciwaringin berupa industri penunjang pariwisata;
  - Kecamatan Palimanan berupa industri manufaktur;
  - Kecamatan Plumbon berupa industri rotan;
  - Kecamatan Weru berupa industri rotan;
  - Kecamatan Plered berupa industri rotan;
  - Kecamatan Tengah Tani industri makanan;
  - Kecamatan Kedawung industri makanan;
  - Kecamatan Depok berupa industri rotan; dan
  - Kecamatan Mundu berupa industri soun.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro, meliputi:
  - Kecamatan Plered berupa industri batik, industri sandal, dan industri mebeuler;
  - Kecamatan Kapetakan berupa industri perikanan budidaya;
  - Kecamatan Arjawinangun berupa industri pertanian tanaman pangan dan industri konveksi;
  - Kecamatan Weru berupa industri makanan olahan;
  - Kecamatan Depok berupa industri mebeuler dan industri batu alam;
  - Kecamatan Losari berupa industri perikanan budidaya dan industri bata merah;
  - Kecamatan Karangsembung berupa industri bata merah dan genteng;
  - Kecamatan Dukupuntang berupa industri batu alam;
  - Kecamatan Gebang berupa industri perikanan tangkap;
  - Kecamatan Pangenan berupa industri garam;
  - Kecamatan Astanajapura berupa industri garam;
  - Kecamatan Mundu berupa industri garam;
  - Kecamatan Plumbon berupa industri sandal;
  - Kecamatan Ciwaringin berupa industri genteng merah;
  - Kecamatan Beber berupa industri anyaman bambu; dan
  - Kecamatan Jamblang berupa industri gerabah.

#### 2.3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

Permasalahan yang akan dihadapi Kabupaten Cirebon, diantaranya adalah:

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industri termasuk industri pariwisata;
- b. Mendukung dan menyiapkan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam kemudahan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan daya saing produk IKM;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- d. Industrialisasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
- e. Paket kebijakan pelayanan perizinan yang berpihak pada pengusaha lokal;
- f. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan;

- g. Penataan alih fungsi lahan akibat adanya lokasi industri dan pertambangan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif untuk menopang ketahanan pangan terutama pada lahan pertanian kelas 1 (satu);
- h. Menyiapkan instrumen insentif dan disentif untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian yang sesuai dan berkeadilan bagi petani;
- i. Pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, industri kecil menengah, dan pariwisata;
- j. Penguatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan sentra industri di Kabupaten Cirebon, antara lain:

- a. Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui:
  - Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
  - Meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
- b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan
  - Mengembangkan kawasan industri terpadu sebagai pusat kegiatan industri;
  - Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.

Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah *terwujudnya kabupaten cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman*. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi berikut:

- 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
- 2. Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal;
- 3. Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi;
- 4. Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (*public private partnership*) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal;
- 5. Melakukan perlindungan kawasan pertanian dan perikanan.

Adapun kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui strategi berikut:
  - mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
  - meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
- b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan melalui strategi berikut:

- mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
- mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.

## 2.3.2 Kabupaten Indramayu

### 2.3.2.1 Rencana Tata Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031

Penataan ruang di Kabupaten Indramayu bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah Daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Indramayu meliputi:

- a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
- b. pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- e. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata terpadu berbasis potensi alam;
- b. pengembangan usaha pertambangan mineral, minyak dan gas bumi;
- c. pengembangan kawasan peruntukan permukiman;
- d. pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
- g. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya dukung lingkungan;
- h. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi untuk pengembangan kawasan industri meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan menarik investasi;
- b. mengembangkan industri kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.

Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Indramayu terdiri dari:

- a. Industri besar seluas kurang lebih 1.000 ha berada di Kecamatan Balongan.
- b. Industri menengah seluas kurang lebih 1.000 ha meliputi Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Patrol, dan Kecamatan Sukra.
- c. Industri kecil dan mikro meliputi:
  - Industri krupuk ikan dan udang berada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang;
  - industri batik meliputi Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu, Desa

Penganjang Kecamatan Sindang, Desa Terusan Kecamatan Sindang, dan Desa Babadan Kecamatan Sindang;

- Industri gitar mini berada di Desa Lelea Kecamatan Lelea;
- Industri kain bordir berada di Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya;
- Industri dodol berada di Kecamatan Karangampel;
- Industri keripik melinjo berada di Kecamatan Karangampel;
- Industri gerabah/keramik berada di Kecamatan Kandanghaur;
- Industri kerajinan topeng berada di Kecamatan Sliyeg;
- Industri tenun gedogan dan waring berada di Kecamatan Juntinyuat;
- Industri ayaman bambu dan pandan meliputi Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Arahman, dan Kecamatan Lelea;
- Industri kecap meliputi Kecamatan Lohbener, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Juntinyuat;
- Industri keripik mangga berada di Kecamatan Lohbener;

Perwujudan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:

- a. Penetapan sentra-sentra industri kecil-menengah;
- b. Pengembangan lembaga pemasaran;
- c. Penetapan kawasan industri;
- d. Pengawasan limbah industri; dan
- e. Pengembangan kawasan peruntukan industri.

#### 2.3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021

Urusan Perindustrian di Kabupaten Indramayu memerlukan peningkatan pembinaan terhadap usaha makro, kecil dan menengah serta Menumbuhkan industri-industri baru berdasarkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.

Adapun isu strategis berkaitan dengan sektor industri, antara lain:

- a. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi (tahun 2017 sebesar 13,67%) (SDGs) sehingga memerlukan perkembangan usaha dan industri skala mikro, kecil dan menengah berbahan baku lokal;
- b. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumber daya alam (upaya pencegahan pencemaran melalui pembangunan IPAL di sentra industri kecil baru 10% tahun 2018) sehingga memerlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir serta kualitas IPAL di sentra industri kecil;
- c. Pengembangan kawasan industri dalam antisipasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dampak pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) serta pemerataan pengembangan di wilayah Indramayu bagian barat, timur dan selatan yang masih belum bersinergi dengan rencana tata ruang.

Adapun Visi Kabupaten Indramayu pada tahun 2016 – 2021 adalah *terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah*. Visi tersebut diturunkan ke dalam beberapa misi berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) dan budaya lokal;
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi kerakyatan serta keserasian industri dan pertanian;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan secara selaras, lestari dan optimal;
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal;
5. Mengembangkan reformasi birokrasi, dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan mengayomi rakyat;
6. Memperkuat peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan misi ke-2 yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi kerakyatan serta keserasian industri dan pertanian, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan sasaran berikut.

1. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan keberlanjutan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM;
2. Meningkatnya produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian.

### 2.3.3 Kabupaten Majalengka

#### 2.3.3.1 Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan kabupaten sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Majalengka meliputi:

- a. Pemantapan sistem agribisnis;
- b. Pengembangan kegiatan perikanan;
- c. Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam;
- d. Pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
- e. Pengembangan pusat pelayanan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Pendistribusian penduduk sesuai pengembangan sistem perkotaan; dan
- c. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Berkaitan dengan pengembangan kegiatan industri sebagaimana, berikut adalah strategi yang akan dilakukan:

- a. Mengembangkan kawasan industri terpadu;
- b. Mengoptimalkan kawasan peruntukan industri;

- b. Meningkatkan penataan kawasan peruntukan industri kecil, menengah dan besar; dan
- c. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Penyusunan *masterplan* kawasan peruntukan industri kecil dan mikro;
- b. Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil;
- b. Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi;
- c. Peningkatan sistem pemasaran;
- d. Pengembangan klaster-klaster industri menengah;
- e. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan;
- f. Menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (*rest area*) dengan pola kemitraan;
- g. Pengembangan aneka produk olahan; dan
- h. Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM.

#### 2.3.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023

Permasalahan utama bidang perindustrian di Kabupaten Majalengka, antara lain:

- 1. Belum tersedianya kawasan industri;
- 2. Pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah;
- 3. Aksesibilitas permodalan yang terbatas;
- 4. Inovasi produk masih rendah;
- 5. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
- 6. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 7. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi;
- 8. Aksesibilitas perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil;
- 9. Kualitas produk belum memenuhi standar.

Adapun Visi Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 – 2023 adalah *mewujudkan tatanan masyarakat Majalengka yang religius, adil, harmonis dan sejahtera*. Visi tersebut diturunkan ke dalam beberapa misi berikut:

- 1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;
- 2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- 3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;
- 4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan,

dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Adapun salah satu tujuan dari misi ke-4 adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing yang diturunkan ke beberapa sasaran salah satunya adalah meningkatnya investasi sektor industri. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi penguatan regulasi investasi dan arahan kebijakan berupa pemberian kemudahan pelayanan perizinan investasi.

#### 2.3.4 Kabupaten Subang

##### 2.3.4.1 Rencana Tata Ruang Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang adalah mewujudkan kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran, dan pesisir. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Subang meliputi:

- a. Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
- b. Pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
- d. Pemantapan kawasan LP2B;
- e. Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
- f. Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
- g. Pemantapan fungsi kawasan lindung;
- h. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan meliputi:

- a. Mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik;
- b. Mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada;
- c. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri;
- d. Meningkatkan RTH kawasan peruntukan industri;
- e. Mengembangkan model taman industri;
- f. Meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri;
- g. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan; dan
- h. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Subang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah dengan luas kurang lebih 11.250 ha meliputi:
  - Kecamatan Cipeundeuy;
  - Kecamatan Pabuaran;
  - Kecamatan Kalijati;
  - Kecamatan Purwadadi;
  - Kecamatan Cibogo;
  - Kecamatan Pagaden; dan
  - Kecamatan Cipunagara.

Lokasi kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah tersebut dapat dikecualikan untuk kegiatan pengolahan hasil pertanian setempat, pengolahan hasil pertambangan setempat, dan pengolahan hasil tangkapan dan budidaya ikan setempat.

- b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro yang meliputi seluruh kecamatan.

#### 2.3.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Subang, yaitu perizinan pendirian industri/pengajuan izin usaha perdagangan, banyaknya tumpang tindih kawasan industri, banyaknya kasus KKN di wilayah pengajuan Izin SIUP, IUI, dan sebagainya.

Visi Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 adalah *Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter*. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalan potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;

Adapun arah kebijakan untuk mewujudkan misi 4 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membangun lapangan usaha pertanian melalui berbasis pengembangan agroindustri;
- b. Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian, sehingga tercipta Subang sebagai lumbung padi nasional;
- c. Pengembangan jaringan usaha, permodalan, produksi dan pemasaran bagi koperasi dan UMKN;

- d. Menyelenggarakan sentra industri kecil serta mengembangkan usaha kecil dan menengah;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Membangun perbatasan kabupaten, kecamatan, dan desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal;
- g. Mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan perluasan jaringan pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan;
- h. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daya tarik wisata secara berkala;
- i. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun gedung kesenian dan mendirikan Lembaga adat;
- j. Meningkatkan fasilitas untuk menunjang peningkatan standar mutu produk IKM/UKM;
- k. Pembuatan kandang indukan di sentra peternakan dan budaya makan ikan di masyarakat.

### 2.3.5 Kabupaten Sumedang

#### 2.3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang adalah Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:

- a. Pengembangan kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;
- b. Pengembangan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh wilayah kabupaten;
- d. Penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata;
- e. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
- f. Peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- g. Peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
- h. Peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
- i. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- j. Penataan Kawasan Ibukota Perkotaan Sumedang;
- k. Pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;
- l. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;
- m. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
- n. Pengamanan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi untuk pengembangan kawasan industri, sentra industri kecil, dan industri rumah tangga meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur;
- b. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
- c. Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
- d. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar  
Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri dengan luas kurang lebih 3.019 ha. Kawasan industri ini meliputi:
  - Optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 345 ha meliputi:
    1. Kecamatan Jatinangor; dan
    2. Kecamatan Cimanggung.
  - Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.523 ha meliputi:
    1. Kecamatan Ujungjaya; dan
    2. Kecamatan Tomo.
  - Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.152 ha di Kecamatan Buahdua.
- b. Kawasan peruntukan industri menengah  
Kawasan peruntukan industri menengah yang ada di Kabupaten Sumedang antara lain:
  1. Pengembangan industri menengah tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
  2. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah potensial tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten; dan
  3. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah di area peristirahatan dan *interchange* Jalan Bebas Hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil.  
Kawasan peruntukan industri kecil yang ada di Kabupaten direncanakan menyebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### 2.3.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi di Kabupaten Sumedang yaitu kurangnya jumlah pelatihan yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM, minimnya teknologi dalam peningkatan kualitas IKM, dan data para pelaku IKM yang belum *update*.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode 2019 – 2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023” Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Adapun arah kebijakan untuk mewujudkan misi 5 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional;
3. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan;
5. Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja;
6. Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda;
7. Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif.

#### 2.3.6 Kabupaten Kuningan

##### 2.3.6.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan adalah mewujudkan kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:

- a. Pemantapan kawasan konservasi;
- b. Pengembangan kawasan pertanian terpadu;
- c. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- d. Pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki;
- f. Pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi untuk menerapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan dibagi menjadi:

1. Strategi pemantapan kawasan konservasi yang meliputi:
  - a. Mengendalikan secara ketat fungsi kawasan lindung;
  - b. Menetapkan tata batas kawasan TNGC;
  - c. Menetapkan zonasi kawasan TNGC;

- d. Menetapkan zona penyangga untuk kawasan TNGC;
  - e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar TNGC dan TWA Linggarjati;
  - f. Mengembangkan KRK sebagai kawasan konservasi *ex-situ*;
  - g. Mengembangkan kegiatan pariwisata alam dan/atau minat khusus di kawasan TNGC, TWA Linggarjati, dan KRK; dan
  - h. Mengembangkan model desa konservasi.
2. Strategi pengembangan kawasan pertanian terpadu yang meliputi:
    - a. Mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan;
    - b. Mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
    - c. Meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
    - d. Meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
    - e. Mengembangkan sentra peternakan; dan
    - f. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
  3. Strategi pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal yang meliputi:
    - a. Mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
    - b. Mengembangkan kawasan agrowisata;
    - c. Mengembangkan zona wisata terpadu di bagian barat wilayah kabupaten; dan
    - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
  4. Strategi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan yang meliputi:
    - a. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus bernilai sosial-ekonomi pada kawasan perkebunan dan kehutanan;
    - b. Merehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis;
    - c. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan;
    - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan;
    - e. Melindungi kawasan resapan dan mata air untuk mempertahankan ketersediaan air baku; dan
    - f. Memanfaatkan potensi air Waduk Darma untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemenuhan air baku.
  5. Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki yang meliputi:
    - a. Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa lainnya;
    - b. Meningkatkan peran perkotaan sesuai dengan fungsinya sebagai PKL, PPK, atau PPL;
    - c. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan
    - d. Mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana wilayah.
  6. Strategi pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya yang meliputi:
    - a. Mengendalikan dan memulihkan fungsi kawasan hutan;
    - b. Mengembangkan potensi kawasan hutan secara berkelanjutan;

- c. Mengembangkan kawasan budaya perikanan terpadu dan ramah lingkungan;
  - d. Mengendalikan secara ketat pemanfaatan peruntukan kawasan pertambangan;
  - e. Mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan; dan
  - f. Mengembangkan kawasan permukiman terpadu dan terintegrasi dengan jaringan prasarana wilayah.
7. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara yang meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

#### 2.3.6.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023

Visi RPJMD 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJPD 2005-2025 dan merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kuningan untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu **“Kuningan Ma’mur, Agamis, Pinunjul (MAJU) berbasis desa 2023”**. Untuk melaksanakan visi ini akan diwujudkan melalui pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan 2018-2023:

- a. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajati,
- b. Mewujudkan masyarakat Kuningan *nuSajati* dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan,
- c. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu sajati,
- d. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat, dan
- e. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Dengan demikian, arah kebijakan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan 2018-2023 yaitu:

- 1. Pada tahun 2019, Memacu Produktivitas dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2. Pada tahun 2020, Peningkatan Keberdayaan Desa;
- 3. Pada tahun 2021, Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik;
- 4. Pada tahun 2022, Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Desa; dan
- 5. Pada tahun 2023, Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul.

### 2.3.7 Kota Cirebon

#### 2.3.7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031

Penataan Ruang Wilayah Kota Cirebon bertujuan mewujudkan Kota sebagai PKN dan pusat pelayanan regional berbasis perdagangan dan jasa didukung sektor pariwisata, pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kota meliputi:

1. Pemantapan sebagai PKN;
2. Pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning);
3. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota;
4. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi;
5. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
6. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
7. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sumber daya air;
8. Pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
9. Pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
10. Pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota; pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur; dan
11. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kota.

#### 2.3.7.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018 – 2023

Visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 adalah : **“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”**. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan. Mengoptimalkan potensi pengelolaan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN DI KAWASAN METROPOLITAN REBANA**

**3.1 Kondisi Sosial Kawasan Metropolitan REBANA**

**3.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Pada tahun 2019, penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 49.316.710 jiwa yang mana menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dalam hal jumlah penduduk. Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 1.394 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019. Sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, terdapat 17 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km<sup>2</sup>.

**3.1.1.1 Kabupaten Cirebon**

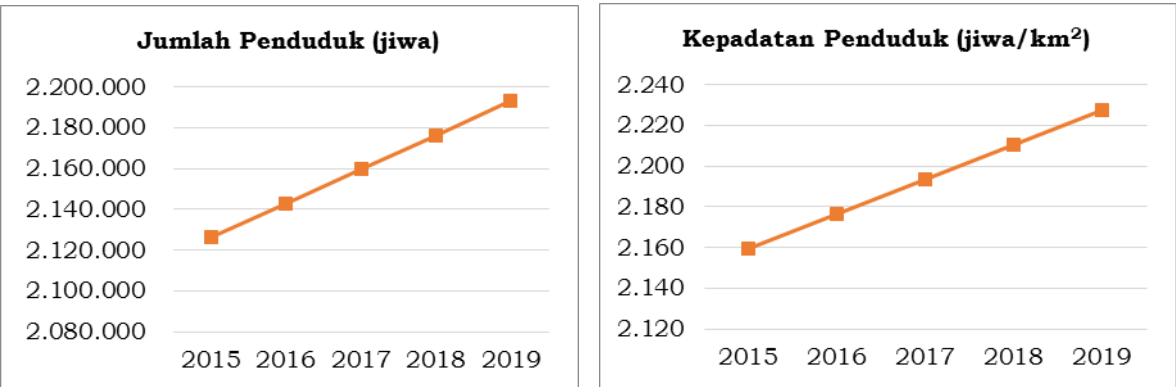
Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah sebesar 984,52 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka.

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cirebon**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 2.126.179              | 2.160                                      |
| 2016  | 2.142.999              | 2.177                                      |
| 2017  | 2.159.577              | 2.194                                      |
| 2018  | 2.176.213              | 2.210                                      |
| 2019  | 2.192.900              | 2.227                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel 3.4, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 mencapai 2.126.179 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 2.192.900 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 mencapai 2.160 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 2.227 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019

3.1.1.2 Kabupaten Indramayu.

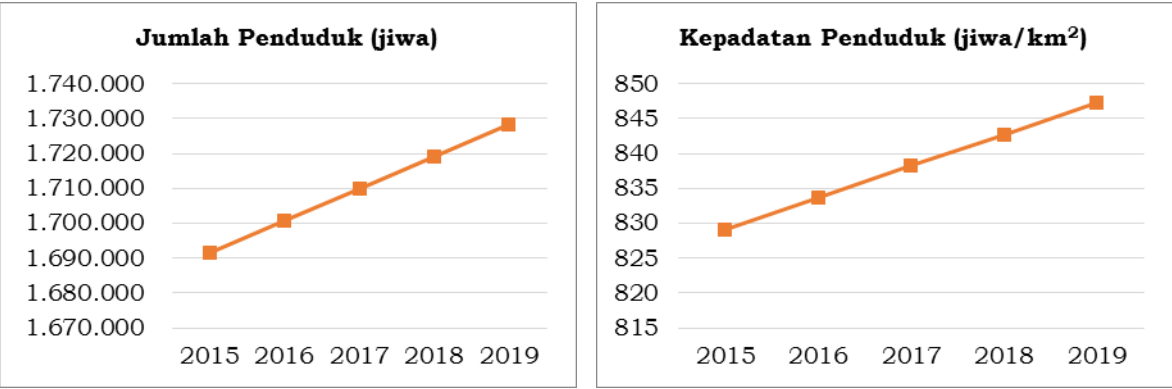
Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah sebesar 2.040,11 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indramayu**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 1.691.386              | 829                                        |
| 2016  | 1.700.815              | 834                                        |
| 2017  | 1.709.994              | 838                                        |
| 2018  | 1.719.187              | 843                                        |
| 2019  | 1.728.470              | 847                                        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**



**Kabupaten Indramayu 2015-2019**

Sumber: Hasil Analisis Tabel 3.2, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 mencapai 1.691.386 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.728.470 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 mencapai 829 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 847 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

3.1.1.3 Kabupaten Majalengka

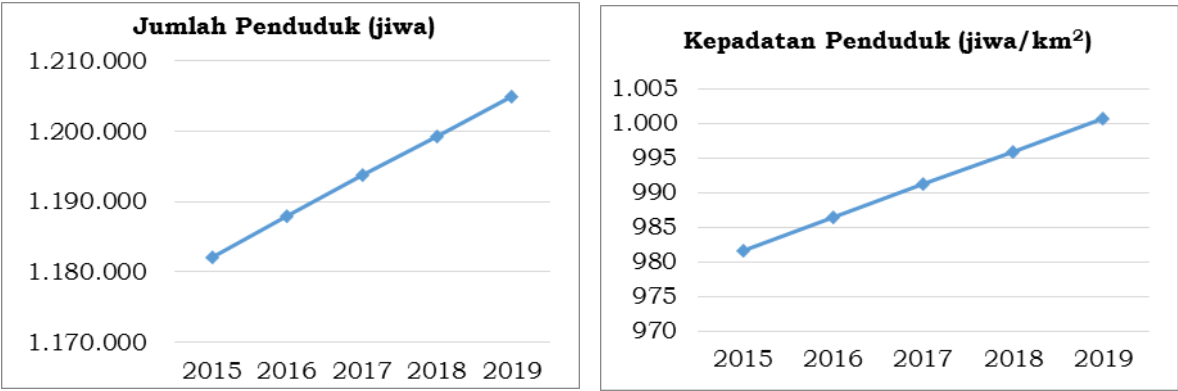
Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah sebesar 1.204,24 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka.

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Majalengka**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 1.182.109              | 982                                        |
| 2016  | 1.188.004              | 987                                        |
| 2017  | 1.193.725              | 991                                        |
| 2018  | 1.199.300              | 996                                        |
| 2019  | 1.205.030              | 1.001                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel 3.3, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mencapai 1.182.109 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.205.030 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mencapai 982 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.001 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

3.1.1.4 Kabupaten Subang

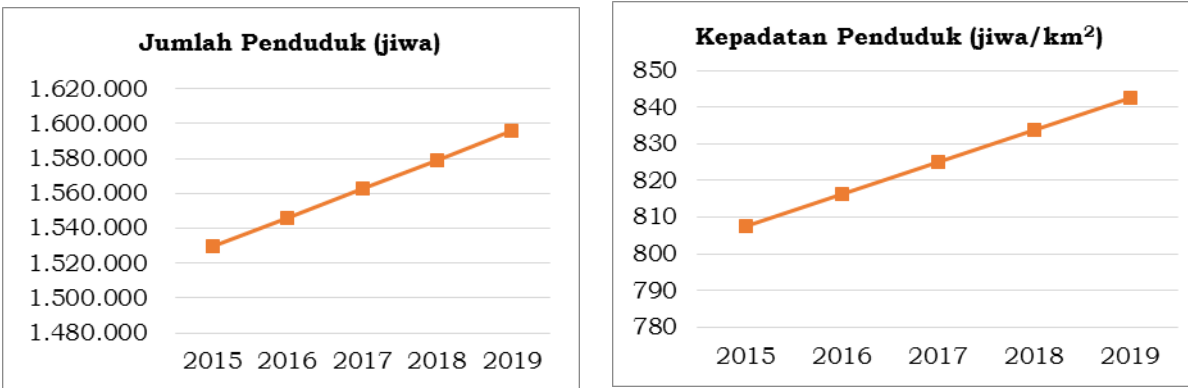
Kabupaten Subang memiliki luas wilayah sebesar 1.893,95 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Subang.

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Subang**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 1.529.388              | 808                                        |
| 2016  | 1.546.000              | 816                                        |
| 2017  | 1.562.509              | 825                                        |
| 2018  | 1.579.018              | 834                                        |
| 2019  | 1.595.830              | 843                                        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Subang 2014-2018**



Sumber: Hasil Analisis Tabel 3.1, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Subang terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di

Kabupaten Subang pada tahun 2015 mencapai 1.529.388 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.595.830 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Subang pada tahun 2015 mencapai 808 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 843 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

3.1.1.5 Kabupaten Sumedang

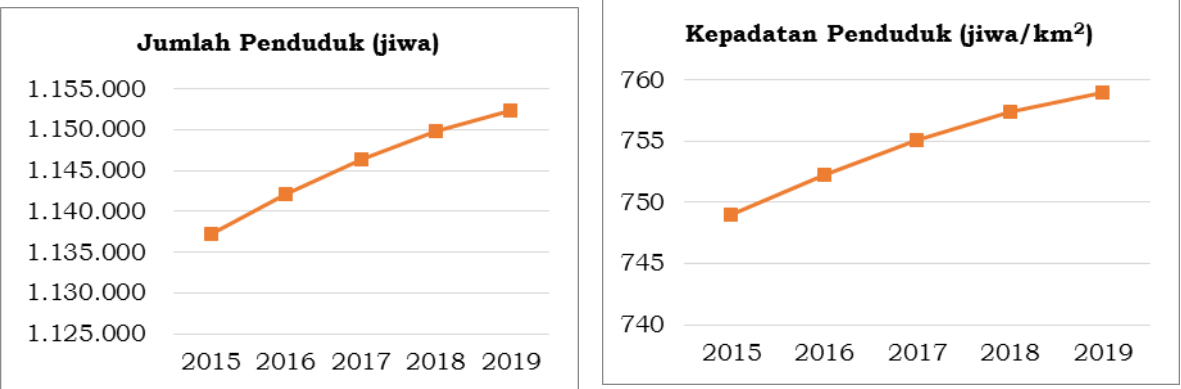
Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sebesar 1.531,24 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 1.137.273              | 749                                        |
| 2016  | 1.142.097              | 752                                        |
| 2017  | 1.146.435              | 755                                        |
| 2018  | 1.149.906              | 757                                        |
| 2019  | 1.152.400              | 759                                        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumedang 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel 3.4, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 mencapai 1.137.273 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.152.400 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 mencapai 749 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 759 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

3.1.1.6 Kabupaten Kuningan

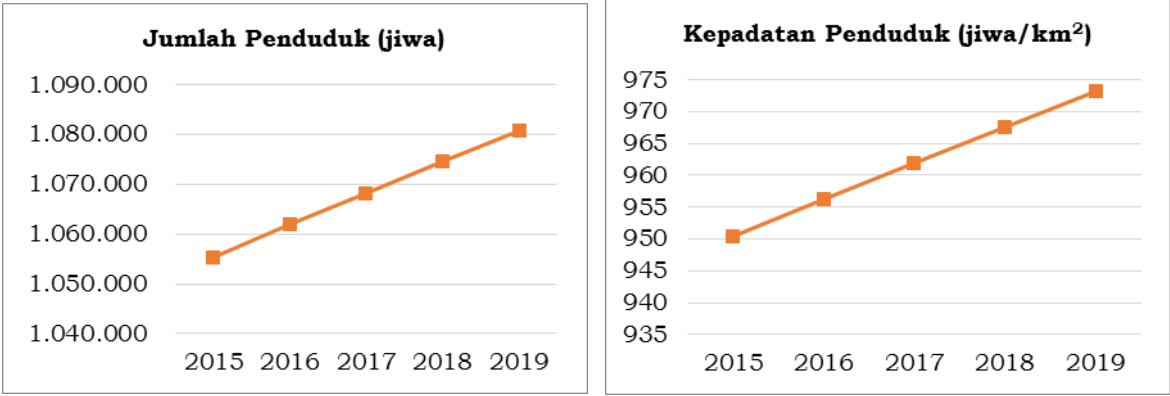
Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah sebesar 1.110,56 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kuningan.

**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 1.055.417              | 950                                        |
| 2016  | 1.061.886              | 956                                        |
| 2017  | 1.068.201              | 962                                        |
| 2018  | 1.074.497              | 968                                        |
| 2019  | 1.080.800              | 973                                        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kuningan 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel 3.4, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kuningan terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan pada tahun 2015 mencapai 1.055.417 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 1.080.800 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 mencapai 950 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 973 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

3.1.1.7 Kota Cirebon

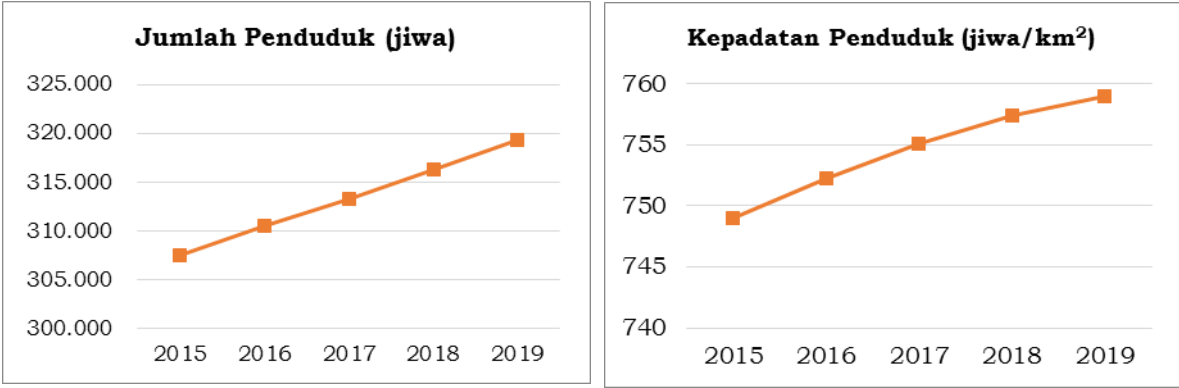
Kota Cirebon memiliki luas wilayah sebesar 37,36 km<sup>2</sup>. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Cirebon.

**Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Cirebon**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 307.494                | 8.231                                      |
| 2016  | 310.486                | 8.311                                      |
| 2017  | 313.325                | 8.387                                      |
| 2018  | 316.277                | 8.466                                      |
| 2019  | 319.310                | 8.547                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon 2015-2019**



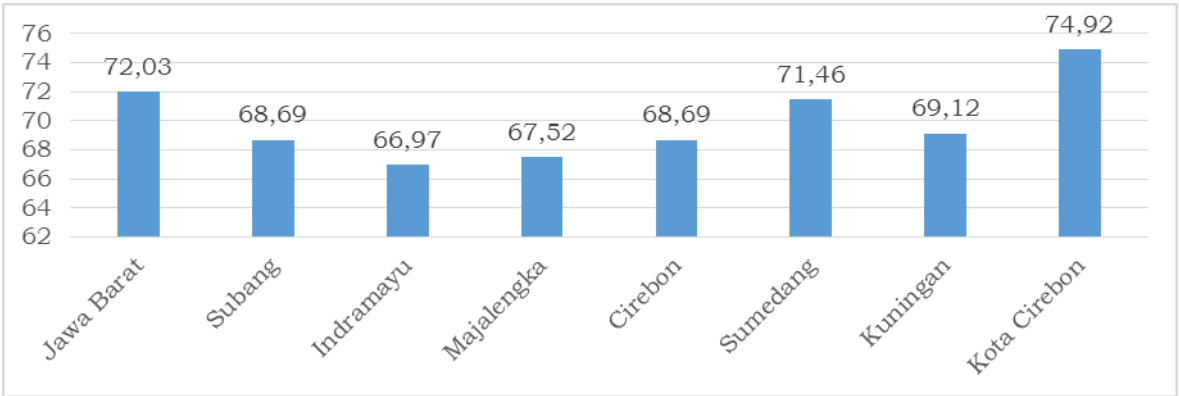
Sumber: hasil Analisis Tabel 3.4, 2020

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Cirebon terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2015 mencapai 307.494 jiwa, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 319.310 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2015 mencapai 8.231 jiwa/km², kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 8.547 jiwa/km² pada tahun 2019.

3.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat mencapai 72,03. Indeks tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 71,30. Berikut adalah perbandingan IPM Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kunungan, dan Kota Cirebon.

**Gambar 3.8 Perbandingan IPM dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



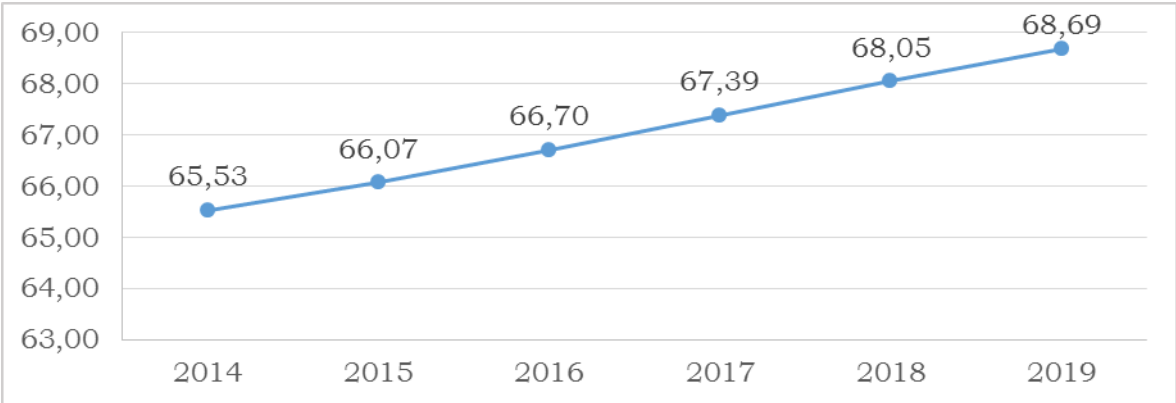
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa hanya Kota Cirebon yang memiliki IPM di atas Jawa Barat yaitu mencapai 74,92, sedangkan IPM 6 (enam) kabupaten lainnya di bawah Jawa Barat.

3.1.2.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019**



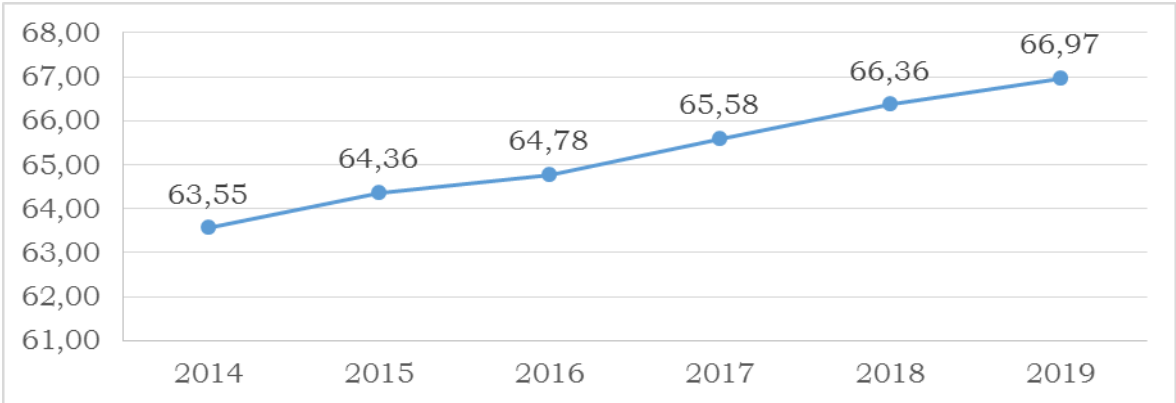
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Cirebon terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 65,53, lalu menjadi 66,07 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 66,70, kemudian menjadi 67,39 pada tahun 2017, menjadi 68,05 pada tahun 2018, dan menjadi 68,69 pada tahun 2019.

3.1.2.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indramayu pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu Tahun 2014 – 2019**



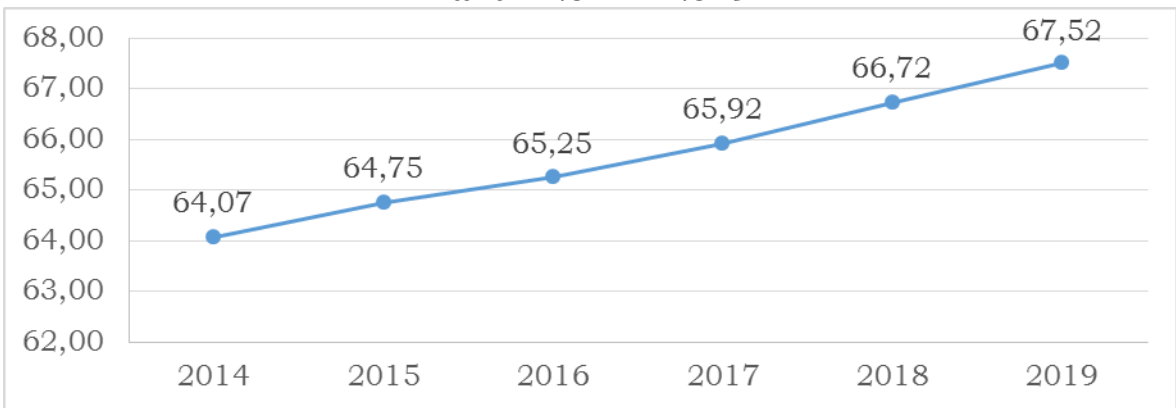
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Indramayu terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 63,55, lalu menjadi 64,36 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 64,78 kemudian menjadi 65,58 pada tahun 2017, menjadi 66,36 pada tahun 2018, dan menjadi 66,97 pada tahun 2019.

3.1.2.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2019**



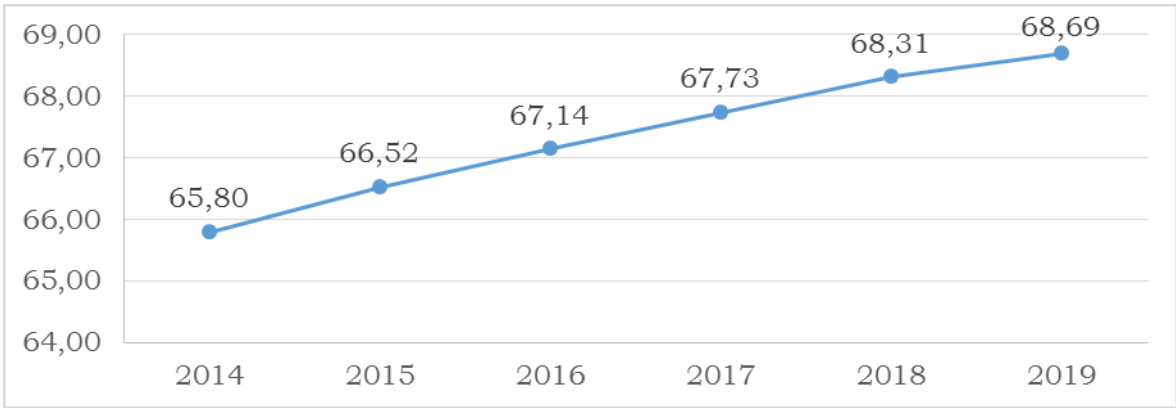
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Majalengka terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 64,07, lalu menjadi 64,75 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 65,25 kemudian menjadi 65,92 pada tahun 2017, menjadi 66,72 pada tahun 2018, dan menjadi 67,52 pada tahun 2019.

3.1.2.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2019**



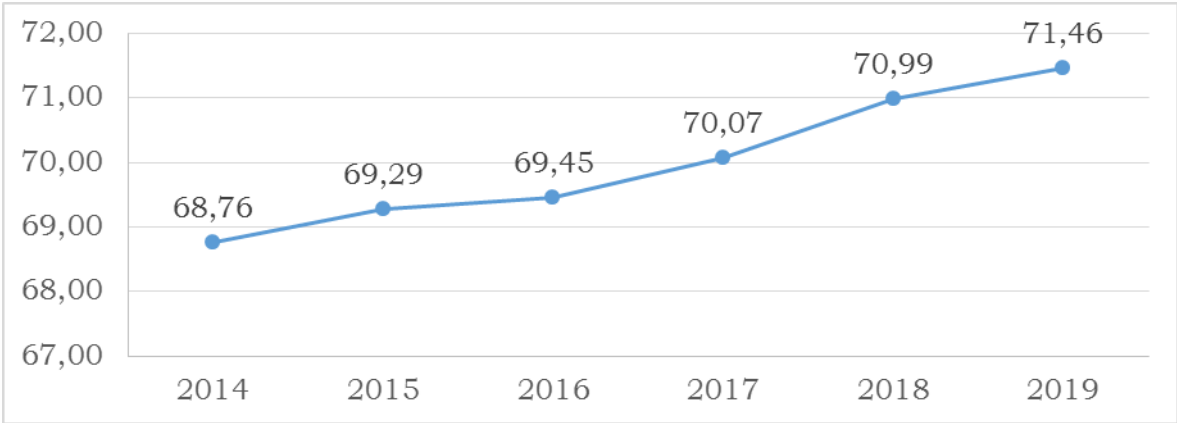
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Subang terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 65,80, lalu menjadi 66,52 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 67,14, kemudian menjadi 67,73 pada tahun 2017, menjadi 68,31 pada tahun 2018, dan menjadi 68,69 pada tahun 2019.

3.1.2.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2019**



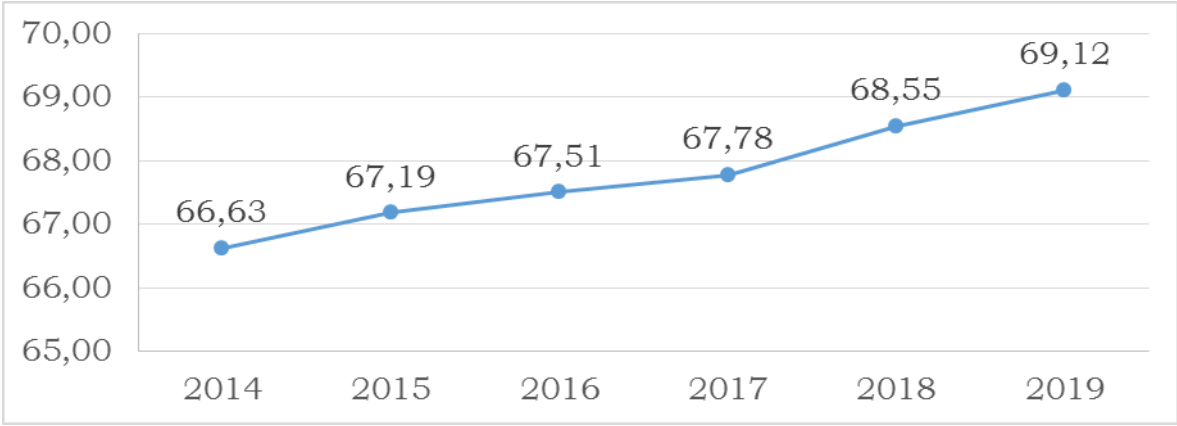
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Sumedang terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 68,76, lalu menjadi 69,29 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 69,45 kemudian menjadi 70,07 pada tahun 2017, menjadi 70,99 pada tahun 2018, dan menjadi 71,46 pada tahun 2019.

3.1.2.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2019**



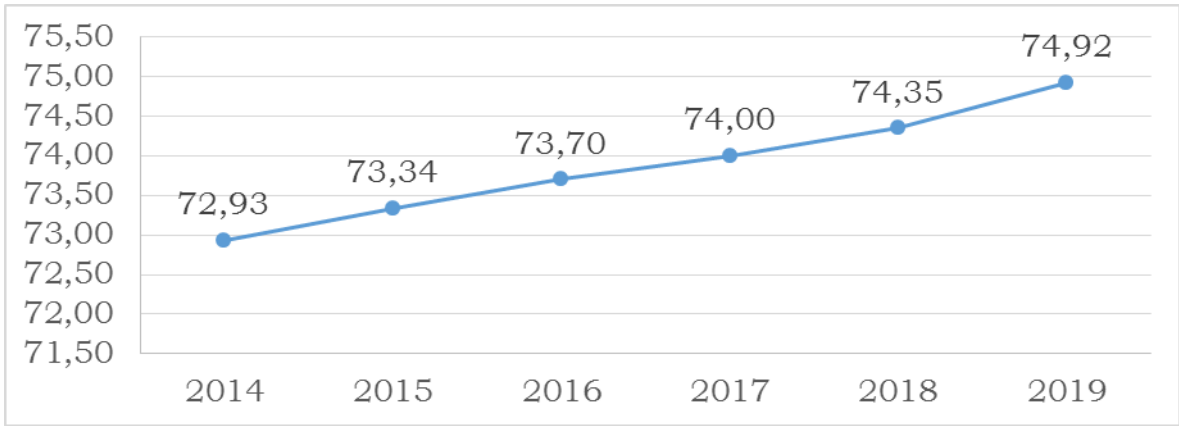
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kabupaten Kuningan terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 66,63, lalu menjadi 67,19 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 67,51 kemudian menjadi 67,78 pada tahun 2017, menjadi 68,55 pada tahun 2018, dan menjadi 69,12 pada tahun 2019.

3.1.2.7 Kota Cirebon

Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cirebon pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun 2014 – 2019**



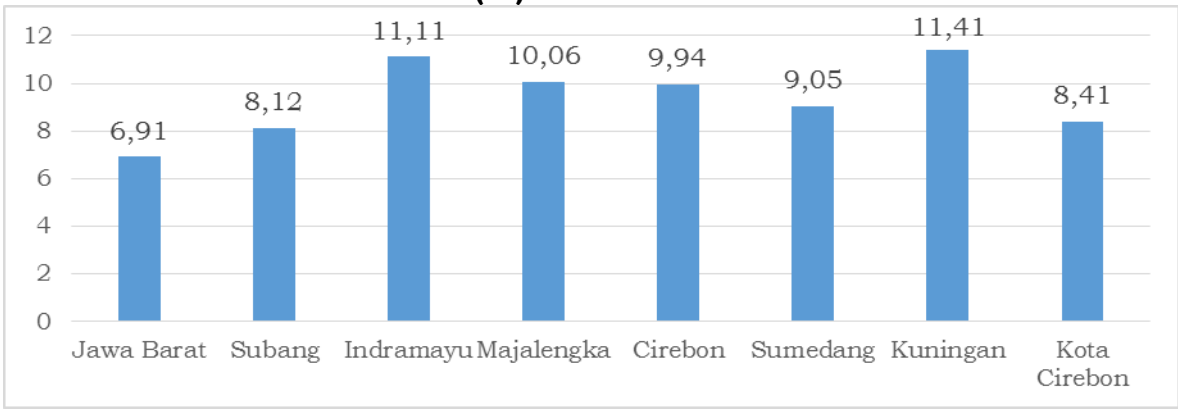
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

IPM di Kota Cirebon terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, IPM mencapai 72,93, lalu menjadi 73,34 pada tahun 2015. Indeks tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 73,70 kemudian menjadi 74,00 pada tahun 2017, menjadi 74,35 pada tahun 2018, dan menjadi 74,92 pada tahun 2019.

3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.399.160 penduduk dengan persentase 6,91%. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 3.615.790 jiwa dengan persentase 7,45%. Berikut adalah perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

**Gambar 3.16 Perbandingan Kemiskinan dengan Provinsi Jawa Barat (%) Tahun 2019**



umber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui tingkat kemiskinan 7 (tujuh) kabupaten/kota tersebut berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai 11,11%; sedangkan tingkat kemiskinan terendah adalah Kabupaten Subang dengan nilai 8,12%.

3.1.3.1 Kabupaten Cirebon

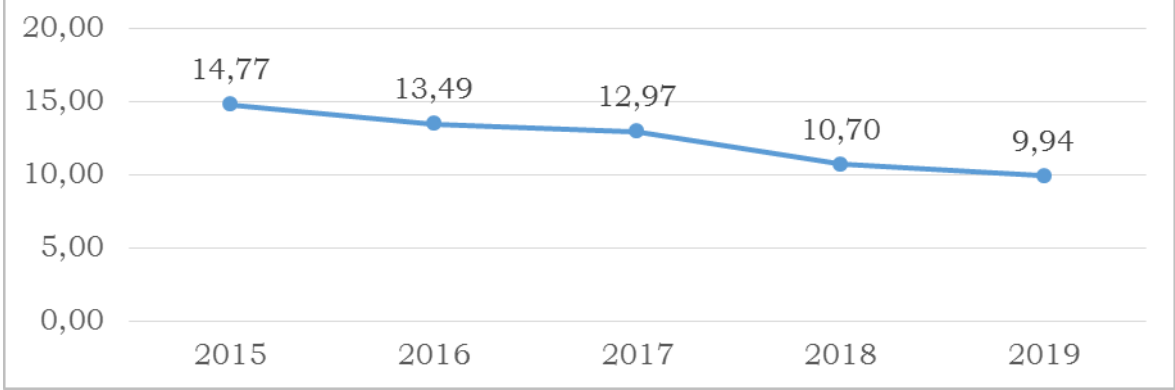
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 313.210                       | 14,77                                      |
| 2016  | 288.490                       | 13,49                                      |
| 2017  | 279.550                       | 12,97                                      |
| 2018  | 232.370                       | 10,70                                      |
| 2019  | 217.640                       | 9,94                                       |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Cirebon (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 mencapai 14,77%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 13,49%, lalu menurun menjadi 12,97% pada tahun 2017, menjadi 10,70% pada tahun 2018, dan menjadi 9,94% pada tahun 2019.

3.1.3.2 Kabupaten Indramayu

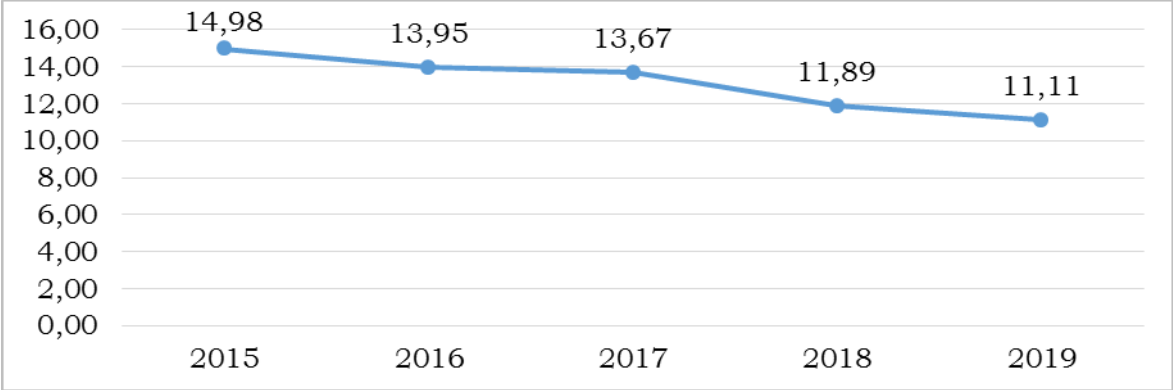
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2014  | 240.680                       | 14,29                                      |
| 2015  | 253.120                       | 14,98                                      |
| 2016  | 237.000                       | 13,95                                      |
| 2017  | 233.380                       | 13,67                                      |
| 2018  | 204.180                       | 11,89                                      |
| 2019  | 191.860                       | 11,11                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.18 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 mencapai 14,98%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 13,95%, lalu menurun menjadi 13,67% pada tahun 2017, menjadi 11,89% pada tahun 2018, dan menjadi 11,11% pada tahun 2019.

3.1.3.3 Kabupaten Majalengka

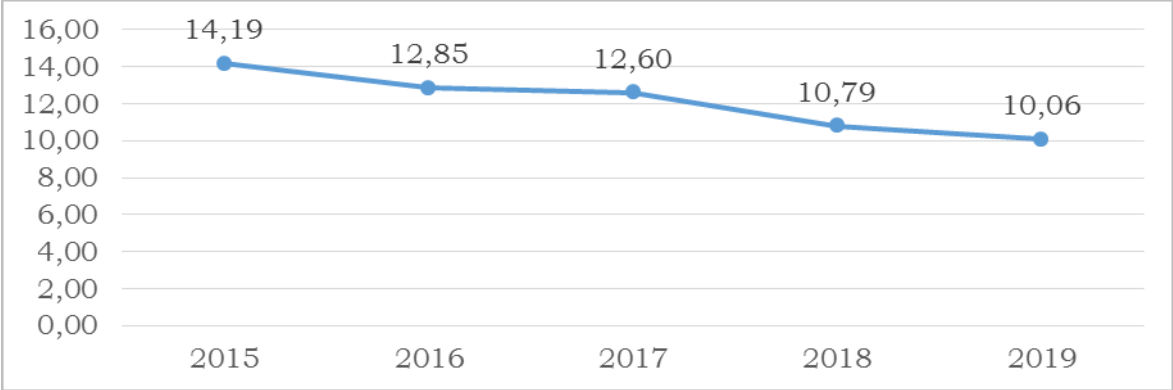
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 167.500                       | 14,19                                      |
| 2016  | 152.500                       | 12,85                                      |
| 2017  | 150.260                       | 12,60                                      |
| 2018  | 129.290                       | 10,79                                      |
| 2019  | 121.060                       | 10,06                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mencapai 14,19% kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 12,85%, lalu menurun menjadi 12,60% pada tahun 2017, menjadi 10,79% pada tahun 2018, dan menjadi 10,06% pada tahun 2019.

3.1.3.4 Kabupaten Subang

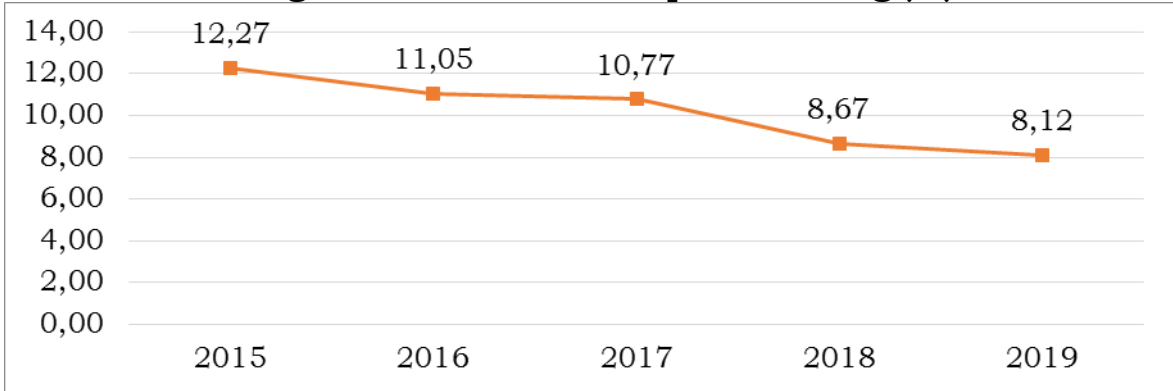
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Subang pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Subang**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 187.170                       | 12,27                                      |
| 2016  | 170.370                       | 11,05                                      |
| 2017  | 167.790                       | 10,77                                      |
| 2018  | 136.610                       | 8,67                                       |
| 2019  | 129.180                       | 8,12                                       |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Subang (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Subang pada tahun 2015 mencapai 12,27%. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 11,05%, lalu menurun menjadi 10,77% pada tahun 2017, menjadi 8,67% pada tahun 2018, dan menjadi 8,12% pada tahun 2019.

3.1.3.5 Kabupaten Sumedang

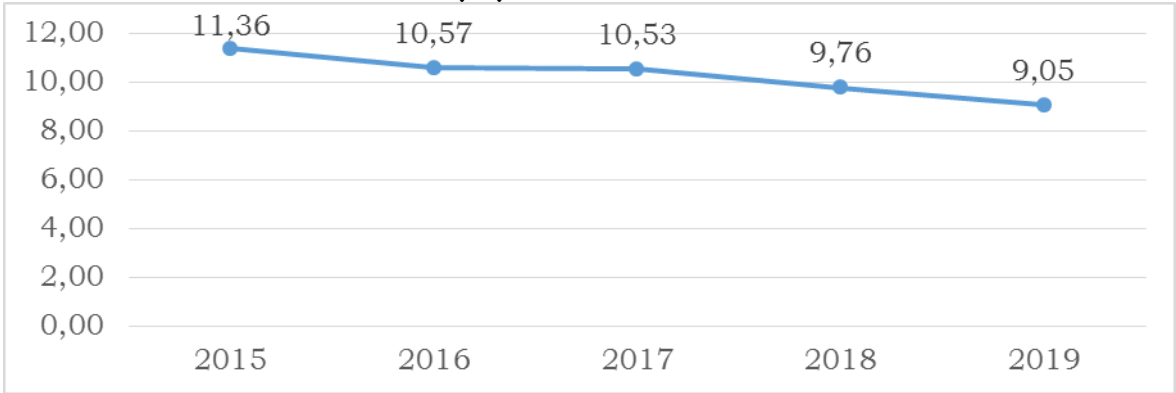
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 129.030                       | 11,36                                      |
| 2016  | 120.600                       | 10,57                                      |
| 2017  | 120.630                       | 10,53                                      |
| 2018  | 112.140                       | 9,76                                       |
| 2019  | 104.180                       | 9,05                                       |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 mencapai 11,36%. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 10,57%, lalu menurun menjadi 10,53% pada tahun 2017, menjadi 9,76% pada tahun 2018, dan menjadi 9,05% pada tahun 2019.

3.1.3.6 Kabupaten Kuningan

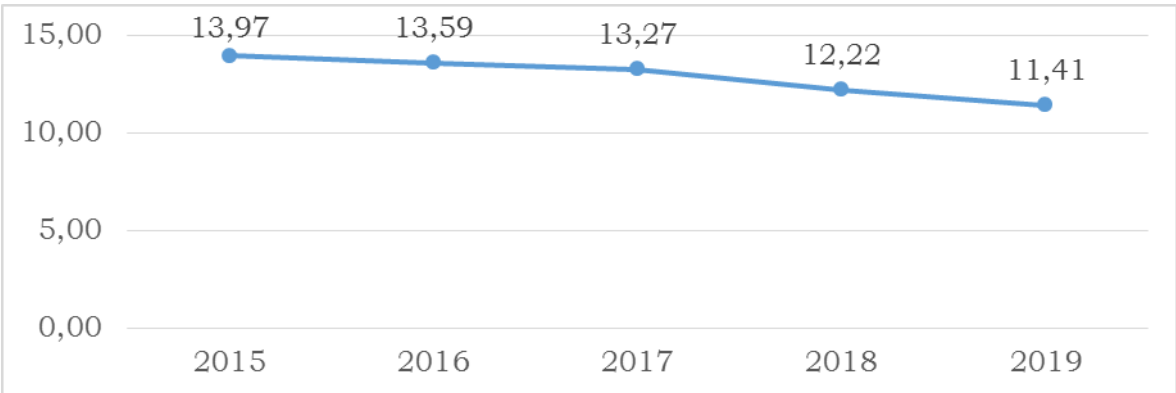
Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 133.570                       | 12,72                                      |
| 2016  | 147.210                       | 13,97                                      |
| 2017  | 144.070                       | 13,59                                      |
| 2018  | 141.550                       | 13,27                                      |
| 2019  | 131.160                       | 12,22                                      |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 3.22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan (%) 2015 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2015 mencapai 13,97%. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 13,59%, lalu menurun menjadi 13,27% pada tahun 2017, menjadi 12,22% pada tahun 2018, dan menjadi 11,41% pada tahun 2019.

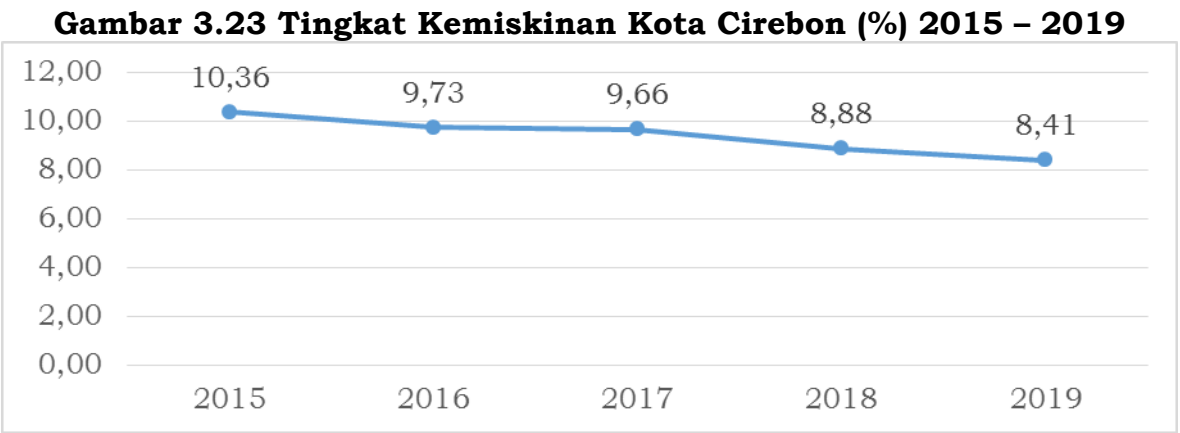
3.1.3.7 Kota Cirebon

Berikut adalah jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kota Cirebon pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015  | 31.740                        | 10,36                                      |
| 2016  | 30.150                        | 9,73                                       |
| 2017  | 30.190                        | 9,66                                       |
| 2018  | 28.030                        | 8,88                                       |
| 2019  | 26.800                        | 8,41                                       |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

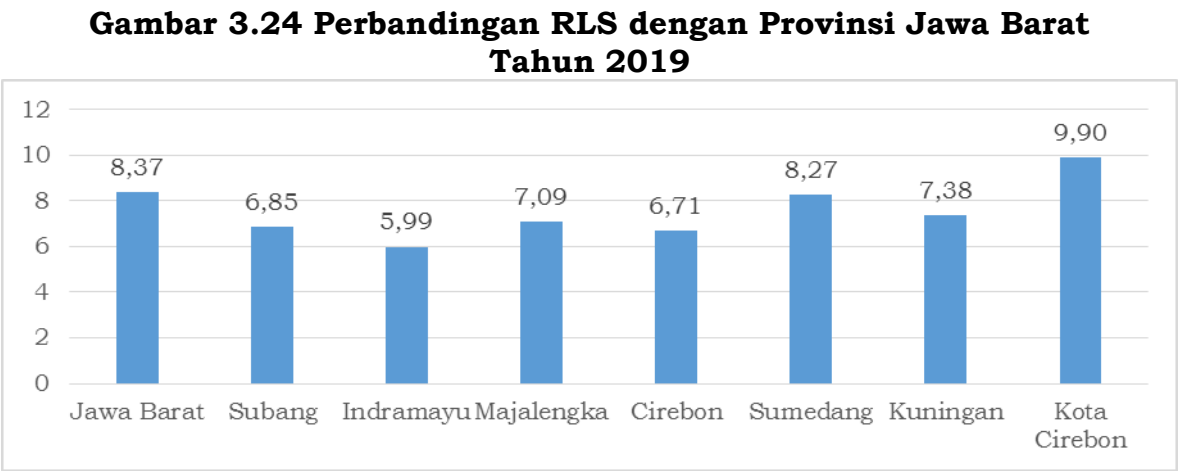


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon pada tahun 2015 mencapai 10,36%. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 9,73%, lalu menurun menjadi 9,6% pada tahun 2017, menjadi 8,88% pada tahun 2018, dan menjadi 8,41% pada tahun 2019.

3.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2019, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Barat mencapai 8,37 tahun. RLS tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8,15 tahun. Berikut adalah perbandingan RLS Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.



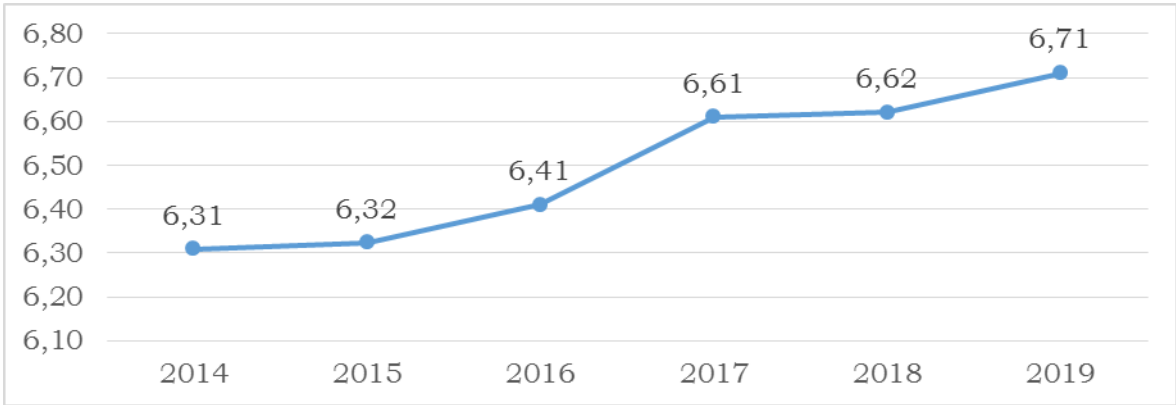
Sumber: Hasil Analisis Data Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa hanya Kota Cirebon yang memiliki RLS di atas Jawa Barat yaitu mencapai 9,90 tahun, sedangkan RLS 6 (enam) kabupaten lainnya di bawah Jawa Barat.

3.1.4.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.25 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019**



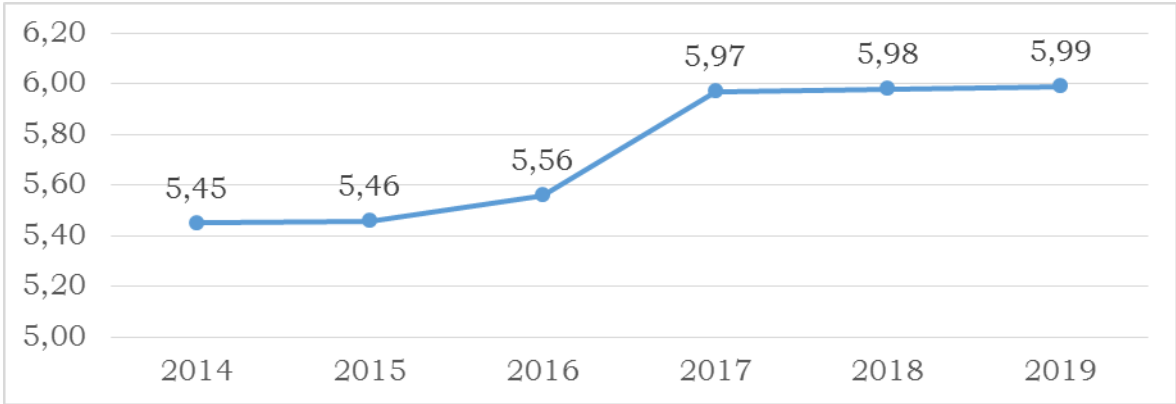
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Cirebon terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 6,31 tahun, lalu menjadi 6,32 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 6,41 tahun, kemudian meningkat tajam menjadi 6,61 tahun pada tahun 2017, menjadi 6,62 pada tahun 2018, dan menjadi 6,71 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Indramayu pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 – 2019**



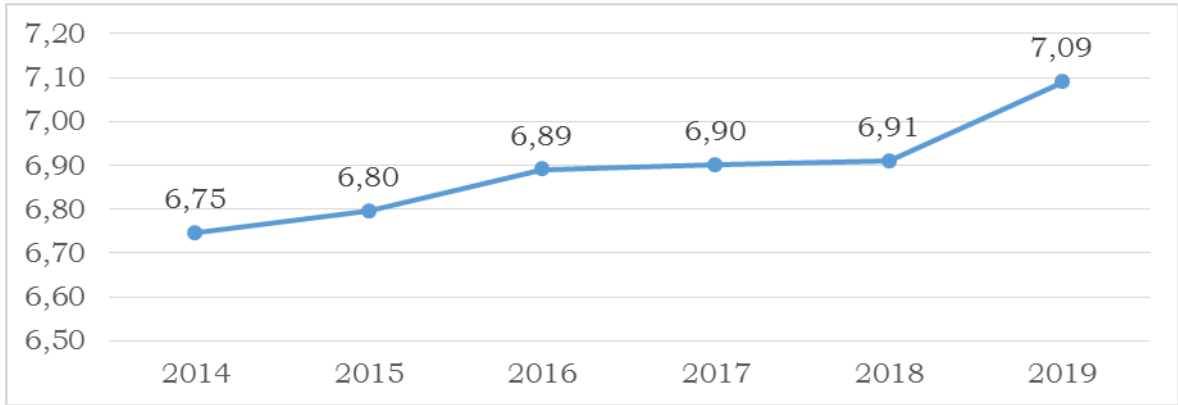
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Indramayu terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 5,45 tahun, lalu menjadi 5,46 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 5,56 tahun, kemudian meningkat tajam menjadi 5,97 tahun pada tahun 2017, menjadi 5,98 pada tahun 2018, dan menjadi 5,99 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2019**



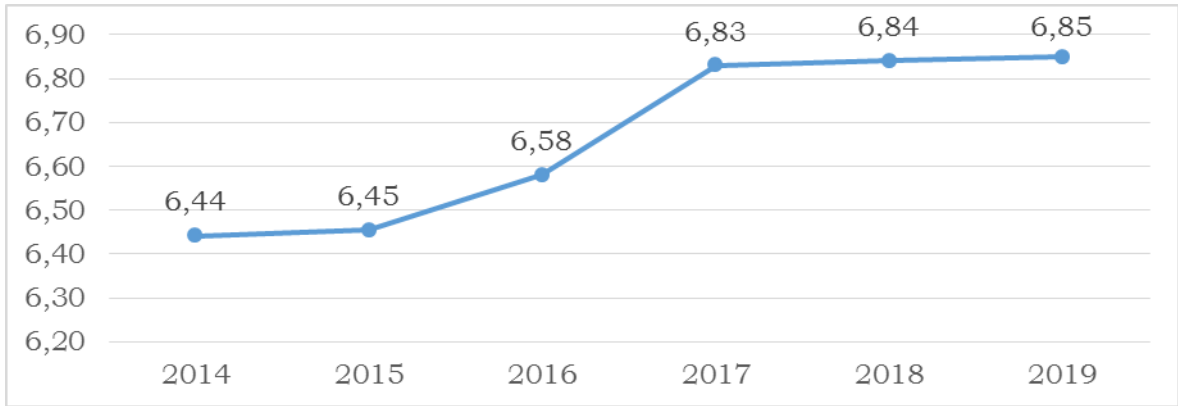
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Majalengka terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 6,75 tahun, lalu menjadi 6,80 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 6,89 tahun, kemudian menjadi 6,90 tahun pada tahun 2017, menjadi 6,91 pada tahun 2018, dan menjadi 7,09 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Subang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.28 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2019**



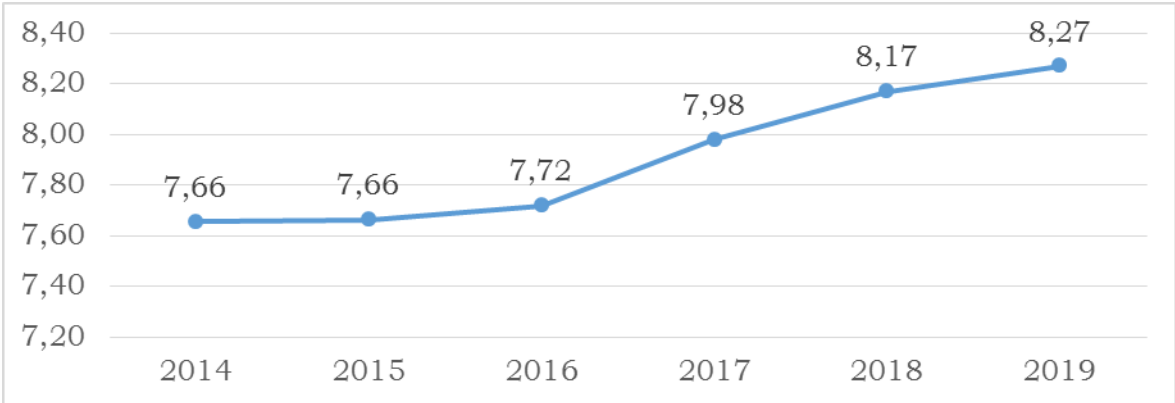
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Subang terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 6,44 tahun, lalu menjadi 6,45 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 6,58 tahun, kemudian meningkat tajam menjadi 6,83 tahun pada tahun 2017, menjadi 6,84 pada tahun 2018, dan menjadi 6,85 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.29 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2019**



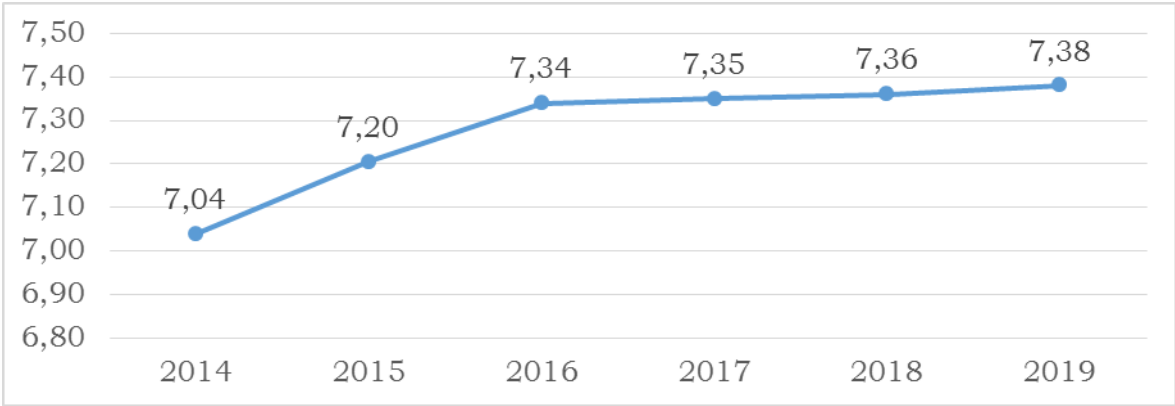
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Sumedang terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014 dan 2015, RLS mencapai 7,66 tahun, RLS tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,72 tahun, kemudian meningkat tajam menjadi 7,98 tahun pada tahun 2017, dan menjadi 8,17 pada tahun 2018, hingga menjadi 8,27 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.30 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2019**



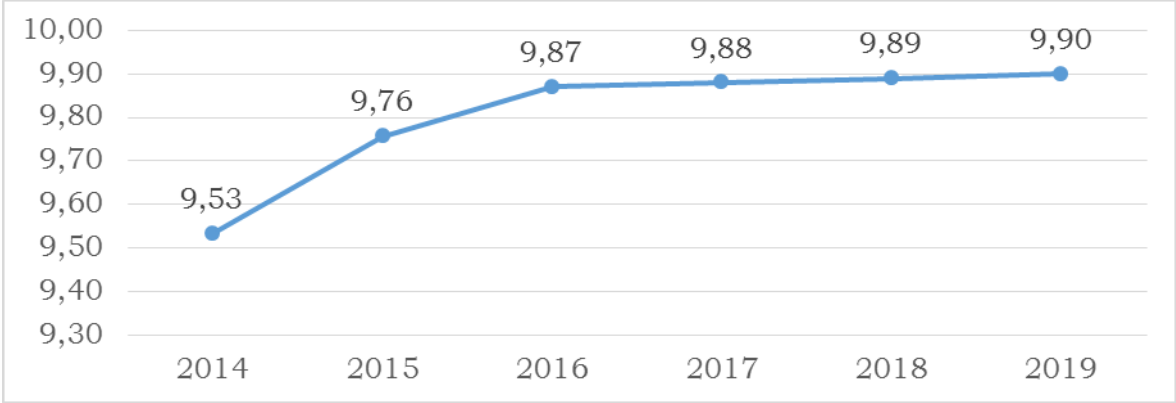
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kabupaten Kuningan terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 7,04 tahun, lalu menjadi 7,20 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 7,34 tahun, kemudian menjadi 7,35 tahun pada tahun 2017, menjadi 7,36 pada tahun 2018, dan menjadi 7,38 tahun pada tahun 2019.

3.1.4.7 Kota Cirebon

Berikut adalah Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cirebon pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.31 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cirebon 2014 – 2019**



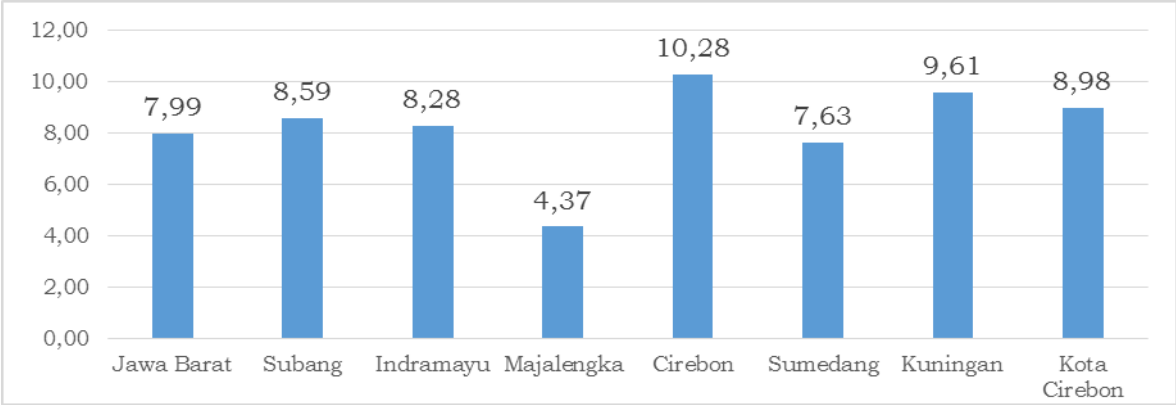
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

RLS di Kota Cirebon terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, RLS mencapai 9,53 tahun, lalu menjadi 9,76 tahun pada tahun 2015. RLS tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 9,87 tahun, kemudian menjadi 9,88 tahun pada tahun 2017, menjadi 9,89 pada tahun 2018, dan menjadi 9,90 tahun pada tahun 2019.

3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat mencapai 7,99%. TPT tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,17%. Berikut adalah perbandingan TPT Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

**Gambar 3.32 Perbandingan TPT dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



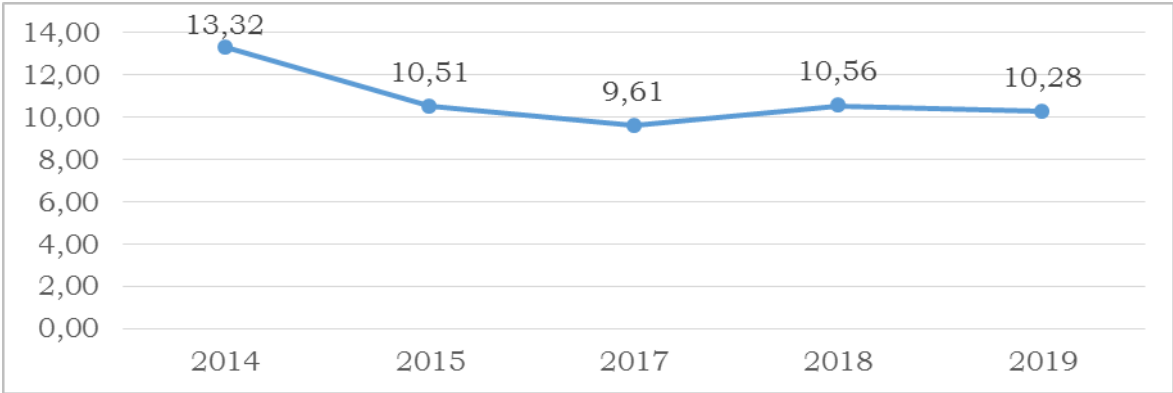
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui TPT di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon berada di atas TPT Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, TPT kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

3.1.5.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 – 2019.

**Gambar 3.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon (%) 2014 – 2019**



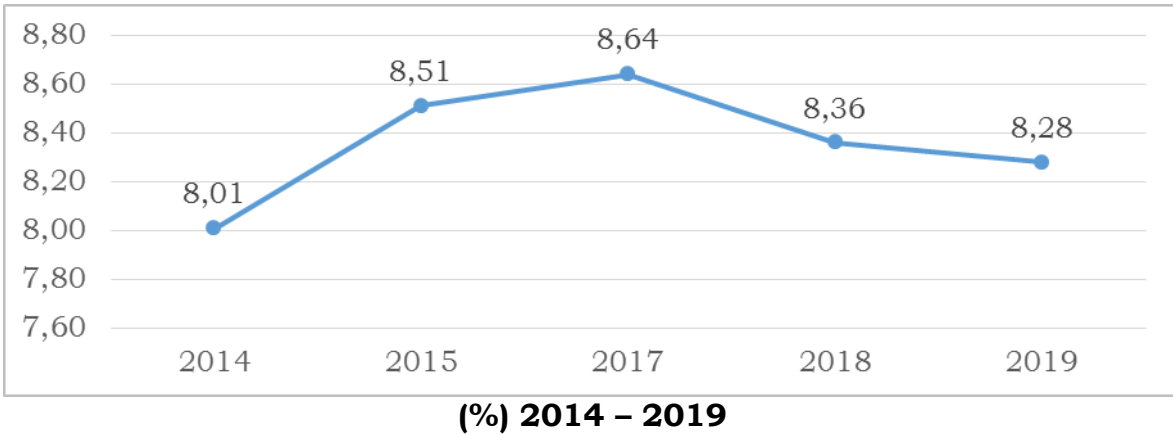
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 – 2019 mengalami penurunan. TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 mencapai 13,32%, lalu menurun pada tahun 2015 menjadi 10,51% dan menjadi 9,61% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Cirebon meningkat 10,56%, kemudian menurun menjadi 10,28% pada tahun 2019.

3.1.5.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indramayu pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indramayu**



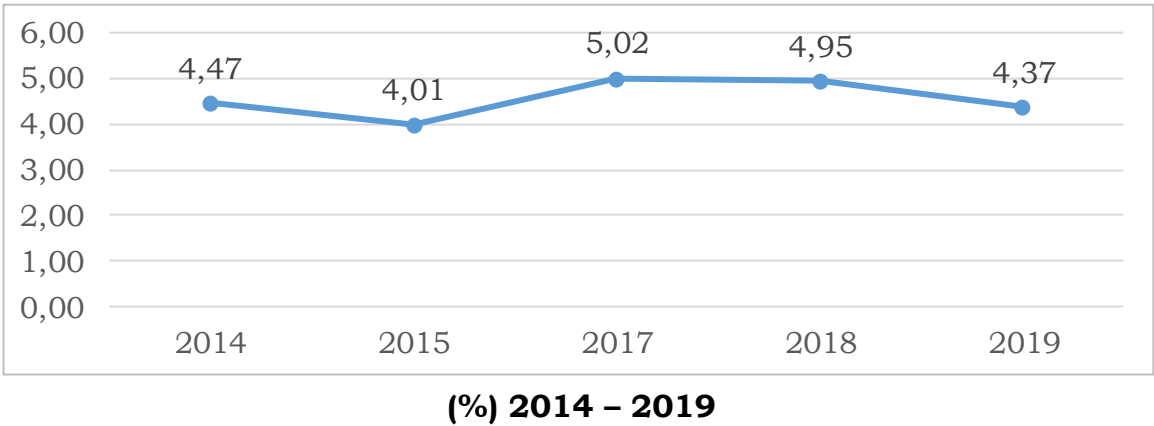
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai 2017. TPT pada tahun 2014 mencapai 8,01%, lalu meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 TPT menurun menjadi 8,36%, dan menurun kembali menjadi 8,28% pada tahun 2019.

3.1.5.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Majalengka pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka**



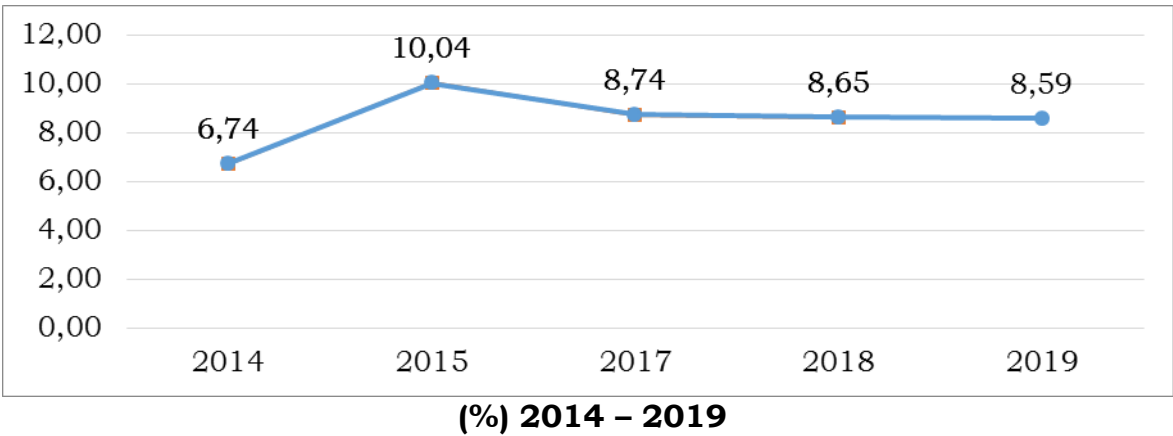
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kabupaten Majalengka pada tahun 2014 – 2019 cenderung fluktuatif. TPT Kabupaten Majalengka pada tahun 2014 mencapai 4,47%, lalu menurun pada tahun 2015 menjadi 4,01%. Pada tahun 2017, TPT tersebut mengalami peningkatan menjadi 5,02%, lalu menurun kembali menjadi 4,95% pada tahun 2018 dan menjadi 4,37% pada tahun 2019.

3.1.5.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Subang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang**



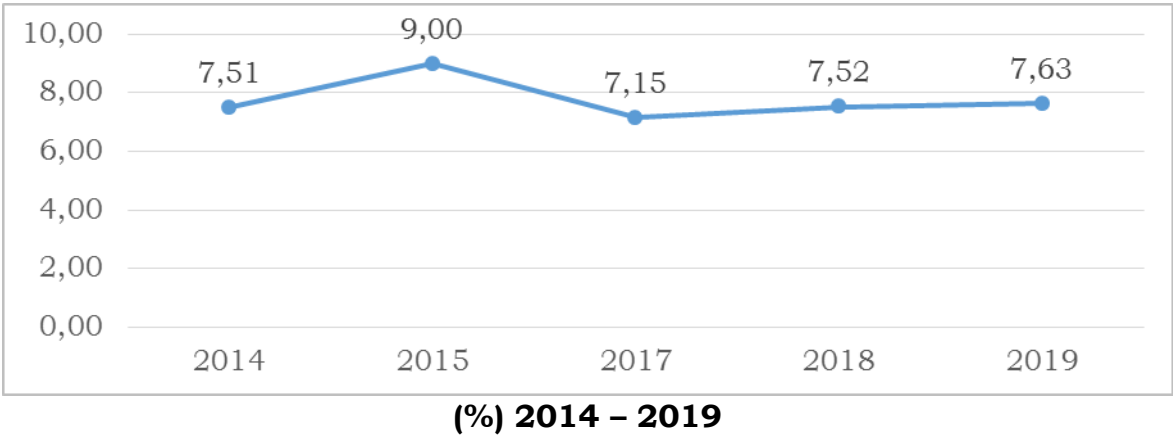
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kabupaten Subang pada tahun 2014 mencapai 6,74%, kemudian meningkat menjadi 10,04% pada tahun 2015. Pada tahun 2017 TPT tersebut menurun menjadi 8,74%, lalu menjadi 8,65% pada tahun 2018 dan menjadi 8,59% pada tahun 2019.

3.1.5.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang**



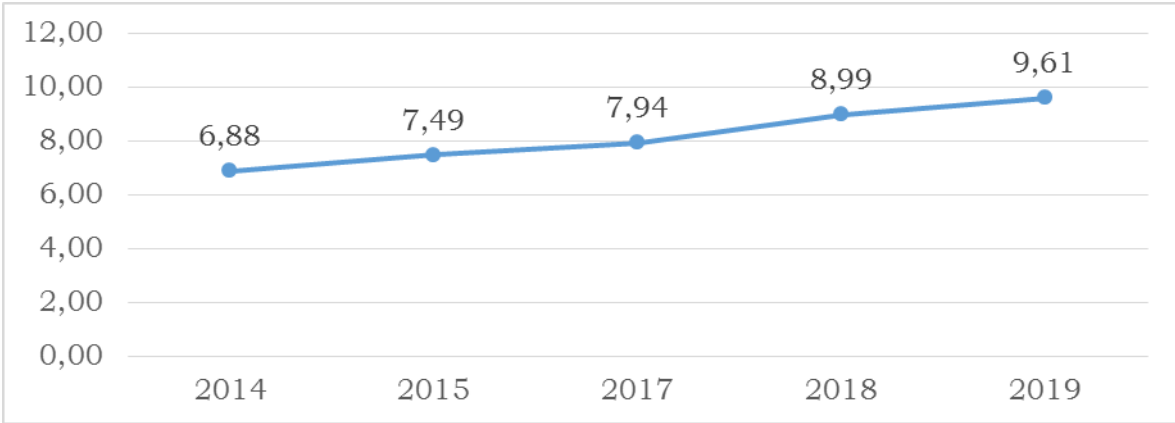
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 mencapai 7,51%, kemudian meningkat menjadi 9,00% pada tahun 2015. Pada tahun 2017 TPT tersebut menurun menjadi 7,15%, lalu meningkat menjadi 7,52% pada tahun 2018 dan menjadi 7,63% pada tahun 2019.

3.1.5.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 – 2019.

**Gambar 3.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuningan (%) 2014 – 2019**



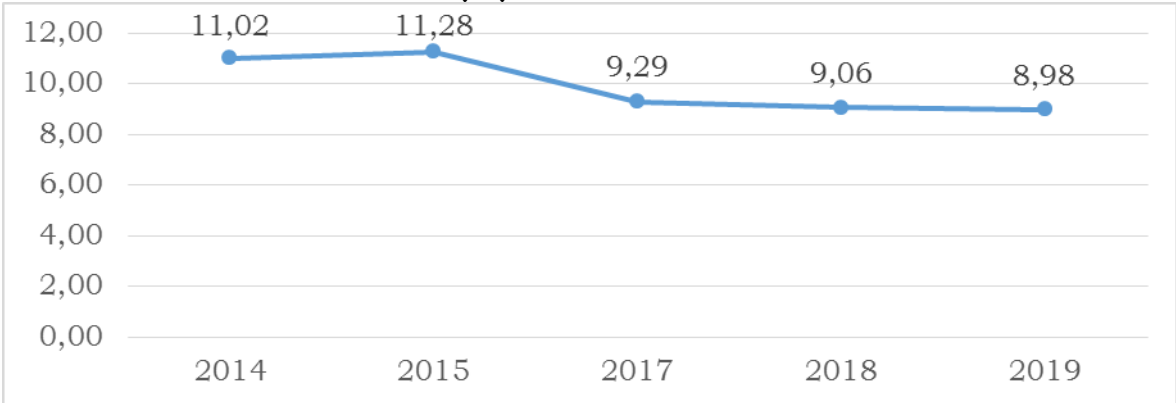
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT di Kabupaten Kuningan terus meningkat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014, TPT mencapai 6,88%, lalu menjadi 7,49% pada tahun 2015. TPT tersebut meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 7,94%, kemudian menjadi 8,99% pada tahun 2018, dan menjadi 9,61% pada tahun 2019. iyaaa

3.1.5.7 Kota Cirebon

Berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cirebon pada tahun 2014 – 2019.

Gambar 3.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon (%) 2014 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

TPT Kota Cirebon pada tahun 2014 mencapai 11,02%, kemudian meningkat menjadi 11,28% pada tahun 2015. Pada tahun 2017 TPT tersebut menurun menjadi 9,29%, lalu menurun menjadi 9,06% pada tahun 2018 dan menjadi 8,98% pada tahun 2019.

3.2 Profil Ekonomi di Kawasan Metropolitan REBANA

3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto terdiri atas beberapa lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan & perikanan; pertambangan & penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Berikut adalah PDRB Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

3.2.1.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 3.15 PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

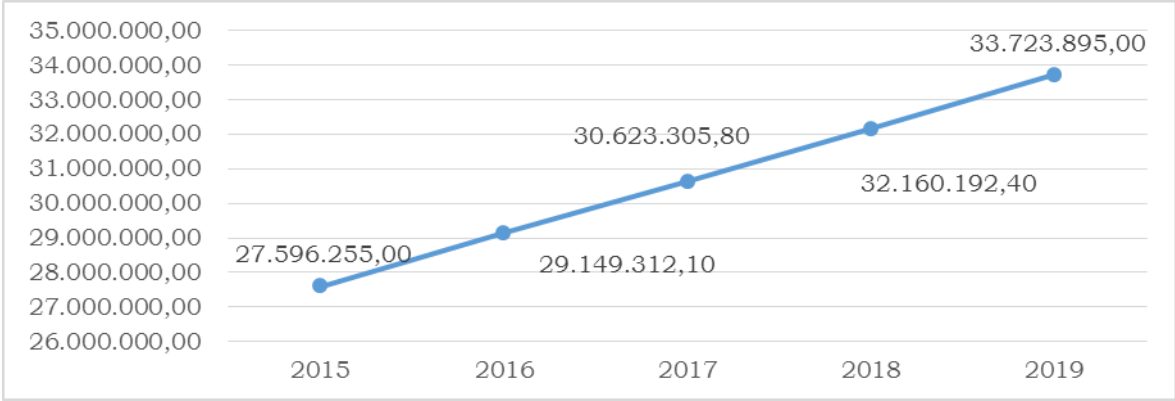
| No | Lapangan Usaha                                            | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                          | 4.112.437,90 | 4.360.550,00 | 4.426.987,70 | 4.526.469,20 | 4.487.076,00 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                 | 429.908,50   | 419.365,20   | 420.748,60   | 431.174,90   | 416.880,00   |
| 3  | Industri Pengolahan                                       | 5.689.437,00 | 6.020.185,20 | 6.325.533,60 | 6.651.078,70 | 6.754.590,00 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                 | 44.516,10    | 47.424,90    | 51.708,80    | 52.999,70    | 56.761,00    |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 22.399,70    | 23.582,90    | 25.400,10    | 26.569,10    | 28.362,00    |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6     | Konstruksi                                                      | 3.361.642,10 | 3.527.201,20 | 3.679.254,60 | 3.936.183,80 | 4.181.874,00 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 4.486.817,70 | 4.647.956,90 | 4.853.022,40 | 5.010.804,60 | 5.249.185,00 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 2.022.859,40 | 2.172.361,60 | 2.310.399,20 | 2.446.490,60 | 2.683.459,00 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.009.223,10 | 1.049.024,00 | 1.129.847,30 | 1.160.826,30 | 1.225.904,00 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 784.048,00   | 866.988,20   | 950.047,60   | 1.035.692,20 | 1.103.908,00 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 967.279,00   | 1.061.760,20 | 1.113.883,10 | 1.192.733,10 | 1.297.663,00 |
| 12    | Real Estate                                                     | 621.763,60   | 649.873,80   | 713.116,50   | 775.727,30   | 847.611,00   |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 227.430,10   | 247.828,20   | 271.119,60   | 294.349,70   | 321.659,00   |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 831.800,80   | 849.610,40   | 853.013,30   | 870.708,10   | 903.402,00   |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1.400.599,10 | 1.488.636,80 | 1.630.471,50 | 1.757.892,60 | 1.984.683,00 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 565.619,90   | 615.279,90   | 663.085,10   | 711.632,70   | 794.031,00   |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 1.018.473,00 | 1.101.682,70 | 1.205.666,80 | 1.278.859,80 | 1.386.847,00 |
| Total |                                                                 | 27.596.255,0 | 29.149.312,1 | 30.623.305,8 | 32.160.192,4 | 33.723.895,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Cirebon adalah industri pengolahan 20,03%; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,57%; serta pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 13,31%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Cirebon adalah jasa perusahaan sebesar 0,95%; pengadaan listrik dan gas sebesar 0,17%; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,08%.

Gambar 3.40 PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019



Sumber: Hasil Analisis Tabel 3.11, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 1.553.057,10 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 1.473.993,70 juta rupiah pada tahun 2017, dan meningkat sebesar 1.536.886,60 juta rupiah pada tahun 2018. Kemudian, PDRB Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan sebesar 1.563.702,60 juta rupiah pada tahun 2019.

3.2.1.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indramayu menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.16 PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

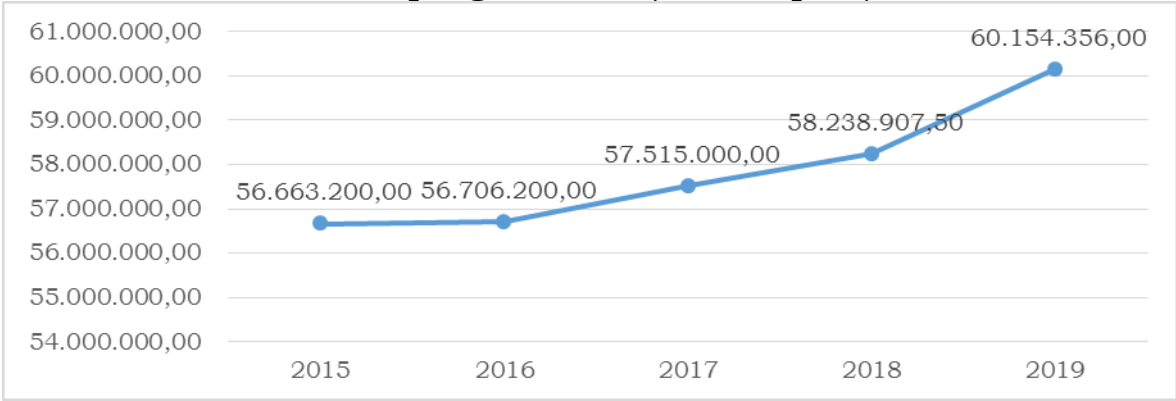
| No | Lapangan Usaha                                                  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 8.040.700,0  | 8.636.100,0  | 8.500.700,0  | 8.751.690,8  | 8.926.760,0  |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                       | 9.011.000,0  | 8.120.600,0  | 7.839.600,0  | 7.383.403,9  | 7.402.530,0  |
| 3  | Industri Pengolahan                                             | 25.544.000,0 | 25.243.900,0 | 25.631.600,0 | 25.743.947,9 | 26.433.580,0 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 25.700,0     | 26.600,0     | 28.100,0     | 29.956,6     | 30.820,0     |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 41.500,0     | 44.200,0     | 47.700,0     | 50.157,2     | 51.740,0     |
| 6  | Konstruksi                                                      | 2.576.600,0  | 2.704.300,0  | 2.933.500,0  | 3.189.279,0  | 3.383.780,0  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 5.624.000,0  | 5.715.200,0  | 5.899.400,0  | 6.075.142,8  | 6.431.430,0  |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.254.100,0  | 1.358.400,0  | 1.440.000,0  | 1.515.133,5  | 1.620.300,0  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 752.500,0    | 794.200,0    | 860.300,0    | 929.105,1    | 1.016.160,0  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                        | 361.400,0    | 412.000,0    | 462.200,0    | 503.992,5    | 564.180,0    |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 570.400,0    | 618.000,0    | 657.800,0    | 691.623,9    | 717.250,0    |
| 12 | Real Estate                                                     | 235.400,0    | 255.900,0    | 279.200,0    | 305.399,5    | 334.156,0    |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                 | 115.000,0    | 123.000,0    | 133.700,0    | 145.441,8    | 158.590,0    |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.095.400,0  | 1.123.400,0  | 1.137.000,0  | 1.154.986,5  | 1.216.260,0  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                 | 993.300,0    | 1.077.300,0  | 1.170.100,0  | 1.241.430,8  | 1.297.530,0  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 215.000,0    | 232.600,0    | 252.500,0    | 272.032,4    | 296.020,0    |
| 17 | Jasa lainnya                                                    | 207.200,0    | 220.500,0    | 241.600,0    | 256.183,3    | 273.270,0    |

| No    | Lapangan Usaha | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total |                | 56.663.200,0 | 56.706.200,0 | 57.515.000,0 | 58.238.907,5 | 60.154.356,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Indramayu adalah industri pengolahan sebesar 43,94%; pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 14,84%; serta pertambangan & penggalian sebesar 12,31%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Indramayu adalah jasa perusahaan sebesar 0,26%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,09%; serta pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05%.

**Gambar 3.41 PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel X, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Indramayu atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 43.000 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 808.800 juta rupiah pada tahun 2017, dan meningkat sebesar 723.907,5 juta rupiah pada tahun 2018. Kemudian, PDRB Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan sebesar 1.915.44,50 juta rupiah pada tahun 2019.

3.2.1.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majalengka menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.17 PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

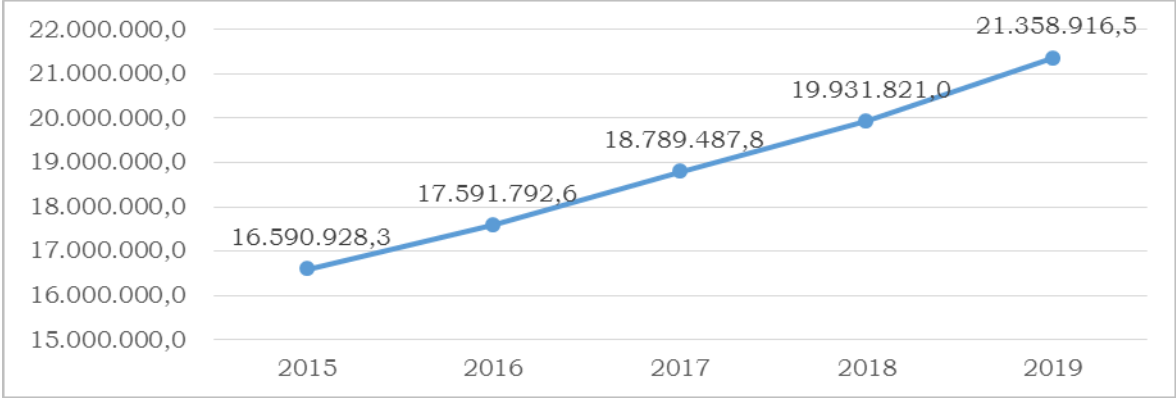
| No | Lapangan Usaha                   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 3.916.563,0 | 4.043.305,2 | 4.090.793,2 | 4.084.165,0 | 4.123.463,5 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian        | 416.395,0   | 407.681,4   | 399.053,3   | 398.156,7   | 382.994,6   |
| 3  | Industri Pengolahan              | 2.309.058,5 | 2.557.507,6 | 2.900.098,9 | 3.471.090,8 | 4.237.686,5 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas        | 13.639,6    | 14.483,0    | 15.572,6    | 16.473,4    | 17.385,5    |

| No           | Lapangan Usaha                                                  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5            | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 9.378,1             | 9.924,8             | 10.491,9            | 11.081,8            | 11.798,0            |
| 6            | Konstruksi                                                      | 2.109.149,8         | 2.325.957,3         | 2.653.120,0         | 2.739.963,6         | 2.850.002,2         |
| 7            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 3.017.828,2         | 3.151.902,8         | 3.304.247,0         | 3.459.193,8         | 3.632.431,8         |
| 8            | Transportasi dan Pergudangan                                    | 634.182,4           | 674.048,3           | 714.213,3           | 760.899,2           | 822.488,3           |
| 9            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 558.805,1           | 592.627,5           | 626.593,6           | 664.636,6           | 704.748,5           |
| 10           | Informasi dan Komunikasi                                        | 628.127,1           | 691.866,9           | 763.163,5           | 829.901,2           | 897.047,9           |
| 11           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 480.345,7           | 512.290,4           | 543.547,5           | 576.695,7           | 603.051,3           |
| 12           | Real Estate                                                     | 223.215,1           | 232.563,0           | 247.016,2           | 268.035,7           | 291.965,3           |
| 13           | Jasa Perusahaan                                                 | 59.059,3            | 62.579,7            | 67.083,8            | 71.421,9            | 76.313,0            |
| 14           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 595.149,2           | 609.448,0           | 613.931,9           | 631.114,6           | 648.241,3           |
| 15           | Jasa Pendidikan                                                 | 971.867,7           | 1.012.953,2         | 1.093.527,2         | 1.146.933,6         | 1.204.867,6         |
| 16           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 175.345,4           | 188.920,6           | 202.496,0           | 215.907,5           | 229.384,6           |
| 17           | Jasa lainnya                                                    | 472.819,1           | 503.732,9           | 544.537,9           | 586.149,9           | 625.046,7           |
| <b>Total</b> |                                                                 | <b>16.590.928,3</b> | <b>17.591.792,6</b> | <b>18.789.487,8</b> | <b>19.931.821,0</b> | <b>21.358.916,5</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Majalengka adalah industri pengolahan sebesar 19,84%; pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 19,31%; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,01%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Majalengka adalah jasa perusahaan sebesar 0,36%; pengadaan listrik dan gas sebesar 0,08%; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,06%.

**Gambar 3.42 PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel X, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 1.000.864,30 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 1.197.695,20 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 1.142.333,20 juta rupiah pada tahun 2018 dan meningkat sebesar 1,427,095.53 pada tahun 2019.

3.2.1.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Subang menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.18 PDRB Kabupaten Subang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

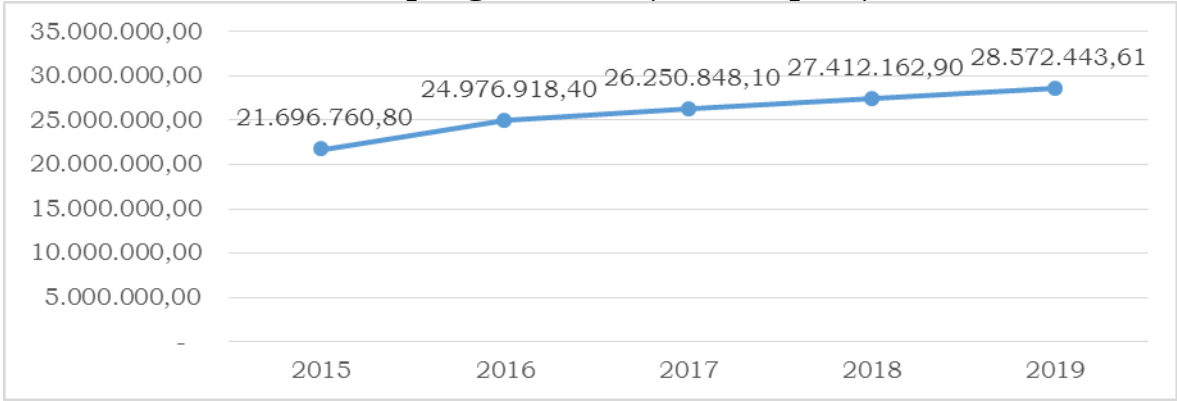
| No | Lapangan Usaha                                                | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                              | 6.354.935,0 | 6.668.824,8 | 7.187.640,6 | 7.445.730,8 | 7,580,817.2 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                     | 696.814,1   | 2.823.236,8 | 2.668.189,0 | 2.527.207,3 | 2.448.668,4 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 2.708.983,8 | 2.851.479,4 | 2.983.803,4 | 3.220.344,1 | 3.494.929,3 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 16.057,2    | 16.703,7    | 17.000,0    | 17.597,8    | 18.043,5    |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 21.213,9    | 22.342,5    | 23.901,4    | 25.197,3    | 26.573,1    |
| 6  | Konstruksi                                                    | 1.914.028,6 | 2.007.414,1 | 2.150.035,1 | 2.317.380,9 | 2.475.908,3 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.800.296,3 | 3.967.855,9 | 4.122.126,4 | 4.284.604,2 | 4.438.566,1 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 883.492,2   | 952.521,5   | 1.003.440,6 | 1.064.368,9 | 1.133.376,7 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 838.911,4   | 874.114,4   | 947.763,4   | 1.030.318,0 | 1.116.834,7 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                      | 767.175,0   | 880.494,5   | 993.813,9   | 1.090.865,5 | 1.207.588,1 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1.004.322,1 | 1.072.961,2 | 1.135.034,2 | 1.207.192,7 | 1.267.533,5 |
| 12 | Real Estate                                                   | 237.524,0   | 249.713,6   | 272.843,7   | 298.495,6   | 324.315,5   |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 10.635,2     | 11.431,8     | 12.382,5     | 13.473,5     | 14.687,5     |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 906.312,0    | 932.737,2    | 940.009,6    | 958.297,6    | 989.633,9    |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 805.051,0    | 855.448,6    | 931.846,6    | 989.271,6    | 1.047.045,1  |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 175.647,0    | 190.805,3    | 206.713,7    | 221.848,8    | 238.886,8    |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 555.362,0    | 598.833,1    | 654.304,0    | 699.968,3    | 749.036,1    |
| Total |                                                                 | 21.696.760,8 | 24.976.918,4 | 26.250.848,1 | 27.412.162,9 | 28.572.443,6 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2018 di Kabupaten Subang adalah pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 26,53%; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,53%; serta industri pengolahan sebesar 12,23%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2018 di Kabupaten Subang adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 0,09%; pengadaan listrik dan gas sebesar 0,06%; serta jasa perusahaan sebesar 0,05%.

**Gambar 3.43 PDRB Kabupaten Subang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel X, 2019

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 3.280.157,6 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 1.273.929,7 juta rupiah pada tahun 2017, dan meningkat sebesar 1.161.314,8 juta rupiah pada tahun 2018. Kemudian, PDRB Kabupaten Subang mengalami peningkatan sebesar 1.160.280,71 juta rupiah pada tahun 2019.

3.2.1.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.19 PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

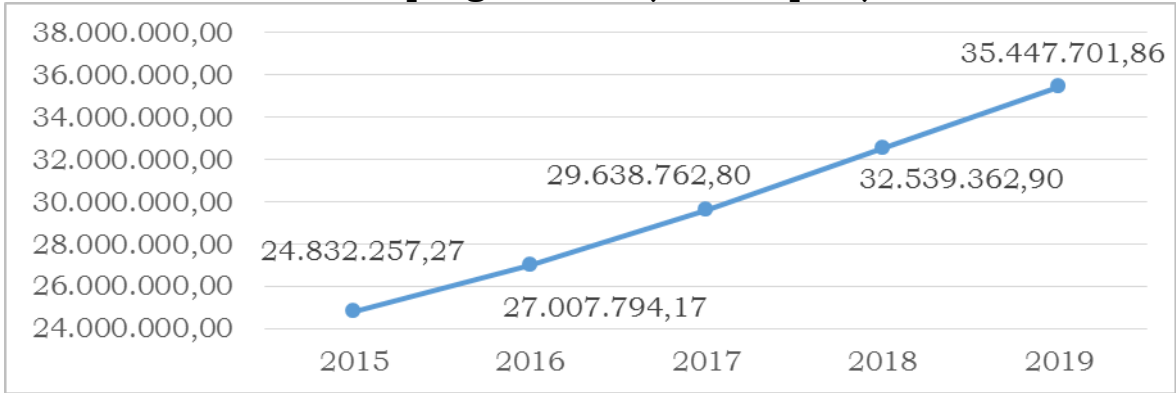
| No           | Lapangan Usaha                                                  | 2015                | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 5.129.288,63        | 5.497.485,99         | 6.025.408,07         | 6.413.509,90         | 6.738.129,85         |
| 2            | Pertambangan & Penggalan                                        | 26.857,54           | 27.166,84            | 27.029,21            | 27.818,70            | 28.517,60            |
| 3            | Industri Pengolahan                                             | 4.591.658,30        | 5.033.983,46         | 5.442.265,32         | 6.194.812,40         | 7.082.725,81         |
| 4            | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 80.399,74           | 99.577,62            | 125.903,18           | 131.633,00           | 138.130,40           |
| 5            | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 6.225,72            | 7.160,82             | 7.328,08             | 7.780,20             | 8.308,48             |
| 6            | Konstruksi                                                      | 2.522.434,52        | 2.723.252,25         | 3.020.344,29         | 3.392.484,60         | 3.690.211,32         |
| 7            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 4.086.219,79        | 4.334.234,95         | 4.713.992,05         | 5.098.142,90         | 5.547.966,34         |
| 8            | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.303.134,10        | 1.440.808,38         | 1.567.896,03         | 1.682.902,30         | 1.778.710,82         |
| 9            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.067.125,83        | 1.206.145,45         | 1.330.426,84         | 1.484.935,50         | 1.629.455,25         |
| 10           | Informasi dan Komunikasi                                        | 723.614,24          | 826.154,19           | 927.190,28           | 1.022.307,20         | 1.118.047,23         |
| 11           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1.027.250,79        | 1.176.419,59         | 1.341.952,09         | 1.469.511,60         | 1.613.671,59         |
| 12           | Real Estate                                                     | 399.027,90          | 424.922,41           | 472.963,72           | 521.737,90           | 569.130,14           |
| 13           | Jasa Perusahaan                                                 | 18.760,64           | 20.433,67            | 22.550,71            | 25.186,80            | 29.765,70            |
| 14           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.699.092,87        | 1.795.515,29         | 1.881.674,92         | 1.995.161,40         | 2.109.270,73         |
| 15           | Jasa Pendidikan                                                 | 1.469.276,84        | 1.631.815,63         | 1.867.495,32         | 2.116.475,60         | 2.317.498,45         |
| 16           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 267.417,40          | 297.292,03           | 333.140,76           | 367.184,50           | 402.984,99           |
| 17           | Jasa lainnya                                                    | 414.472,42          | 465.425,60           | 531.201,93           | 587.778,40           | 645.177,16           |
| <b>Total</b> |                                                                 | <b>24.832.257,7</b> | <b>27.007.794,17</b> | <b>29.638.762,80</b> | <b>32.539.362,90</b> | <b>35.447.701,86</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Sumedang adalah industri pengolahan sebesar 19,98%; pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 19,01%; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,65%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Sumedang adalah jasa

perusahaan sebesar 0,08%; pertambangan dan penggalian sebesar 0,08%; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,02%.

**Gambar 3.44 PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: hasil Analisis Tabel X, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 2,175.536,90 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 2.630.968,63 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 2.900.600,10 juta rupiah pada tahun 2018 dan meningkat sebesar 2.908.338,96 pada tahun 2019

3.2.1.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.20 PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

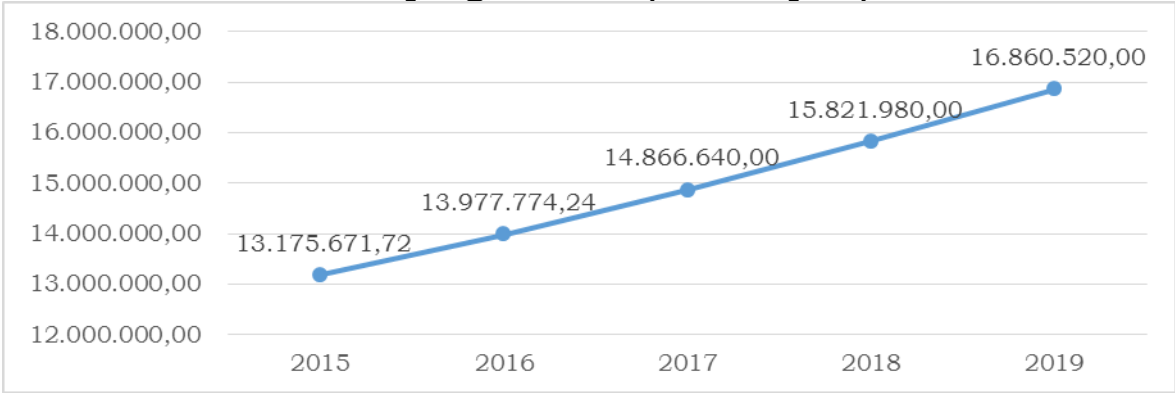
| No | Lapangan Usaha                                                | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                              | 2,900,320.82 | 3,031,841.45 | 3,196,980.00 | 3,379,280.00 | 3,539,580.00 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                     | 228,220.17   | 227,755.82   | 228,130.00   | 229,360.00   | 223,470.00   |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 318,144.23   | 340,891.56   | 357,830.00   | 376,810.00   | 409,170.00   |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 12,651.85    | 13,398.25    | 13,950.00    | 14,550.00    | 15,100.00    |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 11,915.18    | 12,609.37    | 13,530.00    | 14,530.00    | 14,990.00    |
| 6  | Konstruksi                                                    | 1,184,785.11 | 1,227,210.81 | 1,334,590.00 | 1,452,840.00 | 1,543,850.00 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,257,758.42 | 2,353,688.13 | 2,441,340.00 | 2,541,670.00 | 2,737,990.00 |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1,847,308.71  | 1,974,097.41  | 2,077,600.00  | 2,190,200.00  | 2,323,000.00  |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 232,462.16    | 251,107.01    | 272,530.00    | 296,440.00    | 320,060.00    |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 625,003.22    | 695,961.59    | 772,130.00    | 841,970.00    | 919,420.00    |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 682,812.30    | 746,641.07    | 783,180.00    | 823,960.00    | 855,980.00    |
| 12    | Real Estate                                                     | 399,586.54    | 426,498.86    | 465,750.00    | 507,040.00    | 553,010.00    |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 55,014.54     | 59,856.69     | 65,460.00     | 71,740.00     | 78,040.00     |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 499,795.54    | 514,892.17    | 523,690.00    | 537,050.00    | 561,600.00    |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1,240,747.71  | 1,363,996.95  | 1,509,510.00  | 1,663,630.00  | 1,812,970.00  |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 214,663.75    | 234,422.33    | 257,390.00    | 277,910.00    | 302,650.00    |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 464,481.47    | 502,904.77    | 553,050.00    | 603,000.00    | 649,640.00    |
| Total |                                                                 | 13,175,671.72 | 13,977,774.24 | 14,866,640.00 | 15,821,980.00 | 16,860,520.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Kuningan adalah pertanian, kehutanan & perikanan sebesar 20,99%; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,24%; serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,78%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Kuningan adalah jasa perusahaan sebesar 0,46%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,09%; serta pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09%.

**Gambar 3.45 PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: Hasil Analisis Tabel X, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Kuningan atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 802.102,52 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 888.865,76 juta rupiah pada tahun

2017, meningkat sebesar 955.340,00 juta rupiah pada tahun 2018 dan meningkat sebesar 1.038.540,00 pada tahun 2019

3.2.1.7 Kota Cirebon

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 3.21 PDRB Kota Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

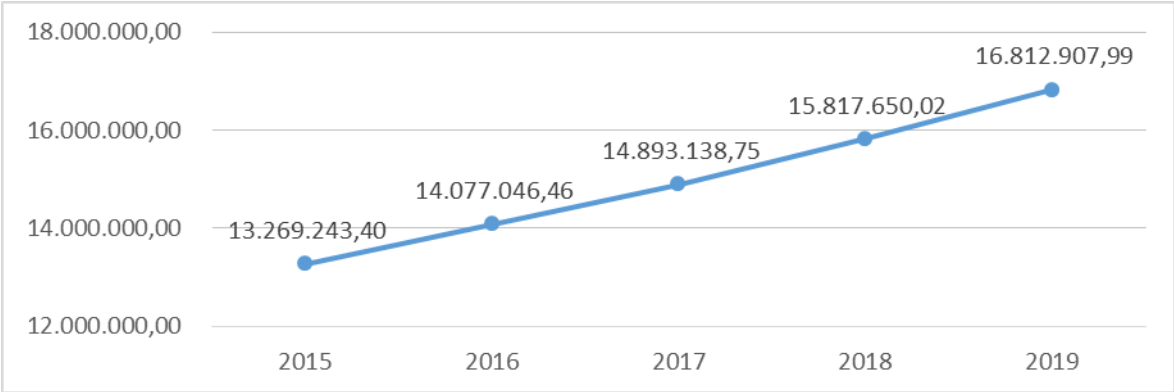
| No    | Lapangan Usaha                                                  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 42,132.86     | 43,817.60     | 44,453.10     | 45,365.40     | 46,324.03     |
| 2     | Pertambangan & Penggalian                                       | -             | -             | -             | -             | -             |
| 3     | Industri Pengolahan                                             | 1,381,191.23  | 1,442,001.10  | 1,507,333.95  | 1,592,322.34  | 1,672,018.79  |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 128,774.86    | 128,395.30    | 123,291.17    | 121,602.03    | 117,441.55    |
| 5     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 36,246.81     | 38,189.30     | 40,874.87     | 42,891.24     | 444,666.40    |
| 6     | Konstruksi                                                      | 1,385,934.80  | 1,448,557.20  | 1,512,987.00  | 1,601,548.80  | 1,675,130.74  |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 4,345,967.41  | 4,588,269.25  | 4,852,013.30  | 5,138,436.98  | 5,440,750.40  |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1,374,937.99  | 1,439,104.00  | 1,512,468.60  | 1,599,593.90  | 1,726,723.08  |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 647,941.69    | 699,309.30    | 751,460.80    | 807,464.14    | 856,165.61    |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 762,120.06    | 865,765.10    | 961,310.00    | 1,053,031.74  | 1,155,123.79  |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1,398,222.82  | 1,497,435.36  | 1,575,276.10  | 1,679,869.46  | 1,794,512.36  |
| 12    | Real Estate                                                     | 124,545.44    | 132,291.05    | 144,320.26    | 157,489.51    | 173,435.20    |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 112,689.07    | 120,427.40    | 128,773.70    | 137,077.50    | 149,231.68    |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 493,758.97    | 516,120.60    | 531,776.40    | 543,808.57    | 556,347.59    |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 445,971.08    | 479,679.30    | 517,694.00    | 556,232.71    | 597,266.48    |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 292,709.13    | 315,916.00    | 339,253.30    | 366,446.70    | 397,940.37    |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 296,099.18    | 321,768.60    | 349,852.20    | 374,469.00    | 409,829.92    |
| Total |                                                                 | 13,269,243.40 | 14,077,046.46 | 14,893,138.75 | 15,817,650.02 | 16,812,907.99 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB tertinggi pada tahun 2019 di Kota Cirebon adalah perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 25,62%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 21,03%; serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,45%. Kemudian 3 (tiga) lapangan usaha dengan persentase PDRB terendah pada tahun 2019 di Kota Cirebon adalah jasa perusahaan sebesar 0,7%; pengadaan listrik dan gas sebesar 0,55%; serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,22%.

**Gambar 3.46 PDRB Kota Cirebon Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019**



Sumber: Hasil Analisis Tabel X, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kota Cirebon atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan sebesar 807.803,06 juta rupiah pada tahun 2016, lalu meningkat sebesar 816.092,29 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 924.511,27 juta rupiah pada tahun 2018 dan meningkat sebesar 995.257,97 pada tahun 2019.

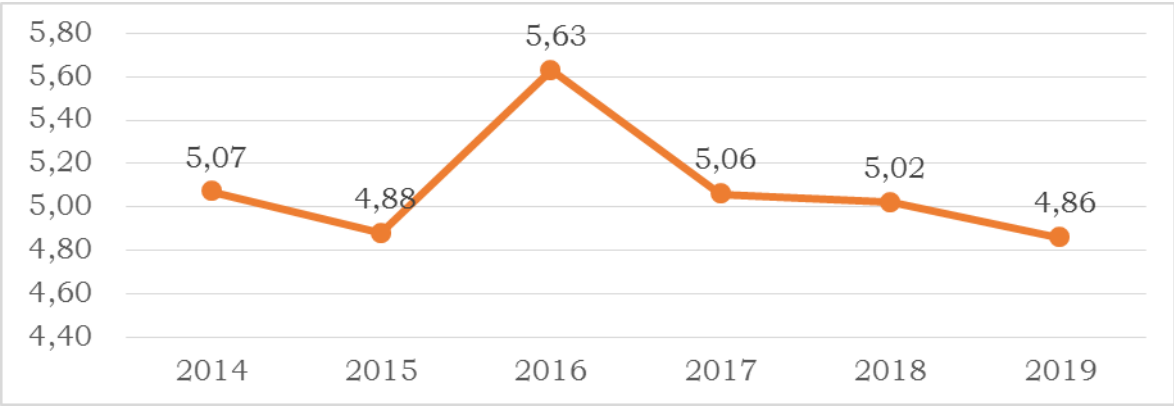
3.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi berikut adalah laju berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

3.2.2.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon.

**Gambar 3.47 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2014-2019**



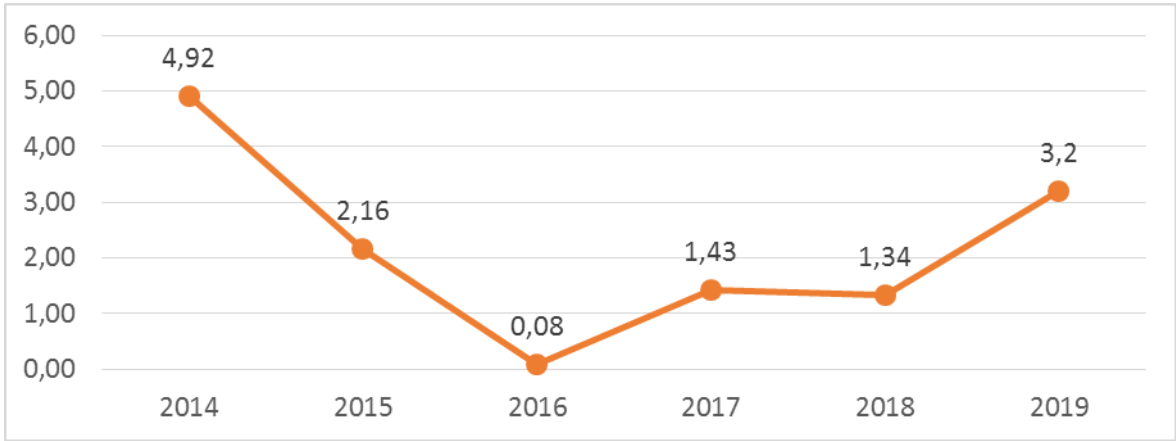
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun 2014 – 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07% dan mengalami penurunan menjadi 4,88% pada tahun 2015. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,63% pada tahun 2016, namun mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,06% pada tahun 2017, menjadi 5,02% pada tahun 2018, dan menjadi 4,86 % pada tahun 2019.

3.2.2.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu.

**Gambar 3.48 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu 2014-2019**



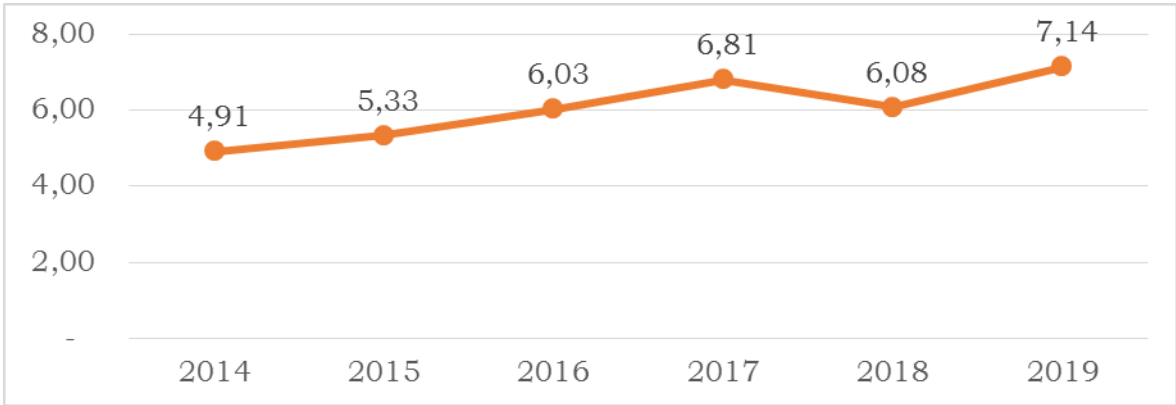
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu dari tahun 2014 – 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87% dan mengalami penurunan menjadi 4,62% pada tahun 2015. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,65% pada tahun 2016, namun mengalami penurunan kembali hingga menjadi 3,19% pada tahun 2017, meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 4,80%, dan menjadi 4,83% pada tahun 2019.

3.2.2.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka.

**Gambar 3.49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 2014-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

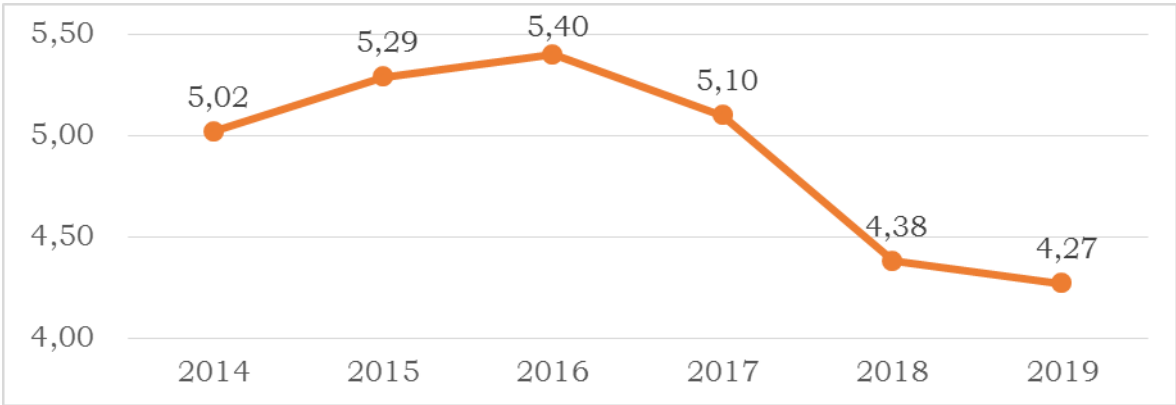
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka dari tahun 2014 – 2017 terus meningkat. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,91%, mengkat menjadi 5,33% pada tahun 2015, lalu menjadi

6,03% pada tahun 2016, dan menjadi 6,81% pada tahun 2017. Namun, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 6,08%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 7,14%.

3.2.2.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang.

**Gambar 3.50 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang 2014-2019**



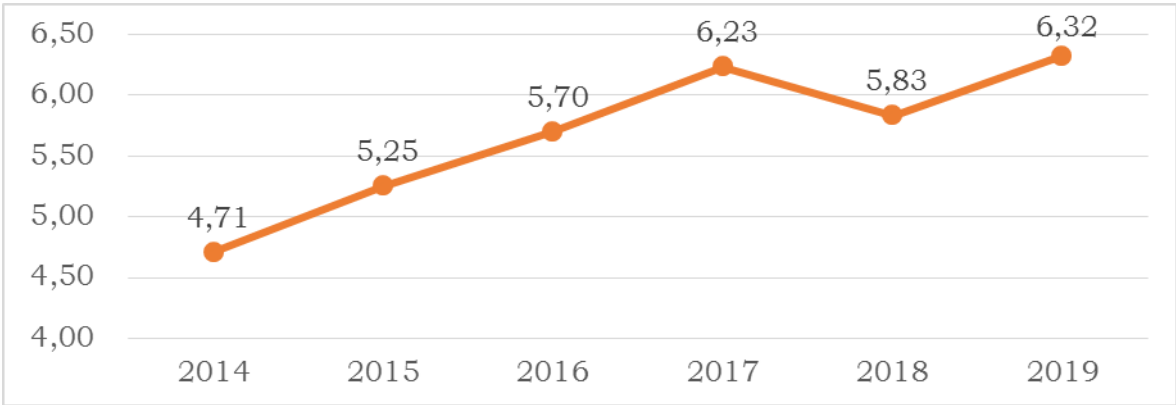
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang pada tahun 2014 mencapai 5,02% kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,29% pada tahun 2015, dan menjadi 5,4% pada tahun 2016. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang mengalami penurunan hingga menjadi 5,1% pada tahun 2017, lalu menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 4,38%, hingga menjadi 4,27% pada tahun 2019.

3.2.2.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.

**Gambar 3.51 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang 2014-2019**



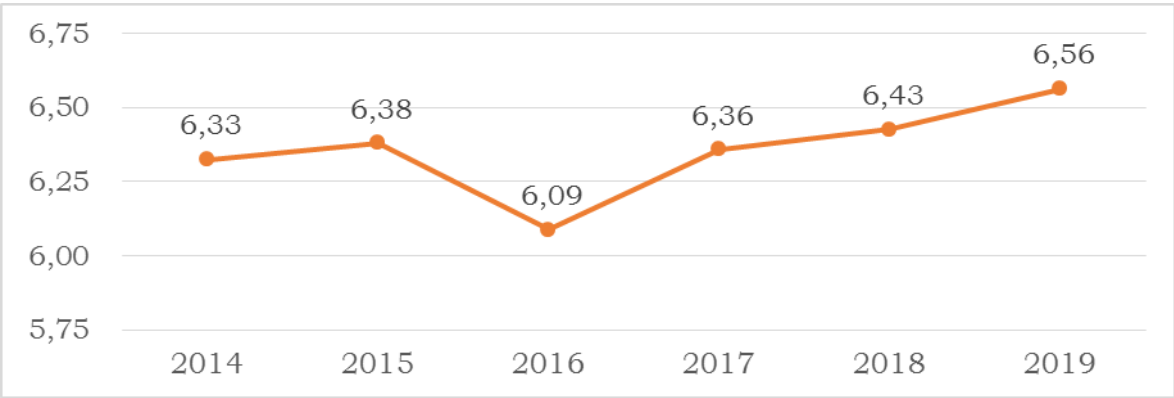
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 mencapai 4,71% kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,25% pada tahun 2015, menjadi 5,7% pada tahun 2016, dan menjadi 6,23% pada tahun 2017. Namun, laju pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,83%, dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2019 menjadi 6,32%.

3.2.2.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan.

**Gambar 3.52 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan 2014-2019**



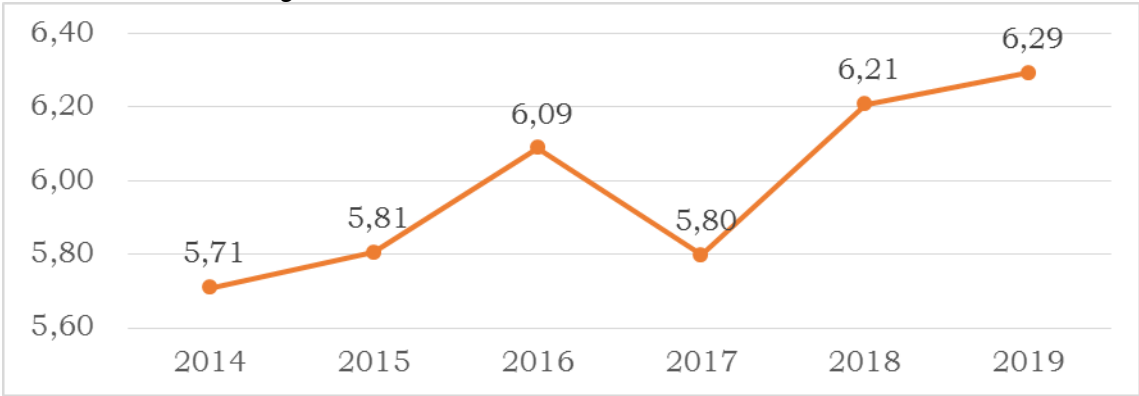
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 mencapai 6,33% kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,38% pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 6,09% pada tahun 2016, dan kembali mengalami peningkatan tahun 2017 menjadi 6,36. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 6,43% dan 6,56%.

3.2.2.7 Kota Cirebon

Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

**Gambar 3.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon 2014-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2014 mencapai 5,71% kemudian mengalami peningkatan selama 2 tahun berikutnya menjadi 5,81% pada tahun 2015 dan 6,09% pada tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,80% pada tahun 2017, dan kembali mengalami peningkatan tahun 2017 menjadi 6,21% dan terus meningkat hingga menjadi 6,29% pada tahun 2019.

3.2.3 Sektor Basis

Sektor basis merupakan sektor yang memiliki mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang maupun jasa yang dihasilkan ke luar wilayah tersebut. Sektor basis suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian

daerah tersebut dengan peran dalam perekonomian regional. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

3.2.3.1 Kabupaten Cirebon

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Cirebon terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.22 Analisis LQ Kabupaten Cirebon

| No    | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Cirebon<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 1     | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 4.487.076,00              | 1.354.957.300,00          | 1,03 |
| 2     | Pertambangan & Penggalian                                       | 416.880,00                | 806.206.200,00            | 0,16 |
| 3     | Industri Pengolahan                                             | 6.754.590,00              | 2.276.682.800,00          | 0,92 |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 56.761,00                 | 111.436.700,00            | 0,16 |
| 5     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 28.362,00                 | 9.005.500,00              | 0,98 |
| 6     | Konstruksi                                                      | 4.181.874,00              | 1.108.425.000,00          | 1,17 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 5.249.185,00              | 1.440.523.200,00          | 1,13 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 2.683.459,00              | 463.254.800,00            | 1,80 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.225.904,00              | 333.358.200,00            | 1,14 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 1.103.908,00              | 589.435.200,00            | 0,58 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1.297.663,00              | 443.041.600,00            | 0,91 |
| 12    | Real Estate                                                     | 847.611,00                | 316.837.100,00            | 0,83 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 321.659,00                | 206.936.200,00            | 0,48 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 903.402,00                | 365.678.200,00            | 0,77 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1.984.683,00              | 341.328.500,00            | 1,81 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 794.031,00                | 127.506.600,00            | 1,94 |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 1.386.847,00              | 204.998.500,00            | 2,11 |
| Total |                                                                 | 33.723.895,00             | 10.499.611.600,00         |      |

Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Cirebon, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Konstruksi;
- c. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- d. Transportasi dan pergudangan
- e. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- f. Jasa pendidikan;
- g. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
- h. Jasa lainnya.

3.2.3.2 Kabupaten Indramayu

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Indramayu terhadap PDB Nasional tahun 2019.

**Tabel 3.23 Analisis LQ Kabupaten Indramayu**

| No           | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Indramayu<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 1            | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 8.926.760,00                | 1.354.957.300,00          | 1,15 |
| 2            | Pertambangan & Penggalian                                       | 7.402.530,00                | 806.206.200,00            | 1,60 |
| 3            | Industri Pengolahan                                             | 26.433.580,00               | 2.276.682.800,00          | 2,03 |
| 4            | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 30.820,00                   | 111.436.700,00            | 0,05 |
| 5            | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 51.740,00                   | 9.005.500,00              | 1,00 |
| 6            | Konstruksi                                                      | 3.383.780,00                | 1.108.425.000,00          | 0,53 |
| 7            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 6.431.430,00                | 1.440.523.200,00          | 0,78 |
| 8            | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.620.300,00                | 463.254.800,00            | 0,61 |
| 9            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.016.160,00                | 333.358.200,00            | 0,53 |
| 10           | Informasi dan Komunikasi                                        | 564.180,00                  | 589.435.200,00            | 0,17 |
| 11           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 717.250,00                  | 443.041.600,00            | 0,28 |
| 12           | Real Estate                                                     | 334.156,00                  | 316.837.100,00            | 0,18 |
| 13           | Jasa Perusahaan                                                 | 158.590,00                  | 206.936.200,00            | 0,13 |
| 14           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.216.260,00                | 365.678.200,00            | 0,58 |
| 15           | Jasa Pendidikan                                                 | 1.297.530,00                | 341.328.500,00            | 0,66 |
| 16           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 296.020,00                  | 127.506.600,00            | 0,41 |
| 17           | Jasa lainnya                                                    | 273.270,00                  | 204.998.500,00            | 0,23 |
| <b>Total</b> |                                                                 | <b>60.154.356,00</b>        | <b>10.499.611.600,00</b>  |      |

Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Indramayu, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Pertambangan & penggalian;
- c. Industri pengolahan; dan
- d. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

3.2.3.3 Kabupaten Majalengka

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Majalengka terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.24 Analisis LQ Kabupaten Majalengka

| No    | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Majalengka<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|
| 1     | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                | 4.123.463,54                 | 1.354.957.300,00          | 1,50 |
| 2     | Pertambangan & Penggalian                                       | 382.994,56                   | 806.206.200,00            | 0,23 |
| 3     | Industri Pengolahan                                             | 4.237.686,49                 | 2.276.682.800,00          | 0,91 |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 17.385,47                    | 111.436.700,00            | 0,08 |
| 5     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 11.798,01                    | 9.005.500,00              | 0,64 |
| 6     | Konstruksi                                                      | 2.850.002,22                 | 1.108.425.000,00          | 1,26 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 3.632.431,84                 | 1.440.523.200,00          | 1,24 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 822.488,25                   | 463.254.800,00            | 0,87 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 704.748,47                   | 333.358.200,00            | 1,04 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 897.047,87                   | 589.435.200,00            | 0,75 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 603.051,27                   | 443.041.600,00            | 0,67 |
| 12    | Real Estate                                                     | 291.965,34                   | 316.837.100,00            | 0,45 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 76.313,02                    | 206.936.200,00            | 0,18 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 648.241,33                   | 365.678.200,00            | 0,87 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1.204.867,62                 | 341.328.500,00            | 1,74 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 229.384,55                   | 127.506.600,00            | 0,88 |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 625.046,68                   | 204.998.500,00            | 1,50 |
| Total |                                                                 | 21.358.916,53                | 10.499.611.600,00         |      |

Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Majalengka, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Konstruksi;
- c. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- d. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- e. Jasa pendidikan; dan
- f. Jasa lainnya

3.2.3.4 Kabupaten Subang

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Subang terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.25 Analisis LQ Kabupaten Subang

| No | Lapangan Usaha                   | PDRB Subang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 7.580.817,20             | 1.354.957.300,00          | 2,06 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian        | 2.448.668,37             | 806.206.200,00            | 1,12 |
| 3  | Industri Pengolahan              | 3.494.929,34             | 2.276.682.800,00          | 0,56 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas        | 18.043,45                | 111.436.700,00            | 0,06 |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Subang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 5     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 26.573,07                | 9.005.500,00              | 1,08 |
| 6     | Konstruksi                                                      | 2.475.908,29             | 1.108.425.000,00          | 0,82 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 4.438.566,13             | 1.440.523.200,00          | 1,13 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.133.376,69             | 463.254.800,00            | 0,90 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.116.834,69             | 333.358.200,00            | 1,23 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 1.207.588,11             | 589.435.200,00            | 0,75 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1.267.533,48             | 443.041.600,00            | 1,05 |
| 12    | Real Estate                                                     | 324.315,47               | 316.837.100,00            | 0,38 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 14.687,46                | 206.936.200,00            | 0,03 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 989.633,93               | 365.678.200,00            | 0,99 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1.047.045,06             | 341.328.500,00            | 1,13 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 238.886,79               | 127.506.600,00            | 0,69 |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 749.036,08               | 204.998.500,00            | 1,34 |
| Total |                                                                 | 28.572.443,61            | 10.499.611.600,00         |      |

Sumber: hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Subang, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Pertambangan & penggalian;
- c. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;
- d. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- e. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- f. Jasa keuangan dan asuransi;
- g. Jasa pendidikan; dan
- h. Jasa lainnya.

3.2.3.5 Kabupaten Sumedang

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Sumedang terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.26 Analisis LQ Kabupaten Sumedang

| No | Lapangan Usaha                                            | PDRB Sumedang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                          | 6.738.129,85               | 1.354.957.300,00          | 1,47 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                 | 28.517,60                  | 806.206.200,00            | 0,01 |
| 3  | Industri Pengolahan                                       | 7.082.725,81               | 2.276.682.800,00          | 0,92 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                 | 138.130,40                 | 111.436.700,00            | 0,37 |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 8.308,48                   | 9.005.500,00              | 0,27 |
| 6  | Konstruksi                                                | 3.690.211,32               | 1.108.425.000,00          | 0,99 |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Sumedang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 5.547.966,34               | 1.440.523.200,00          | 1,14 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.778.710,82               | 463.254.800,00            | 1,14 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.629.455,25               | 333.358.200,00            | 1,45 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 1.118.047,23               | 589.435.200,00            | 0,56 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1.613.671,59               | 443.041.600,00            | 1,08 |
| 12    | Real Estate                                                     | 569.130,14                 | 316.837.100,00            | 0,53 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 29.765,70                  | 206.936.200,00            | 0,04 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2.109.270,73               | 365.678.200,00            | 1,71 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 2.317.498,45               | 341.328.500,00            | 2,01 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 402.984,99                 | 127.506.600,00            | 0,94 |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 645.177,16                 | 204.998.500,00            | 0,93 |
| Total |                                                                 | 35.447.701,86              | 10.499.611.600,00         |      |

Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Sumedang, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- c. Transportasi dan pergudangan;
- d. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- e. Jasa keuangan dan asuransi;
- f. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- g. Jasa pendidikan.

3.2.3.6 Kabupaten Kuningan

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Kuningan terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.27 Analisis LQ Kabupaten Kuningan

| No | Lapangan Usaha                                                | PDRB Kuningan<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                              | 3,539,580.00               | 1,354,957,300.00          | 1.63 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                     | 223,470.00                 | 806,206,200.00            | 0.17 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 409,170.00                 | 2,276,682,800.00          | 0.11 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 15,100.00                  | 111,436,700.00            | 0.08 |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 14,990.00                  | 9,005,500.00              | 1.04 |
| 6  | Konstruksi                                                    | 1,543,850.00               | 1,108,425,000.00          | 0.87 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,737,990.00               | 1,440,523,200.00          | 1.18 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 2,323,000.00               | 463,254,800.00            | 3.12 |

| No    | Lapangan Usaha                                                  | PDRB Kuningan<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 320,060.00                 | 333,358,200.00            | 0.60 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                        | 919,420.00                 | 589,435,200.00            | 0.97 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 855,980.00                 | 443,041,600.00            | 1.20 |
| 12    | Real Estate                                                     | 553,010.00                 | 316,837,100.00            | 1.09 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                 | 78,040.00                  | 206,936,200.00            | 0.23 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 561,600.00                 | 365,678,200.00            | 0.96 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                 | 1,812,970.00               | 341,328,500.00            | 3.31 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 302,650.00                 | 127,506,600.00            | 1.48 |
| 17    | Jasa lainnya                                                    | 649,640.00                 | 204,998,500.00            | 1.97 |
| Total |                                                                 | 16,860,520.00              | 10.499.611.600,00         |      |

Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Kuningan, antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan & perikanan;
- b. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;
- c. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- d. Transportasi dan pergudangan;
- e. Jasa keuangan dan asuransi;
- f. Real estate;
- g. Jasa Pendidikan;
- h. Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial;
- i. Jasa lainnya.

3.2.3.7 Kota Cirebon

Berikut adalah analisis *Location Quotient* PDRB Kabupaten Cirebon terhadap PDB Nasional tahun 2019.

Tabel 3.28 Analisis LQ Kota Cirebon

| No | Lapangan Usaha                                                | PDRB Sumedang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                              | 46,324.03                  | 1.354.957.300,00          | 0.02 |
| 2  | Pertambangan & Penggalian                                     | -                          | 806.206.200,00            | 0.00 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 1,672,018.79               | 2.276.682.800,00          | 0.46 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 117,441.55                 | 111.436.700,00            | 0.66 |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 44,666.40                  | 9.005.500,00              | 3.10 |
| 6  | Konstruksi                                                    | 1,675,130.74               | 1.108.425.000,00          | 0.94 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,440,750.40               | 1.440.523.200,00          | 2.36 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 1,726,723.08               | 463.254.800,00            | 2.33 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 856,165.61                 | 333.358.200,00            | 1.60 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                      | 1,155,123.79               | 589.435.200,00            | 1.22 |

| No    | Lapangan Usaha                                                        | PDRB Sumedang<br>(Rp Juta) | PDB Nasional<br>(Rp Juta) | LQ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                            | 1,794,512.36               | 443.041.600,00            | 2.53 |
| 12    | Real Estate                                                           | 173,435.20                 | 316.837.100,00            | 0.34 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                       | 149,231.68                 | 206.936.200,00            | 0.45 |
| 14    | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan, dan Jaminan<br>Sosial Wajib | 556,347.59                 | 365.678.200,00            | 0.95 |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                       | 597,266.48                 | 341.328.500,00            | 1.09 |
| 16    | Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                 | 397,940.37                 | 127.506.600,00            | 1.95 |
| 17    | Jasa lainnya                                                          | 409,829.92                 | 204.998.500,00            | 1.25 |
| Total |                                                                       | 16,812,907.99              | 10.499.611.600,00         |      |

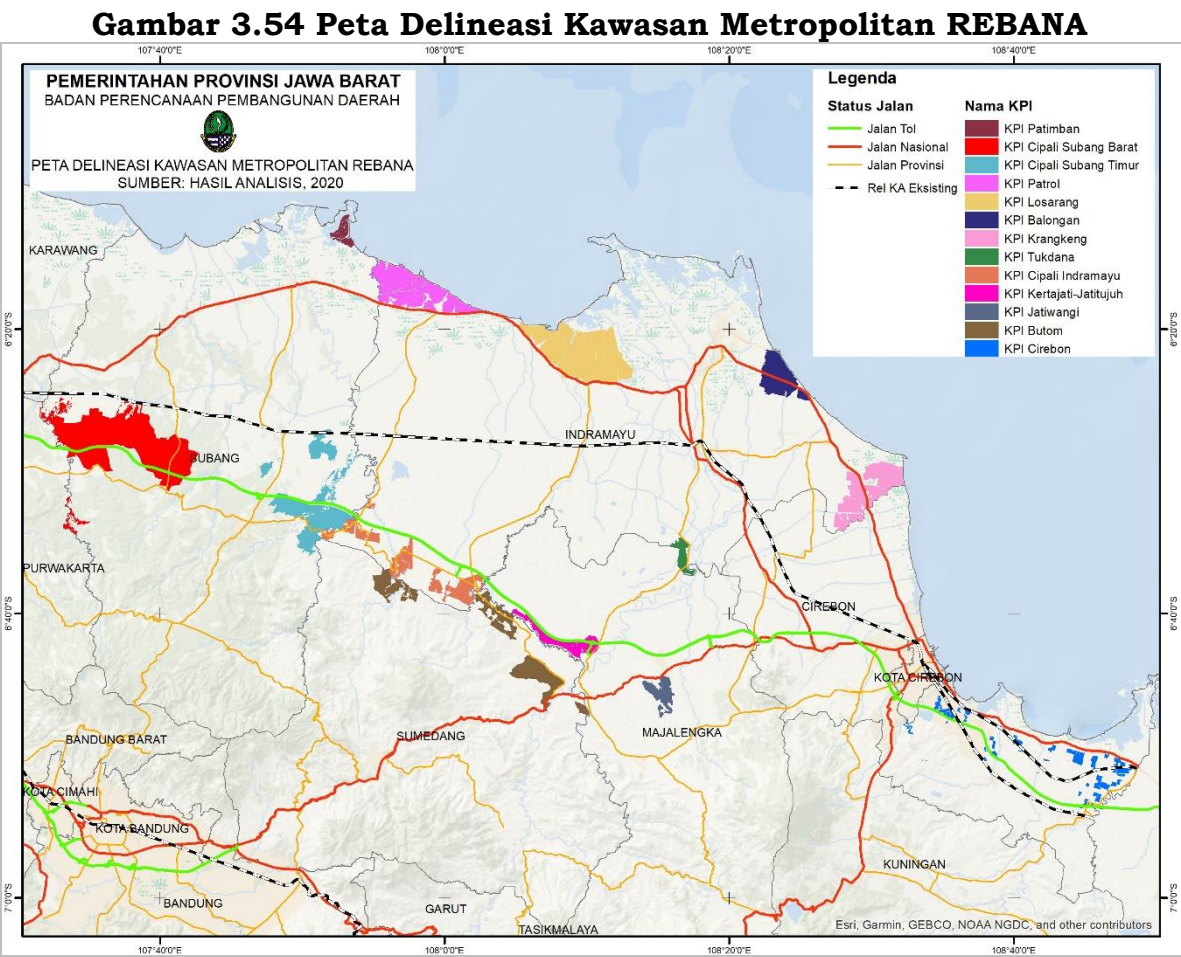
Sumber: hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kota Cirebon, antara lain:

- a. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;
- b. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- c. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Jasa keuangan dan asuransi;
- f. Jasa Pendidikan;
- g. Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial;
- h. Jasa lainnya.

**3.3 Delineasi Kawasan Metropolitan REBANA**

Kawasan Metropolitan REBANA terdiri dari 13 KPI yang berlokasi di 5 kabupaten yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang, serta 2 kabupaten dan kota pendukung yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. 13 KPI tersebut memiliki total luas kawasan sebesar 43.912,94 Ha.



Kabupaten Subang memiliki KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, dan KPI Cipali Subang Timur. Kabupaten Indramayu memiliki 6 KPI antara lain KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Tukdana, dan KPI Cipali Indramayu. Kabupaten Majalengka memiliki 2 KPI yaitu KPI Kertajati-Jatitujuh dan KPI Jatiwangi. Kabupaten Sumedang memiliki 1 KPI yaitu KPI Butom. Kabupaten Cirebon memiliki 1 KPI yaitu KPI Cirebon.

Penentuan delineasi usulan 13 KPI yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA ditentukan berdasarkan beberapa cara antara lain:

- a. Peninjauan lokasi peruntukan industri dalam RTRW masing-masing kabupaten yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA;
  - b. Peninjauan terhadap revisi RTRW masing-masing kabupaten;
  - c. Usulan Kabupaten.
- KPI yang belum sesuai dengan draf revisi RTRW Kabupaten Subang adalah KPI Patimban. KPI Patimban merupakan usulan Kabupaten Subang untuk mendukung fungsi dari Pelabuhan Patimban.

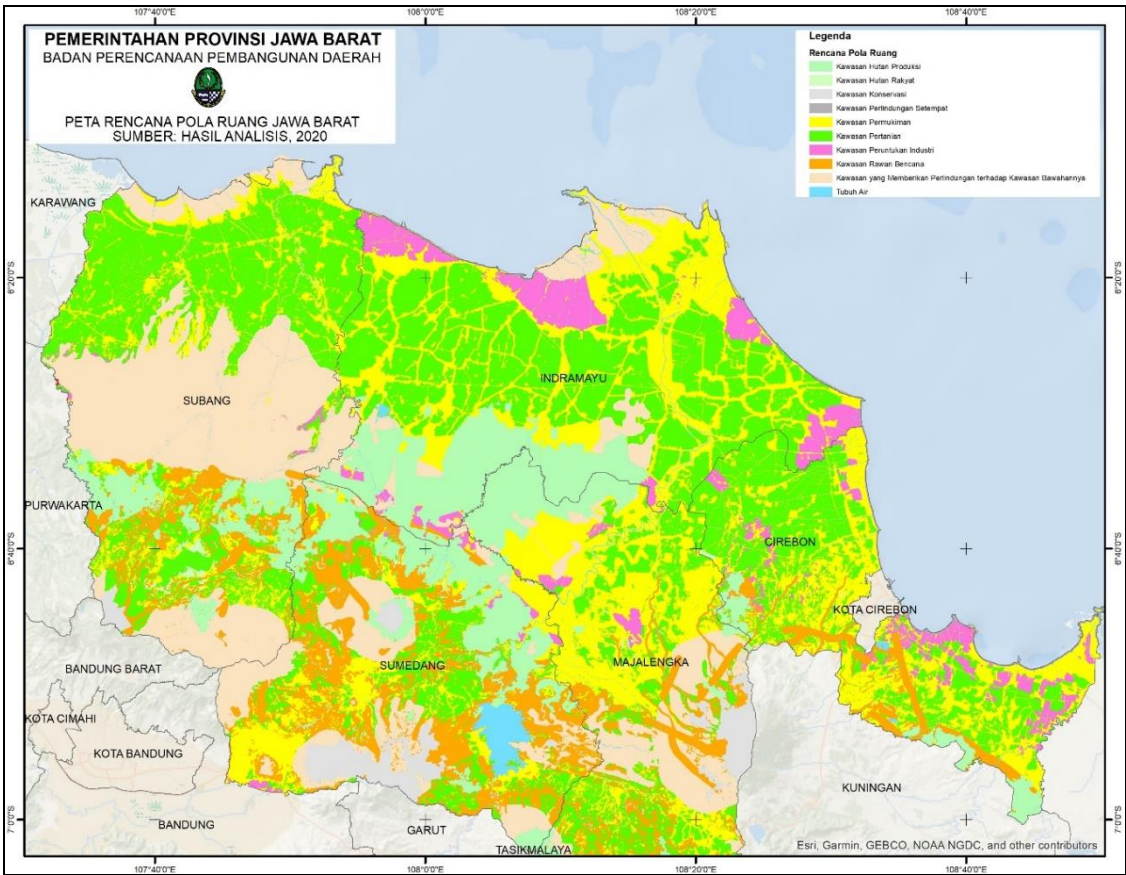
Kemudian, kawasan-kawasan tersebut disesuaikan luasannya agar tidak tumpang tindih dengan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

**3.4 Kondisi Lahan Peruntukan Kawasan Metropolitan REBANA**

Ketujuh kabupaten yang menjadi lingkup Kawasan Metropolitan REBANA ini berada di bagian utara atau masuk dalam Wilayah Pengembangan Purwasuka dan Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning.

Kawasan ini memiliki kondisi topografi yang cukup landai berkisar 0-50m dari permukaan laut.

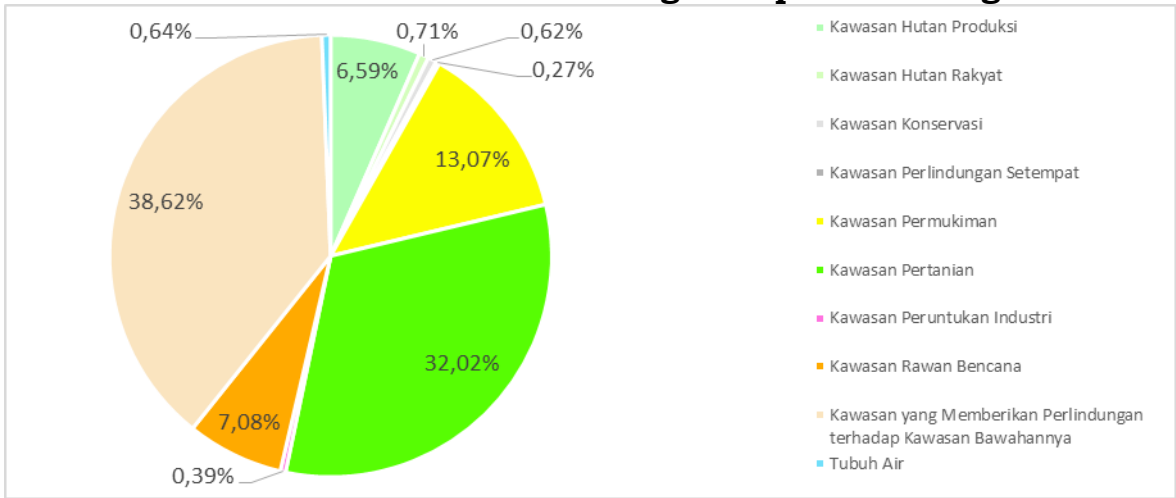
**Gambar 3.55 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Metropolitan REBANA Berdasarkan Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Subang berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 10 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Subang adalah rencana pola ruang Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan luas 84.159,88 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Perlindungan Setempat sebesar 578,14 Ha.

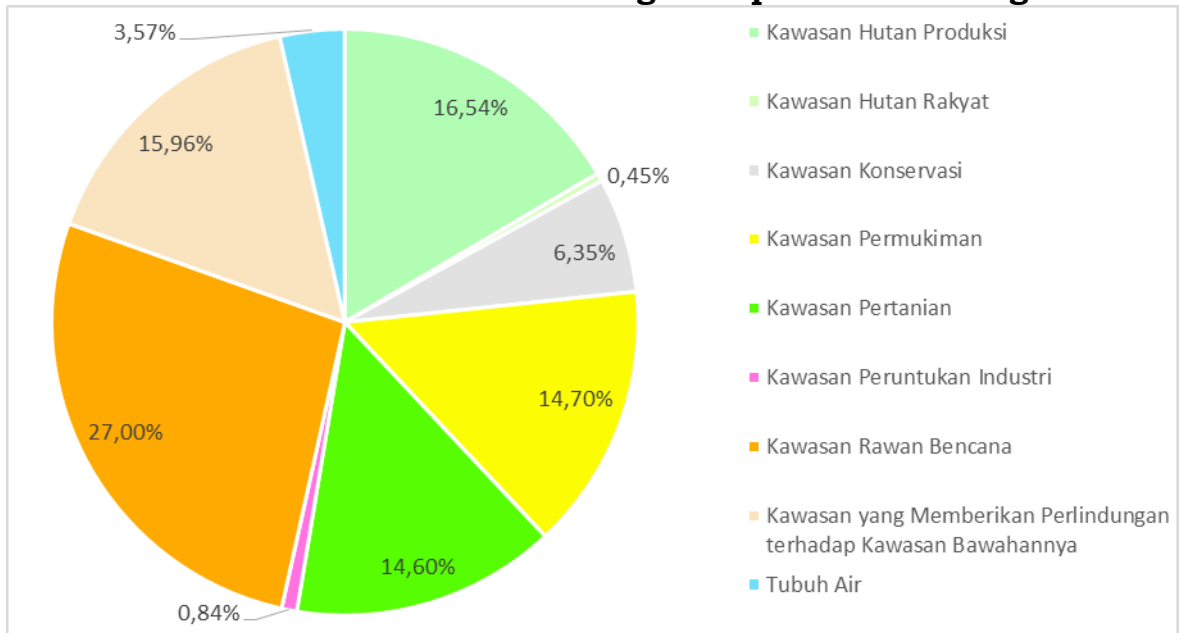
**Gambar 3.56 Luas Pola Ruang Kabupaten Subang**



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Sumedang berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 9 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Sumedang adalah rencana pola ruang Kawasan Rawan Bencana dengan luas 42.362,91 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Hutan Rakyat sebesar 703,61 Ha.

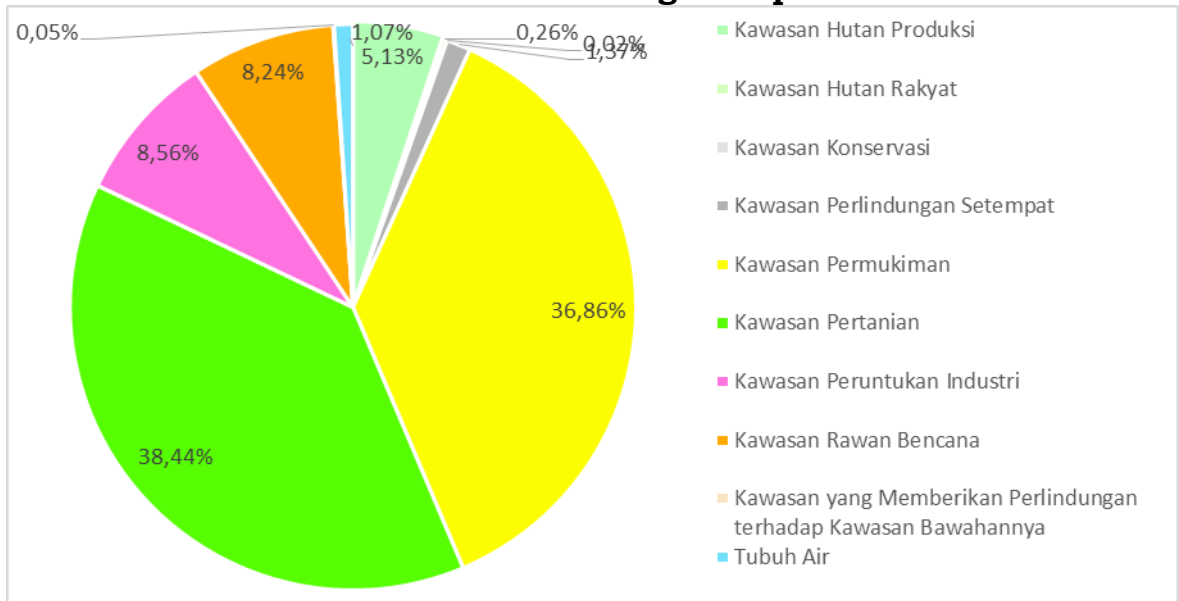
Gambar 3.57 Luas Pola Ruang Kabupaten Sumedang



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Cirebon berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 10 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Cirebon adalah rencana pola ruang Kawasan Pertanian dengan luas 41.463,36 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Konservasi sebesar 17,77 Ha.

Gambar 3.58 Luas Pola Ruang Kabupaten Cirebon

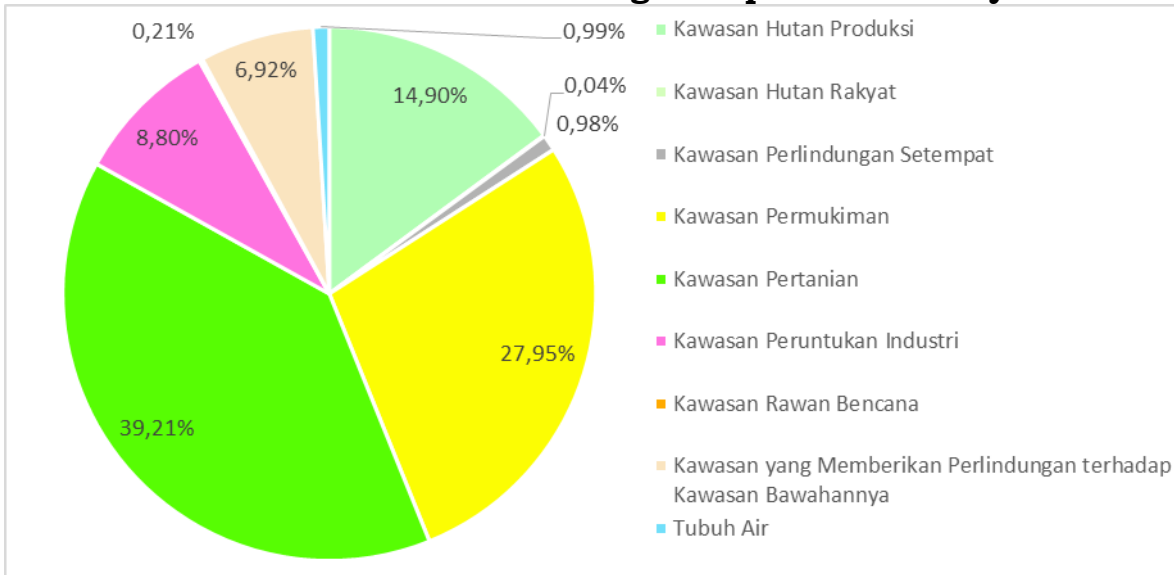


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Indramayu berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 9 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Indramayu adalah

rencana pola ruang Kawasan Pertanian dengan luas 82.177,47 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Hutan sebesar 85,58 Ha.

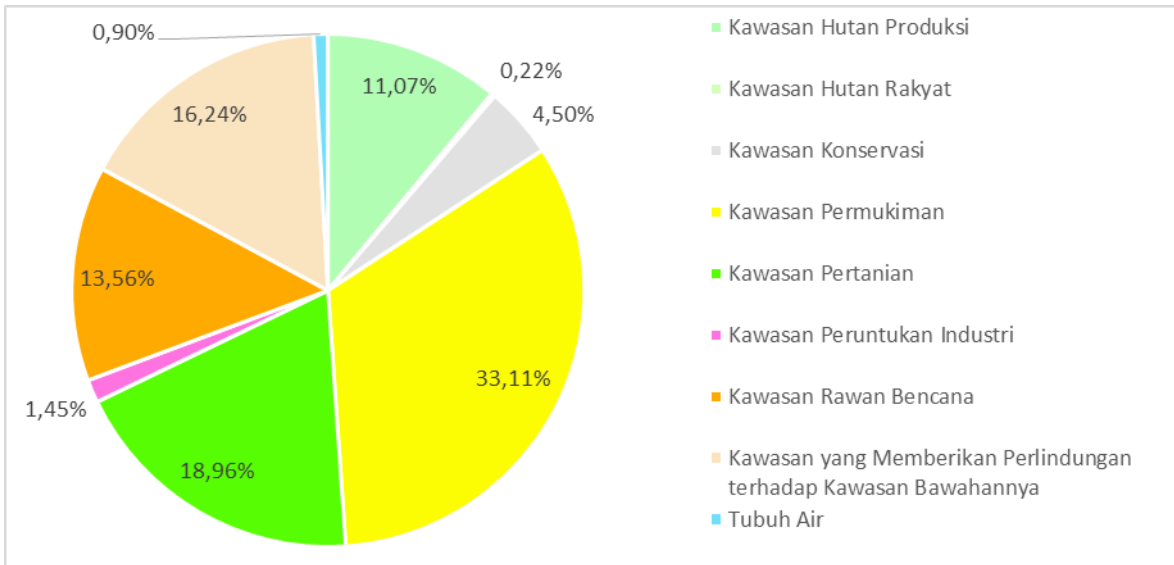
**Gambar 3.59 Luas Pola Ruang Kabupaten Indramayu**



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 9 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Majalengka adalah rencana pola ruang Kawasan Permukiman dengan luas 44.149,53 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Hutan Rakyat sebesar 288,68 Ha.

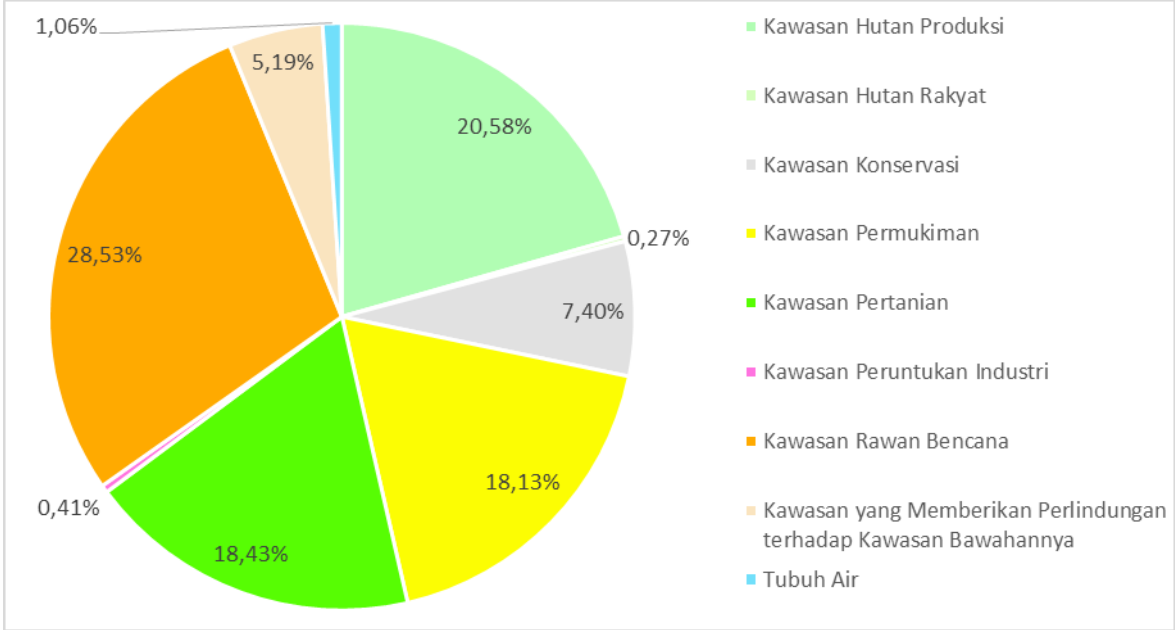
**Gambar 3.60 Luas Pola Ruang Kabupaten Majalengka**



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Kuningan berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 9 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kabupaten Kuningan adalah rencana pola ruang Kawasan Rawan Bencana dengan luas 34.134,15 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Hutan Rakyat sebesar 327,67 Ha.

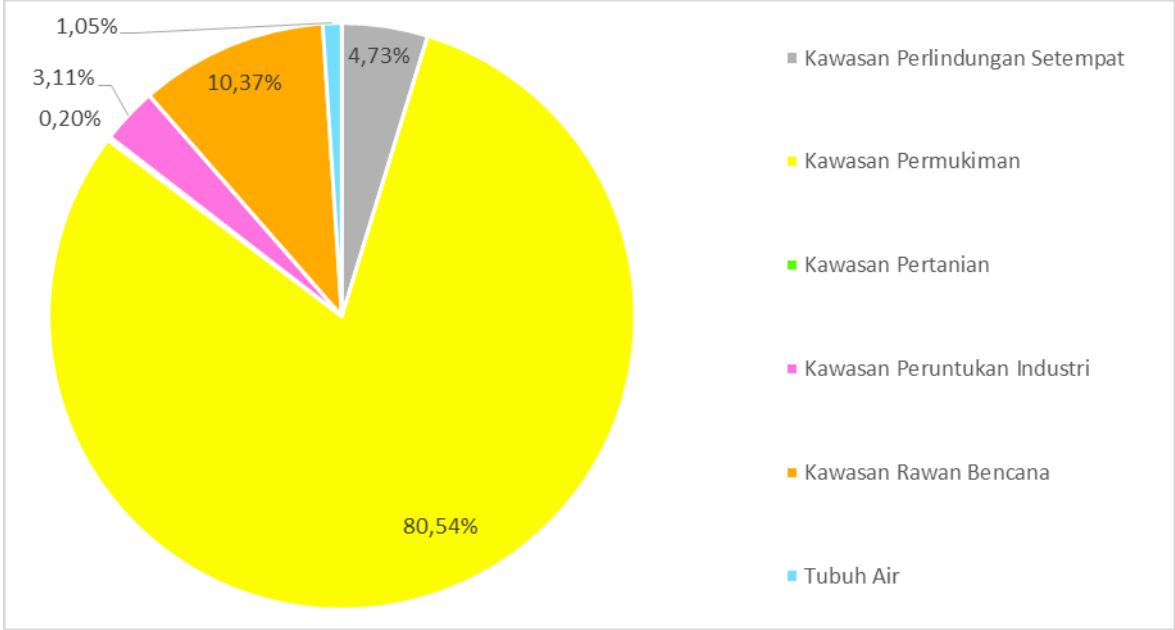
**Gambar 3.61 Luas Pola Ruang Kabupaten Kuningan**



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Rencana Pola Ruang di Kota Cirebon berdasarkan Peta Pola Ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 6 jenis rencana pola ruang. Pola ruang tertinggi di Kota Cirebon adalah rencana pola ruang Kawasan Permukiman dengan luas 3.210,91 Ha. Sedangkan rencana pola ruang terkecil yaitu rencana pola ruang Kawasan Pertanian sebesar 7,86 Ha.

**Gambar 3.62 Luas Pola Ruang Kota Cirebon**



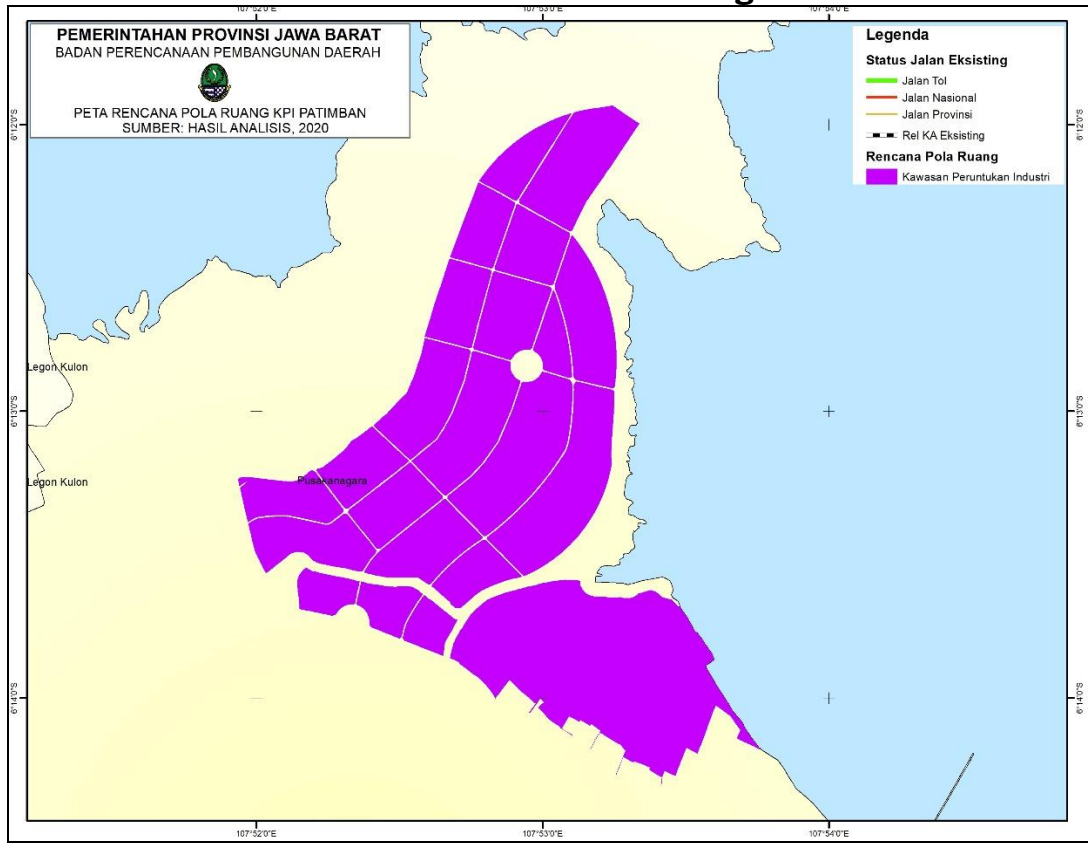
Sumber: Hasil Analisis, 2020

3.4.1 Penggunaan Lahan di KPI Patimban

KPI Patimban merupakan KPI yang terletak di Kecamatan Pusakanagara. KPI Patimban memiliki luas 541,61 ha. Berdasarkan rancangan RDTR Kota Baru Patimban, delineasi tersebut merupakan rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Industri. Rencana pola ruang ini memiliki luas sebesar 541,61 ha. Pola ruang tersebut sesuai untuk dilakukan pengembangan KPI yang berkonsep industri manufaktur, perkapalan, dan logistik. Selain itu, KPI Patimban juga didukung oleh

konektivitas yang memadai seperti adanya pembangunan Tol Cipali – Patimban dan rencana rel kereta api menuju Pelabuhan Patimban.

**Gambar 3.63 Peta Rencana Pola Ruang KPI Patimban**



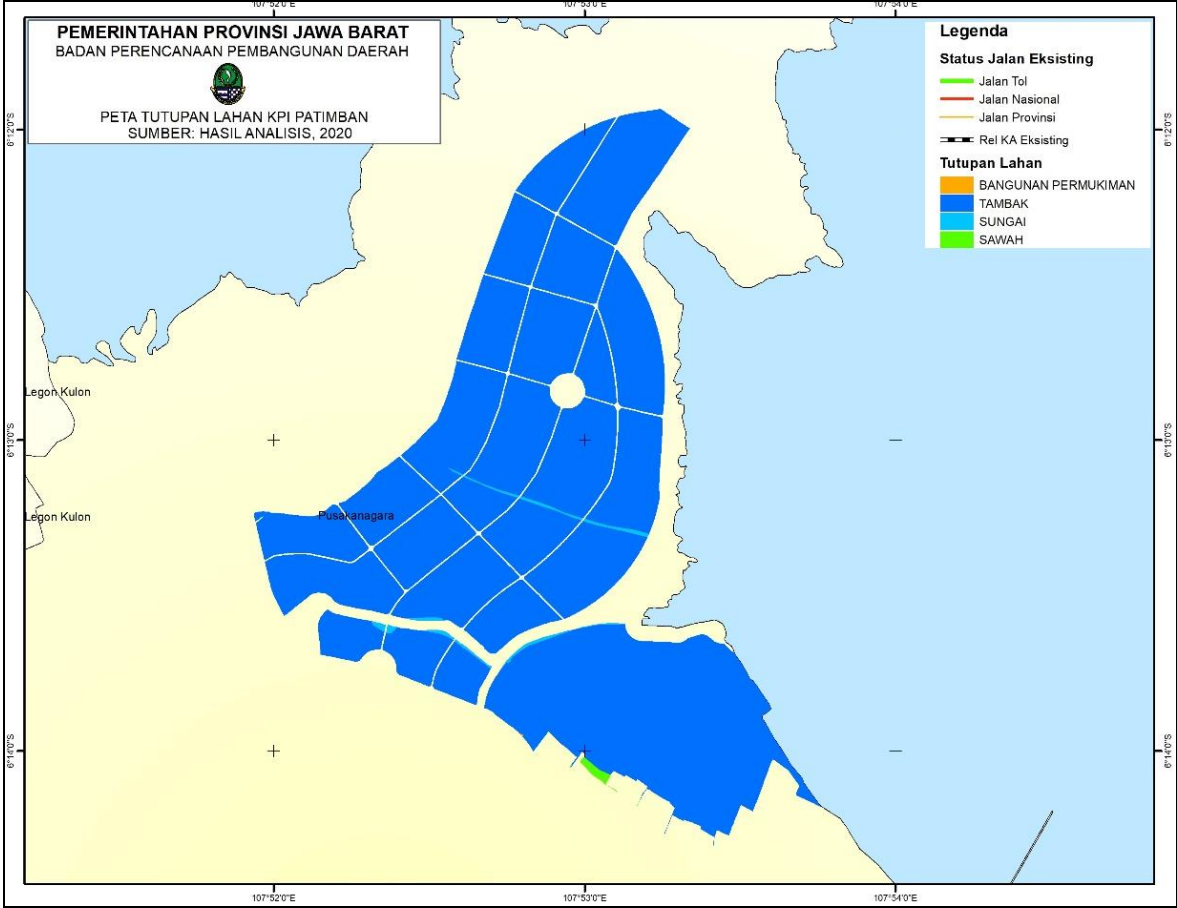
Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RDTR Kota Baru Patimban, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, wilayah delineasi KPI Patimban merupakan wilayah hamparan lahan pertanian dan pertambakan. Penggunaan lahan eksisting di KPI Patimban yaitu:

1. Bangunan permukiman/campuran;
2. Kolam air asin/payau (tambak);
3. Sungai; dan
4. Tanaman semusim lahan basah (sawah).

Pembangunan Pelabuhan Patimban masih dalam tahap konstruksi. Tahapan tersebut direncanakan selesai pada tahun 2021.

Gambar 3.64 Peta Tutupan Lahan KPI Patimban

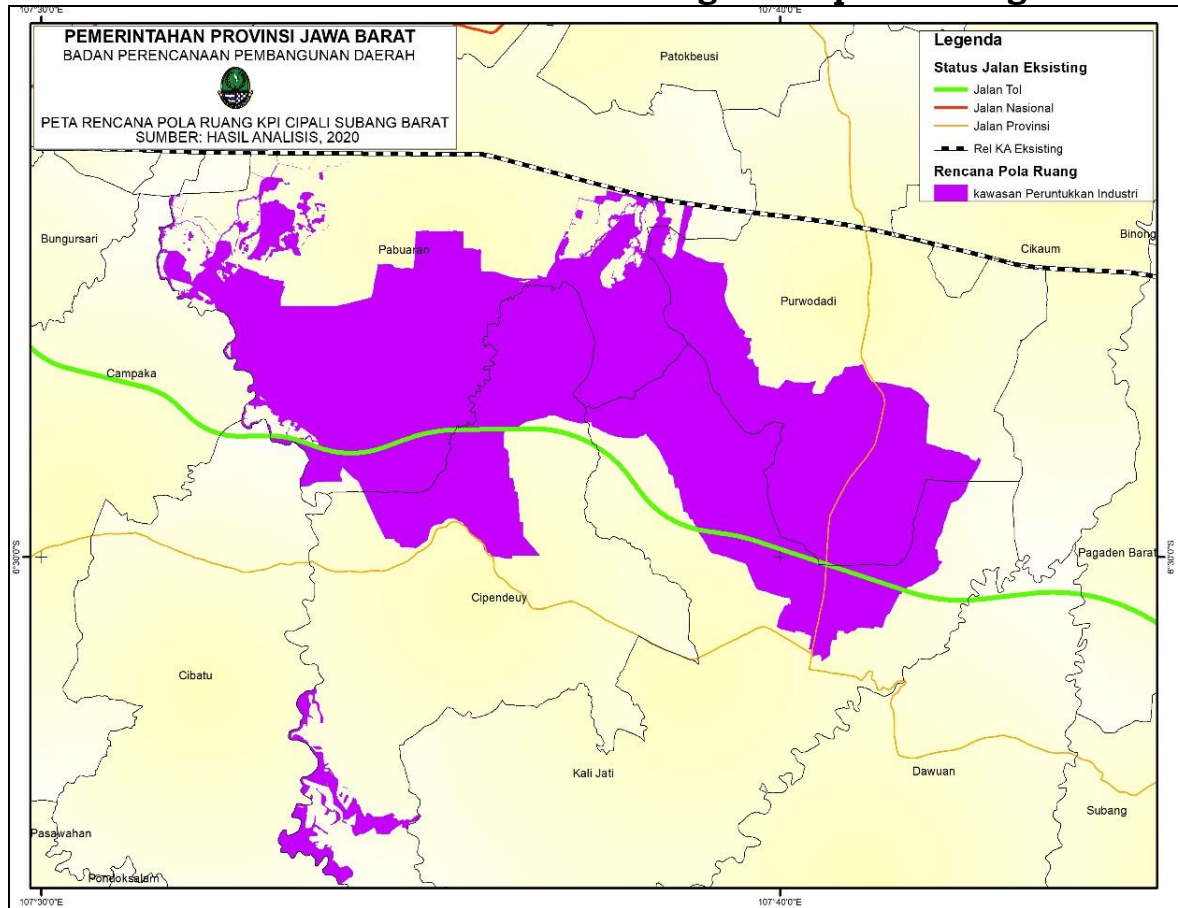


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.2 Penggunaan Lahan di KPI Cipali Subang Barat

KPI Cipali Subang Barat merupakan KPI yang terletak di sekitar Kecamatan Purwadadi dan kecamatan sekitarnya. KPI Cipali Subang Barat memiliki luas 10.407,62 ha. Berdasarkan RTRW Kabupaten Subang tahun 2011 – 2031, rencana pola ruang di KPI Cipali Subang Barat terdiri atas pola ruang Kawasan Peruntukan Industri seluas 10.407,62 ha. Berdasarkan pola ruang di atas, pengembangan kawasan industri yang akan dilakukan harus industri yang tidak memakai banyak air. Industri yang ada juga tidak diperbolehkan memakai air tanah dan harus menggunakan air permukaan.

**Gambar 3.65 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Subang Barat**

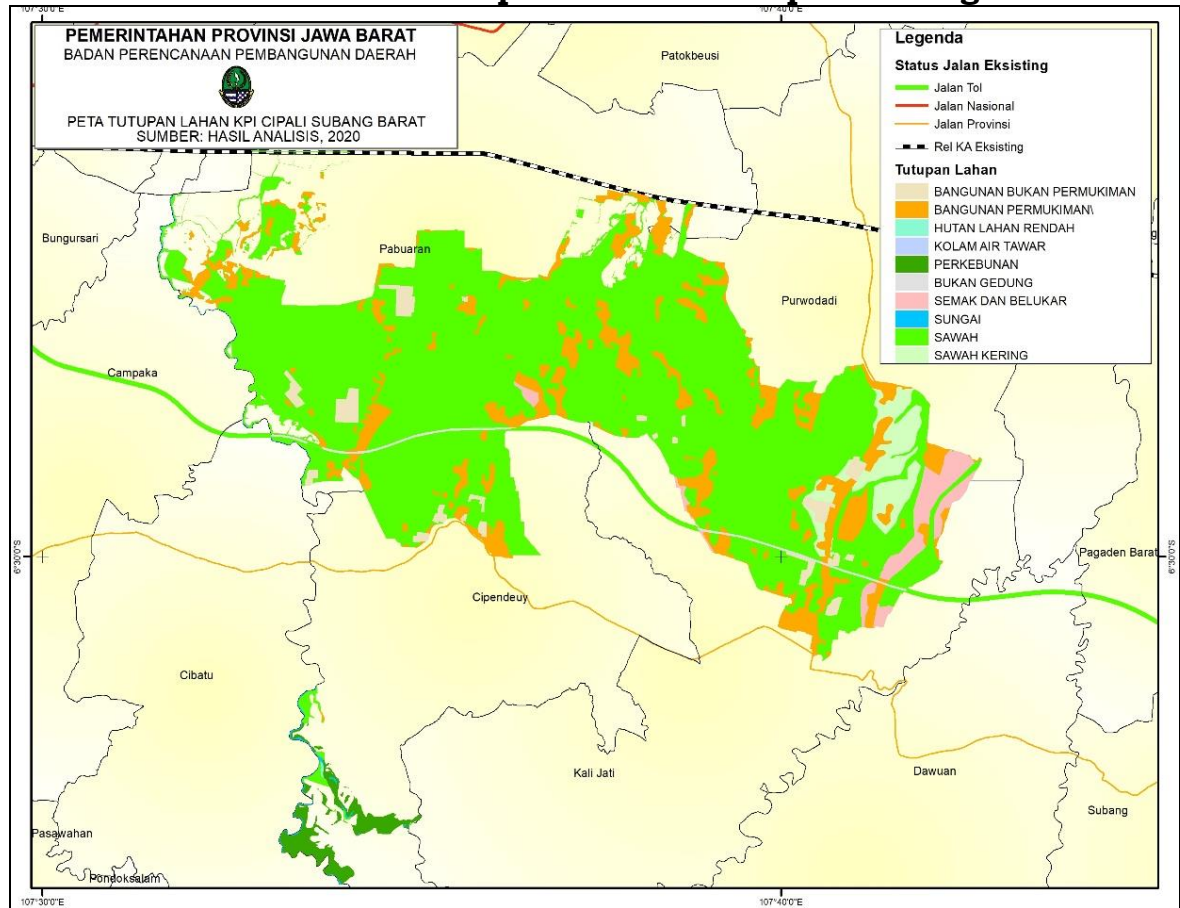


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, Tutupan lahan eksisting yang ada di KPI Cipali Subang Barat ada beberapa macam antara lain:

1. Bangunan bukan permukiman;
2. Bangunan permukiman/campuran;
3. Hutan lahan rendah;
4. Kolam air tawar;
5. Perkebunan dengan tanaman berkayu keras;
6. Permukaan diperkeras bukan gedung;
7. Semak dan belukar;
8. Sungai;
9. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
10. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.66 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Subang Barat

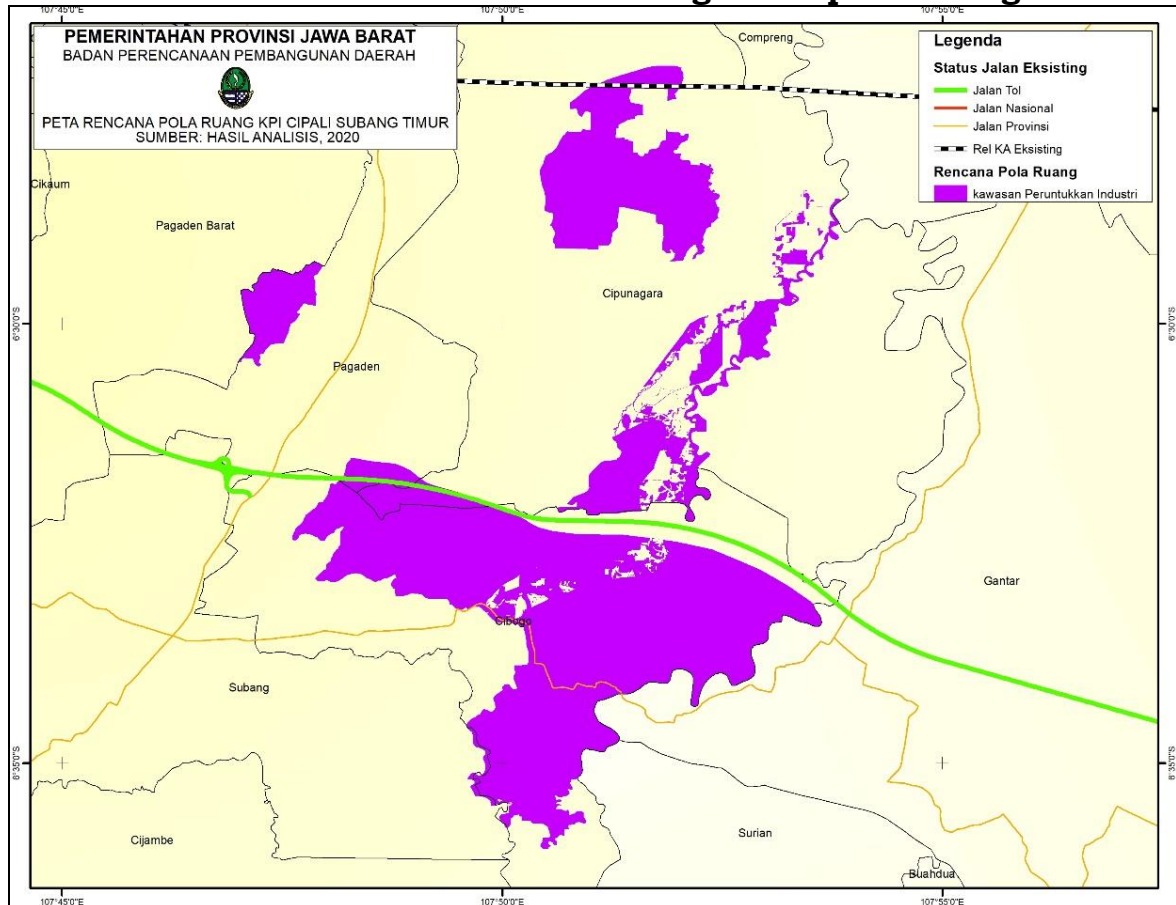


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.3 Penggunaan Lahan di KPI Cipali Subang Timur

KPI Cipali Subang Timur merupakan KPI yang terletak di Kecamatan Cipunagara dan sekitarnya. KPI ini memiliki luas 4.806,25 ha. Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, KPI Cipali Subang Timur memiliki rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Industri seluas 4.806,25 ha. Pengembangan KPI ini harus memperhatikan pemilihan industri yang menggunakan sedikit air.

**Gambar 3.67 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Subang Timur**

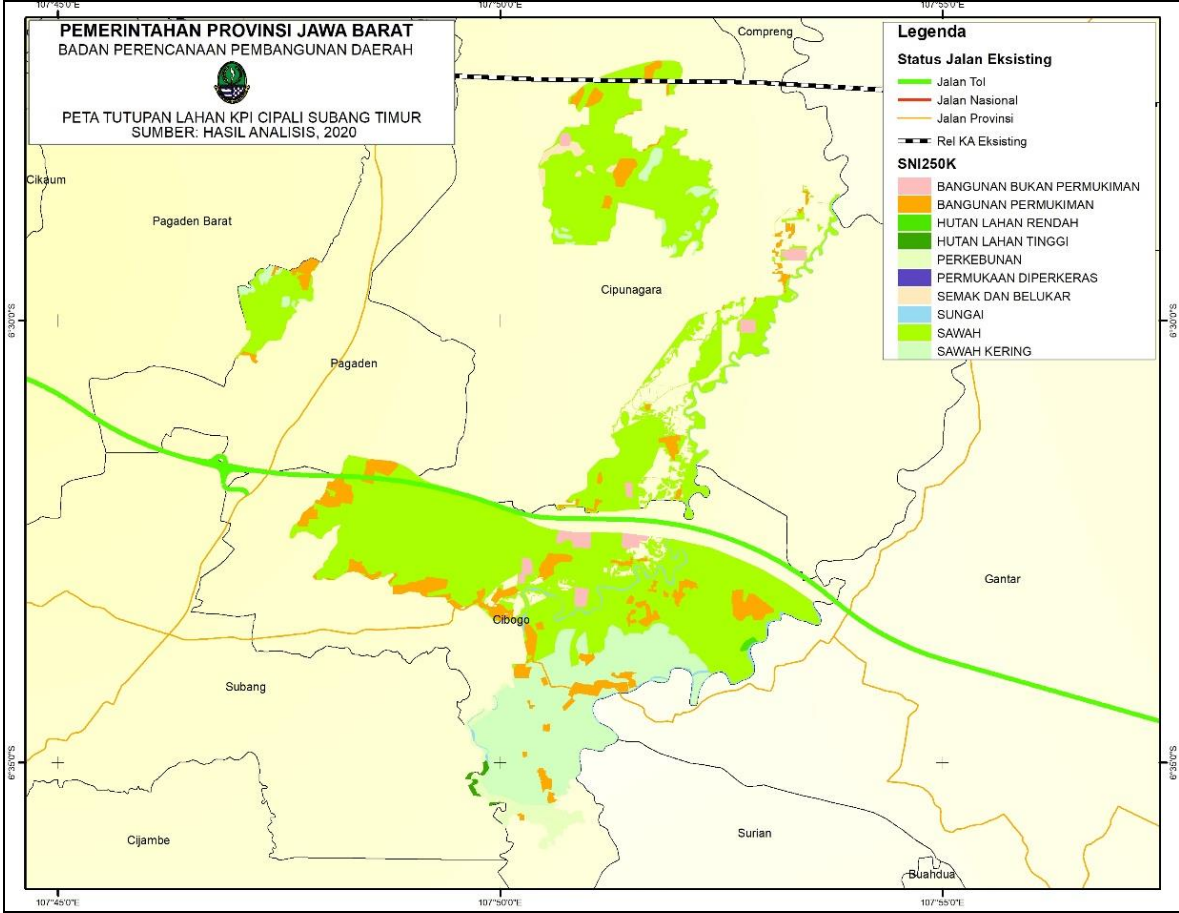


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, Tutupan lahan di KPI Cipali Subang Timur antara lain:

1. Bangunan bukan permukiman;
2. Bangunan permukiman/campuran;
3. Hutan lahan rendah;
4. Hutan lahan tinggi;
5. Perkebunan dengan tanaman berkayu keras;
6. Permukaan diperkeras bukan gedung;
7. Semak dan belukar;
8. Sungai;
9. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
10. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.68 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Subang Timur

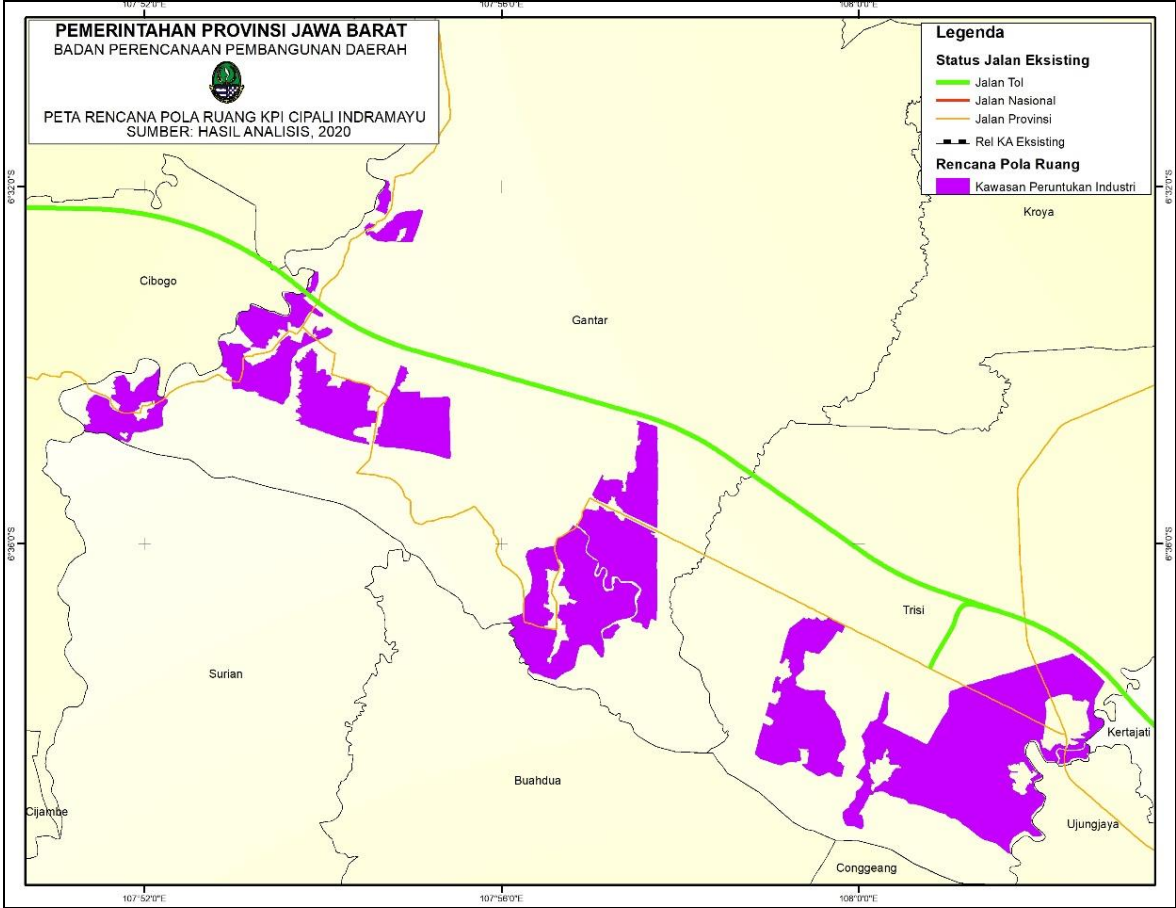


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.4 Penggunaan Lahan di KPI Cipali Indramayu

KPI Cipali Indramayu merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Terisi dan kecamatan disekitarnya. KPI tersebut memiliki luas 2.874,77 ha. Berdasarkan rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, KPI Cipali Indramayu terdiri dari pola ruang Kawasan Peruntukan Industri sebesar 2.874,77 ha. Pengembangan industri di KPI ini diarahkan untuk industri yang menggunakan sedikit air.

**Gambar 3.69 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cipali Indramayu**

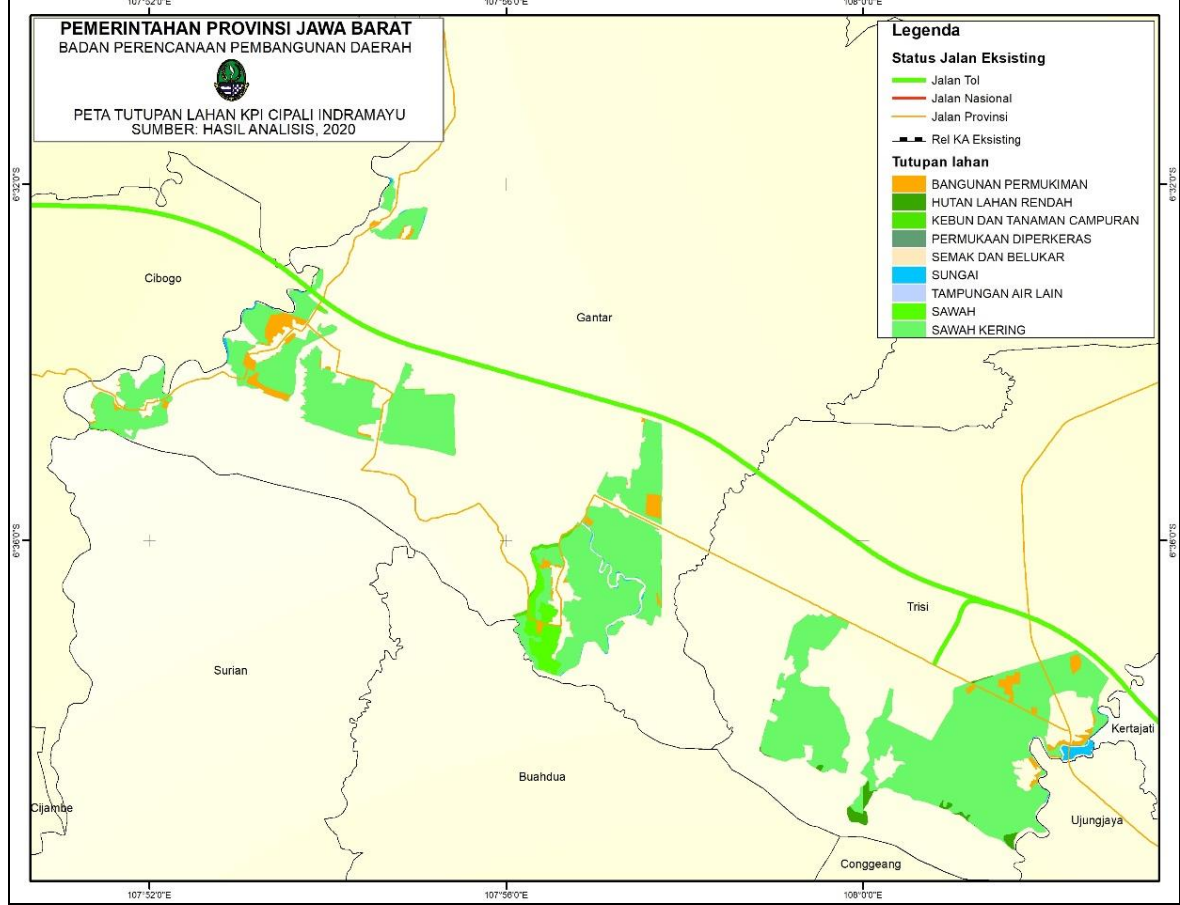


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan di KPI Cipali Indramayu terdiri dari beberapa klasifikasi tutupan lahan antara lain:

1. Bangunan permukiman/campuran;
2. Hutan lahan rendah;
3. Kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim);
4. Permukaan diperkeras bukan gedung;
5. Semak dan belukar;
6. Sungai;
7. Tampungan air lain;
8. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
9. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.70 Peta Tutupan Lahan KPI Cipali Indramayu

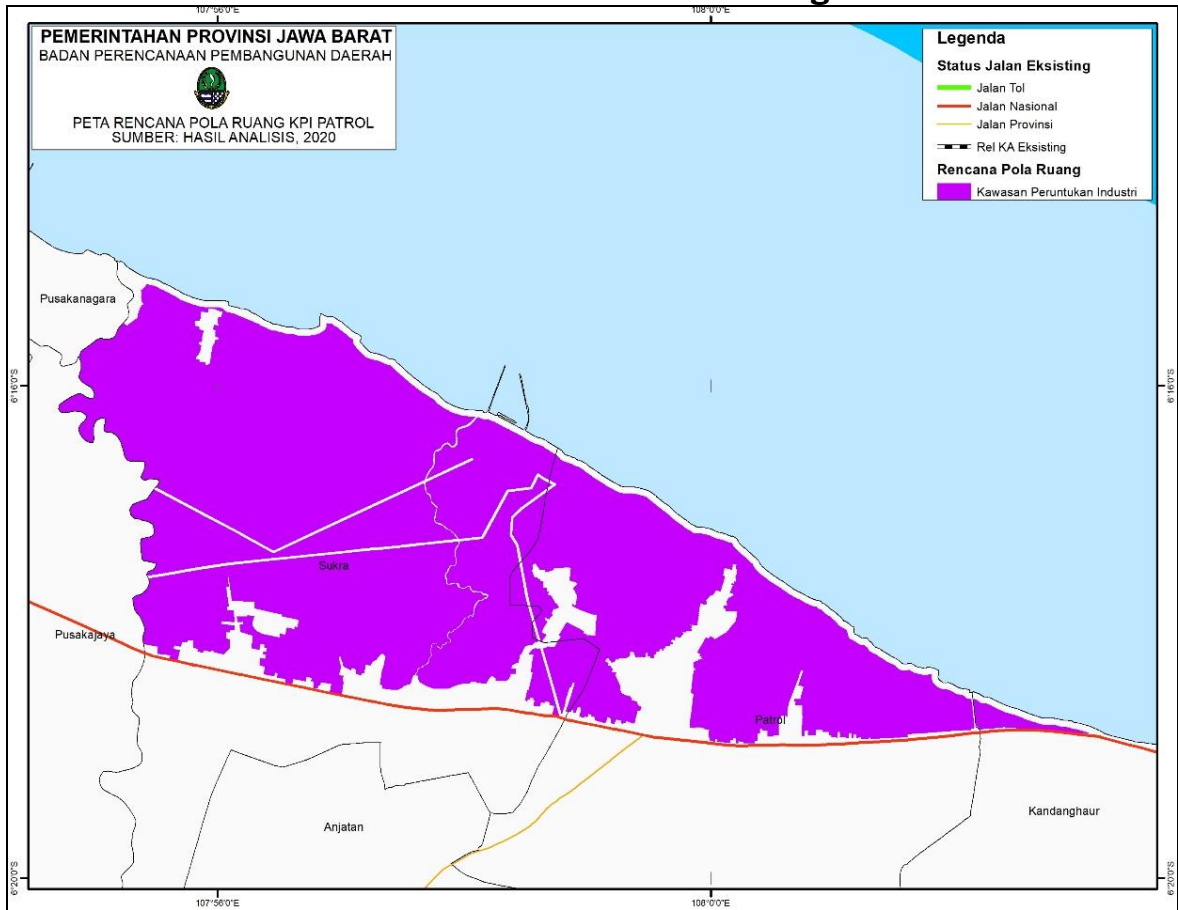


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.5 Penggunaan Lahan di KPI Patrol

KPI Patrol merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Patrol dan sekitarnya. KPI ini memiliki luas sebesar 4.140,82 ha. Dalam rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, KPI Patrol memiliki rencana pola ruang berupa Kawasan Peruntukan Industri sebesar 4.140,82 ha. Pengembangan kawasan industri di KPI Patrol bisa dimaksimalkan karena KPI ini tidak memiliki limitasi apapun dari penggunaan lahannya. KPI Patrol juga diuntungkan karena adanya pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanagara yang terletak di sebelah Kecamatan Patrol.

Gambar 3.71 Peta Rencana Pola Ruang KPI Patrol

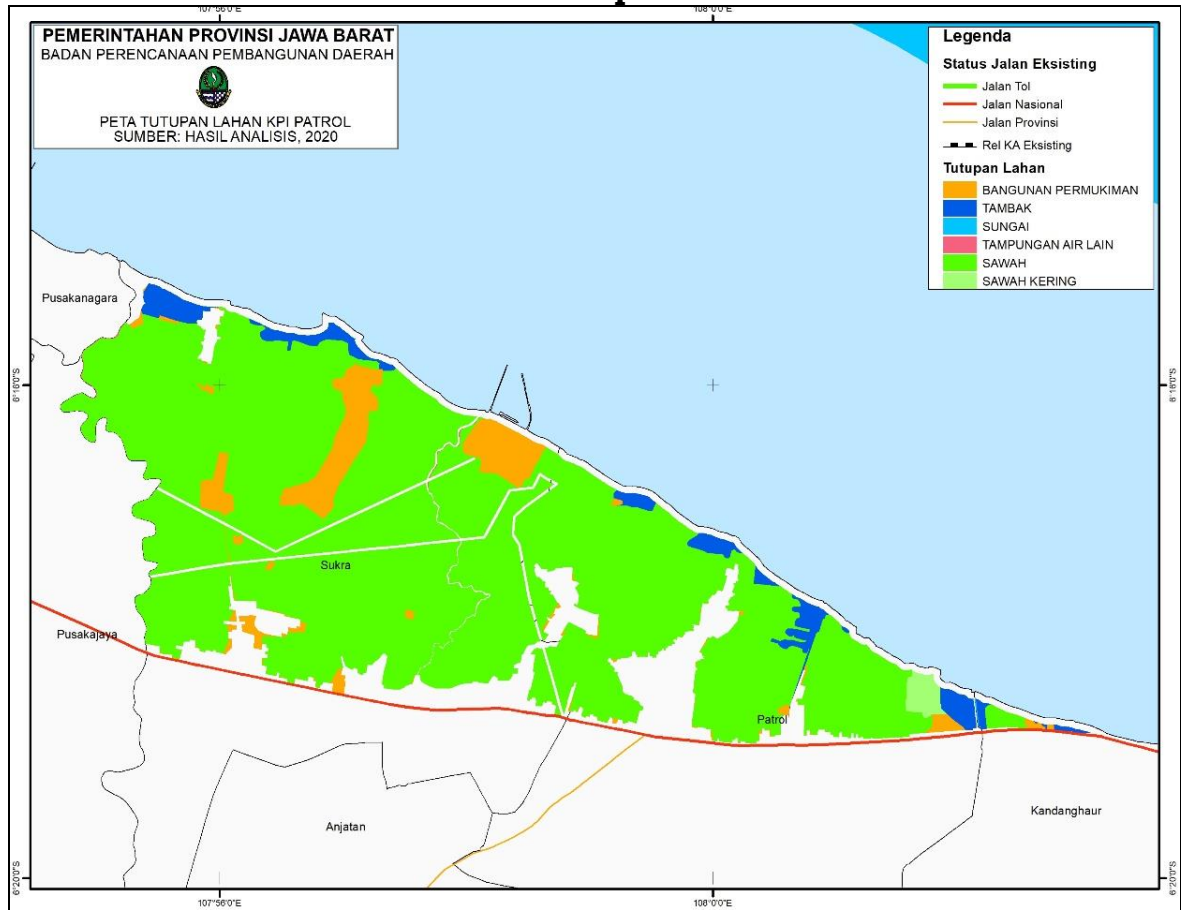


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Patrol memiliki beberapa klasifikasi antara lain:

1. Bangunan permukiman/campuran;
2. Kolam air asin/payau (tambak);
3. Sungai;
4. Tampung air lain;
5. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
6. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.72 Peta Tutupan Lahan KPI Patrol

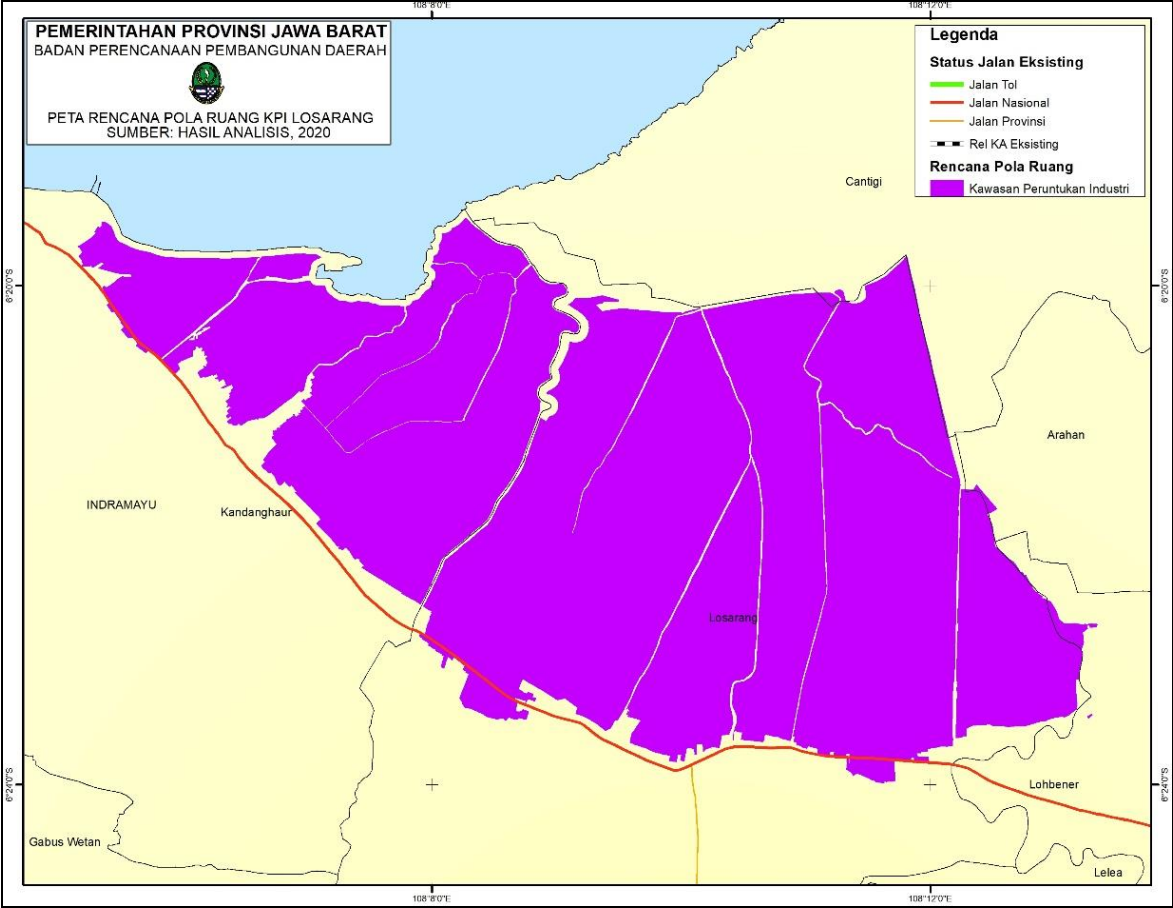


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.6 Penggunaan Lahan di KPI Losarang

KPI Losarang merupakan KPI yang terletak di Kecamatan Losarang dan sekitarnya, Kabupaten Indramayu. KPI ini memiliki luas sebesar 6.710,08 ha. Berdasarkan rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, KPI Losarang memiliki rencana pola ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri. Luas pola ruang ini adalah 6.710,08 ha. KPI losarang bisa digunakan sebagai kawasan industri yang memiliki bermacam-macam industri didalamnya. Industri yang diarahkan di KPI ini adalah industri di sektor perikanan karena potensinya yang besar di KPI ini.

**Gambar 3.73 Peta Rencana Pola Ruang KPI Losarang**

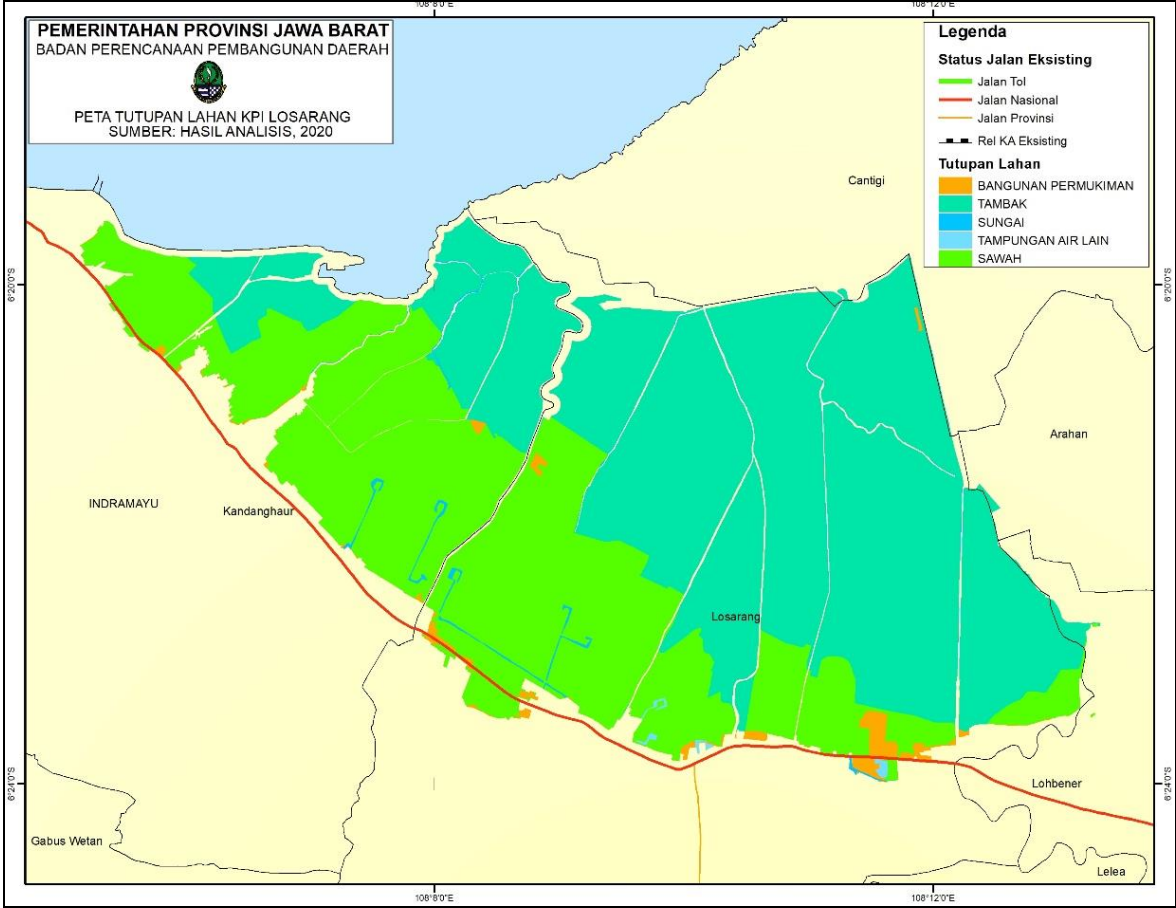


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, KPI Losarang memiliki beberapa kategori tutupan lahan antara lain:

- 1. Bangunan permukiman/campuran;
- 2. Kolam air asin/payau (tambak);
- 3. Sungai;
- 4. Tampungan air lain; dan
- 5. Tanaman semusim lahan basah (sawah).

Gambar 3.74 Peta Tutupan Lahan KPI Losarang

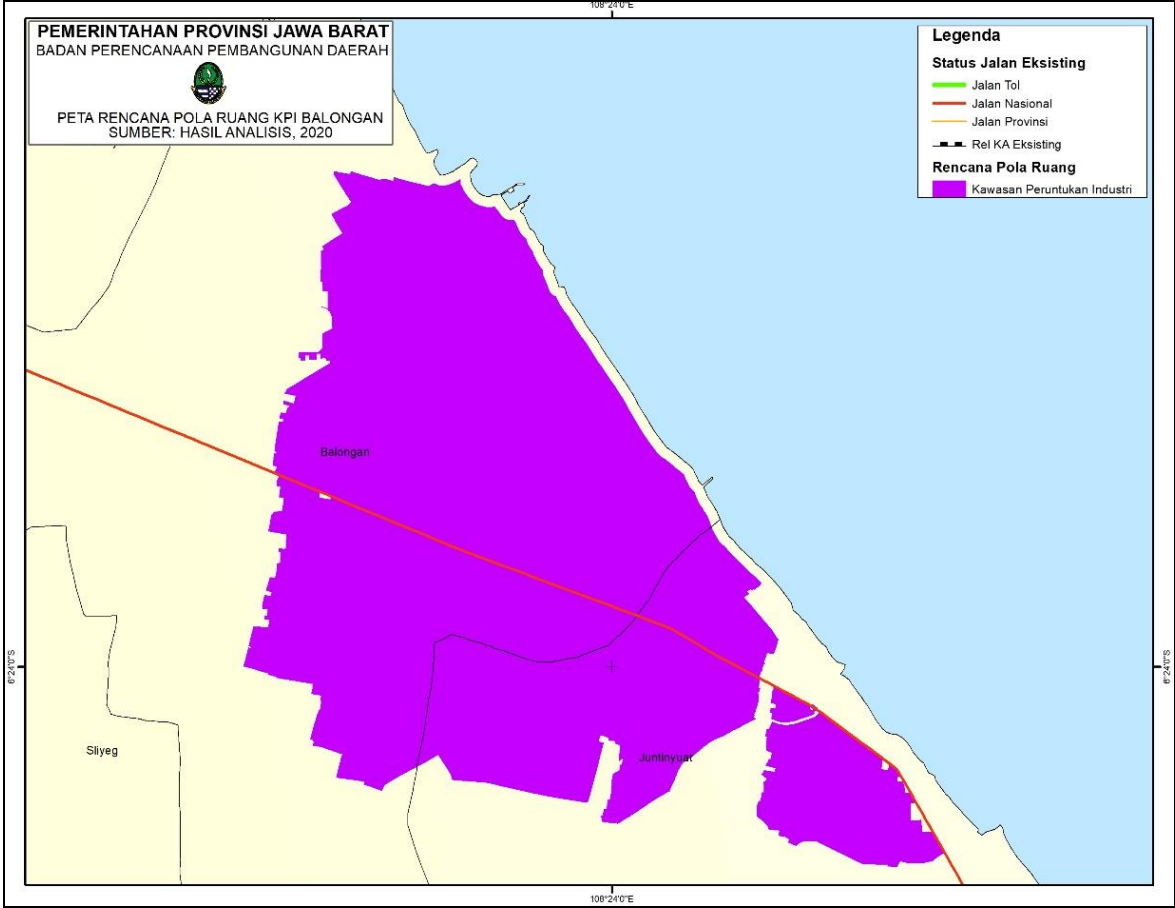


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.7 Penggunaan Lahan di KPI Balongan

KPI Balongan merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Balongan dan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. KPI ini memiliki luas 2.122,06 ha. Ditinjau dari rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, pola ruang di KPI Balongan yaitu Kawasan Peruntukan Industri sebesar 2.122,06 ha. Pengembangan industri di KPI Balongan difokuskan ke sektor migas dikarenakan potensi kecamatan tersebut.

Gambar 3.75 Peta Rencana Pola Ruang KPI Balongan

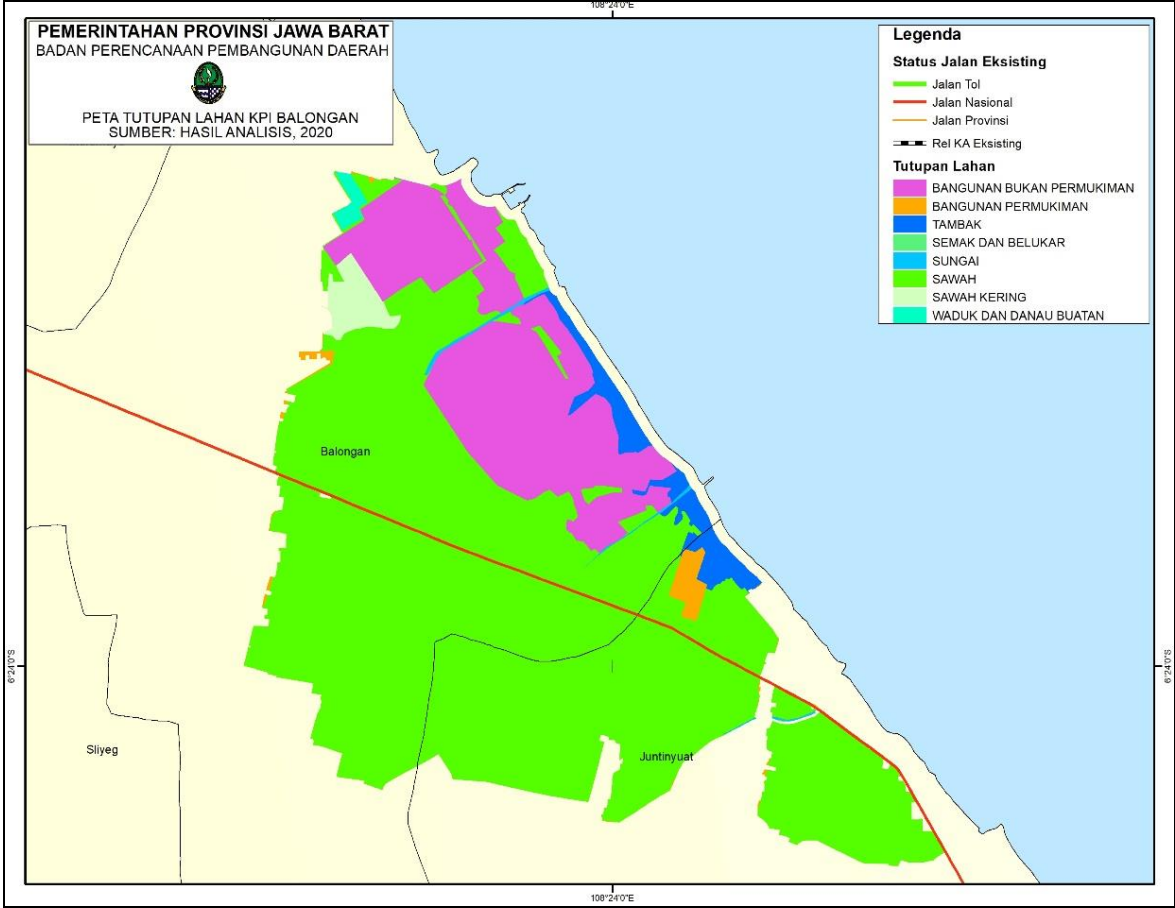


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Balongan ada beberapa klasifikasi yaitu:

1. Bangunan bukan permukiman
2. Bangunan permukiman/campuran
3. Kolam air asin/payau (tambak)
4. Semak dan belukar
5. Sungai
6. Tanaman semusim lahan basah (sawah)
7. Tanaman semusim lahan kering
8. Waduk dan danau buatan

Gambar 3.76 Peta Tutupan Lahan KPI Balongan

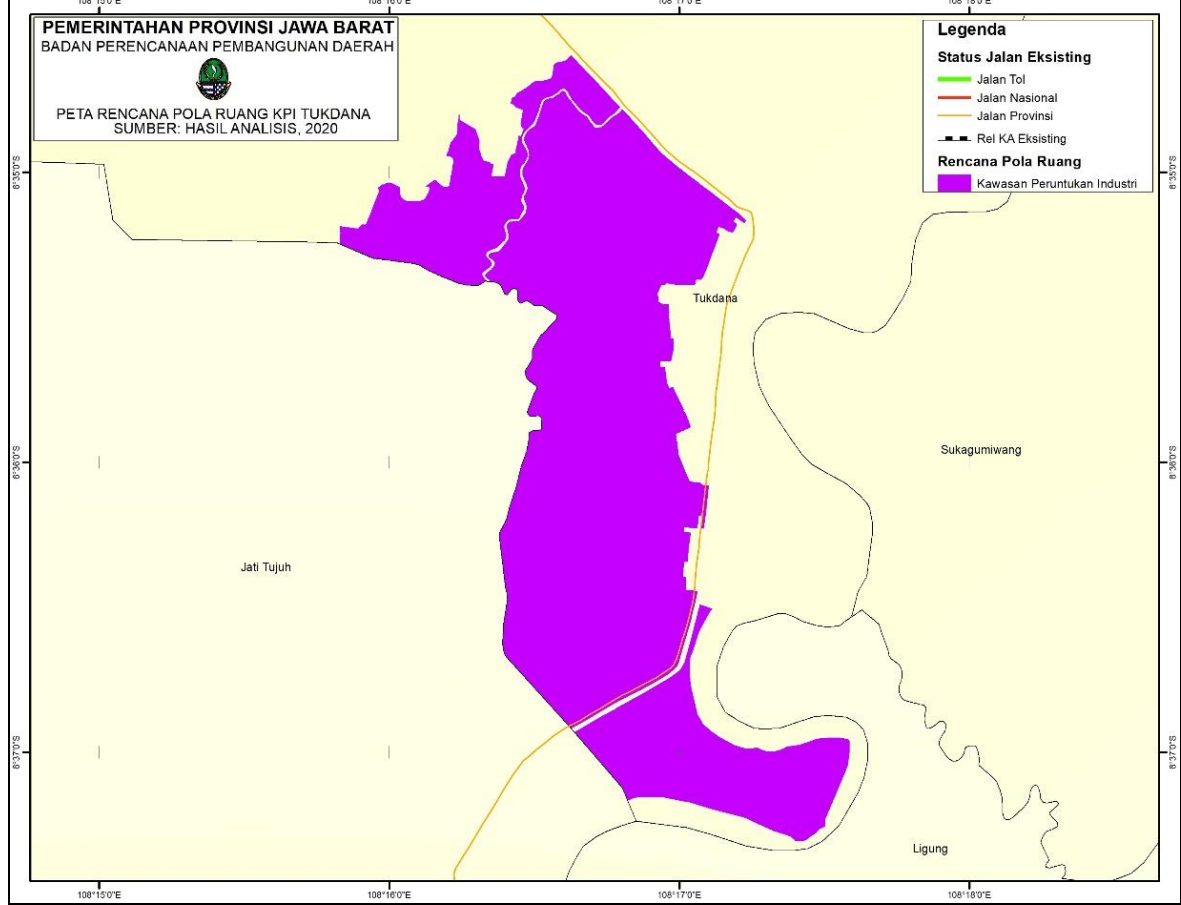


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.8 Penggunaan Lahan di KPI Tukdana

KPI Tukdana merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. KPI ini memiliki luas 563,04 ha. Menurut rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, pola ruang yang direncanakan di KPI Tukdana adalah Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 563,04 ha. KPI tersebut dikembangkan dengan berbagai macam cara. Di KPI ini juga tidak ada lahan yang memiliki limitasi.

**Gambar 3.77 Peta Rencana Pola Ruang KPI Tukdana**



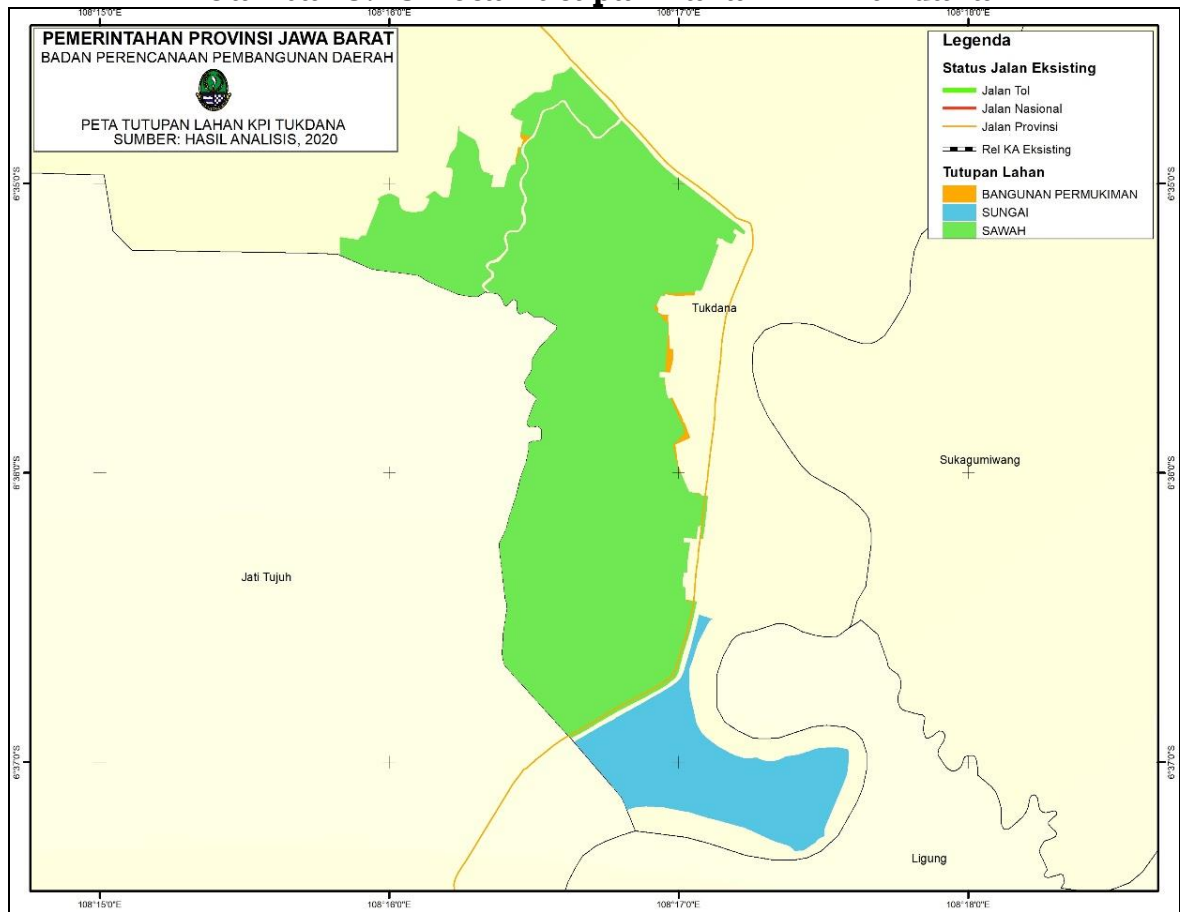
Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Tukdana juga terbagi menjadi:

1. Bangunan permukiman/campuran;
2. Sungai; dan
3. Tanaman semusim lahan basah (sawah).

KPI Tukdana memiliki potensi yang besar untuk dijadikan kawasan industri karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati.

Gambar 3.78 Peta Tutupan Lahan KPI Tukdana

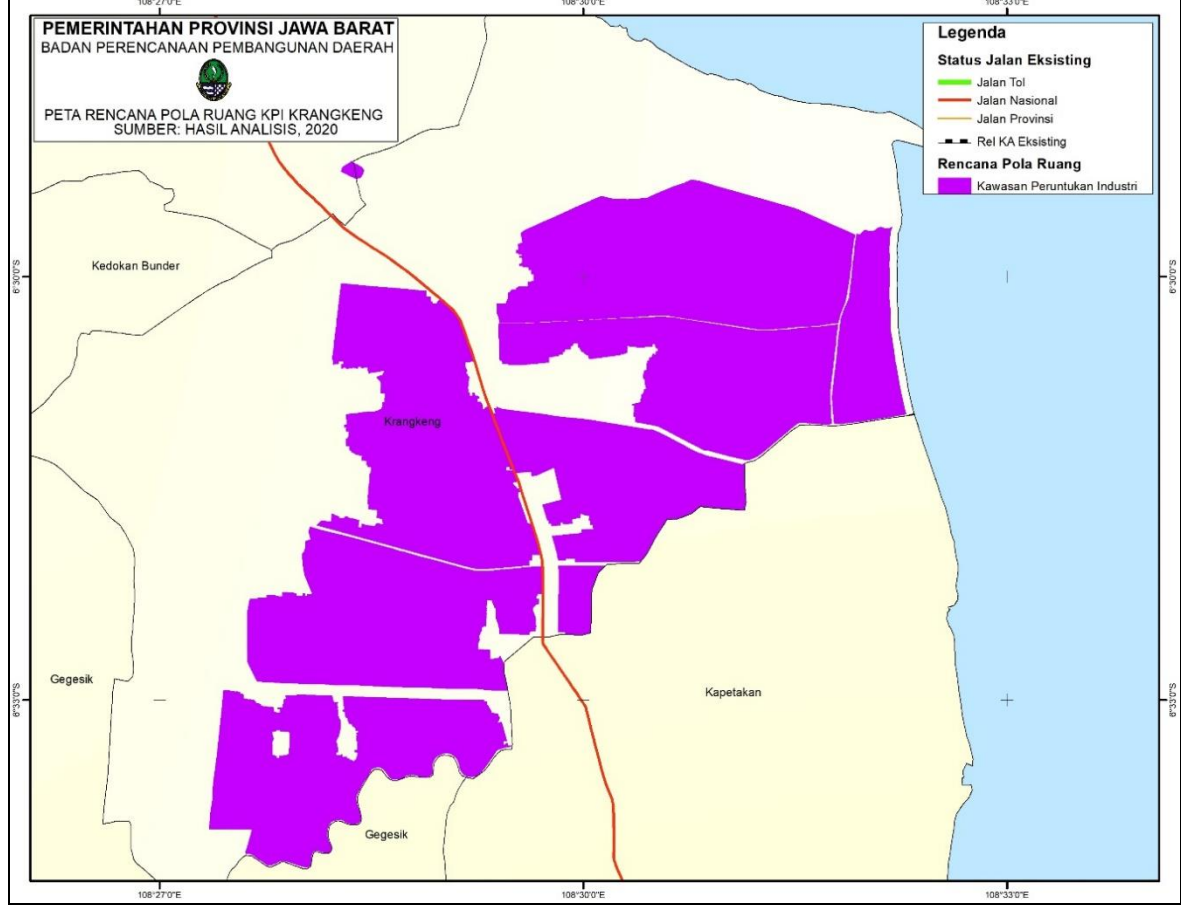


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.9 Penggunaan Lahan di KPI Krangkeng

KPI Tukdana merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. KPI ini memiliki luas 3.452,39 ha. Menurut rencana pola ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, pola ruang yang direncanakan di KPI Krangkeng adalah Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 3.452,39 ha.

**Gambar 3.79 Peta Rencana Pola Ruang KPI Krangkeng**

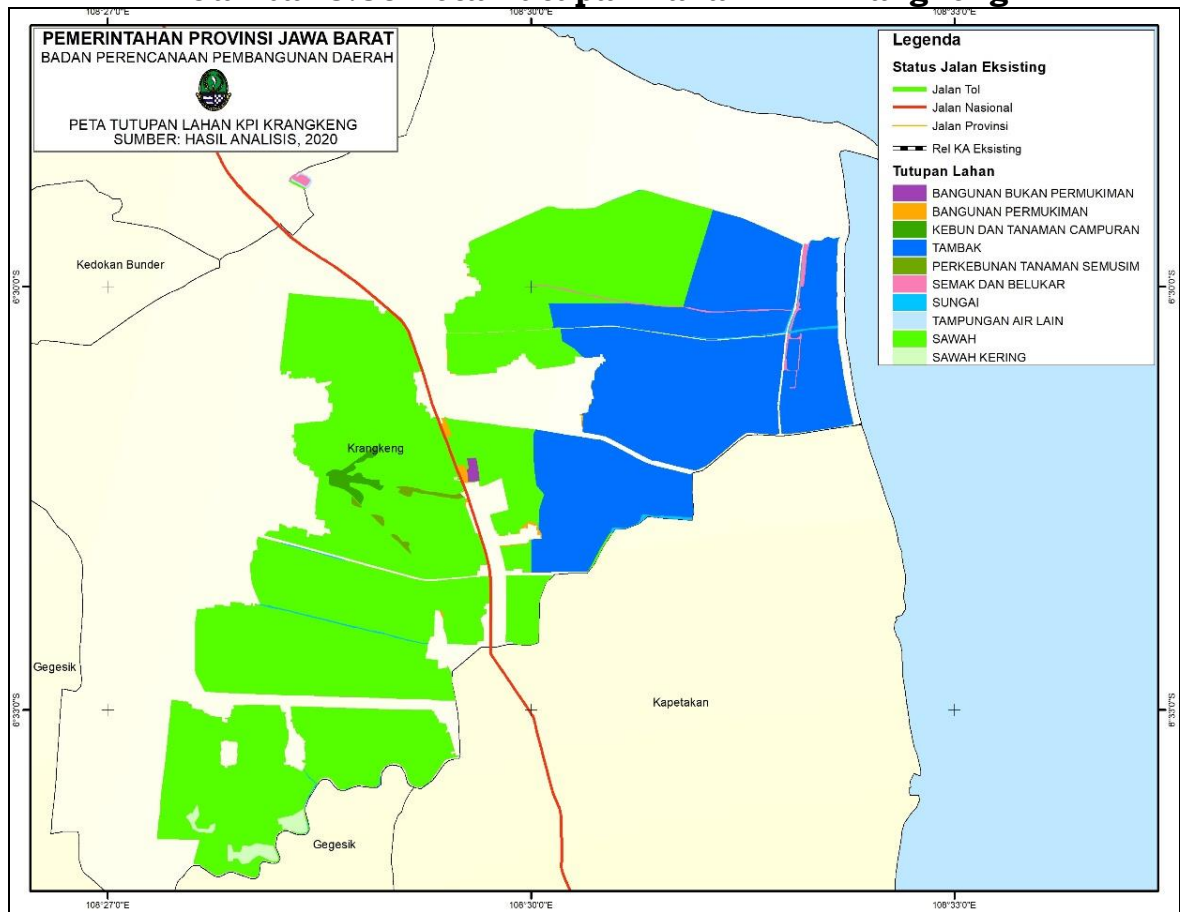


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Indramayu, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Krangkeng juga terbagi menjadi:

- 1. Bangunan bukan permukiman;
- 2. Bangunan permukiman/campuran;
- 3. Kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim);
- 4. Kolam air asin/payau (tambak);
- 5. Perkebunan tanaman semusim;
- 6. Semak dan belukar;
- 7. Sungai;
- 8. Tampungan air lain;
- 9. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
- 10. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.80 Peta Tutupan Lahan KPI Krangkeng

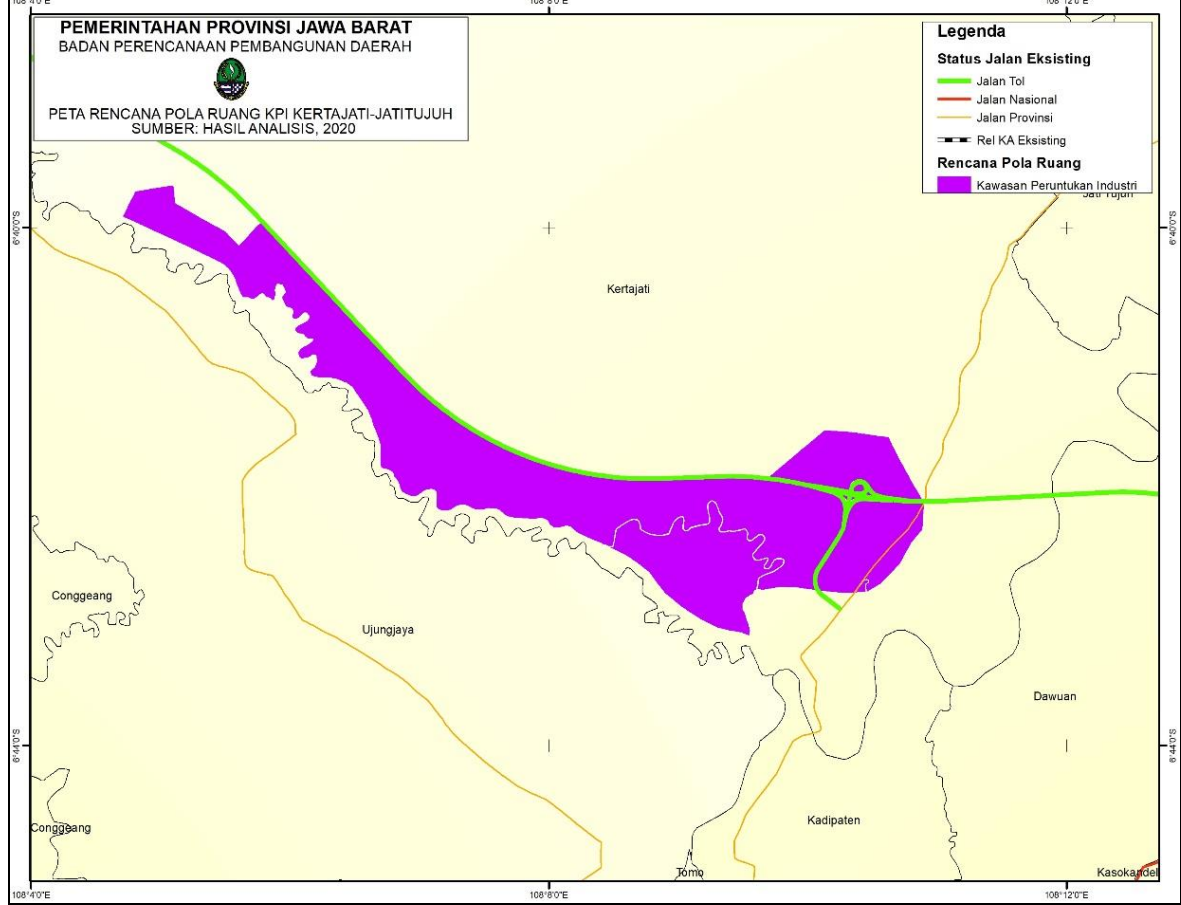


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.10 Penggunaan Lahan di KPI Kertajati-Jatitujuh

KPI Kertajati-Jatitujuh berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. KPI ini memiliki luas total 1.415,20 ha. Berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031, KPI Kertajati-Jatitujuh memiliki rencana pola ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri sebesar 1.415,20 ha.

**Gambar 3.81 Peta Rencana Pola Ruang KPI Kertajati-Jatitujuh**

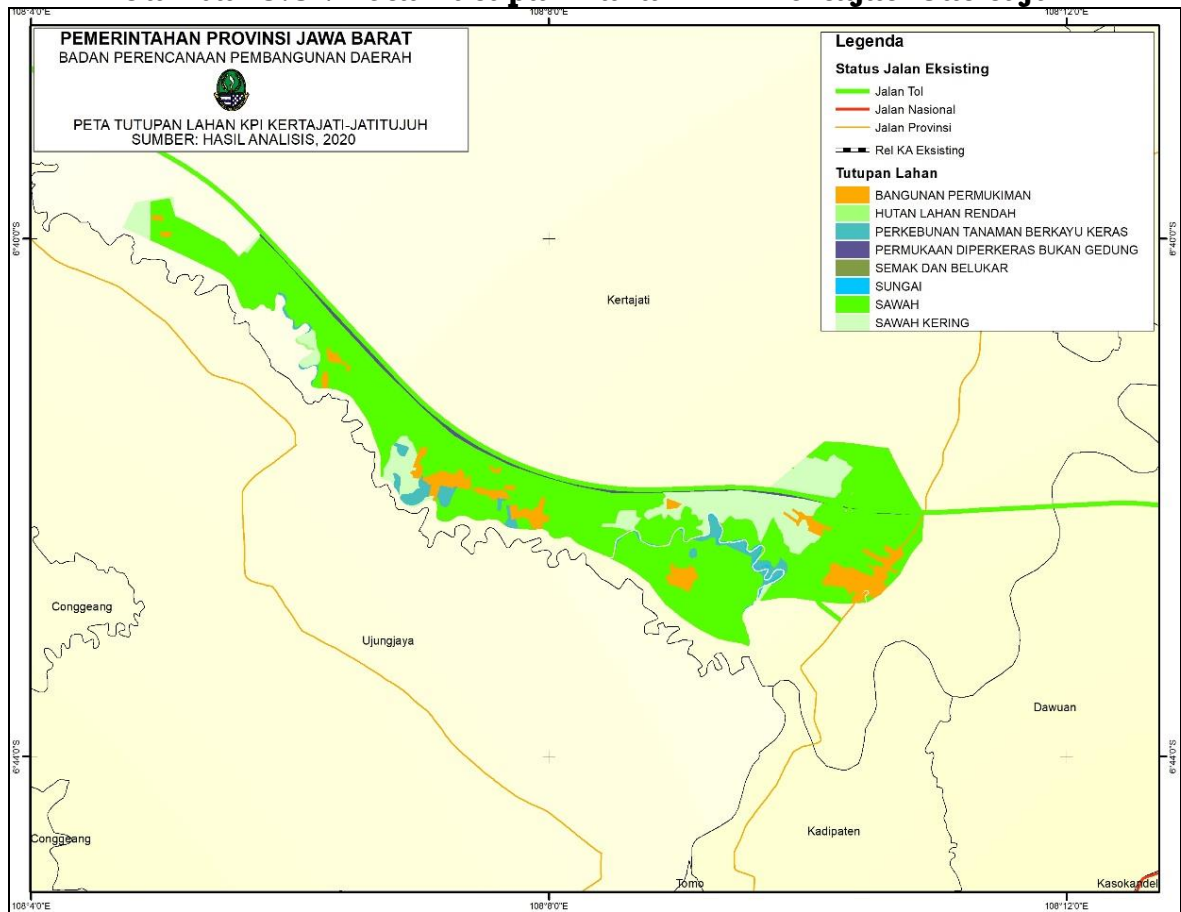


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan di KPI Kertajati-Jatitujuh dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain:

- 1. Bangunan permukiman/campuran;
- 2. Hutan lahan rendah;
- 3. Perkebunan dengan tanaman berkayu keras;
- 4. Permukaan diperkeras bukan gedung;
- 5. Semak dan belukar;
- 6. Sungai;
- 7. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
- 8. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.82 Peta Tutupan Lahan KPI Kertajati-Jatitujuh

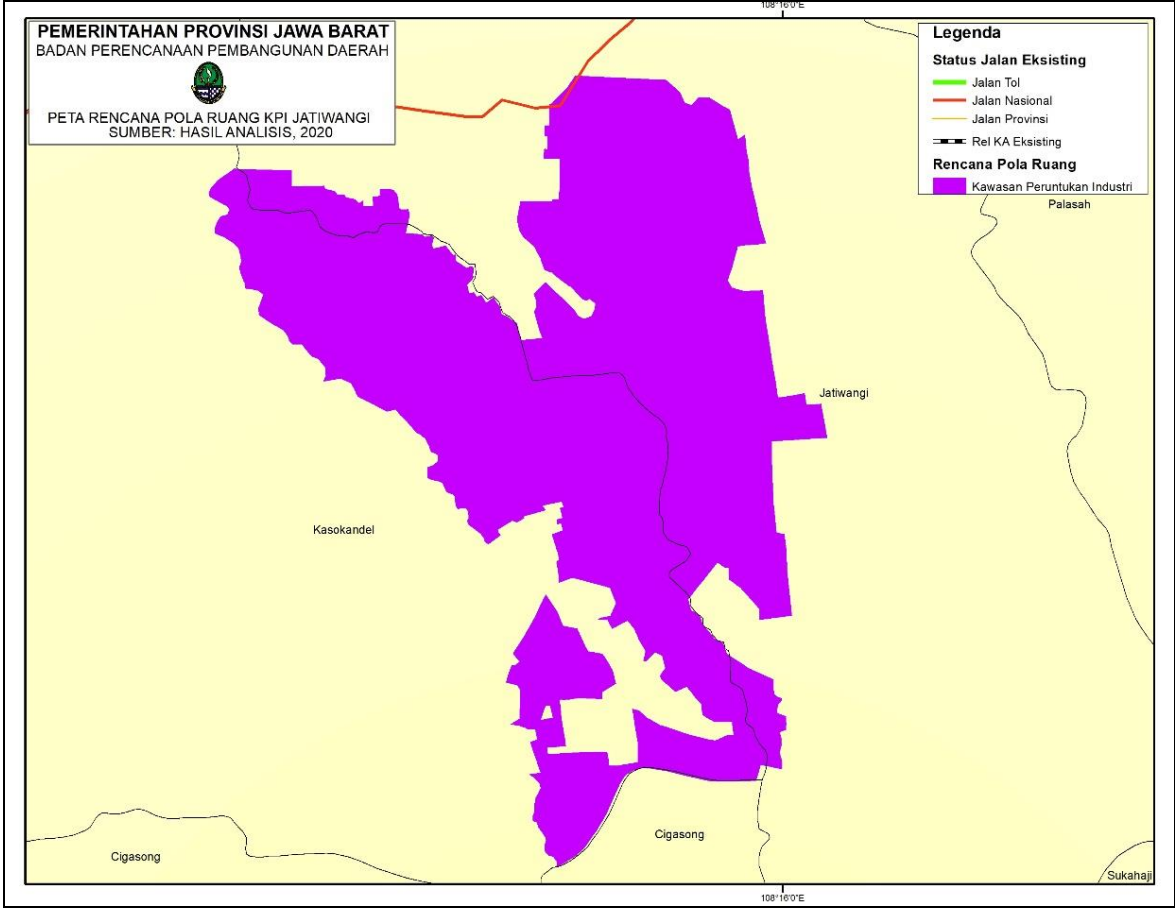


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.11 Penggunaan Lahan di KPI Jatiwangi

KPI Jatiwangi merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, Kabupaten Majalengka. KPI ini memiliki luas 971,58 ha. Ditinjau dari rencana pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031, KPI Jatiwangi memiliki rencana pola ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri. Luas pola ruang ini adalah 971,58 ha. Pengembangan industri di KPI ini bisa dimaksimalkan karena tidak ada daerah limitasi di KPI tersebut.

Gambar 3.83 Peta Rencana Pola Ruang KPI Jatiwangi



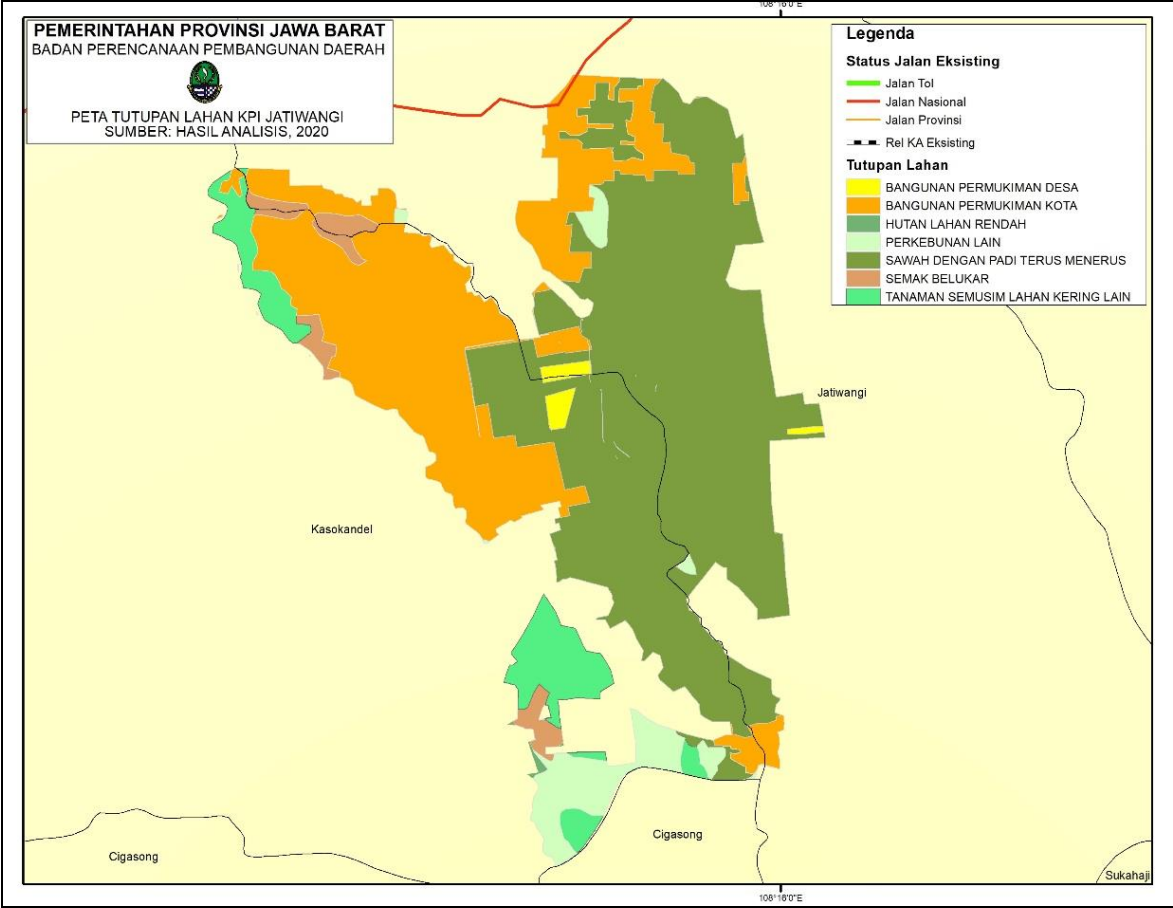
Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Jatiwangi terdiri dari beberapa kategori yaitu:

- 1. Sawah dengan padi terus menerus;
- 2. Bangunan permukiman desa;
- 3. Bangunan permukiman kota;
- 4. Perkebunan lain;
- 5. Semak belukar;
- 6. Tanaman semusim lahan kering lain; dan
- 7. Hutan Lahan Rendah.

Kondisi eksisting industri di KPI Jatiwangi masih didominasi oleh industri pembuatan genteng rumahan. Selain itu, persawahan padi juga sangat luas dan tersedia di KPI ini. hanya ada beberapa industri garmen di sekitar jalan utama di KPI Jatiwangi.

Gambar 3.84 Peta Tutupan Lahan KPI Jatiwangi

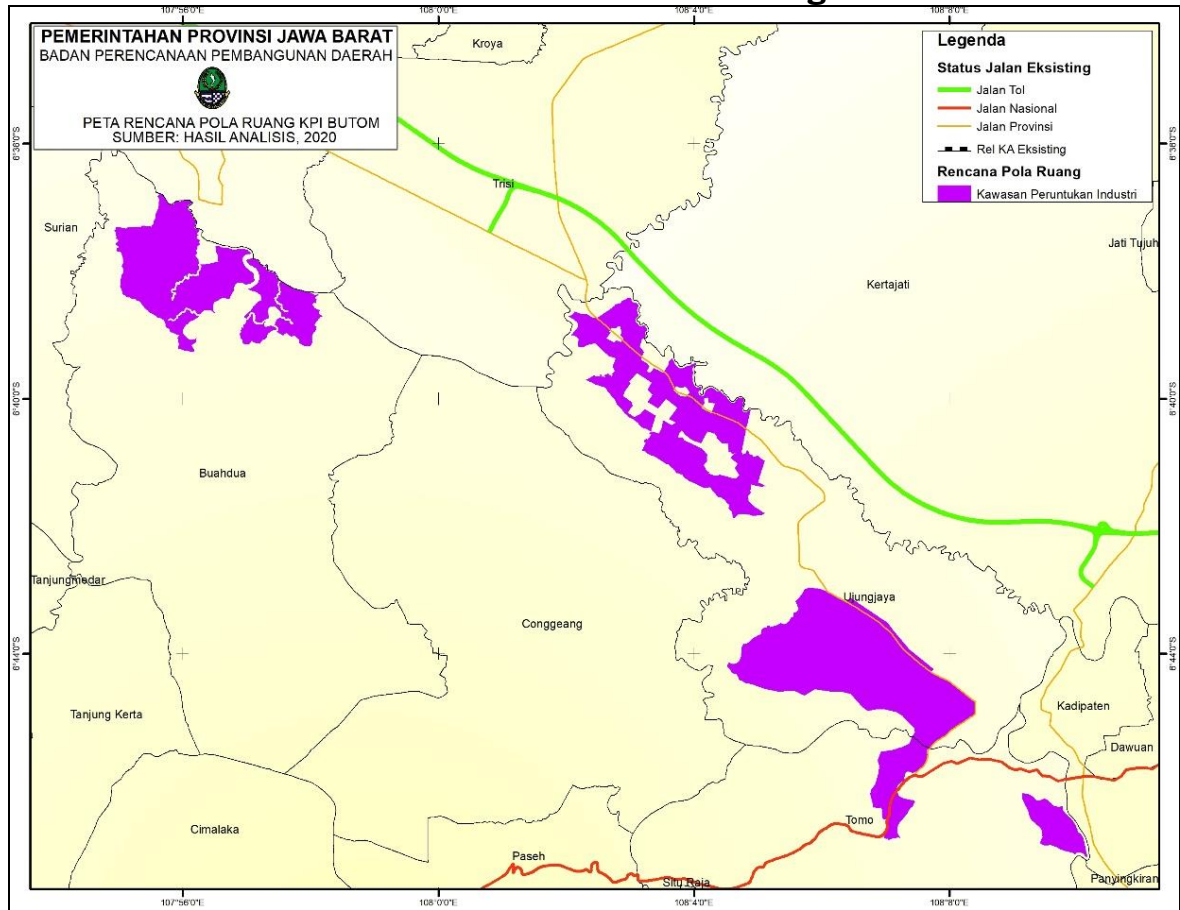


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.12 Penggunaan Lahan di KPI Butom

KPI Butom merupakan KPI yang berlokasi di Kecamatan Buahdua, Ujung Jaya, dan Tomo, Kabupaten Sumedang. KPI ini memiliki luas 4.092,25 ha. Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2018-2038, KPI Butom memiliki pola ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri. Pola ruang tersebut memiliki luas 4.092,25 ha.

Gambar 3.85 Peta Rencana Pola Ruang KPI Butom

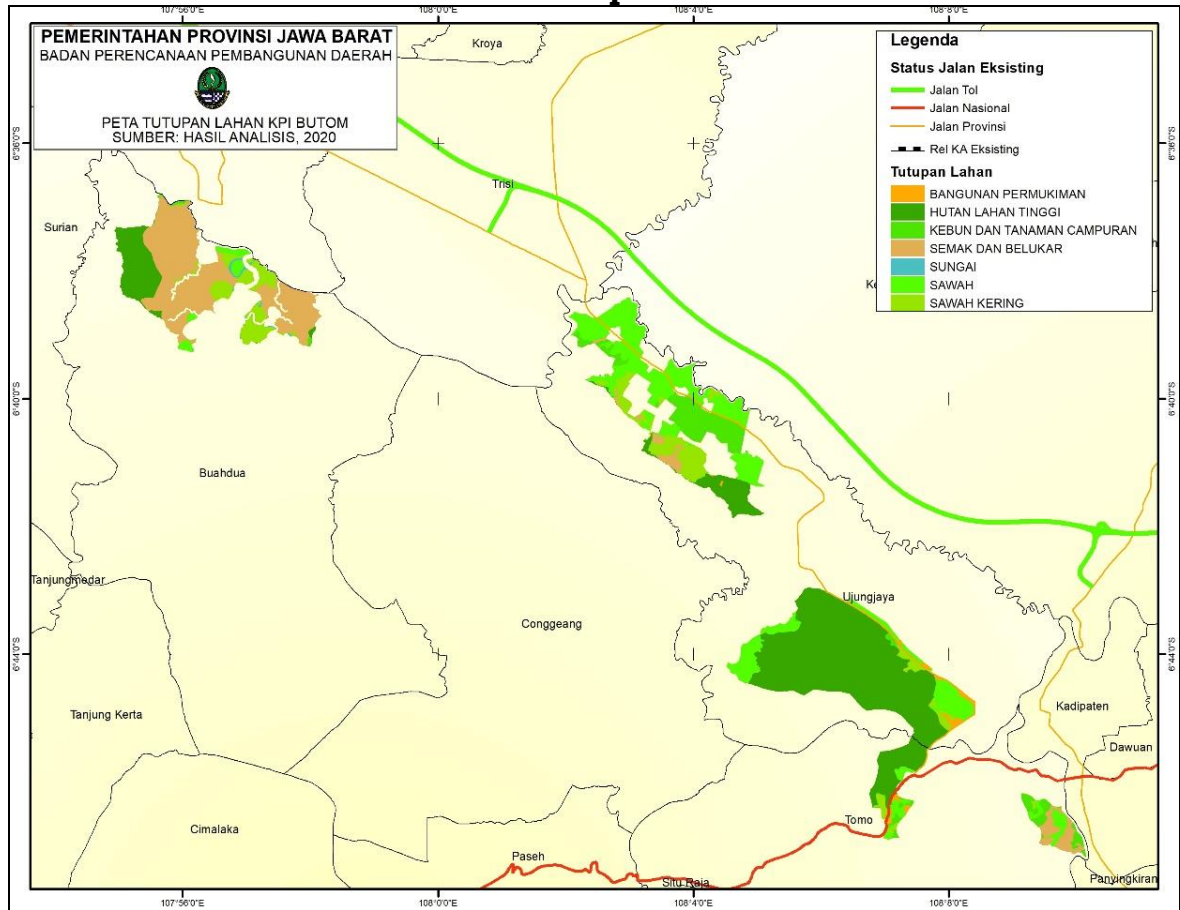


Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2018-2038, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan yang ada di KPI Butom terbagi menjadi:

- 1. Bangunan permukiman/campuran;
- 2. Hutan lahan tinggi;
- 3. Kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim);
- 4. Semak dan belukar;
- 5. Sungai;
- 6. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
- 7. Tanaman semusim lahan kering.

Gambar 3.86 Peta Tutupan Lahan KPI Butom

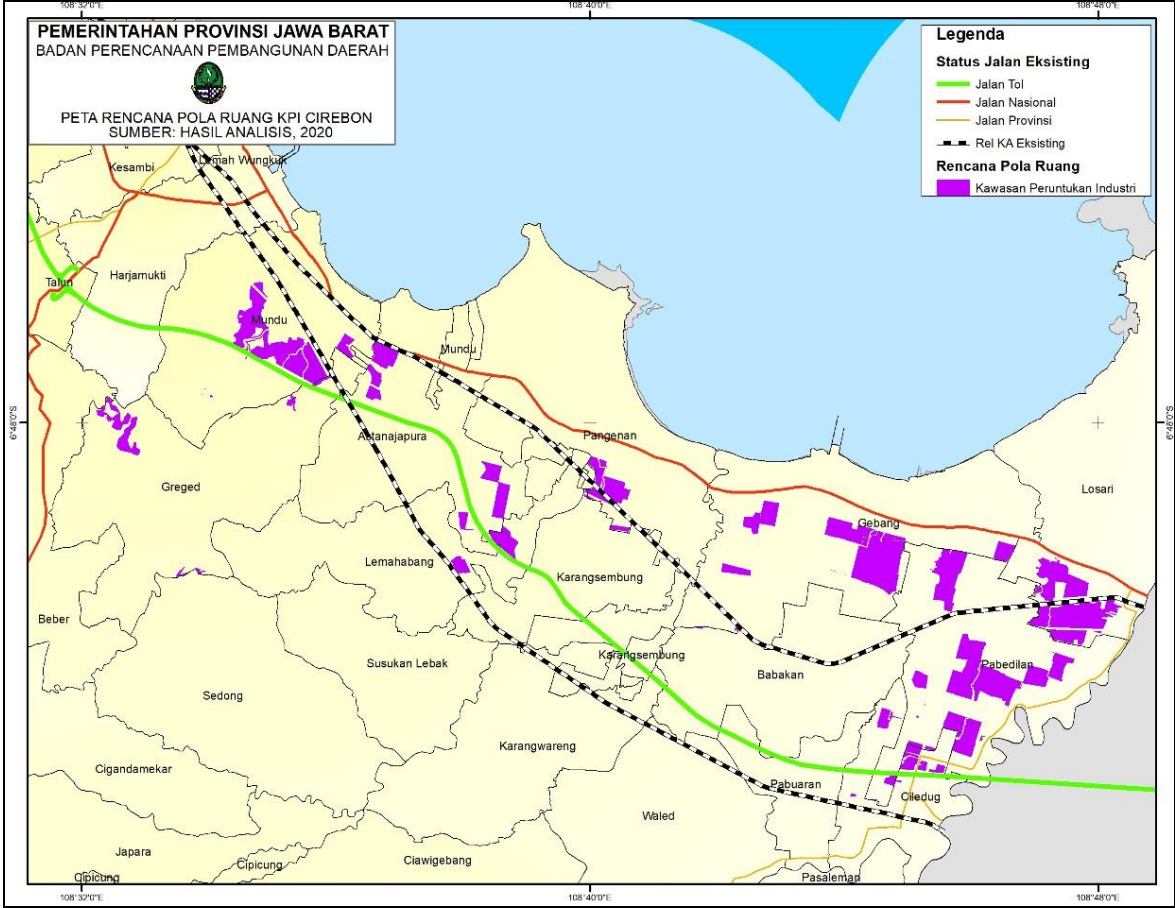


Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

3.4.13 Penggunaan Lahan di KPI Cirebon

KPI Cirebon merupakan KPI yang berlokasi di sepanjang Kecamatan Mundu – Losari, Kabupaten Cirebon. KPI ini memiliki luas 1.815,29 ha. KPI Cirebon merupakan KPI yang unik karena delineasinya menyebar di setiap kecamatan yang dilalui jalan pantura. Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038, KPI Cirebon memiliki pola ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri. Pola ruang tersebut memiliki luas 1.815,29 ha. KPI ini bisa dikembangkan industri apapun dikarenakan tidak ada wilayah limitasi di KPI ini.

**Gambar 3.87 Peta Rencana Pola Ruang KPI Cirebon**



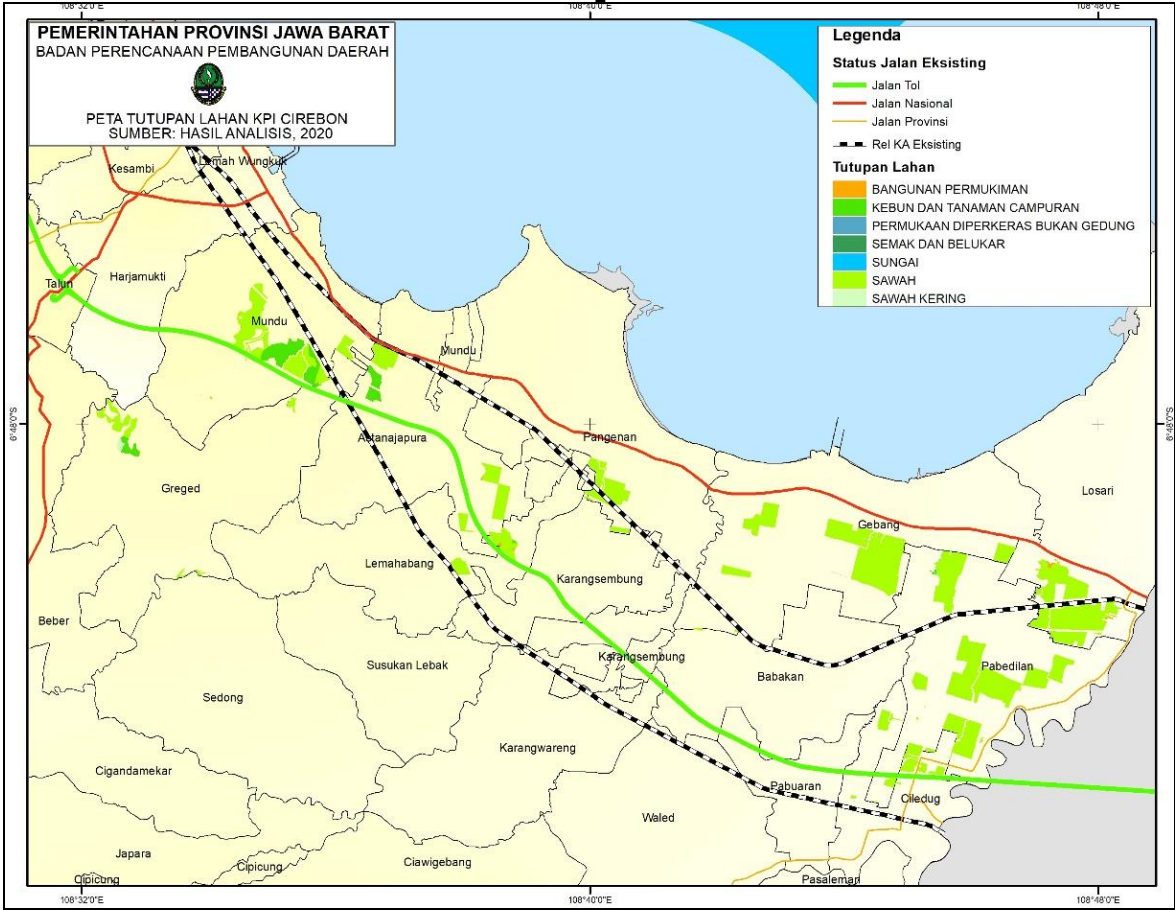
Sumber: Hasil Analisis Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038, 2020

Berdasarkan data tutupan lahan Provinsi Jawa Barat, tutupan lahan di KPI Cirebon terbagi menjadi:

- 1. Bangunan permukiman/campuran;
- 2. Kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim);
- 3. Permukaan diperkeras bukan gedung;
- 4. Semak dan belukar;
- 5. Sungai;
- 6. Tanaman semusim lahan basah (sawah); dan
- 7. Tanaman semusim lahan kering.

Selain itu, industri eksisting yang ada di KPI Cirebon antara lain industri makanan minuman, industri Kasur, dan PLTU. Lahan di KPI Cirebon khususnya di utara jalan pantura sering terkena banjir rob.

Gambar 3.88 Peta Tutupan Lahan KPI Cirebon



Sumber: Hasil Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 2020

## **BAB IV**

### **ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA**

Arahan pengembangan kawasan menjelaskan tentang visi dan kebijakan strategis pengembangan, arahan pengembangan sektor, komoditas unggulan dan klaster industri, arahan pengembangan struktur ruang wilayah, dan arahan pengembangan *support system*.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan**

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA di bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberdayakan potensi dan peluang pengembangan wilayah yang terdapat di wilayah tersebut. Beberapa potensi dan peluang yang perlu diberdayakan di Kawasan Metropolitan REBANA adalah keunggulan konektivitas fisik wilayah, peluang pengembangan kawasan sebagai aglomerasi KPI yang saling terhubung baik secara fisik maupun supply chain, padatnya pengembangan industri di wilayah barat dan tengah Provinsi Jawa Barat, lokasi yang berada di dalam delineasi Koridor Ekonomi Pantai Utara Jawa, serta keunggulan komparatif UMK yang lebih rendah dibandingkan UMK Provinsi Jawa Barat. Keunggulan-keunggulan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan daya saing Kawasan Metropolitan REBANA.

Melalui peningkatan daya tarik investasi dan peningkatan daya saing kawasan ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik yang berada di Kawasan Metropolitan REBANA maupun Masyarakat Provinsi Jawa Barat secara umum. Dengan memperlihatkan realisasi potensi daya saing investasi yang dimiliki kawasan ini, diharapkan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA dapat menjadi pengembangan skala internasional dan kawasan-kawasan peruntukan industri dapat ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) di masa yang akan datang. Peningkatan KPI menjadi KEK ini sejalan dengan tujuan Kawasan Metropolitan REBANA untuk menjadi engine of growth Provinsi Jawa Barat. Penetapan KEK dapat menjadi katalis ekonomi wilayah, membuka lapangan pekerjaan lebih lanjut, meningkatkan kualitas kehidupan, serta meningkatkan kapasitas perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan Kawasan Metropolitan REBANA harus sejalan dengan kebijakan dan rencana pembangunan lainnya yang berlaku di kawasan tersebut.

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA selaras dengan 5 (lima) arahan utama dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM. Dalam mewujudkan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, diperlukan peningkatan kualitas SDM agar dapat menunjang kawasan industri yang direncanakan.
2. Pembangunan infrastruktur. Untuk menunjang Kawasan Metropolitan REBANA diperlukan berbagai infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan infrastruktur dasar.

3. Penyederhanaan regulasi. Arahan ini sejalan dengan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA yang didorong oleh kemudahan investasi.
4. Penyederhanaan birokrasi. Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA akan disertai dengan pembentukan kelembagaan.
5. Transformasi ekonomi. Arahan ini sejalan dengan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi.

Kemudian, Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA juga merupakan bagian dari perwujudan visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 yaitu Visi “**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”. Dengan misi serta sasaran yang terkait antara lain :

- MISI 2.** Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif
- Millennial Juara, dengan sasaran terkait yaitu pembentukan *Start-Up/Creative Hub*, di setiap Kab/Kota untuk pengembangan fasilitas dan ide bisnis;
  - Perguruan Tinggi Juara, dengan sasaran terkait menjadikan perguruan tinggi sebagai *centre of excellence and innovation* dengan optimalisasi peran pemerintah untuk mendorong kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan (Akademisi, Bisnis/Industri, Pemerintah, Masyarakat/komunitas, dan juga media;
  - SMK Juara, dengan sasaran terkait meningkatkan fokus pendidikan SMK sesuai dengan potensi kekuatan ekonomi dan industri lokal dan menyediakan kemudahan akses pekerjaan di industri-industri lokal terkait.
- MISI 3.** Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara
- Transportasi Juara, dengan sasaran terkait yaitu Jalan Alus Mulus 100%, LRT Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, Rel Kereta antar Kota/Kabupaten, dan Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Baru
  - Logistik Juara, dengan sasaran terkait yaitu menciptakan Pusat Logistik Jawa Barat dan Gudang Juara di setiap Kab/Kota untuk mengendalikan harga komoditas
  - Pantura Juara, dengan sasaran terkait yaitu mendorong pertumbuhan kawasan industri sekaligus melindungi lumbung Padi Jabar di Pantura
- MISI 4.** Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan
- Ekonomi Kreatif Juara, dengan sasaran terkait mendorong pengembangan kawasan industri kreatif, desa kreatif, pembinaan, *off-taker*, dan promosi usaha kreatif
  - Buruh Juara, dengan sasaran terkait berupa penyediaan hunian, transportasi, dan sekolah untuk anak buruh

- Industri Juara, dengan sasaran terkait berupa pembangunan klaster industri kecil lokal, dan pembentukan sistem logistik khusus untuk penguatan mata rantai produksi industri kecil-menengah-besar
- Wirausaha Juara, dengan sasaran terkait berupa inkubator bisnis kecamatan, perizinan usaha juara, serta wirausaha baru

Selain itu, pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan beberapa teori berikut:

1. Lewis *Growth Theory* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern. Menurutnya, perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional pertanian yang tingkat produktivitasnya rendah dan sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. (Lewis, 1954)
2. Kuznets (1955) menjelaskan bahwa dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, perubahan struktural terjadi pada peralihan kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, dalam skala unit produksi, serta peralihan dari perusahaan perseorangan ke perusahaan yang berbadan hukum sehingga menyebabkan peralihan status buruh.
3. Kwik Kian Gie (2002) menjelaskan bahwa pembangunan harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang yang tidak menimbulkan ketimpangan antar sektor perekonomian dan membentuk perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Teori-teori di atas memperkuat konsep pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA yang berbasis industri dapat berimplikasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pengembangan kawasan industri ini tidak boleh menimbulkan ketimpangan antar sektor perekonomian. Dengan demikian, pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA tidak menghilangkan sektor pertanian dengan mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta membentuk kawasan industri yang terintegrasi.

Kemudian, berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern (Kuznets, 1955)  
Salah satu ciri pertumbuhan ekonomi modern ialah adanya peningkatan produktivitas yang signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan produk perkapita merupakan dampak dari adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas per unit input. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sumber tenaga kerja dan modal yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan efisiensi pada kedua-duanya. Kenaikan efisiensi ini diartikan dengan penggunaan *output* yang lebih besar untuk setiap input.  
Tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi modern, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari adanya peningkatan terhadap persediaan barang secara terus – menerus.
- b. Kemajuan teknologi merupakan penentu dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan berbagai macam barang bagi penduduk.
- c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian pada bidang kelembagaan.

## 2. Teori Model Neoklasik Solow – Swan

Teori ini dibuat sebagai respon atas model Harrod-Domar yang mengasumsikan rasio *capital-output* konstan. Model Solow mendefinisikan fungsi produksi yang memiliki sifat bahwa faktor-faktornya saling bersubstitusi secara kontinyu, dan diasumsikan tiap faktor produksi mengalami *diminishing return*. Solow memulai dengan membentuk fungsi produksi:

$$Y = F(K, L)$$

Model ini mengasumsikan bahwa negara-negara menggunakan sumber daya secara efisien dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang (*diminishing return*) terhadap peningkatan modal dan tenaga kerja. Dari dua asumsi ini terdapat tiga prediksi penting:

- a. Peningkatan modal per tenaga kerja menciptakan pertumbuhan ekonomi selama masyarakat dapat terus memberikan modal secara produktif.
- b. Negara-negara miskin dengan tingkat modal per kapita yang rendah akan tumbuh lebih cepat karena setiap investasi dari modal akan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang memiliki modal yang lebih besar.
- c. Dikarenakan adanya *diminishing returns* terhadap modal, tingkat ekonomi akan mencapai suatu keadaan yang mana peningkatan modal baru tidak akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi (*steady state*).

Berdasarkan teori-teori di atas, diketahui bahwa untuk meningkatkan produktivitas diperlukan teknologi, tenaga kerja, dan modal. Dengan demikian pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA memerlukan inovasi teknologi, SDM yang kompeten, kemudahan mekanisme penanaman modal.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA, Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, serta teori-teori mengenai pertumbuhan ekonomi, **Tujuan Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA paada tahun 2030** adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kawasan Metropolitan REBANA sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur-utara berbasis pada pengembangan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan”***

**Sasaran** dari Tujuan pengembangan kawasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. **INTEGRASI**, Mewujudkan sinergi pengembangan kawasan melalui integrasi rantai logistik industri besar-menengah-kecil dan integrasi antar KPI dengan kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. **INOVASI**, Mewujudkan pengembangan kawasan yang bertumpu pada inovasi teknologi, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan dan SDM inovatif untuk menyongsong industri masa depan 4.0;
3. **KOLABORASI**, Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, bisnis/industri, IKM, Akademisi, masyarakat/komunitas) melalui pengembangan wadah kerjasama kawasan;
4. **BERDAYA SAING TINGGI**, Membentuk aglomerasi industri yang terkoneksi satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing berupa 13 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui berbagai kemudahan fiskal maupun non fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di kawasan yang didukung oleh kesiapan berbagai infrastruktur penunjang; dan
5. **BERKELANJUTAN**, Mengembangkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan untuk meminimalisir emisi karbon serta mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

## 4.2 Indikator Utama Capaian Pengembangan Kawasan

### 4.2.1 Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Kawasan Metropolitan REBANA ini merupakan kawasan yang diarahkan pengembangannya sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dengan fokus pengembangan sebagai kawasan industri. Dengan arahan pengembangan tersebut, maka keberadaan Kawasan Metropolitan REBANA ini diharapkan dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan investasi di Provinsi Jawa Barat secara signifikan.

Perhitungan LPE dan investasi Jawa Barat pada Tahun 2030 dengan mempertimbangkan dampak dari Kawasan Metropolitan REBANA menggunakan pendekatan elastisitas dan laju pertumbuhan sektor yang nilainya menggunakan *benchmark* Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten yang terdampak perkembangan industri dan investasi. Hubungan antara elastisitas, laju pertumbuhan sektor, dan laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut.

$$\text{elastisitas sektor} = \frac{\text{laju pertumbuhan sektor}}{\text{laju pertumbuhan PDRB}}$$

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam perhitungan LPE dan investasi di Jawa Barat pada tahun 2030.

1. Dampak REBANA dilihat dari elastisitas dan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan industri pengolahan terhadap laju pertumbuhan PDRB menggunakan *benchmarking* dari pengaruh pembangunan Bandara Kertajati terhadap LPE Kabupaten Majalengka dan dari Kabupaten Subang;
2. Perhitungan dampak REBANA tahun 2021-2025 menggunakan benchmark elastisitas sektor konstruksi senilai 1,77 dan laju

pertumbuhan sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan sebesar 10,28 dan 10,76 dari Kabupaten Majalengka;

3. Perhitungan dampak REBANA tahun 2026-2030 menggunakan benchmark elastisitas sektor industri pengolahan 1,40 dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 8,8 Kabupaten Subang yang kemudian ditambahkan dampak konstruksi dengan mempertimbangkan elastisitas dan laju pertumbuhan sektor konstruksi Kabupaten Majalengka;
4. Konstruksi dan industri pengolahan dianggap terealisasi sebesar 80 % dan 10 % pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2030 dianggap sudah terealisasi sepenuhnya; dan
5. Pembagian laju pertumbuhan per tahun pada tahun 2021-2029 dihitung mundur dengan membagi rata berdasarkan proyeksi tahun 2030.

Tabel 4.1 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

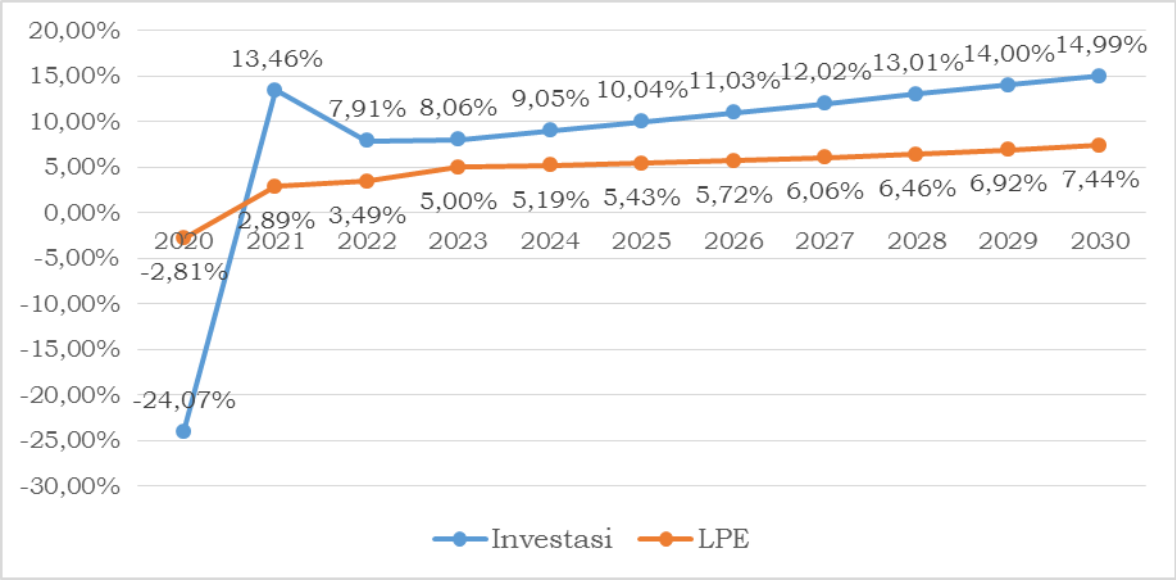
| PROVINSI   | Tahun | PMTB        |             | PDRB          |               | PMTB/PDRB | Delta PDRB   | LPE    | Growth PMTB<br>(Silahkan Diisi) | E Indeks | ICOR  |
|------------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------------|----------|-------|
|            |       | ADHK        | ADHB        | ADHK          | ADHB          |           |              |        |                                 |          |       |
| JAWA BARAT | 2010  | 221,524,237 | 221,524,237 | 906,685,760   | 906,685,760   | 24.43%    |              |        |                                 | 1.00     |       |
|            | 2011  | 245,323,571 | 252,467,435 | 965,622,061   | 1,021,628,597 | 24.71%    | 58,936,301   | 6.50%  | 10.74%                          | 1.06     | 4.16  |
|            | 2012  | 271,070,796 | 294,079,170 | 1,028,409,740 | 1,128,245,685 | 26.07%    | 62,787,678   | 6.50%  | 10.50%                          | 1.10     | 4.32  |
|            | 2013  | 268,318,281 | 301,400,004 | 1,093,543,546 | 1,258,989,329 | 23.94%    | 65,133,806   | 6.33%  | -1.02%                          | 1.15     | 4.12  |
|            | 2014  | 287,389,550 | 346,009,578 | 1,149,216,057 | 1,385,825,076 | 24.97%    | 55,672,511   | 5.09%  | 7.11%                           | 1.21     | 5.16  |
|            | 2015  | 299,342,638 | 382,985,600 | 1,207,083,406 | 1,524,832,202 | 25.12%    | 57,867,349   | 5.04%  | 4.16%                           | 1.26     | 5.17  |
|            | 2016  | 313,083,696 | 412,295,911 | 1,275,546,477 | 1,652,589,443 | 24.95%    | 68,463,071   | 5.67%  | 4.59%                           | 1.30     | 4.57  |
|            | 2017  | 332,750,610 | 449,337,050 | 1,342,953,380 | 1,786,092,380 | 25.16%    | 67,406,903   | 5.28%  | 6.28%                           | 1.33     | 4.94  |
|            | 2018  | 352,312,422 | 495,827,138 | 1,419,689,116 | 1,962,231,581 | 25.27%    | 76,735,736   | 5.64%  | 5.88%                           | 1.38     | 4.59  |
|            | 2019  | 366,803,200 | 535,722,500 | 1,491,705,800 | 2,125,158,000 | 25.21%    | 72,016,684   | 5.07%  | 4.11%                           | 1.42     | 5.09  |
|            | 2020  | 344,779,000 | 494,413,086 | 1,450,385,549 | 2,079,852,878 | 23.77%    | (41,320,251) | -2.77% | -6.00%                          | 1.43     | -8.34 |
|            | 2021  | 358,467,530 | 528,381,139 | 1,500,133,774 | 2,289,500,000 | 23.08%    | 49,748,224   | 3.43%  | 3.97%                           | 1.47     | 7.21  |
|            | 2022  | 376,819,517 | 570,658,618 | 1,570,940,088 | 2,470,000,000 | 23.10%    | 70,806,314   | 4.72%  | 5.12%                           | 1.51     | 5.32  |
|            | 2023  | 397,459,819 | 618,447,478 | 1,650,272,562 | 2,670,500,000 | 23.16%    | 79,332,474   | 5.05%  | 5.48%                           | 1.56     | 5.01  |
|            | 2024  | 419,704,911 | 669,849,037 | 1,735,426,626 | 2,769,740,896 | 24.18%    | 85,154,064   | 5.16%  | 5.60%                           | 1.60     | 4.93  |

|  |      |             |               |               |               |        |             |       |       |      |      |
|--|------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|-------|------|------|
|  | 2025 | 443,741,301 | 725,960,768   | 1,827,005,692 | 2,988,981,312 | 24.29% | 91,579,065  | 5.28% | 5.73% | 1.64 | 4.85 |
|  | 2026 | 470,646,297 | 788,803,194   | 1,929,081,134 | 3,233,139,980 | 24.40% | 102,075,442 | 5.59% | 5.80% | 1.68 | 4.61 |
|  | 2027 | 500,101,481 | 858,174,141   | 2,040,293,331 | 3,501,143,356 | 24.51% | 111,212,197 | 5.77% | 5.86% | 1.72 | 4.50 |
|  | 2028 | 532,322,247 | 934,757,866   | 2,161,548,672 | 3,795,679,467 | 24.63% | 121,255,341 | 5.94% | 5.93% | 1.76 | 4.39 |
|  | 2029 | 567,658,241 | 1,019,514,201 | 2,293,857,816 | 4,119,768,637 | 24.75% | 132,309,144 | 6.12% | 6.00% | 1.80 | 4.29 |
|  | 2030 | 609,711,429 | 1,119,430,184 | 2,450,635,433 | 4,499,366,655 | 24.88% | 156,777,617 | 6.83% | 6.07% | 1.84 | 3.89 |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan dengan beberapa asumsi di atas, diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE Jawa Barat pada tahun 2030 berada pada angka 6,83% dengan laju investasi sebesar 6,07%. Total nilai PMTB ADHK Jawa Barat tahun 2030 dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA mencapai 609.711.429 juta rupiah dan nilai PDRB ADHK Jawa Barat tahun 2030 mencapai 2.450.635.433 juta rupiah. Berikut adalah rincian LPE dan laju investasi Jawa Barat hingga tahun 2030 dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

**Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Investasi di Jawa Barat Tahun 2020 – 2030**



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Kemudian, berikut adalah proyeksi LPE dan laju investasi Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan REBANA dengan asumsi bahwa penambahan LPE dan laju investasi Kabupaten/Kota setiap tahun sama dengan persentase penambahan LPE dan laju investasi Jawa Barat pada tahun yang sama.

Tabel 4.2 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon

| Tahun | PMTB       |            | PDRB       |             | PMTB/PDRB | Delta PDRB | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR   |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|--------|
|       | ADHK       | ADHB       | ADHK       | ADHB        |           |            |        |             |          |        |
| 2010  | 6.734.215  | 6.734.215  | 21.496.571 | 21.496.571  | 31,33%    |            |        |             | 1,00     |        |
| 2011  | 7.225.682  | 7.472.786  | 22.621.717 | 23.823.647  | 31,37%    | 1.125.146  | 5,23%  | 7,30%       | 1,05     | 6,42   |
| 2012  | 8.312.993  | 9.256.396  | 23.857.750 | 26.297.826  | 35,20%    | 1.236.033  | 5,46%  | 15,05%      | 1,10     | 6,73   |
| 2013  | 8.800.460  | 10.361.593 | 25.042.255 | 29.410.722  | 35,23%    | 1.184.505  | 4,96%  | 5,86%       | 1,17     | 7,43   |
| 2014  | 9.090.584  | 11.626.865 | 26.312.992 | 32.579.051  | 35,69%    | 1.270.737  | 5,07%  | 3,30%       | 1,24     | 7,15   |
| 2015  | 9.418.578  | 12.700.114 | 27.596.255 | 35.752.663  | 35,52%    | 1.283.263  | 4,88%  | 3,61%       | 1,30     | 7,34   |
| 2016  | 9.700.862  | 13.220.644 | 29.148.229 | 38.882.897  | 34,00%    | 1.551.974  | 5,62%  | 3,00%       | 1,33     | 6,25   |
| 2017  | 10.196.698 | 14.056.195 | 30.623.306 | 41.919.286  | 33,53%    | 1.475.077  | 5,06%  | 5,11%       | 1,37     | 6,91   |
| 2018  | 10.676.306 | 15.167.919 | 32.160.192 | 45.461.939  | 33,36%    | 1.536.886  | 5,02%  | 4,78%       | 1,41     | 6,95   |
| 2019  | 11.209.590 | 16.261.948 | 33.723.897 | 49.186.357  | 33,06%    | 1.563.705  | 4,86%  | 3,35%       | 1,45     | 7,17   |
| 2020  | 10.661.963 | 15.928.665 | 32.828.025 | 49.044.124  | 32,48%    | (895.872)  | -2,66% | -4,89%      | 1,49     | -11,90 |
| 2021  | 11.006.377 | 16.883.466 | 33.907.885 | 52.013.718  | 32,46%    | 1.079.859  | 3,29%  | 3,23%       | 1,53     | 10,19  |
| 2022  | 11.464.842 | 18.045.331 | 35.442.752 | 55.785.870  | 32,35%    | 1.534.868  | 4,53%  | 4,17%       | 1,57     | 7,47   |
| 2023  | 11.975.793 | 19.328.584 | 37.159.265 | 59.973.983  | 32,23%    | 1.716.513  | 4,84%  | 4,46%       | 1,61     | 6,98   |
| 2024  | 12.521.140 | 20.709.605 | 38.998.110 | 64.501.749  | 32,11%    | 1.838.845  | 4,95%  | 4,55%       | 1,65     | 6,81   |
| 2025  | 13.104.582 | 22.198.784 | 40.971.722 | 69.404.915  | 31,98%    | 1.973.612  | 5,06%  | 4,66%       | 1,69     | 6,64   |
| 2026  | 13.722.521 | 23.794.456 | 43.167.021 | 74.850.371  | 31,79%    | 2.195.300  | 5,36%  | 4,72%       | 1,73     | 6,25   |
| 2027  | 14.377.255 | 25.504.836 | 45.553.636 | 80.810.836  | 31,56%    | 2.386.614  | 5,53%  | 4,77%       | 1,77     | 6,02   |
| 2028  | 15.071.249 | 27.338.811 | 48.149.963 | 87.342.646  | 31,30%    | 2.596.328  | 5,70%  | 4,83%       | 1,81     | 5,80   |
| 2029  | 15.807.151 | 29.306.002 | 50.976.464 | 94.508.894  | 31,01%    | 2.826.500  | 5,87%  | 4,88%       | 1,85     | 5,59   |
| 2030  | 16.587.804 | 31.416.824 | 54.317.764 | 102.876.279 | 30,54%    | 3.341.300  | 6,55%  | 4,94%       | 1,89     | 4,96   |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas, diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA LPE dan laju investasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2030 berturut-turut adalah 6,55% dan 4,94%.

Tabel 4.3 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indramayu

| Tahun | PMTB       |            | PDRB       |             | PMTB/PDRB | Delta PDRB  | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR   |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|--------|
|       | ADHK       | ADHB       | ADHK       | ADHB        |           |             |        |             |          |        |
| 2010  | 5.727.334  | 5.727.334  | 47.859.833 | 47.859.833  | 11,97%    |             |        |             | 1,00     |        |
| 2011  | 6.320.951  | 6.540.548  | 49.804.916 | 54.157.394  | 12,08%    | 1.945.082   | 4,06%  | 10,36%      | 1,09     | 3,25   |
| 2012  | 6.791.339  | 7.337.230  | 51.389.041 | 59.376.511  | 12,36%    | 1.584.125   | 3,18%  | 7,44%       | 1,16     | 4,29   |
| 2013  | 6.643.520  | 7.471.602  | 52.858.951 | 63.312.768  | 11,80%    | 1.469.910   | 2,86%  | -2,18%      | 1,20     | 4,52   |
| 2014  | 7.190.701  | 8.721.755  | 55.464.114 | 67.625.220  | 12,90%    | 2.605.163   | 4,93%  | 8,24%       | 1,22     | 2,76   |
| 2015  | 7.530.829  | 9.580.854  | 56.663.300 | 65.391.667  | 14,65%    | 1.199.186   | 2,16%  | 4,73%       | 1,15     | 6,28   |
| 2016  | 7.867.311  | 10.224.135 | 56.706.183 | 66.533.442  | 15,37%    | 42.883      | 0,08%  | 4,47%       | 1,17     | 183,46 |
| 2017  | 8.348.318  | 11.224.025 | 57.515.011 | 69.814.296  | 16,08%    | 808.828     | 1,43%  | 6,11%       | 1,22     | 10,32  |
| 2018  | 8.836.827  | 12.278.319 | 58.287.977 | 74.920.424  | 16,39%    | 772.966     | 1,34%  | 5,72%       | 1,27     | 11,43  |
| 2019  | 9.203.672  | 13.265.785 | 60.154.352 | 80.390.980  | 16,50%    | 1.866.376   | 3,20%  | 4,00%       | 1,31     | 4,93   |
| 2020  | 8.665.831  | 11.727.482 | 59.102.005 | 79.982.825  | 14,66%    | (1.052.347) | -1,75% | -5,84%      | 1,35     | -8,23  |
| 2021  | 9.000.683  | 12.540.664 | 60.382.296 | 84.130.735  | 14,91%    | 1.280.290   | 2,17%  | 3,86%       | 1,39     | 7,03   |
| 2022  | 9.449.154  | 13.543.485 | 62.182.259 | 89.125.918  | 15,20%    | 1.799.964   | 2,98%  | 4,98%       | 1,43     | 5,25   |
| 2023  | 9.952.888  | 14.663.603 | 64.165.475 | 94.535.082  | 15,51%    | 1.983.216   | 3,19%  | 5,33%       | 1,47     | 5,02   |
| 2024  | 10.495.033 | 15.882.148 | 66.256.519 | 100.266.082 | 15,84%    | 2.091.044   | 3,26%  | 5,45%       | 1,51     | 5,02   |
| 2025  | 11.080.005 | 17.210.586 | 68.464.680 | 106.346.281 | 16,18%    | 2.208.161   | 3,33%  | 5,57%       | 1,55     | 5,02   |
| 2026  | 11.704.976 | 18.649.554 | 70.880.475 | 112.933.958 | 16,51%    | 2.415.795   | 3,53%  | 5,64%       | 1,59     | 4,85   |
| 2027  | 12.373.010 | 20.208.854 | 73.461.193 | 119.984.268 | 16,84%    | 2.580.719   | 3,64%  | 5,71%       | 1,63     | 4,79   |
| 2028  | 13.087.428 | 21.899.212 | 76.218.457 | 127.536.449 | 17,17%    | 2.757.264   | 3,75%  | 5,77%       | 1,67     | 4,75   |
| 2029  | 13.851.831 | 23.732.362 | 79.164.894 | 135.633.321 | 17,50%    | 2.946.437   | 3,87%  | 5,84%       | 1,71     | 4,70   |
| 2030  | 14.670.125 | 25.721.151 | 82.582.030 | 144.791.187 | 17,76%    | 3.417.136   | 4,32%  | 5,91%       | 1,75     | 4,29   |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kabupaten Indramayu pada tahun 2030 berturut-turut adalah 4,32% dan 5,91%.

Tabel 4.4 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Majalengka

| Tahun | PMTB       |            | PDRB       |            | PMTB/PDRB | Delta PDRB | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR  |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|-------|
|       | ADHK       | ADHB       | ADHK       | ADHB       |           |            |        |             |          |       |
| 2010  | 3.583.141  | 3.583.141  | 12.883.188 | 12.883.188 | 27,81%    |            |        |             | 1,00     |       |
| 2011  | 3.927.333  | 4.057.377  | 13.490.257 | 14.135.274 | 28,70%    | 607.070    | 4,71%  | 9,61%       | 1,05     | 6,47  |
| 2012  | 4.824.121  | 5.231.405  | 14.307.427 | 15.691.229 | 33,34%    | 817.169    | 6,06%  | 22,83%      | 1,10     | 5,90  |
| 2013  | 5.080.250  | 5.757.960  | 15.012.894 | 17.543.189 | 32,82%    | 705.467    | 4,93%  | 5,31%       | 1,17     | 7,20  |
| 2014  | 5.582.843  | 6.820.196  | 15.750.655 | 19.193.459 | 35,53%    | 737.761    | 4,91%  | 9,89%       | 1,22     | 7,57  |
| 2015  | 5.916.881  | 7.656.200  | 16.590.930 | 21.250.793 | 36,03%    | 840.275    | 5,33%  | 5,98%       | 1,28     | 7,04  |
| 2016  | 6.190.449  | 8.179.828  | 17.569.771 | 23.129.765 | 35,36%    | 978.841    | 5,90%  | 4,62%       | 1,32     | 6,32  |
| 2017  | 7.261.930  | 9.903.175  | 18.789.488 | 25.405.615 | 38,98%    | 1.219.717  | 6,81%  | 17,31%      | 1,37     | 5,95  |
| 2018  | 7.585.726  | 10.758.406 | 19.935.541 | 28.051.621 | 38,35%    | 1.146.053  | 6,10%  | 6,10%       | 1,42     | 6,62  |
| 2019  | 7.859.009  | 11.539.507 | 21.358.917 | 30.912.095 | 37,33%    | 1.423.376  | 7,14%  | 4,27%       | 1,46     | 5,52  |
| 2020  | 7.369.398  | 11.027.952 | 20.525.729 | 30.715.775 | 35,90%    | (833.187)  | -3,90% | -6,23%      | 1,50     | -8,84 |
| 2021  | 7.672.972  | 11.789.155 | 21.517.192 | 33.060.138 | 35,66%    | 991.462    | 4,83%  | 4,12%       | 1,54     | 7,74  |
| 2022  | 8.080.552  | 12.738.604 | 22.947.439 | 36.175.543 | 35,21%    | 1.430.247  | 6,65%  | 5,31%       | 1,58     | 5,65  |
| 2023  | 8.539.791  | 13.804.165 | 24.579.398 | 39.731.423 | 34,74%    | 1.631.959  | 7,11%  | 5,68%       | 1,62     | 5,23  |
| 2024  | 9.035.703  | 14.967.210 | 26.365.492 | 43.673.180 | 34,27%    | 1.786.095  | 7,27%  | 5,81%       | 1,66     | 5,06  |
| 2025  | 9.572.615  | 16.239.484 | 28.324.831 | 48.051.723 | 33,80%    | 1.959.338  | 7,43%  | 5,94%       | 1,70     | 4,89  |
| 2026  | 10.148.241 | 17.621.937 | 30.553.431 | 53.054.575 | 33,21%    | 2.228.601  | 7,87%  | 6,01%       | 1,74     | 4,55  |
| 2027  | 10.765.702 | 19.124.756 | 33.033.967 | 58.683.265 | 32,59%    | 2.480.536  | 8,12%  | 6,08%       | 1,78     | 4,34  |
| 2028  | 11.428.391 | 20.759.127 | 35.798.695 | 65.026.622 | 31,92%    | 2.764.729  | 8,37%  | 6,16%       | 1,82     | 4,13  |
| 2029  | 12.140.003 | 22.537.336 | 38.884.551 | 72.187.313 | 31,22%    | 3.085.855  | 8,62%  | 6,23%       | 1,86     | 3,93  |
| 2030  | 12.904.563 | 24.472.887 | 42.627.192 | 80.840.435 | 30,27%    | 3.742.641  | 9,63%  | 6,30%       | 1,90     | 3,45  |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kabupaten Majalengka pada tahun 2030 berturut-turut adalah 9,63% dan 6,30%.

Tabel 4.5 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Subang

| Tahun | PMTB       |            | PDRB       |            | PMTB/PDRB | Delta PDRB | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR   |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|--------|
|       | ADHK       | ADHB       | ADHK       | ADHB       |           |            |        |             |          |        |
| 2010  | 4.668.271  | 4.668.271  | 19.817.219 | 19.817.219 | 23,56%    |            |        |             | 1,00     |        |
| 2011  | 5.128.847  | 5.266.223  | 20.465.660 | 22.364.301 | 23,55%    | 648.441    | 3,27%  | 9,87%       | 1,09     | 7,91   |
| 2012  | 5.510.937  | 6.008.203  | 20.588.973 | 23.052.644 | 26,06%    | 123.313    | 0,60%  | 7,45%       | 1,12     | 44,69  |
| 2013  | 5.442.056  | 6.159.931  | 21.431.369 | 24.732.536 | 24,91%    | 842.396    | 4,09%  | -1,25%      | 1,15     | 6,46   |
| 2014  | 6.030.433  | 7.394.452  | 22.506.484 | 26.815.273 | 27,58%    | 1.075.115  | 5,02%  | 10,81%      | 1,19     | 5,61   |
| 2015  | 6.271.028  | 8.185.411  | 23.696.761 | 29.307.918 | 27,93%    | 1.190.277  | 5,29%  | 3,99%       | 1,24     | 5,27   |
| 2016  | 6.539.362  | 8.825.441  | 24.976.918 | 31.530.210 | 27,99%    | 1.280.157  | 5,40%  | 4,28%       | 1,26     | 5,11   |
| 2017  | 6.915.764  | 9.545.916  | 26.250.716 | 34.259.779 | 27,86%    | 1.273.798  | 5,10%  | 5,76%       | 1,31     | 5,43   |
| 2018  | 7.311.360  | 10.435.088 | 27.401.290 | 37.542.713 | 27,80%    | 1.150.573  | 4,38%  | 5,39%       | 1,36     | 6,35   |
| 2019  | 7.551.062  | 11.126.362 | 28.572.444 | 39.853.001 | 27,92%    | 1.171.154  | 4,27%  | 3,77%       | 1,40     | 6,45   |
| 2020  | 7.135.638  | 10.292.258 | 27.905.234 | 40.249.781 | 25,57%    | (667.209)  | -2,34% | -5,50%      | 1,44     | -10,69 |
| 2021  | 7.395.214  | 10.962.473 | 28.712.125 | 42.562.105 | 25,76%    | 806.891    | 2,89%  | 3,64%       | 1,48     | 9,17   |
| 2022  | 7.742.111  | 11.786.388 | 29.854.589 | 45.449.846 | 25,93%    | 1.142.463  | 3,98%  | 4,69%       | 1,52     | 6,78   |
| 2023  | 8.130.671  | 12.703.149 | 31.125.565 | 48.629.770 | 26,12%    | 1.270.976  | 4,26%  | 5,02%       | 1,56     | 6,40   |
| 2024  | 8.547.621  | 13.696.485 | 32.479.513 | 52.044.323 | 26,32%    | 1.353.948  | 4,35%  | 5,13%       | 1,60     | 6,31   |
| 2025  | 8.996.146  | 14.775.036 | 33.924.402 | 55.716.552 | 26,52%    | 1.444.889  | 4,45%  | 5,25%       | 1,64     | 6,23   |
| 2026  | 9.473.859  | 15.938.574 | 35.522.224 | 59.761.663 | 26,67%    | 1.597.823  | 4,71%  | 5,31%       | 1,68     | 5,93   |
| 2027  | 9.982.892  | 17.194.273 | 37.248.607 | 64.156.028 | 26,80%    | 1.726.383  | 4,86%  | 5,37%       | 1,72     | 5,78   |
| 2028  | 10.525.548 | 18.549.951 | 39.114.786 | 68.934.877 | 26,91%    | 1.866.179  | 5,01%  | 5,44%       | 1,76     | 5,64   |
| 2029  | 11.104.314 | 20.014.126 | 41.133.156 | 74.137.326 | 27,00%    | 2.018.370  | 5,16%  | 5,50%       | 1,80     | 5,50   |
| 2030  | 11.721.882 | 21.596.090 | 43.503.135 | 80.149.041 | 26,94%    | 2.369.979  | 5,76%  | 5,56%       | 1,84     | 4,95   |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kabupaten Subang pada tahun 2030 berturut-turut adalah 5,76% dan 5,56%.

Tabel 4.6 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang

| Tahun | PMTB         |              | PDRB          |               | PMTB/PDRB | Delta PDRB  | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR  |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|-------|
|       | ADHK         | ADHB         | ADHK          | ADHB          |           |             |        |             |          |       |
| 2010  | 3.516.484,00 | 3.516.484,00 | 14.686.783,81 | 14.686.783,81 | 23,94%    |             |        |             | 1,00     |       |
| 2011  | 3.797.126,79 | 3.516.484,00 | 15.390.930,85 | 16.392.584,44 | 21,45%    | 704.147     | 4,79%  | 7,98%       | 1,07     | 5,39  |
| 2012  | 4.254.632,36 | 3.516.484,00 | 16.400.809,40 | 18.140.278,72 | 19,38%    | 1.009.879   | 6,56%  | 12,05%      | 1,11     | 4,21  |
| 2013  | 4.255.956,05 | 3.516.484,00 | 17.194.506,28 | 20.260.540,99 | 17,36%    | 793.697     | 4,84%  | 0,03%       | 1,18     | 5,36  |
| 2014  | 4.491.024,66 | 5.519.346,86 | 18.004.693,62 | 22.345.409,88 | 24,70%    | 810.187     | 4,71%  | 5,52%       | 1,24     | 5,54  |
| 2015  | 4.721.625,09 | 6.180.519,73 | 18.950.356,39 | 24.832.257,27 | 24,89%    | 945.663     | 5,25%  | 5,13%       | 1,31     | 4,99  |
| 2016  | 4.988.026,85 | 6.691.178,00 | 20.029.716,74 | 27.007.794,15 | 24,77%    | 1.079.360   | 5,70%  | 5,64%       | 1,35     | 4,62  |
| 2017  | 5.297.290,92 | 7.344.266,83 | 21.276.696,67 | 29.638.762,78 | 24,78%    | 1.246.980   | 6,23%  | 6,20%       | 1,40     | 4,25  |
| 2018  | 5.716.219    | 3.516.484    | 22.517.159    | 32.539.363    | 10,81%    | 1.240.462   | 5,83%  | 5,80%       | 1,45     | 4,61  |
| 2019  | 5.932.331    | 3.516.484    | 23.939.289    | 35.447.702    | 9,92%     | 1.422.130   | 6,32%  | 4,06%       | 1,49     | 4,17  |
| 2020  | 5.580.775    | 8.529.580    | 22.520.625    | 34.420.213    | 24,78%    | (1.418.664) | -3,45% | -5,93%      | 1,53     | -3,93 |
| 2021  | 5.799.457    | 9.095.788    | 23.403.090    | 36.705.084    | 24,78%    | 882.465     | 4,27%  | 3,92%       | 1,57     | 6,57  |
| 2022  | 6.092.493    | 9.799.082    | 24.585.608    | 39.543.153    | 24,78%    | 1.182.518   | 5,88%  | 5,05%       | 1,61     | 5,15  |
| 2023  | 6.421.859    | 10.585.705   | 25.914.730    | 42.717.484    | 24,78%    | 1.329.122   | 6,29%  | 5,41%       | 1,65     | 4,83  |
| 2024  | 6.776.594    | 11.441.507   | 27.346.222    | 46.170.984    | 24,78%    | 1.431.492   | 6,43%  | 5,52%       | 1,69     | 4,73  |
| 2025  | 7.159.628    | 12.374.602   | 28.891.917    | 49.936.391    | 24,78%    | 1.545.695   | 6,57%  | 5,65%       | 1,73     | 4,63  |
| 2026  | 7.569.158    | 13.385.195   | 30.544.532    | 54.014.530    | 24,78%    | 1.652.616   | 6,96%  | 5,72%       | 1,77     | 4,58  |
| 2027  | 8.007.236    | 14.480.176   | 32.312.349    | 58.433.207    | 24,78%    | 1.767.817   | 7,18%  | 5,79%       | 1,81     | 4,53  |
| 2028  | 8.476.088    | 15.667.084   | 34.204.350    | 63.222.849    | 24,78%    | 1.892.001   | 7,40%  | 5,86%       | 1,85     | 4,48  |
| 2029  | 8.978.129    | 16.954.174   | 36.230.282    | 68.416.765    | 24,78%    | 2.025.932   | 7,63%  | 5,92%       | 1,89     | 4,43  |
| 2030  | 9.515.982    | 18.350.488   | 38.400.731    | 74.051.440    | 24,78%    | 2.170.449   | 8,51%  | 5,99%       | 1,93     | 4,38  |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kabupaten Sumedang pada tahun 2030 berturut-turut adalah 8,51% dan 5,99%.

Tabel 4.7 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kuningan

| Tahun | PMTB      |            | PDRB          |               | PMTB/PDRB | Delta PDRB | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR  |
|-------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|-------|
|       | ADHK      | ADHB       | ADHK          | ADHB          |           |            |        |             |          |       |
| 2010  | 2.585.910 | 2.585.910  | 9.819.541,27  | 9.819.541,27  | 26,33%    |            |        |             | 1,00     |       |
| 2011  | 2.835.840 | 2.913.050  | 10.371.175,26 | 10.867.301,78 | 26,81%    | 551.634    | 5,62%  | 9,67%       | 1,05     | 5,14  |
| 2012  | 3.095.510 | 3.368.420  | 10.962.964,00 | 11.951.482,16 | 28,18%    | 591.789    | 5,71%  | 9,16%       | 1,09     | 5,23  |
| 2013  | 3.140.780 | 3.556.950  | 11.648.539,43 | 13.459.362,64 | 26,43%    | 685.575    | 6,25%  | 1,46%       | 1,16     | 4,58  |
| 2014  | 3.327.540 | 4.042.310  | 12.385.382,11 | 14.998.961,02 | 26,95%    | 736.843    | 6,33%  | 5,95%       | 1,21     | 4,52  |
| 2015  | 3.470.440 | 4.498.380  | 13.175.671,72 | 16.986.674,71 | 26,48%    | 790.290    | 6,38%  | 4,29%       | 1,29     | 4,39  |
| 2016  | 3.634.550 | 4.804.410  | 13.977.774,24 | 18.563.286,16 | 25,88%    | 802.103    | 6,09%  | 4,73%       | 1,33     | 4,53  |
| 2017  | 3.822.810 | 5.182.300  | 14.866.619,07 | 20.463.990,21 | 25,32%    | 888.845    | 6,36%  | 5,18%       | 1,38     | 4,30  |
| 2018  | 4.127.510 | 5.833.390  | 15.821.954,97 | 22.771.387,38 | 25,62%    | 955.336    | 6,43%  | 7,97%       | 1,43     | 4,32  |
| 2019  | 4.387.850 | 6.347.900  | 16.860.516,96 | 25.090.470,83 | 25,30%    | 1.038.562  | 6,56%  | 6,31%       | 1,47     | 4,22  |
| 2020  | 3.983.825 | 6.007.837  | 16.255.851,76 | 24.514.757    | 24,51%    | (604.665)  | -3,59% | -9,21%      | 1,51     | -6,59 |
| 2021  | 4.226.378 | 6.542.675  | 16.977.737,01 | 26.282.511    | 24,89%    | 721.885    | 4,44%  | 6,09%       | 1,55     | 5,85  |
| 2022  | 4.558.189 | 7.238.665  | 18.015.232,27 | 28.609.222    | 25,30%    | 1.037.495  | 6,11%  | 7,85%       | 1,59     | 4,39  |
| 2023  | 4.941.070 | 8.044.345  | 19.193.097,39 | 31.247.464    | 25,74%    | 1.177.865  | 6,54%  | 8,40%       | 1,63     | 4,19  |
| 2024  | 5.365.153 | 8.949.383  | 20.475.307,18 | 34.153.987    | 26,20%    | 1.282.210  | 6,68%  | 8,58%       | 1,67     | 4,18  |
| 2025  | 5.836.343 | 9.968.809  | 21.874.200,82 | 37.362.390    | 26,68%    | 1.398.894  | 6,83%  | 8,78%       | 1,71     | 4,17  |
| 2026  | 6.355.052 | 11.108.996 | 23.456.460,95 | 41.003.240    | 27,09%    | 1.582.260  | 7,23%  | 8,89%       | 1,75     | 4,02  |
| 2027  | 6.926.545 | 12.385.060 | 25.207.229,48 | 45.071.973    | 27,48%    | 1.750.769  | 7,46%  | 8,99%       | 1,79     | 3,96  |
| 2028  | 7.556.715 | 13.814.108 | 27.146.764,84 | 49.625.844    | 27,84%    | 1.939.535  | 7,69%  | 9,10%       | 1,83     | 3,90  |
| 2029  | 8.252.162 | 15.415.512 | 29.298.095,88 | 54.730.524    | 28,17%    | 2.151.331  | 7,92%  | 9,20%       | 1,87     | 3,84  |
| 2030  | 9.020.290 | 17.211.230 | 31.890.610,89 | 60.849.115    | 28,29%    | 2.592.515  | 8,85%  | 9,31%       | 1,91     | 3,48  |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kabupaten Kuningan pada tahun 2030 berturut-turut adalah 8,85% dan 9,31%.

Tabel 4.8 Target Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cirebon

| Tahun | PMTB         |              | PDRB          |               | PMTB/PDRB | Delta PDRB | LPE    | Growth PMTB | E Indeks | ICOR  |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|-------|
|       | ADHK         | ADHB         | ADHK          | ADHB          |           |            |        |             |          |       |
| 2010  | 2.737.605,20 | 2.737.605,20 | 10.093.709,30 | 10.093.709,30 | 27,12%    |            |        |             | 1,00     |       |
| 2011  | 3.016.124,70 | 3.091.351,00 | 10.677.433,00 | 11.178.433,00 | 27,65%    | 583.724    | 5,78%  | 10,17%      | 1,05     | 5,17  |
| 2012  | 3.320.757,80 | 3.531.875,30 | 11.309.383,00 | 12.284.555,70 | 28,75%    | 631.950    | 5,92%  | 10,10%      | 1,09     | 5,25  |
| 2013  | 3.493.861,40 | 3.881.985,20 | 11.863.884,90 | 13.611.965,20 | 28,52%    | 554.502    | 4,90%  | 5,21%       | 1,15     | 6,30  |
| 2014  | 3.755.381,88 | 4.411.866,25 | 12.541.219,47 | 15.037.851,20 | 29,34%    | 677.335    | 5,71%  | 7,49%       | 1,20     | 5,54  |
| 2015  | 3.930.172,76 | 4.873.622,96 | 13.269.243,42 | 16.703.880,15 | 29,18%    | 728.024    | 5,81%  | 4,65%       | 1,26     | 5,40  |
| 2016  | 4.109.953,80 | 5.198.403,82 | 14.077.046,46 | 18.139.081,42 | 28,66%    | 807.803    | 6,09%  | 4,57%       | 1,29     | 5,09  |
| 2017  | 4.302.333,29 | 5.561.726,11 | 14.893.138,76 | 19.821.298,75 | 28,06%    | 816.092    | 5,80%  | 4,68%       | 1,34     | 5,27  |
| 2018  | 4.546.714,41 | 6.060.256,43 | 15.817.650,01 | 21.634.236,70 | 28,01%    | 924.511    | 6,21%  | 5,68%       | 1,39     | 4,92  |
| 2019  | 4.685.813,30 | 6.383.441,33 | 16.812.908,00 | 23.456.830,10 | 27,21%    | 995.258    | 6,29%  | 3,06%       | 1,43     | 4,71  |
| 2020  | 4.476.540    | 6.574.055    | 16.234.933,93 | 23.841.931    | 27,57%    | (577.974)  | -3,44% | -4,47%      | 1,47     | -7,75 |
| 2021  | 4.608.737    | 6.952.543    | 16.926.017,22 | 25.533.867    | 27,23%    | 691.083    | 4,26%  | 2,95%       | 1,51     | 6,67  |
| 2022  | 4.784.237    | 7.408.665    | 17.917.493,96 | 27.746.267    | 26,70%    | 991.477    | 5,86%  | 3,81%       | 1,55     | 4,83  |
| 2023  | 4.979.157    | 7.909.677    | 19.040.428,39 | 30.246.812    | 26,15%    | 1.122.934  | 6,27%  | 4,07%       | 1,59     | 4,43  |
| 2024  | 5.186.438    | 8.446.412    | 20.259.732,87 | 32.994.136    | 25,60%    | 1.219.304  | 6,40%  | 4,16%       | 1,63     | 4,25  |
| 2025  | 5.407.369    | 9.022.505    | 21.586.544,94 | 36.018.388    | 25,05%    | 1.326.812  | 6,55%  | 4,26%       | 1,67     | 4,08  |
| 2026  | 5.640.469    | 9.637.065    | 23.083.298,36 | 39.439.139    | 24,44%    | 1.496.753  | 6,93%  | 4,31%       | 1,71     | 3,77  |
| 2027  | 5.886.495    | 10.292.873   | 24.734.824,84 | 43.250.259    | 23,80%    | 1.651.526  | 7,15%  | 4,36%       | 1,75     | 3,56  |
| 2028  | 6.146.253    | 10.992.927   | 26.559.152,56 | 47.502.567    | 23,14%    | 1.824.328  | 7,38%  | 4,41%       | 1,79     | 3,37  |
| 2029  | 6.420.610    | 11.740.453   | 28.576.704,89 | 52.254.143    | 22,47%    | 2.017.552  | 7,60%  | 4,46%       | 1,83     | 3,18  |
| 2030  | 6.710.488    | 12.538.931   | 31.000.609,18 | 57.926.416    | 21,65%    | 2.423.904  | 8,48%  | 4,51%       | 1,87     | 2,77  |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel hasil proyeksi di atas diketahui bahwa dengan adanya pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, LPE dan laju investasi Kota Cirebon pada tahun 2030 berturut-turut adalah 8,48% dan 4,51%.

#### 4.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagai kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri, maka dampak sosial menjadi perhatian utama yang akan disasar. Dengan adanya pengembangan kawasan industri ini diharapkan masyarakat sekitar kawasan akan terserap sebagai tenaga kerja sehingga kedepannya akan dapat mengurangi pengangguran di khususnya di sekitar Kawasan Metropolitan REBANA.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2018, teridentifikasi bahwa Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan, sehingga secara total nilai ini masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 7%, lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 5%. Kebutuhan dan pemenuhan tenaga kerja diidentifikasi dengan menggunakan data kecenderungan dan target kebutuhan berdasarkan luas lahan yang dikembangkan. Luas Kawasan Metropolitan REBANA yang akan dikembangkan adalah sebesar 43.912,94 Ha. Kemudian, merujuk pada standar pengembangan kawasan industri dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, yang mengatur bahwa 1 Ha kawasan industri akan membangkitkan tenaga kerja sebanyak 100 jiwa, maka di Kawasan Metropolitan REBANA ini akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sebanyak 4.391.294 jiwa.

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penyerapan tenaga kerja di Kawasan Metropolitan REBANA:

- Jumlah tenaga kerja yang terserap dari Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cirebon merupakan 80% dari proyeksi jumlah tenaga kerja berusia 15 tahun ke atas yang menganggur pada tahun 2020 hingga 2030.
- Jumlah tenaga kerja yang terserap dari Kabupaten Kuningan yang lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra IKM merupakan 60% dari proyeksi jumlah tenaga kerja berusia 15 tahun ke atas yang menganggur pada tahun 2020 hingga 2030.

Berikut adalah target penyerapan tenaga kerja di Kawasan Metropolitan REBANA.

**Tabel 4.9 Skenario Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Metropolitan REBANA**

| Kabupaten/Kota                                                 | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Cirebon                                                        | 87.538 | 86.074  | 84,634  | 83.219  | 81.827  | 80.458  | 79.113  | 77.789  | 76.488  | 75.209  | 73.951  | 72.714  | 871.476   |
| Majalengka                                                     | 21.939 | 21.081  | 20,256  | 19.463  | 18.702  | 17.970  | 17.267  | 16.591  | 15.942  | 15.319  | 14.719  | 14.143  | 191.454   |
| Sumedang                                                       | 34.758 | 34.214  | 33,679  | 33.152  | 32.633  | 32.123  | 31.621  | 31.126  | 30.639  | 30.160  | 29.688  | 29.224  | 348.258   |
| Indramayu                                                      | 59.129 | 58.567  | 58,010  | 57.459  | 56.913  | 56.372  | 55.836  | 55.306  | 54.780  | 54.259  | 53.744  | 53.233  | 614.478   |
| Subang                                                         | 57.294 | 58.981  | 60,718  | 62.505  | 64.345  | 66.240  | 68.190  | 70.197  | 72.264  | 74.391  | 76.581  | 78.836  | 753.248   |
| Kuningan                                                       | 28.962 | 28.869  | 28,776  | 28.684  | 28.591  | 28.500  | 28.408  | 28.317  | 28.226  | 28.135  | 28.045  | 27.954  | 312.504   |
| Kota Cirebon                                                   | 10.958 | 10.542  | 10,143  | 9.758   | 9.389   | 9.033   | 8.691   | 8.361   | 8.044   | 7.740   | 7.446   | 7.164   | 96.311    |
| Tenaga Kerja dari 7 Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan REBANA |        | 298.328 | 296.216 | 294.240 | 292.400 | 290.695 | 289.125 | 287.688 | 286.384 | 285.213 | 284.174 | 283.269 | 3.187.731 |
| Tenaga Kerja Luar 7 Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan REBANA |        | 67.614  | 69.726  | 71.701  | 91.838  | 93.543  | 95.114  | 96.551  | 152.746 | 153.917 | 154.955 | 155.861 | 1.203.563 |
| Jumlah                                                         |        | 365.941 | 365.941 | 365.941 | 384.238 | 384.238 | 384.238 | 384.238 | 439.129 | 439.129 | 439.129 | 439.129 | 4.391.294 |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja di Kawasan Metropolitan REBANA dari tahun 2020 hingga tahun 2030 terus meningkat. Pada tahun 2030, akumulasi jumlah tenaga kerja yang terserap dari kabupaten dan kota di Kawasan Metropolitan REBANA mencapai mencapai 72,59%dari total tenaga kerja yaitu sebesar 3.187.731 tenaga kerja, sedangkan 27,41% yaitu sebesar 1.203.563 tenaga kerja berasal dari luar kabupaten/kota tersebut.

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan

Untuk dapat mencapai tujuan pengembangan kawasan yang diinginkan, serta memenuhi indikator utama capaian pengembangan, maka perlu disusun kebijakan dan strategi pengembangan kawasan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Matriks Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA

| TUJUAN          | “Terwujudnya Kawasan Metropolitan REBANA sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur-utara berbasis pada pengembangan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan” |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARGET CAPAIAN  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | Peningkatan laju investasi                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | Peningkatan ketersediaan kesempatan kerja                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| INDIKATOR UTAMA | Peningkatan LPE kawasan hingga 6,83% pada tahun 2030                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | Peningkatan laju investasi di kawasan hingga 6,07% pada tahun 2030                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | Penambahan jumlah kesempatan kerja di kawasan hingga 4,39 juta tenaga kerja                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| KEBIJAKAN UTAMA | Integrasi pengembangan wilayah antar KPI dengan SIKM dan Kawasan perkotaan-perdesaan                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | Peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan 13 KEK dan pengembangan konektivitas tinggi antar kawasan                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | Pengembangan sistem vokasi yang terhubung dengan industri, kewirausahaan, dan SDM inovatif                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| STRATEGI UTAMA  | Mengembangkan KPI, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan                                                                                                                                                                       | Mengembangkan sistem rantai logistik terintegrasi antara industri besar dan IKM                                                                                                                  | Promosi dan Pengembangan Kerjasama Kawasan                                                                                   | Mengembangkan 13 KEK                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mengembangkan infrastruktur pendukung konektivitas kawasan                                                                                                                                                                                     | Mengembangkan kurikulum dan sistem vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri ( <i>link and match</i> )                                                                                      | Mengembangkan kewirausahaan, start-up, dan SDM inovatif                                                                                                                                                |
| PROGRAM UTAMA   | -Pengembangan Lahan 13 KPI<br>-Revitalisasi SIKM dan Pengembangan SIKM baru<br>-Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan                                                                                                       | -Kajian Master Plan dan Business Plan<br>Pengembangan Sistem Kawasan Industri Terpadu REBANA<br>-Pengembangan Sistem Logistik Digital Terintegrasi Industri Besar-IKM<br>-Pengembangan kemitraan | -Kerja sama Bisnis Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan<br>- Sistem Promosi Kawasan berbasis media daring<br>-event business | -Penyiapan badan usaha pengusul, pembangun dan pengelola KEK<br>-Penyiapan persyaratan dan perizinan pengusulan KEK<br>-Penyiapan studi kelayakan ekonomi dan finansial<br>-Fasilitasi Legalisasi RDTR Kertajati-Jatitujuh dan RDTR Patimban<br>-Penyusunan dokumen lingkungan<br>-Penyusunan perangkat | -Pengembangan pelabuhan Patimban sebagai pintu gerbang ekspor impor<br>-Pengembangan bandara internasional Kertajati<br>-Pengembangan jaringan jalan, jembatan, jalan bebas hambatan, dan fly over penghubung antar kawasan<br>-Reaktivasi dan | -Pengembangan kurikulum sekolah vokasi SMK dan Politeknik<br>-Link and match sekolah vokasi dan industri<br>-Pengembangan kerjasama industri dengan BBPLK, BLK Provinsi dan BLK Kabupaten/Kota | -Pencetakan wirausaha dan start-up baru<br>-Pengembangan creative hub, material centre, dan testing lab<br>-Pengembangan Talent Pool dan pelatihan kerja berbasis kompetensi industri teknologi tinggi |

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                                                                                                                                                      | kolaboratif antar industri besar dan IKM | meeting dan promosi Kawasan                                                                                                                                                                                                                | regulasi dan deregulasi fiskal dan non fiskal<br>-Penyiapan insentif untuk investasi produk berorientasi masa depan dan ramah lingkungan | pembangunan jalur rel kereta api penumpang dan logistik<br>-Pengembangan SAUM ciayumajakuning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| KEBIJAKAN PENDUKUNG | Pengembangan Sistem Pendukung (Infrastruktur, Kelembagaan, R&D, Konservasi Lingkungan)                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| STRATEGI PENDUKUNG  | Pengembangan tata ruang, industri ramah lingkungan dan konservasi lahan pangan berkelanjutan                                                                                                                         |                                          | Pengembangan fasilitas kesehatan dan utilitas pendukung                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                               | Pengembangan kelembagaan, riset dan teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PROGRAM PENDUKUNG   | -penyusunan RDTR 10 KPI-regulasi insentif disinsentif industri ramah lingkungan-pembinaan mekanisme produksi bersih dan simbiosis industri-konservasi KP2B dan insentif untuk petani-pengawasan dan penegakkan hukum |                                          | -pengembangan fasilitas kesehatan dan pengawasan HSE-pengembangan jaringan energi-pengembangan jaringan telekomunikasi dan IT-pengembangan jaringan sumber daya air-pengembangan jaringan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan |                                                                                                                                          |                                                                                               | -pembentukan kelembagaan pengelola kawasan-peningkatan kapasitas BUMD-pengembangan kemitraan dengan universitas-pengembangan kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan-pengembangan lembaga technopark atau R&D kawasan sebagai think-tank-Fasilitasi HAKI, modal ventura dan hibah untuk riset dan pengembangan teknologi baru |  |

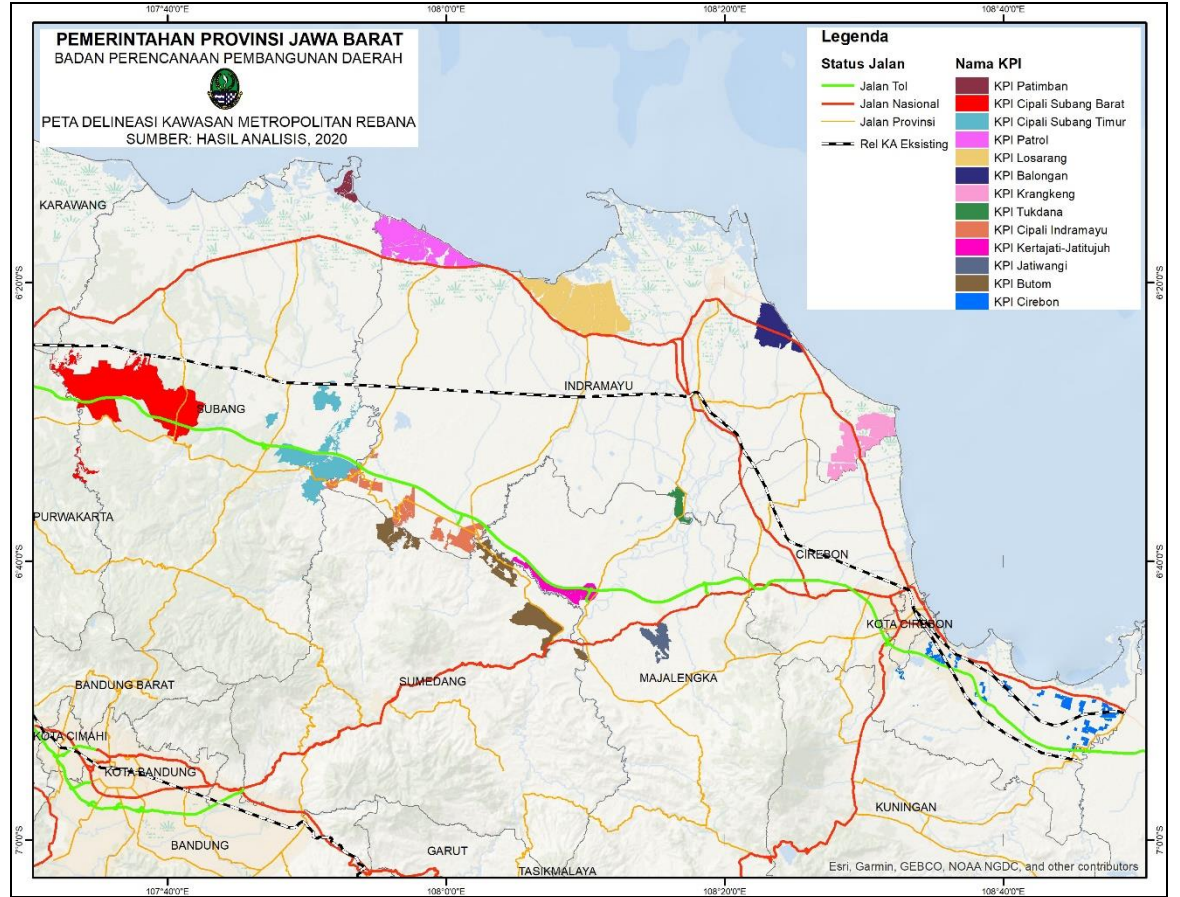
Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.4 Arahan Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster industri

4.4.1 Arahan Pengembangan Sektor

Rencana pembangunan Kawasan Metropolitan REBANA berlokasi pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon. Terdapat 13 titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat tiga titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, enam titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, dua titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, satu titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan satu titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial* park atau kawasan industri berwawasan lingkungan. Sementara itu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon menjadi wilayah pendukung dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

Gambar 0.2 Titik Pengembangan Kawasan pada Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 serta mempertimbangkan karakteristik daya dukung lingkungan dan keterkaitan masukan dan keluaran pada sektor-sektor pada masing-masing kabupaten, terdapat arahan pengembangan sektor pada masing-masing kabupaten yang menjadi bagian Kawasan Metropolitan REBANA. Berikut arahan pengembangan sektor pada ke-lima kabupaten.

#### 4.4.1.1 Kabupaten Subang

Dengan luas kawasan pengembangan sebesar 15.755,47 ha, sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Logam, Mesin & elektronik / Metal
- Sektor Industri pengolahan makanan dan minuman
- Sektor Logistik (Dry Port)
- Sektor Industri Alat Transportasi (Otomotif dan Perkapalan)
- Sektor Industri Pengolahan Makanan

#### 4.4.1.2 Kabupaten Indramayu

Dengan luas kawasan pengembangan sebesar 19.863,16 ha, sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Kimia Hulu (Pengolahan Garam)
- Sektor Industri Pengolahan Ikan
- Sektor Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
- Sektor Industri Hulu Pertanian
- Sektor Industri Hulu Petrokimia
- Sektor Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik
- Sektor Industri Perkapalan

#### 4.4.1.3 Kabupaten Majalengka

Dengan luas kawasan pengembangan sebesar 2.386,77 ha, sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Penerbangan
- Sektor Jasa Penerbangan, Cargo, dan Logistik
- Sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Sektor Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik

#### 4.4.1.4 Kabupaten Sumedang

Dengan luas kawasan pengembangan sebesar 4.092,25 ha, sektor yang dikembangkan adalah:

- Sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Sektor Industri Tekstil
- Sektor Industri Logistik
- Sektor Industri Agroindustri

#### 4.4.1.5 Kabupaten Cirebon

Dengan luas Kawasan pengembangan sebesar 1.815,29 ha, sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Perikanan
- Sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Sektor Industri Furniture dan Barang kayu
- Sektor Industri Perkapalan
- Sektor Industri Pakan
- Sektor Industri Bahan Galian Non-Logam

#### 4.4.1.6 Kabupaten Kuningan

Sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
- Sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Sektor Industri Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
- Sektor Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan
- Sektor Industri Bahan Galian Bukan Logam
- Sektor Industri Logam

#### 4.4.1.7 Kota Cirebon

Sektor yang dikembangkan adalah,

- Sektor Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu
- Sektor Industri Barang dari Kayu
- Sektor Industri Bahan Galian Bukan Logam
- Sektor Industri Tekstil

#### 4.4.2 Arahan Pengembangan Klaster Industri

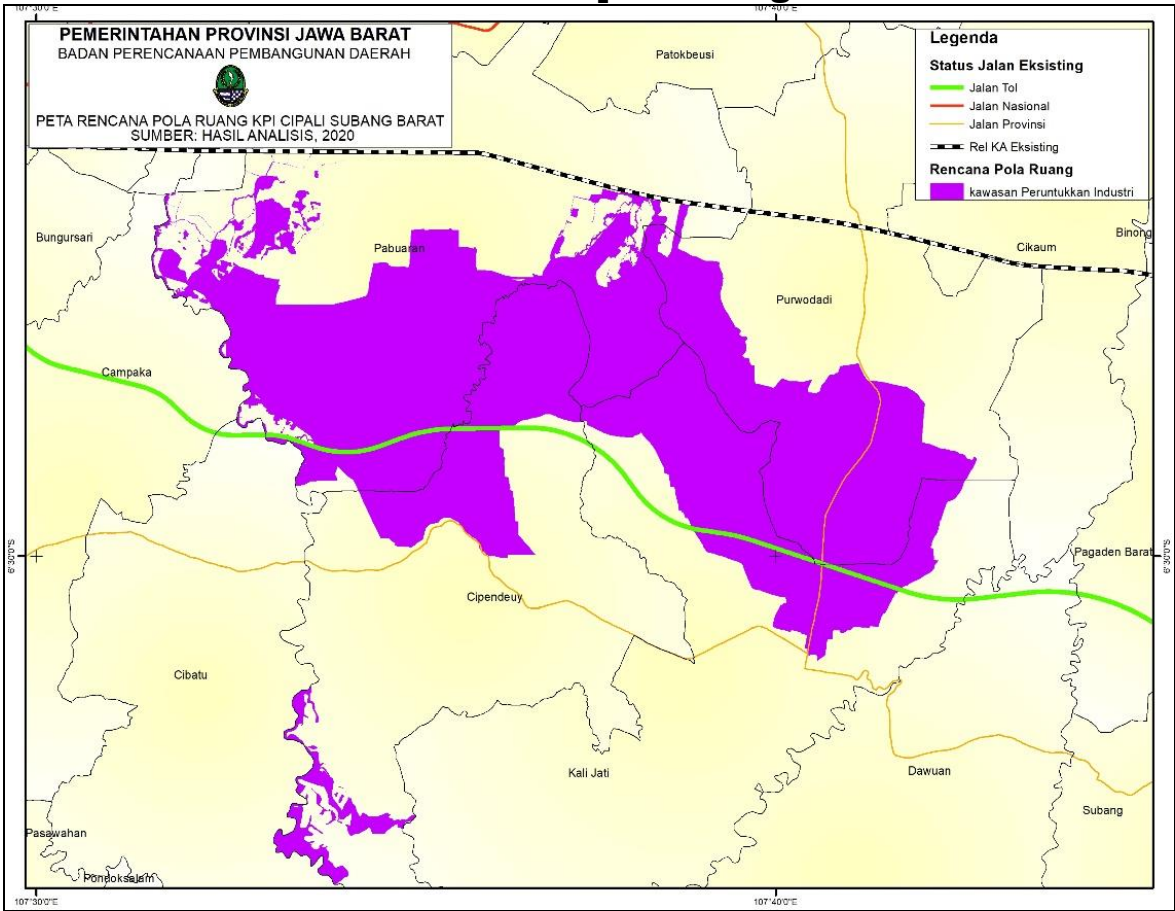
Mengacu pada arahan pengembangan sektor dan arahan pengembangan komoditas unggulan, terdapat arahan pengembangan klaster industri pada sebelas titik pengembangan Kawasan di dalam Kawasan Metropolitan REBANA. Arahan Pengembangan Klaster Industri tersebut sebagai berikut.

##### 1. KPI Cipali Subang Barat

Arahan pengembangan klaster industri KPI Cipali Subang Barat adalah sebagai berikut.

- Industri logam, mesin dan elektronik / metal
- Industri pengolahan makanan dan Minuman
- Industri karton dan kertas

Gambar 4.3 KPI Cipali Subang Barat



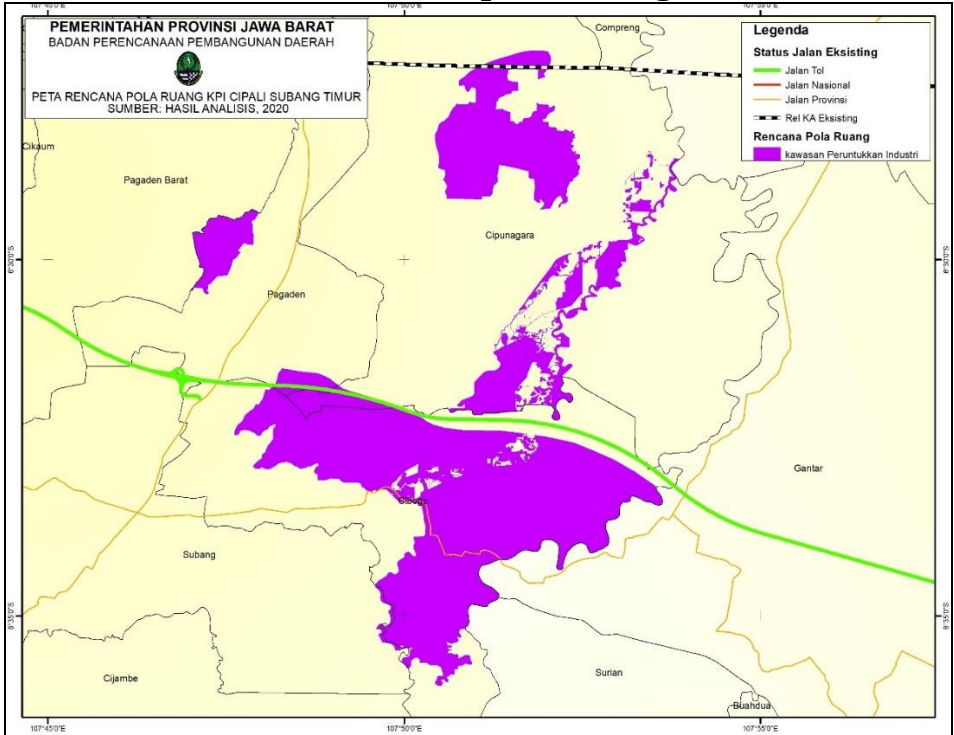
Sumber: Hasil Analisis, 2020

2. KPI Cipali Subang Timur

Arahan pengembangan klaster industri KPI Cipali Subang Timur adalah sebagai berikut.

- Industri logam, mesin dan elektronik / metal
- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Logistik (dry port)
- Industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan)
- Industri pengolahan Makanan dan Minuman
- Industri pertahanan

Gambar 4.4 KPI Cipali Subang Timur



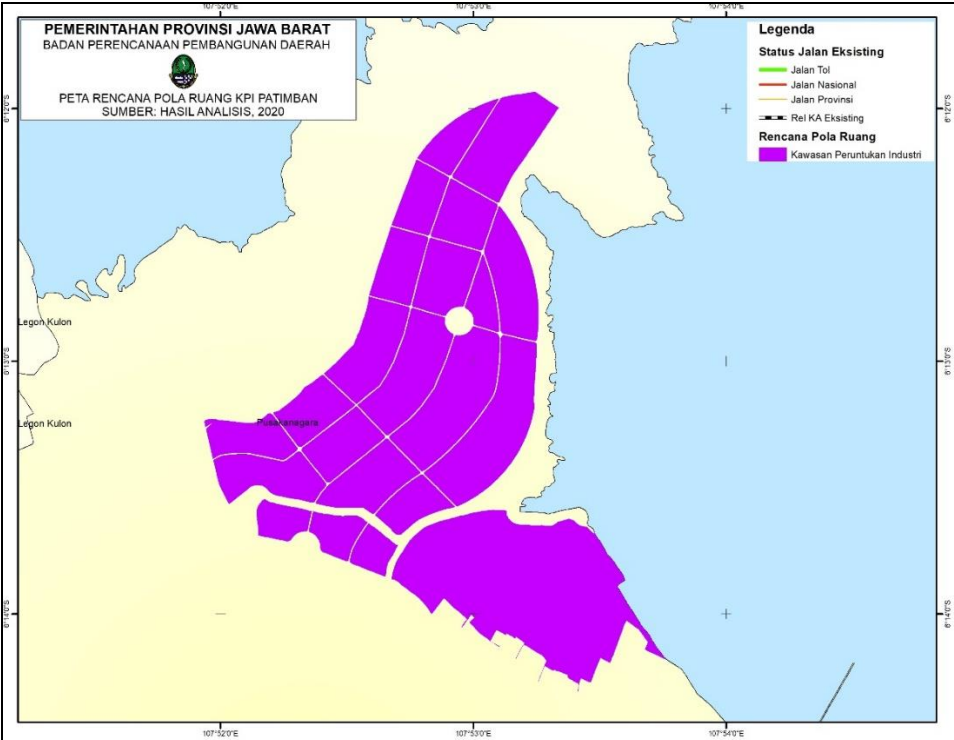
Sumber: Hasil Analisis, 2020

3. KPI Patimban

Arahan pengembangan klaster industri Kota Baru Patimban adalah sebagai berikut.

- Industri logam, mesin dan elektronik / metal
- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Logistik dan Pergudangan Terpadu

Gambar 4.5 KPI Patimban



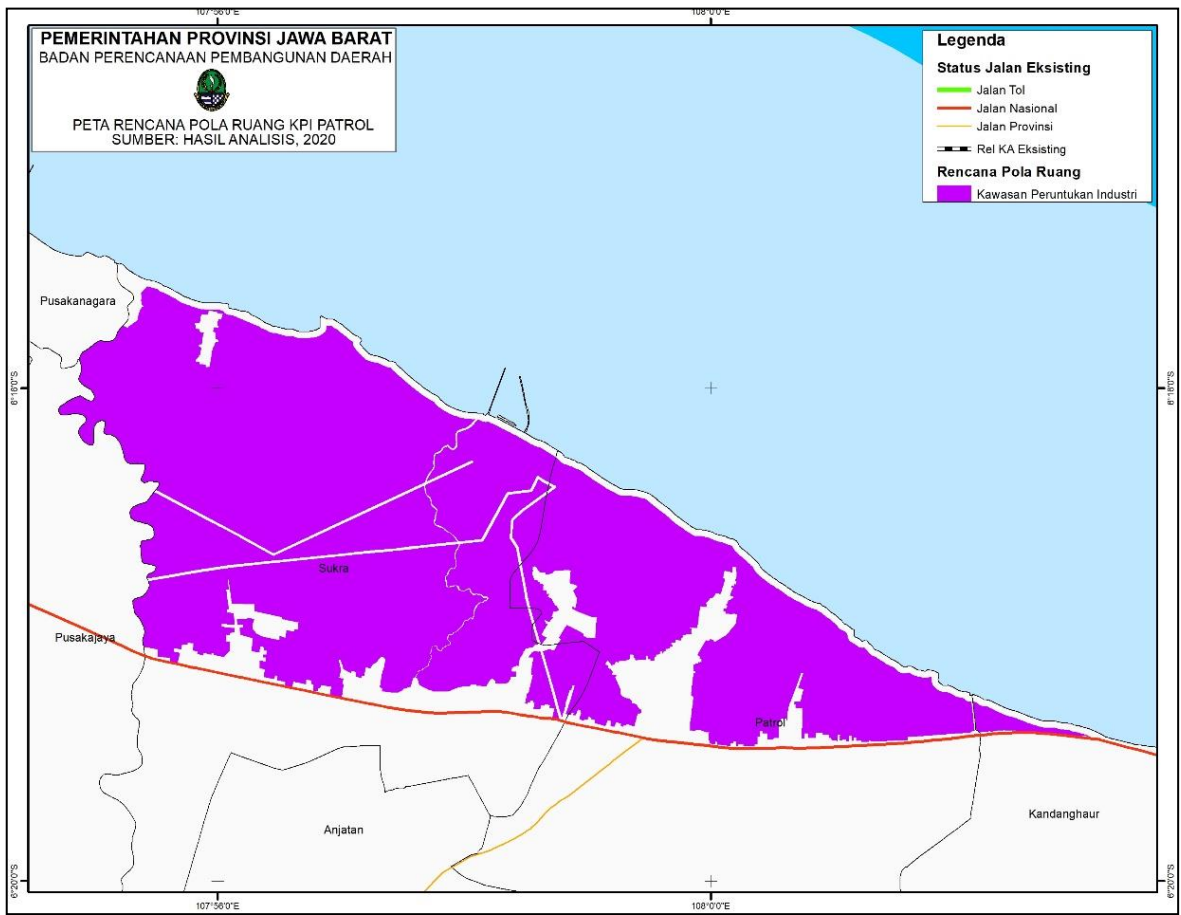
Sumber: Hasil Analisis, 2020

4. KPI Patrol

Arahan pengembangan klaster industri KPI Patrol adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri pengolahan ikan
- Industri bahan penolong
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastik
- Industri perkapalan

Gambar 4.6 KPI Patrol



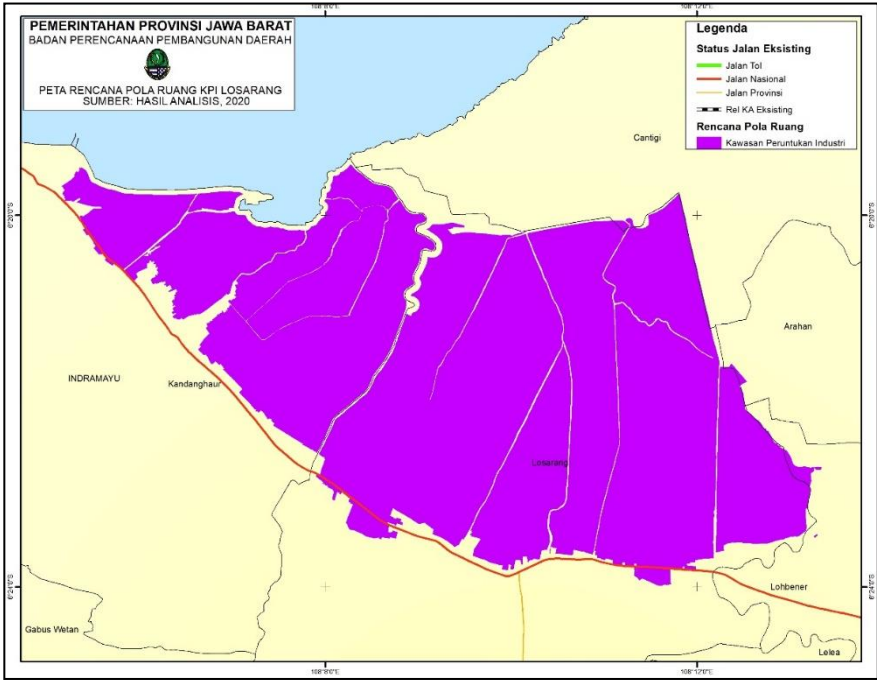
Sumber: Hasil Analisis, 2020

5. KPI Losarang

Arahan pengembangan klaster industri KPI Losarang adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri pengolahan ikan
- Industri bahan penolong
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastik

Gambar 4.7 KPI Losarang



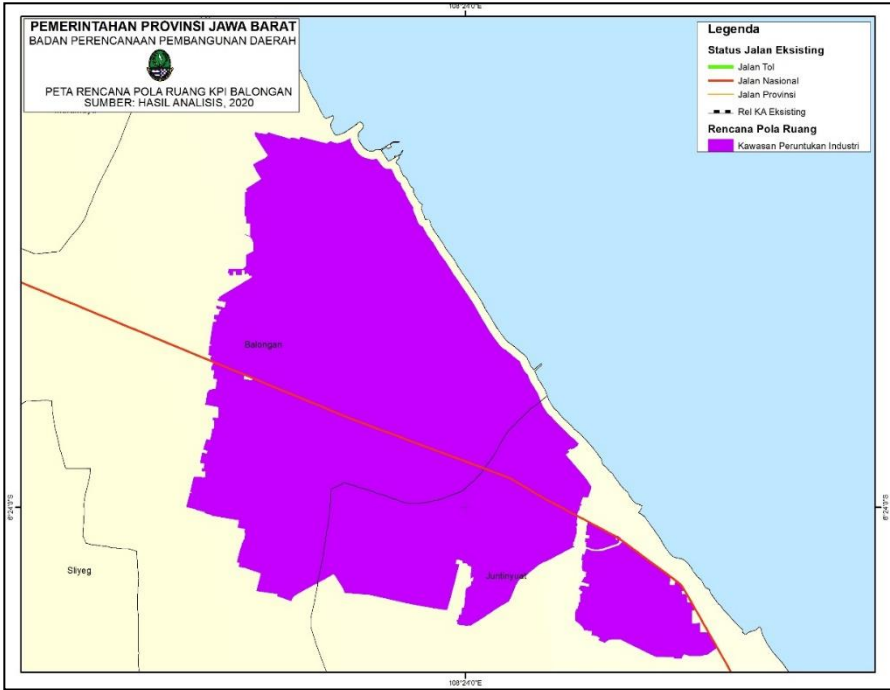
Sumber: Hasil Analisis, 2020

6. KPI Balongan

Arahan pengembangan klaster industri KPI Balongan adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri pengolahan ikan
- Industri bahan penolong
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastik

Gambar 4.8 KPI Balongan



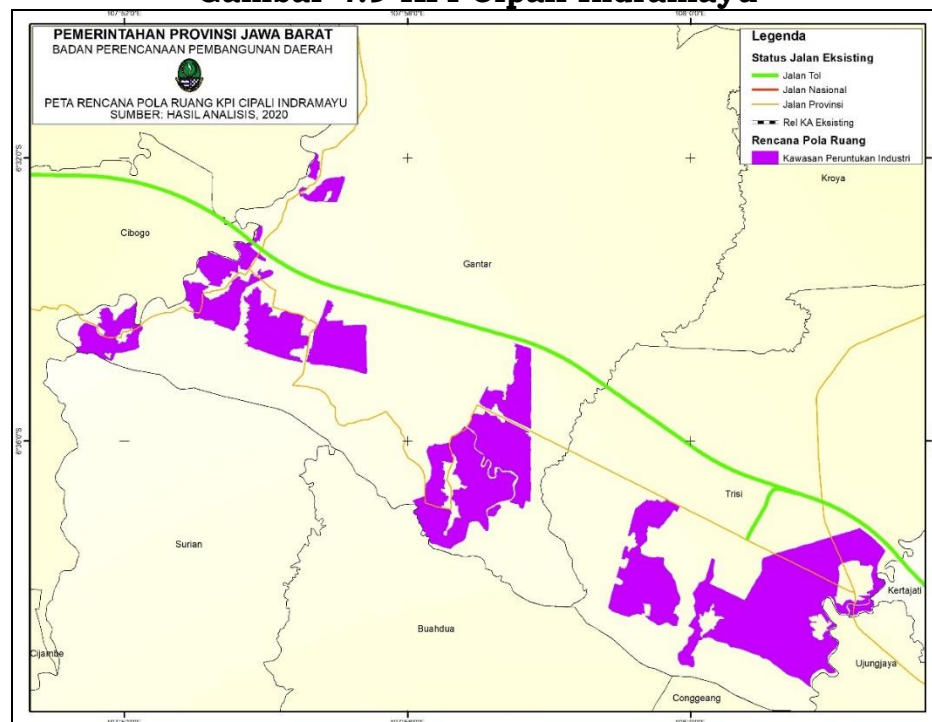
Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 7. KPI Cipali Indramayu

Arahan pengembangan klaster industri KPI Cipali Indramayu adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri pengolahan ikan
- Industri bahan penolong
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastic
- Industri pengolahan bahan makanan
- Industri metal stamping electrical automotif
- Industri knitting (rajut) dan garmen
- Industri Ban dalam dan ban luar sepeda motor

**Gambar 4.9 KPI Cipali Indramayu**



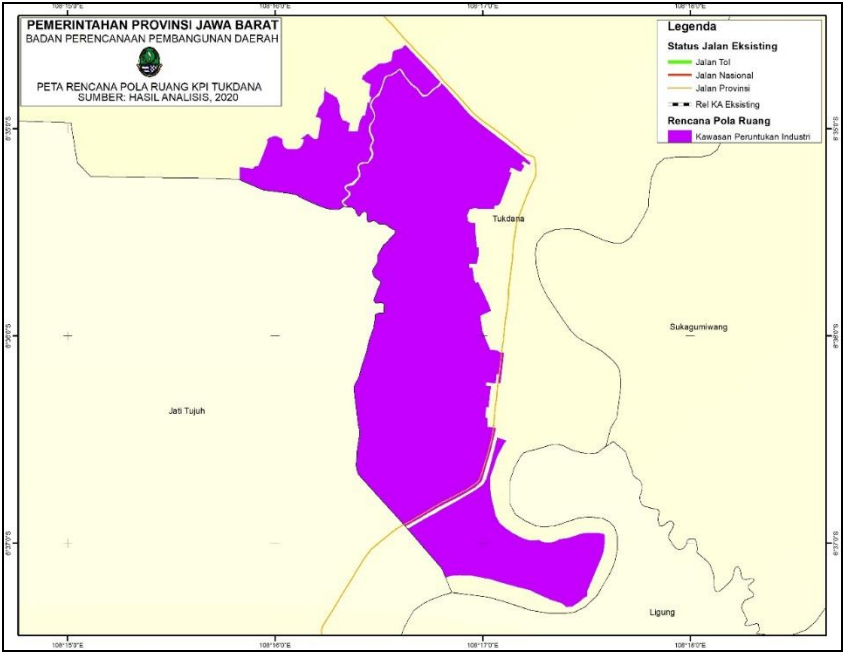
*Sumber: Hasil Analisis, 2020*

## 8. KPI Tukdana

Arahan pengembangan klaster industri KPI Tukdana adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Industri mesin dan alat-alat pertanian
- Industri bahan penolong
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastik

Gambar 4.10 KPI Tukdana



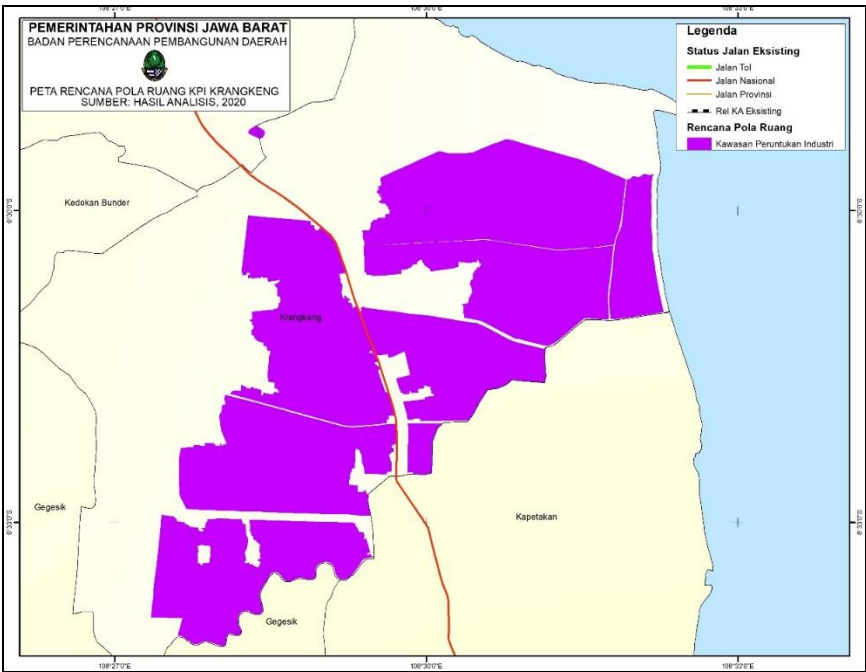
Sumber: Hasil Analisis, 2020

9. KPI Krangkeng

Arahan pengembangan klaster industri KPI Kertajati-Jatitujuh adalah sebagai berikut.

- Industri kimia hulu (pengolahan garam)
- Industri bahan penolong
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara
- Industri hulu agro
- Industri petrokimia hulu
- Industri resin sintetik dan bahan plastic
- Industri pengolahan bahan makanan
- Industri Perkapalan

Gambar 4.11 KPI Krangkeng



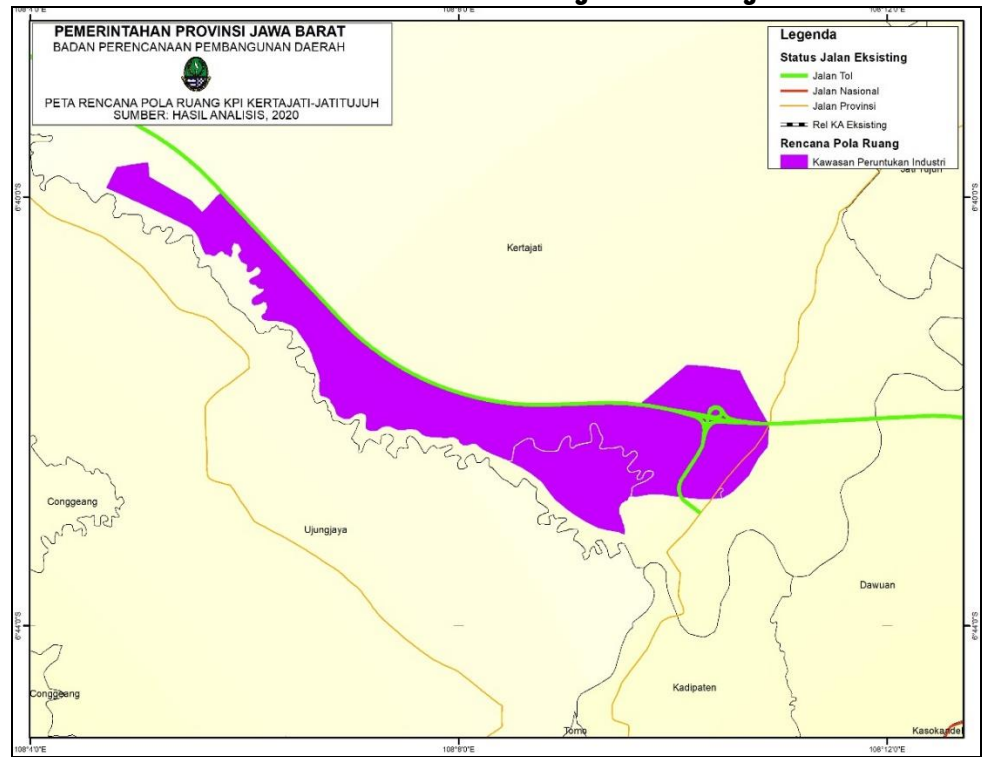
Sumber: Hasil Analisis, 2020

10. KPI Kertajati-Jatitujuh

Arahan pengembangan klaster industri KPI Kertajati-Jatitujuh adalah sebagai berikut.

- Penerbangan
- Cargo/logistik
- Industri elektronik, sensor, robotika
- Industri alat angkut berbasis elektrik
- Industri pertahanan
- Industri tekstil
- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Industri resin sintetik dan plastik

**Gambar 4.12 KPI Kertajati-Jatitujuh**



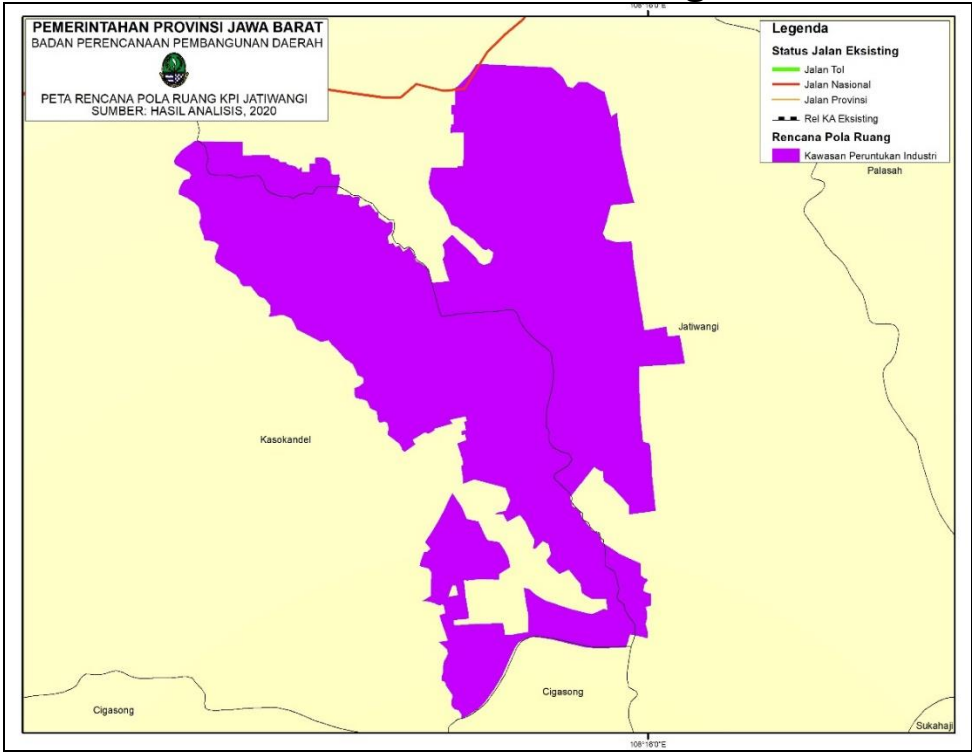
*Sumber: Hasil Analisis, 2020*

11. KPI Jatiwangi

Arahan pengembangan klaster industri KPI Jatiwangi adalah sebagai berikut.

- Industri tekstil
- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Industri resin sintetik dan plastik
- Industri bahan bangunan
- Industri pengolahan *hotmix* dan beton
- Industri furnitur dan barang dari kayu

Gambar 4.13 KPI Jatiwangi



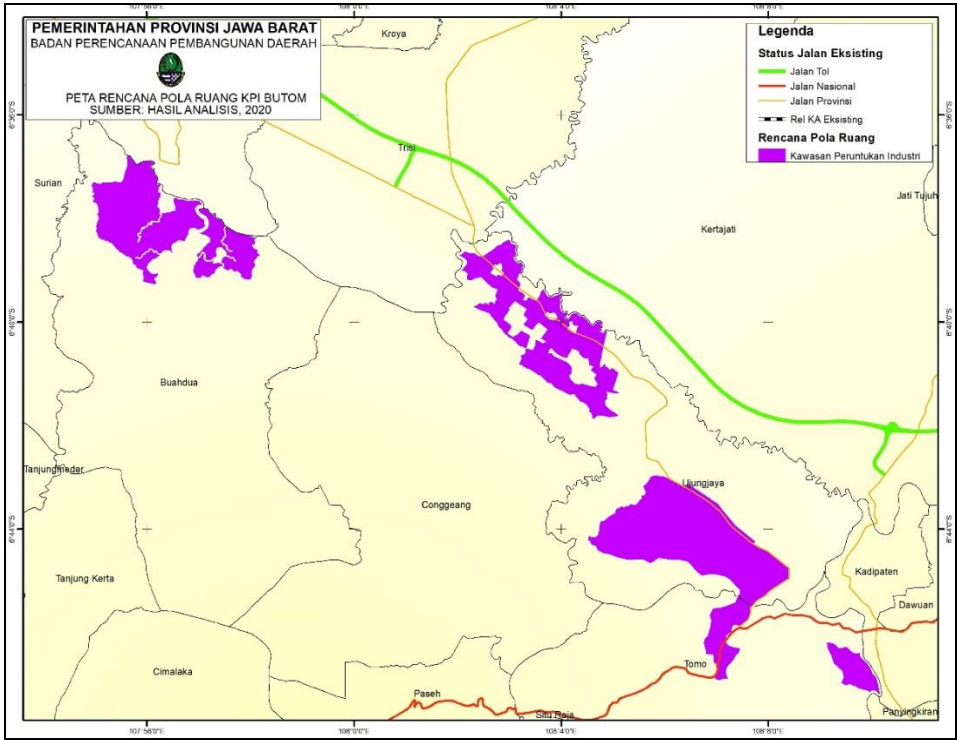
Sumber: Hasil Analisis, 2020

12. KPI Butom

Arahan pengembangan klaster industri KPI Butom adalah sebagai berikut.

- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Industri Tekstil
- Logistik dan Pergudangan
- Agroindustri
- Industri furnitur dan barang dari kayu

Gambar 4.14 KPI Butom



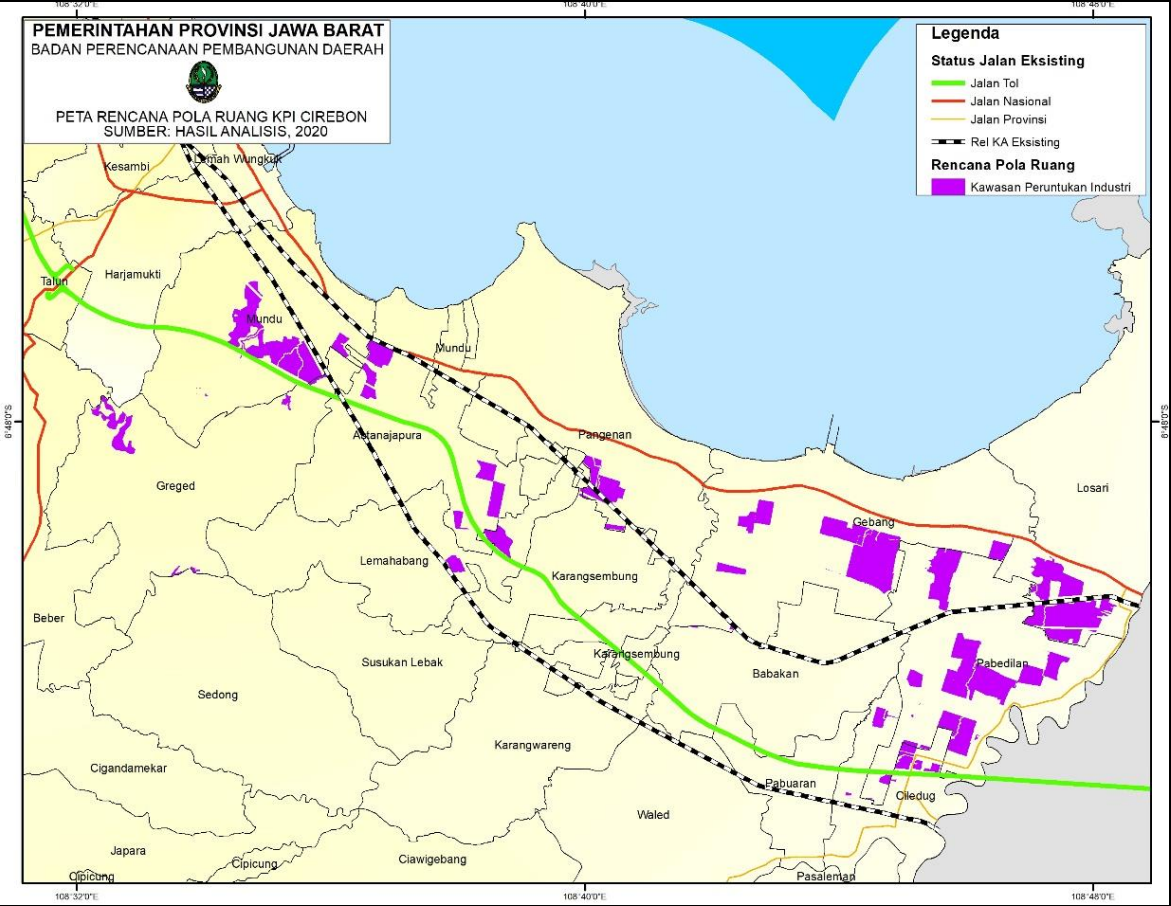
Sumber: Hasil Analisis, 2020

13. KPI Cirebon

Arahan pengembangan klaster industri KPI Cirebon adalah sebagai berikut.

- Industri pengolahan makanan dan minuman
- Industri furnitur dan barang dari kayu
- Industri perkapalan
- Industri pakan
- Industri bahan galian non logam
- Industri bahan bangunan
- Industri pengolahan garam konsulasi
- Industri pengolahan hotmix dan beton

Gambar 4.15 KPI Cirebon



Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5 Arahan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah

Arahan pengembangan struktur ruang disusun berdasarkan strategi pengembangan kawasan pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten, serta mempertimbangkan pusat kegiatan yang ditetapkan dalam arahan kebijakan kawasan. Struktur ruang wilayah disusun ke dalam beberapa pembahasan yaitu sistem perkotaan, sistem jaringan prasarana, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### 4.5.1 Sistem Pusat-pusat Pertumbuhan

Kawasan Metropolitan REBANA meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Majalengka (Kertajati), Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang (Patimban) dan Kabupaten Sumedang (Ujung Jaya dan Tomo) serta kawasan pendukung yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Sistem perkotaan ini disusun berdasarkan arahan kawasan sebagai pengembangan industri dan juga kegiatan industri yang nantinya akan dikembangkan pada kawasan. Adapun arahan kawasan berdasarkan RTRW Kabupaten terkait adalah sebagai berikut.

##### 4.5.1.1 Arahan dalam RTRW Kabupaten

Arahan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA dalam RTRW Kabupaten sebagai berikut.

##### i. Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi dalam pengembangan kegiatan industri, salah satunya adalah Kecamatan Kertajati.

- Arahan dalam RTRW Kabupaten, Kecamatan Kertajati masuk dalam fungsi pelayanan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat), pengembangan kawasan perkotaan *aerocity* dan pertanian;
- Pengembangan kawasan kertajati sebagai *aerocity* merupakan arahan strategis nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- Kegiatan industri yang akan dikembangkan pada kawasan berupa Pengembangan *Aerocity*: Industri pesawat terbang, MRO, energi (*power plant*), perumahan, industri kreatif (IT, periklanan, *marketing*, desain, manufaktur), fasilitas pendidikan, pergudangan, FTZ, *logistic Hub*, perdagangan dan jasa lainnya.

##### ii. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon memiliki fungsi yang dominan pada bidang industri terutama pada industri pengolahan. Perkembangan Kabupaten Cirebon yang pesat dalam kegiatan industri membuat kawasan ini menjadi sentra bagi kegiatan industri.

- Arahan RTRWN Kabupaten Cirebon masuk dalam kawasan PKN dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
- Arahan dalam RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) memiliki fungsi pelayanan sebagai PKL yang terdapat pada kecamatan Ciledug, Lemahabang, Mundu, Greged, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Gebang, Babakan, Losari, dan Pabedilan;
- Kawasan perkotaan dengan fungsi pelayanan PKL terdapat pada Sumber, Palimanan, Arjawinangun dan Weru dengan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.

##### iii. Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan kawasan industri. Beberapa arahan kebijakan tata ruang dalam pengembangan kawasan adalah sebagai berikut.

- Kabupaten Indramayu termasuk dalam kawasan PKW dengan peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional;
  - Kawasan Industri yang tersebar di Kabupaten Indramayu terdapat pada Tukdana, Losarang, Cantigi, Lohbener, Juntinyuat Gantar, Terisi, Sukra, Patrol dan Kandanghaur dengan fungsi kawasan sebagai PPK dan PKL;
  - Kegiatan industri yang berkembang pada kawasan berupa industri pengolahan perikanan, industri makan, industri dan pertambangan.
- iv. Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan Metropolitan REBANA karena berbatasan langsung dengan kawasan Kertajati, dimana kawasan ini dianggap dapat mendukung kegiatan industri yang ada di Kertajati.
- Pengembangan industri pada kawasan berada pada Kecamatan Ujung Jaya dan Tomo dengan kegiatan industri yang berkembang adalah industri manufaktur;
  - Kecamatan Ujung Jaya dan Tomo masuk dalam fungsi pelayanan PPK masuk dalam kawasan Butom Gede;
  - Kecamatan Ujung Jaya dan Tomo memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan dan pengembangan kegiatan industri.
- v. Kabupaten Subang
- Kabupaten Subang merupakan salah satu kawasan dalam pengembangan kegiatan industri yaitu terletak pada Patimban.
- Patimban berada di Kecamatan Pusakanagara dengan arahan fungsi pelayanan kawasan sebagai PKL;
  - Kawasan peruntukan industri terdapat pada Pabuaran, Cipeundeuy, Kalijati, Purwodadi, Cikaum, Pagaden, Cibogo dengan fungsi PPL.
- vi. Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari metropolitan REBANA yang merupakan penunjang dari segi jasa lingkungan.
- Kawasan perkotaan yang masuk ke dalam konstelasi metropolitan terdiri dari PKL Cilimus dan PPK Mandirancan
  - Pengembangan kawasan industri berupa industri menengah dengan arahan industri pengolahan hasil pertanian di kecamatan cilimus, cigandamekar, cipicung, dan garawangi
  - Kawasan wisata alam dan sumber air di kaki gunung ceremai dan linggarjati merupakan pusat pengembangan jasa lingkungan
- vii. Kota Cirebon
- Kota Cirebon memiliki fungsi utama sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.
- Pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional berada di PPK Kejaksan dan SPPK Gunung Sari-Cipto
  - Pusat pelayanan transportasi berada di SPPK Pelabuhan Cirebon
  - Pusat pelayanan pendidikan tinggi berada di SPPK Majasem; dan
  - Pusat sarana pelayanan umum berada di SPPK Ciremai Raya

Adapun arahan kawasan dalam RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRW Kabupaten

| KABUPATEN            | ARAHAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Subang     | <ul style="list-style-type: none"><li>• sebagai daerah agribisnis, pariwisata, dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran, dan pesisir</li><li>• meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, dan industri kreatif</li><li>• Pengembangan industri berbasis pengolahan hasil pertanian setempat, pengolahan pertambangan setempat, pengolahan hasil tangkapan dan budidaya ikan setempat</li></ul>                                                                                                                        |
| Kabupaten Majalengka | <ul style="list-style-type: none"><li>• sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan</li><li>• pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia</li><li>• pengembangan industri besar, menengah, dan kecil yang terpadu (terutama di Kertajati)</li><li>• pengembangan industri yang hemat dalam penggunaan air dan yang bersifat non-polutif</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabupaten Cirebon    | <ul style="list-style-type: none"><li>• sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan</li><li>• pengembangan kawasan industri, agropolitan dan minapolitan terpadu, serta pengembangan agroindustri dan industri kecil mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabupaten Indramayu  | <ul style="list-style-type: none"><li>• pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah Daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri</li><li>• pengembangan industri diarahkan pada:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pengembangan minapolitan garam, dan perikanan budidaya di Losarang</li><li>b. pengolahan hasil perikanan di Kadanghaur dan Sukra (KPI Patrol)</li><li>c. pengembangan industri kecil dan mikro makanan dan minuman di Lohbener, Juntinyuat, dan Kandanghaur</li><li>d. pengembangan tenun gedongan dan warig fdi Juntinyuat</li><li>e. pengembangan industri grabah/keramik di Kandanghaur</li></ul></li></ul> |
| Kabupaten Sumedang   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendukung kawasan <i>aerocity</i></li><li>• Pengembangan industri manufaktur</li><li>• Pengembangan kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabupaten Kuningan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konservasi Pertanian dan Sumber Air</li><li>• Pariwisata alam</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kota Cirebon         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat perdagangan dan Jasa</li><li>• Pariwisata budaya</li><li>• Pendidikan tinggi</li><li>• Pelabuhan nasional dan pelabuhan perikanan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4.5.1.2 Arahan Sistem Pusat-pusat Pertumbuhan Kawasan

Arahan sistem pusat-pusat pertumbuhan kawasan disusun berdasarkan hasil identifikasi kawasan yang dilakukan dalam kebijakan tata ruang dan kondisi atau kegiatan industri eksisting, serta rencana pengembangan kawasan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing titik permukiman dalam mendukung kegiatan investasi yang akan berkembang pada kawasan. Arahan sistem pusat-pusat pertumbuhan kawasan sebagai titik jangkar dari struktur ruang kawasan disusun untuk mengarahkan peran-peran pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam konstelasi pengembangan wilayah Kawasan Metropolitan REBANA.

Arahan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan mengintegrasikan antara pusat-pusat fungsional pertumbuhan, pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan, dan pusat-pusat kawasan perdesaan. Antara pusat-pusat pertumbuhan diharapkan memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dan terkoneksi dengan jaringan infrastruktur yang memadai serta sistem rantai pasok/rantai nilai yang terhubung sehingga dapat terjadi interaksi yang saling mendukung.

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut:

##### A. Pusat Fungsional Pertumbuhan

Pusat fungsional pertumbuhan merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki fungsi khusus dalam konsep pengembangan kawasan. Konsep pengembangan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA adalah Polynucleus Smart Region. Konsep pengembangan Smart Region adalah suatu jenis konsep pengembangan kawasan geografis, yang melalui kebijakan bersama, mampu meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan, dengan perhatian khusus terhadap kepadatan sosial, penyebaran pengetahuan, pertumbuhan kreativitas, aksesibilitas dan kebebasan bergerak, kegunaan lingkungan (alami, sejarah, arsitektur, persebaran perkotaan), kualitas lanskap dan kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan ukuran dan persebaran titik-titik permukiman kawasan ini, maka pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA diarahkan untuk memiliki inti ganda yang memiliki spesialisasi yang tidak saling bertentangan satu sama lain, disebut juga sebagai Polynucleated Development. Berdasarkan fungsinya, pemicu pertumbuhan kawasan ini memiliki dua jenis fungsional, yaitu sebagai Growth Pole dan Growth Foundation. Selain itu, dibutuhkan juga kawasan sentra IKM sebagai pendukung Growth Foundation di Kawasan Metropolitan REBANA.

##### 1. Pengembangan Growth Pole (Kawasan Perkotaan Inti)

Kawasan Perkotaan Inti merupakan pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini diharapkan dapat menstimulasi pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya dan menyambungkan Kawasan Metropolitan REBANA dengan dunia luar melalui fungsi-fungsi khusus yang dimilikinya.

Terdapat tiga kawasan perkotaan inti dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana, yaitu di Kota Cirebon, Kota Maritim Patimban, dan Aerocity Kertajati. Kota Cirebon dipilih sebagai salah satu inti karena fungsinya sebagai PKN jelas dapat membantu menghubungkan Kawasan Metropolitan REBANA dengan dunia luar, terutama pada tahap-tahap pengembangan awal. Kota Maritim

Patimban dan Aerocity Kertajati ditetapkan sebagai kawasan inti karena potensi yang besar sebagai simpul transportasi internasional sehingga dapat menjadi lokomotif perkembangan Kawasan Metropolitan REBANA ke depannya. Adanya bandar udara dan pelabuhan internasional diharapkan dapat menarik perusahaan-perusahaan global bernilai tinggi untuk berinvestasi di kawasan ini. Didukung dengan pengembangan ICT data centre, pusat desain dan creative centre serta pusat pengembangan R&D di Kawasan Metropolitan REBANA, diharapkan kawasan ini menjadi kawasan yang kondusif untuk dapat melahirkan produk-produk penemuan baru bernilai tinggi yang inovatif, fungsional untuk kebutuhan masa depan, dan unggul dari segi desain produk.

2. Pengembangan Growth Foundation (Kawasan Perkotaan Sekitarnya)  
Kawasan Perkotaan Sekitarnya merupakan pusat-pusat klaster kawasan industri yang memiliki spesialisasi tersendiri dan terhubung dengan klaster-klaster industri lainnya. KPI-KPI pada pusat sekunder diarahkan fungsi utamanya agar dapat saling melengkapi, tidak bersaing satu sama lain dan merealisasikan interaksi rantai pasok antar KPI. Di kawasan ini dirancang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, tetapi juga bagi para start-up dan teknopreneur baru yang diproyeksikan dapat tumbuh menciptakan peluang-peluang pengembangan industri baru.

Kawasan Perkotaan Sekitarnya terdiri dari:

- a. KPI Patimban
- b. KPI Cipali Subang Barat
- c. KPI Cipali Subang Timur
- d. KPI Cipali Indramayu
- e. KPI Patrol
- f. KPI Losarang
- g. KPI Balongan
- h. KPI Krangkeng
- i. KPI Tukdana
- j. KPI Kertjati-Jatiwangi
- k. KPI Jatiwangi
- l. KPI Butom
- m. KPI Cirebon

3. Pengembangan Sentra IKM

Pusat pertumbuhan sentra IKM merupakan titik pertumbuhan bagi daerah industri sekitarnya. SIKM-SIKM yang ada diharapkan dapat memiliki peran dalam rantai pasok/nilai pengembangan industri di Kawasan Metropolitan REBANA. Upgrading, standarisasi dan inovasi produk SIKM, serta spesialisasi yang tepat diperlukan agar SIKM dapat memenuhi kualifikasi industri dan menjadi pemasok terhadap industri atau sebaliknya dengan keberadaan kawasan industri, SIKM mendapatkan keuntungan dengan adanya keberlimpahan bahan baku yang ada di industri.

Pusat tersier berada pada kawasan SIKM yang tersebar pada 5 Kabupaten.

#### B. Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan berdasarkan pada sistem perkotaan nasional yang tercantum dalam arahan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Pusa-pusat kegiatan kawasan perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan hunian, perdagangan jasa,

finansial, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta fasos fasum lainnya. Adapun sistem pusat-pusat kegiatan yang diintegrasikan di Kawasan Metropolitan REBANA terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Arjawinangun
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Weru
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Subang
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pamanukan
5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cilimus
6. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di 5 Kabupaten
7. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di 5 Kabupaten

### C. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang menjadi support system dalam pengembangan kegiatan industri. Kawasan Perdesaan juga diharapkan dapat terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Kawasan Perdesaan diharapkan dapat berperan sebagai sentra produksi dan bahan baku, serta sentra produk-produk olahan barang setengah jadi yang juga dapat terhubung rantai pasok/nilainya dengan kawasan industri. Selain itu, Kawasan Perdesaan juga dapat berperan sebagai benteng penjaga alam dan budaya masyarakat di Kawasan Metropolitan REBANA sehingga berperan penting terhadap keseimbangan pembangunan di Kawasan Metropolitan REBANA. Kegiatan pariwisata yang menonjolkan alam dan budaya serta agrowisata di kawasan perdesaan diharapkan dapat berkembang dengan berkelanjutan.

Untuk lebih lengkapnya mengenai arahan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Metropolitan REBANA dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.12 Arahannya Fungsi Kawasan**

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                   |              |                                      |                                      | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWA-SAN    | KECAMATAN    | Arahannya Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahannya Struktur Ruang dalam RTRWP | PUSAT PELAYANAN                | TEMA                                                                  | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAJALENGKA              |                   |              |                                      |                                      |                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kertajati               | KPI               | Kertajati    | PKL                                  | PKL, KSP BIJB dan Kertajati Aerocity | Kawasan Perkotaan Inti         | Aerotropolis, Core business center, kawasan industri teknologi tinggi | Pengembangan Aerocity: Industri pesawat terbang, MRO, energi ( <i>power plant</i> ), perumahan, industri kreatif (IT, periklanan, <i>marketing</i> , desain, manufaktur), fasilitas pendidikan, pergudangan, FTZ, <i>logistic Hub</i> , perdagangan dan jasa lain |
| Jatiwangi               | KPI dan SIKM      | Jatiwangi    | PKL                                  | PKL                                  | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Kawasan Industri dan SIKM Bahan Bangunan                              | Industri tekstil, pengolahan makanan dan minuman, resin sintetis dan plastik, bahan bangunan, pengolahan <i>hotmix</i> dan beton, furnitur dan barang dari kayu, dan SIKM Penyedia bahan baku dan bahan setengah jadi industri bahan bangunan dan perumahan       |
| Lengkong                | SIKM              | Sindangwangi | PPK                                  |                                      | SIKM                           | SIKM Bukan Logam                                                      | sentra batu alam                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kadipaten               | Kawasan Perkotaan | Kadipaten    | PKW                                  | PKW                                  | PKW                            | Kawasan Perkotaan                                                     | Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan                                                                                                                                                                                                                       |
| Majalengka              | Kawasan Perkotaan | Majalengka   | PKL                                  | PKL                                  | PKL                            | Kawasan Perkotaan                                                     | Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan vokasi, kesehatan                                                                                                                                                                                           |
| KABUPATEN CIREBON       |                   |              |                                      |                                      |                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KPI Cirebon             | KPI               | Ciledug      | PKL                                  | PKL, KSP Kawasan Industri Cirebon    | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri                                         | Kawasan industri terpadu, kawasan pariwisata, dan permukiman perkotaan                                                                                                                                                                                            |
|                         |                   | Lemahabang   | PKL                                  | PKL, KSP Kawasan Industri Cirebon    | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri                                         | Industri manufaktur, penunjang kawasan industri perikanan laut                                                                                                                                                                                                    |

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |               |               |                                   |                                         | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN     |                                  |                                                                                             |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWASAN | KECAMATAN     | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP       | PUSAT PELAYANAN                    | TEMA                             | FUNGSI                                                                                      |
|                         |               | Mundu         | PPL                               | PKL, KSP<br>Kawasan Industri<br>Cirebon | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri pengolahan perikanan,<br>manufaktur, makanan minuman,<br>garam                     |
|                         |               | Greged        | PPL                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri pertanian                                                                          |
|                         |               | Astanajapura  | PPK                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri manufaktur, penunjang<br>kawasan industri perikanan laut                           |
|                         |               | Pangenan      | PPL                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri manufaktur, pengolahan<br>perikanan, garam dan hasil tambang                       |
|                         |               | Karangsembung | PPK                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri bahan bangunan,<br>pertambangan mineral dan batu                                   |
|                         |               | Gebang        | PPL                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri pengolahan perikanan,<br>manufaktur, perikanan tangkap,<br>penunjang wisata bahari |
|                         |               | Babakan       | PPK                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri gula                                                                               |
|                         |               | Losari        | PPK                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri manufaktur, penunjang<br>pertanian dan perikanan, bata merah                       |
|                         |               | Pabedilan     | PPL                               | -                                       | Kawasan<br>Perkotaan<br>Sekitarnya | Pengembangan<br>Kawasan Industri | Industri pertanian                                                                          |
| Mertasinga              | SIKM          | Gunungjati    | PPL                               |                                         | SIKM                               | SIKM Pangan                      | Olahan Kerang dan Rajungan                                                                  |
| Trusmi Kulon            | SIKM          | Plered        | PPL                               |                                         | SIKM                               | SIKM Sandang                     | Batik Tulis dan Cap                                                                         |

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                   |              |                                   |                                   | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN   |                               |                                                                                         |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWA-SAN    | KECAMATAN    | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP | PUSAT PELAYANAN                  | TEMA                          | FUNGSI                                                                                  |
| Tegalbugubug            | SIKM              | Arjawinangun | PKL                               | PKL                               | SIKM                             | SIKM Sandang                  | Konveksi                                                                                |
| Rawaurip                | SIKM              | Pangenan     | PPL                               |                                   | SIKM                             | SIKM Kimia                    | Garam Krosok                                                                            |
| Tegalwangi              | SIKM              | Weru         | PKLp                              |                                   | SIKM                             | SIKM Furniture                | Meubel Rotan                                                                            |
| Gempol                  | SIKM              | Gempol       | PPL                               |                                   | SIKM                             | SIKM Galian Bukan Logam       | Kapur Tohor                                                                             |
| Bobos                   | SIKM              | Dukupuntang  | PPL                               |                                   | SIKM                             | SIKM Galian Bukan Logam       | Batu Alam                                                                               |
| Sumber                  | Kawasan Perkotaan | Sumber       | PKL                               | PKL                               | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan vokasi, kesehatan                 |
| Arjawinangun            | Kawasan Perkotaan | Arjawinangun | PKL                               | PKL                               | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan                                             |
| Palimanan               | Kawasan Perkotaan | Palimanan    | PKL                               | PKL                               | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan                                             |
| Galmanthro              | Kawasan Perdesaan | Weru         | PKLp                              | -                                 | Pusat Kaperdes - Desa Tegalwangi | Kampung Wisata Rotan          | Penghasil kerajinan rotan dan meubelair                                                 |
| Gempol                  | Kawasan Perdesaan | Gempol       | PPL                               | -                                 | Pusat Kaperdes - Desa Cikeusal   | Agrowisata                    | Penghasil komoditas utama buah-buahan dan Jamur                                         |
| SUBANG                  |                   |              |                                   |                                   |                                  |                               |                                                                                         |
| Patimban                | KPI/ Kota Baru    | Pusakanagara | PKL                               | PKL, KSP Kota Baru Patimban       | Kawasan Perkotaan Inti           | Pengembangan Kota Baru        | Pelabuhan utama, Hub Logistik, pergudangan, CIQS, Industri Logam, mein, dan elektronika |
| Cipali-subang barat     | KPI               | Pabuaran     | PPK                               | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya     | Pengembangan Kawasan Industri | Industri Kertas, Karton, pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika                  |
|                         |                   | Cipeundeuy   | PPL                               | -                                 |                                  |                               |                                                                                         |
|                         |                   | Kalijati     | PKL                               | PKL                               |                                  |                               |                                                                                         |
|                         |                   | Purwodadi    | PPL                               | -                                 |                                  |                               |                                                                                         |

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                   |               |                                   |                                             | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN   |                               |                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWASAN     | KECAMATAN     | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP           | PUSAT PELAYANAN                  | TEMA                          | FUNGSI                                                                                            |
|                         |                   | Cikaum        | PPL                               | -                                           |                                  |                               |                                                                                                   |
| Cipali-subang timur     | KPI               | Pagaden       | PPL                               | -                                           | Kawasan Perkotaan Sekitarnya     | Pengembangan Kawasan Industri | Industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, pertahanan, alat angkut                   |
|                         |                   | Cibogo        | PKL                               | -                                           |                                  | Pengembangan Kawasan Industri |                                                                                                   |
| Kota Subang             | Kawasan Perkotaan | Subang        | PKL                               | PKL                                         | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, jasa keuangan, pendidikan vokasi, kesehatan, perumahan |
| Pamanukan               | Kawasan Perkotaan | Pamanukan     | PKL                               | PKL                                         | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat perdagangan jasa, jasa keuangan, perumahan                                                  |
| Pagaden                 | Kawasan Perkotaan | Pagaden       | PKL                               | PKL                                         | PKL                              | Kawasan Perkotaan             | Pusat logistik, perdagangan jasa, jasa keuangan, perumahan                                        |
| Pagaden Barat           | Kawasan Perdesaan | Pagaden Barat | PPL                               |                                             | Pusat Kaperdes - Desa Balingbing | Agro Industri Pangan          | Penghasil olahan pangan                                                                           |
| Cijambe                 | Kawasan Perdesaan | Cijambe       | PPL                               |                                             | Pusat Kaperdes - Desa Cikadu     | Agro Industri Rempah          | Penghasil komoditas unggulan sereh wangi dan lada, ikan tawar                                     |
| INDRAMAYU               |                   |               |                                   |                                             |                                  |                               |                                                                                                   |
| Tukdana                 | KPI               | Tukdana       | PKLp                              | -                                           | Kawasan Perkotaan Sekitarnya     | Pengembangan Kawasan Industri | Industri pengolahan makanan minuman, alat dan mesin pertanian                                     |
| Losarang                | KPI               | Losarang      | PKL                               | PKL, KSP Kawasan Industri Pantura Indramayu | Kawasan Perkotaan Sekitarnya     | Pengembangan Kawasan Industri | Industri perikanan, pertambangan, pergudangan, dan makanan minuman                                |

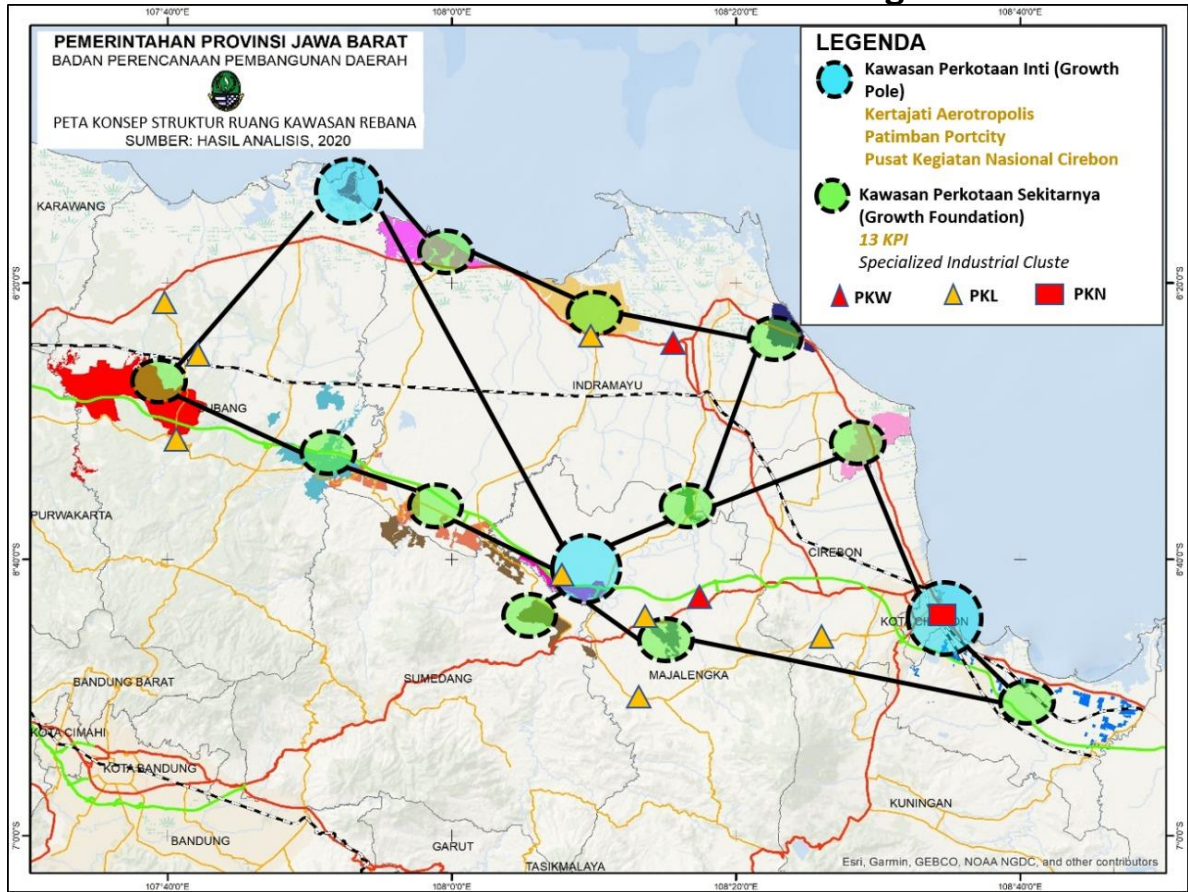
| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                |             |                                   |                                   | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN |                               |                                                                                 |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWA-SAN | KECAMATAN   | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP | PUSAT PELAYANAN                | TEMA                          | FUNGSI                                                                          |
|                         |                | Cantigi     | PPK                               | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri perikanan, pertambangan, pergudangan, dan makanan minuman              |
|                         |                | Lohbener    | PPK                               | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri pengolahan makanan dan minuman                                         |
| Balongan                | KPI            | Juntinyuat  | PPK                               | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri migas, petrokimia, dan kimia                                           |
| Cipali-Indramayu        | KPI            | Gantar      | PKL                               | PKL                               | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, pertahanan, alat angkut |
|                         |                | Terisi      | PKLp                              | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri |                                                                                 |
| Patrol                  | KPI            | Sukra       | PPK                               | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri perkapalan, pengolahan perikanan                                       |
|                         |                | Patrol      | PKL                               | PKL                               | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri pengolahan perikanan budidaya                                          |
|                         |                | Kandanghaur | PKL                               | PKL                               | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri bahan bangunan, pengolahan perikanan, dan makanan minuman              |
| Krangkeng               | KPI            | Krangkeng   | PKL                               | PKL                               | Kawasan Perkotaan Sekitarnya   | Pengembangan Kawasan Industri | Industri kimia hulu (pengolahan garam), hulu agro, bahan makanan, perkapalan    |
| Sumuradem               | SIKM           | Sukra       | PPL                               |                                   | SIKM                           | SIKM Pangan                   | Minuman Sari Buah                                                               |
| Kenanga                 | SIKM           | Siindang    | PPL                               |                                   | SIKM                           | SIKM Pangan                   | Kerupuk Udang/Ikan                                                              |

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                   |                              |                                   |                                   | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN      |                                                   |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWA-SAN    | KECAMATAN                    | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP | PUSAT PELAYANAN                     | TEMA                                              | FUNGSI                                                                                    |
| Kasmaran                | SIKM              | Widasari                     | PPL / KSK                         |                                   | SIKM                                | SIKM Pangan                                       | Pengawetan Buah                                                                           |
| Paoman                  | SIKM              | Indramayu                    | PPL                               |                                   | SIKM                                | SIKM Sandang                                      | Batik dan Konveksi                                                                        |
| Kepandean               | SIKM              | Indramayu                    | PPL                               |                                   | SIKM                                | SIKM Logam                                        | Perhiasan Bukan Logam Mulia                                                               |
| Tambi                   | SIKM              | Sliyeg                       | PPL                               |                                   | SIKM                                | SIKM Logam                                        | Alat Pertukangan                                                                          |
| Losarang                | SIKM              | Losarang                     | PKL                               |                                   | SIKM                                | SIKM Kimia                                        | Garam Curai                                                                               |
| Parean Girang           | SIKM              | Kandanghaur                  | PKL                               |                                   | SIKM                                | SIKM Kimia                                        | Garam Curai                                                                               |
| Krangkeng               | SIKM              | Krangkeng                    | PPK                               |                                   | SIKM                                | SIKM Kimia                                        | Garam Curai                                                                               |
| Indramayu               | Kawasan Perkotaan | Indramayu                    | PKW                               | PKW                               | PKW                                 | Kawasan Perkotaan                                 | Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan vokasi, kesehatan, perdagangan jasa |
| Karangampel             | Kawasan Perkotaan | Karangampel                  | PKL                               | PKL                               | PKL                                 | Kawasan Perkotaan                                 | Pusat perdagangan jasa, jasa keuangan, perumahan                                          |
| Jatibarang              | Kawasan Perkotaan | Jatibarang                   | PKL                               | PKL                               | PKL                                 | Kawasan Perkotaan                                 | Pusat perdagangan jasa, jasa keuangan, perumahan                                          |
| Krangkeng               | Kawasan Perdesaan | Krangkeng dan Kedokan Bunder | PPL                               |                                   | Pusat Kaperdes - Desa Kedokan Agung | Agro Eduwisata                                    | Penghasil komoditas utama ikan tawar dan buah-buahan                                      |
| SUMEDANG                |                   |                              |                                   |                                   |                                     |                                                   |                                                                                           |
| BUTOM                   | KPI               | Ujungjaya                    | PPL; KSK                          | -                                 | Kawasan Perkotaan Sekitarnya        | Pengembangan Kawasan Industri                     | industri manufaktur, industri tekstil produk tekstil                                      |
|                         |                   | Tomo                         | PPK; KSK                          | PKL                               |                                     |                                                   |                                                                                           |
|                         |                   | Buahdua                      | PPL; KSK                          |                                   |                                     |                                                   |                                                                                           |
| KUNINGAN                |                   |                              |                                   |                                   |                                     |                                                   |                                                                                           |
| Cilimus                 | Kawasan Perkotaan | Cilimus                      | PKL; KSK                          | PKL                               | PKL                                 | Kawasan Perkotaan SIKM Pengolahan hasil Pertanian | Perdagangan dan jasa, pariwisata, agribisnis, agroindustri                                |
| Mandirancan             | Kawasan Perdesaan | Mandirancan                  | PPK;KSK                           | -                                 | Pusat Kaperdes - Desa               | Ekowisata                                         | Ekowisata                                                                                 |

| 01 IDENTIFIKASI KAWASAN |                   |                   |                                   |                                   | 02 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN   |                                                |                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAWASAN                 | JENIS KAWA-SAN    | KECAMATAN         | Arahan Struktur dalam Ruang RTRWK | Arahan Struktur Ruang dalam RTRWP | PUSAT PELAYANAN                  | TEMA                                           | FUNGSI                                                                                                 |
|                         |                   |                   |                                   |                                   | Setianegara                      |                                                |                                                                                                        |
| Pasawahan               | Kawasan Perdesaan | Pasawahan         | KSK                               |                                   | Pusat Kaperdes – Desa Padaherang | Ekowisata                                      | Ekowisata                                                                                              |
| Cigandamekar            | SIKM              | Cigandamekar      | KSK                               | -                                 | SIKM                             | SIKM Pengolahan hasil Pertanian dan peternakan | Agroindustri; Peternakan                                                                               |
| KOTA CIREBON            |                   |                   |                                   |                                   |                                  |                                                |                                                                                                        |
| Kota Cirebon            | Kawasan Perkotaan | Seluruh Kecamatan | PPK;SPPK;PL                       | PKN                               | Kawasan Perkotaan Inti           | Kawasan Perkotaan                              | Perdagangan dan Jasa, Pariwisata Budaya, Pendidikan Tinggi, Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Perikanan |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.16 Arah Struktur Ruang



Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5.2 Sistem Jaringan Transportasi

Kawasan Metropolitan REBANA didukung oleh berbagai macam infrastruktur mulai dari Jalan Tol, Jalan Non-Tol, dan Jalur Rel Kereta Api. Infrastruktur tersebut membentuk konektivitas yang menghubungkan antar KPI yang ada. Dengan kondisi infrastruktur yang memadai, hal tersebut bisa membentuk sistem *linking Industry* yang mendukung hubungan dari masing-masing KPI. Sistem jaringan transportasi terdiri dari jaringan jalan dan infrastruktur perkeretaapian. Program terkait sistem jaringan transportasi dapat dilihat pada bab 5. Berikut merupakan beberapa program prioritas sistem jaringan transportasi yang terdapat di rencana aksi REBANA yaitu:

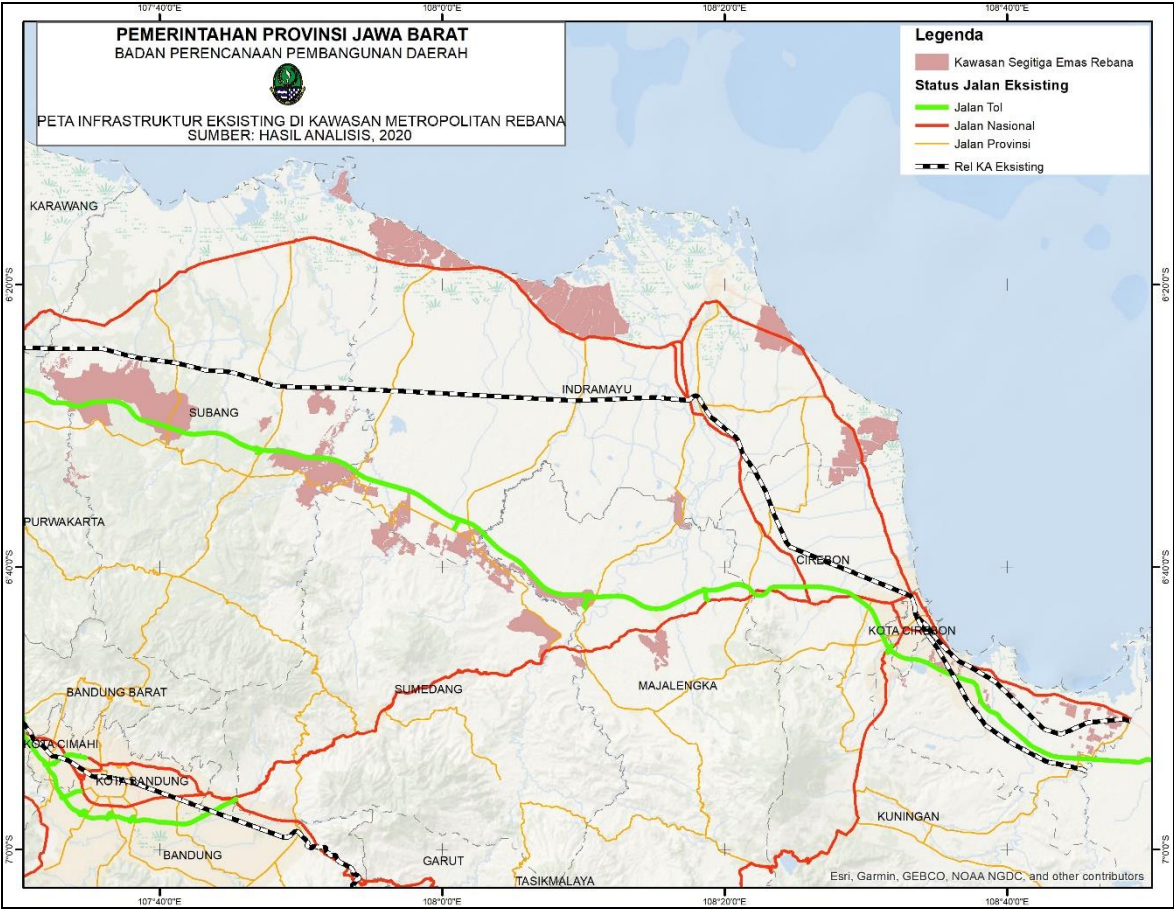
4.5.2.1 Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kawasan Metropolitan REBANA diklasifikasikan menjadi jaringan jalan eksisting, jaringan jalan yang sedang dibangun, dan rencana jaringan jalan yang akan dibangun.

1. Jaringan Jalan Eksisting

Jaringan jalan eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 4.17 Peta Jaringan Jalan Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, jaringan jalan eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) Eksisting  
Jalan tol yang melintasi Kawasan Metropolitan REBANA yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci). Jalan Tol Cipali dan Palikanci merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Transjawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat hingga ke Jawa Bagian Timur. Di dalam konteks Kawasan Metropolitan REBANA, Jalan Tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cipali Indramayu, KPI Kertajati-Jatitujuh, KPI Butom, KPI Jatiwangi, dan KPI Cirebon. Jalan tol eksisting ini sangat penting untuk mendukung mobilitas kegiatan produksi yang akan berlangsung di Kawasan Metropolitan REBANA.
- b. Jalan Non-Tol Eksisting  
Jalan non-tol yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA terdiri dari beberapa ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Jalan non-tol tersebut merupakan jalan penghubung dari setiap KPI yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA. Beberapa ruas Jalan Nasional yang ada di kawasan ini antara lain:
  - 1) Ruas jalan batas Kab.Subang – batas Kota Pamanukan yang berada di sebelah utara KPI Subang Barat
  - 2) Ruas jalan batas Kota Pamanukan – Sewo yang berlokasi di sekitar KPI Patimban

- 3) Ruas jalan Sewo – Lohbener yang melewati KPI Patrol dan KPI Losarang
- 4) Ruas jalan Lohbener – batas Kota Indramayu – Soekarno-Hatta (Indramayu) – Mulia Asri (Indramayu) – Lingkar Indramayu – Karangampel – Singakerta – batas Kota Cirebon yang melewati KPI Balongan dan KPI Krangkeng
- 5) Ruas jalan Langut – Lohbener – Jatibarang – Cadang Pinggan – batas Kota Palimanan yang berada di sekitar KPI Tukdana
- 6) Ruas jalan batas Kota Sumedang – Cijelag – Kadipaten – Prapatan – Jatiwangi – batas Kota Palimanan – Klangeran – Jamblang – batas Kota Cirebon yang berada di sekitar KPI Kertajati-Jatitujuh dan KPI Jatiwangi
- 7) Ruas jalan Pilangsari (Cirebon) – Brigjen Darsono (Cirebon) – Jendral A.Yani (Cirebon) – Kalijaga (Cirebon) – batas Kota Cirebon – Losari yang melewati KPI Cirebon.

Sedangkan ruas jalan provinsi yang berada di Kawasan Metropolitan REBANA antara lain:

- 1) Ruas jalan Batas Purwakarta – Subang – Kalijati – Sukamandi yang berlokasi di KPI Cipali Subang Barat
- 2) Ruas jalan Subang – Bantarwaru – Haurgeulis – Patrol yang melewati KPI Cipali Subang Timur dan KPI Patrol
- 3) Ruas jalan Subang – Pagaden – Pamanukan yang melewati KPI Cipali Subang Timur hingga ke KPI Patimban
- 4) Ruas jalan Bantarwaru – Cikamurang – Jangga yang melewati KPI Cipali Indramayu hingga ke KPI Losarang
- 5) Ruas jalan Jatitujuh – Kadipaten – Jatibarang – Pekandangan yang berada di sekitar KPI Jatiwangi, KPI Kertajati-Jatitujuh, KPI Tukdana, dan KPI Balongan
- 6) Ruas jalan Bantarsari – Ciledug – Waled yang berada di KPI Cirebon.

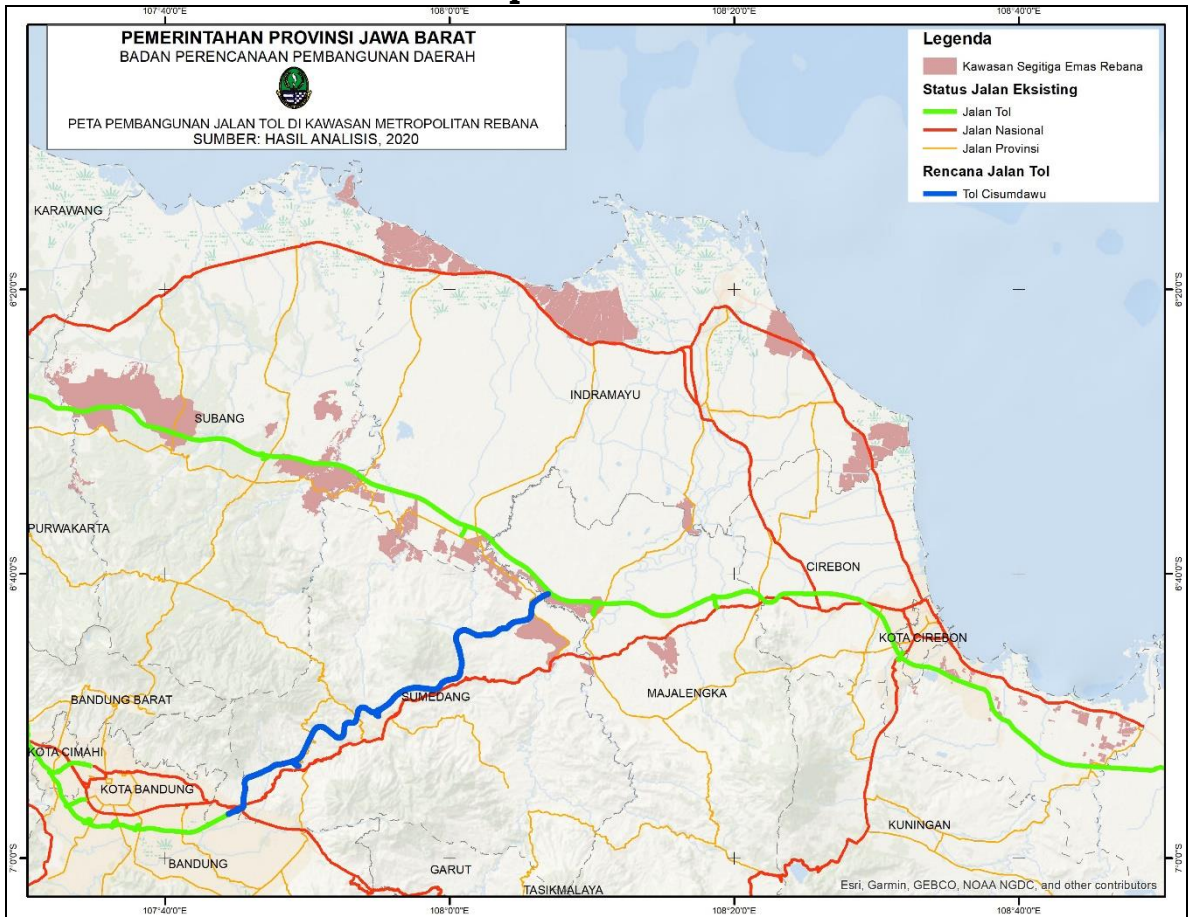
## 2. Jaringan Jalan yang Sedang Dibangun

Jaringan jalan yang sedang dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA adalah sebagai berikut:

### a. Jalan Tol yang Sedang Dibangun

Selain infrastruktur jalan tol eksisting yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA, saat ini sedang dibangun infrastruktur jalan tol baru untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah mobilitas kegiatan industri.

**Gambar 4.18 Peta Jalan Tol yang Sedang Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA**



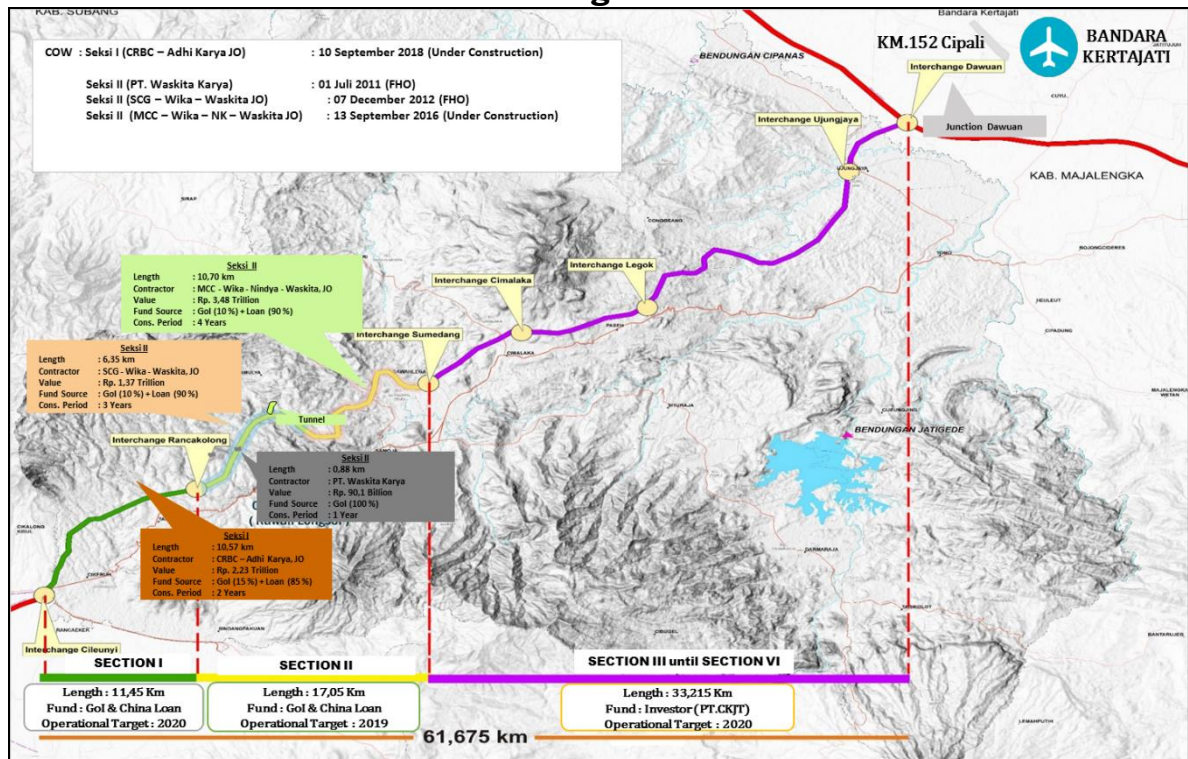
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan jalan tol yang sedang berjalan yaitu pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu). Jalan tol Cisumdawu memiliki panjang 61,67 Km yang terbentang melewati 1 desa di Kabupaten Bandung, 46 desa di Kabupaten Sumedang, dan 2 desa di Kabupaten Majalengka. Pembangunan jalan tol Cisumdawu merupakan pembangunan kewenangan nasional. Jalan tol Cisumdawu dibagi menjadi 6 seksi pembangunan yaitu:

- 1) Seksi 1 (-1+750 – 10+600) yang berlokasi di Cileunyi – Rancakalong. Seksi ini memiliki panjang 14,70 Km dan membutuhkan lahan seluas 194,36 Ha
- 2) Seksi 2 (10+600 – 27+700) yang berlokasi di Rancakalong – Sumedang. Seksi ini memiliki panjang 19,52 Km dan membutuhkan lahan seluas 307,10 Ha
- 3) Seksi 3 (29+550 – 35+250) yang berlokasi di Sumedang – Cimalaka. Seksi ini memiliki panjang 3,15 Km dan membutuhkan lahan 48,96 Ha
- 4) Seksi 4 (30+850 – 38+100) yang berlokasi di Cimalaka – Legok. Seksi ini memiliki panjang 8,38 Km dan membutuhkan lahan 188,2 Ha
- 5) Seksi 5 (28+100 – 55+100) yang berlokasi di Legok – Ujung Jaya. Seksi ini memiliki panjang 17,65 Km dan membutuhkan lahan 376,01 Ha

- 6) Seksi 3 (55+100 – 58+350) yang berlokasi di Ujung Jaya – Kertajati. Seksi ini memiliki panjang 3,35 Km dan membutuhkan lahan 25,21 Ha.

**Gambar 4.19 Seksi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu**



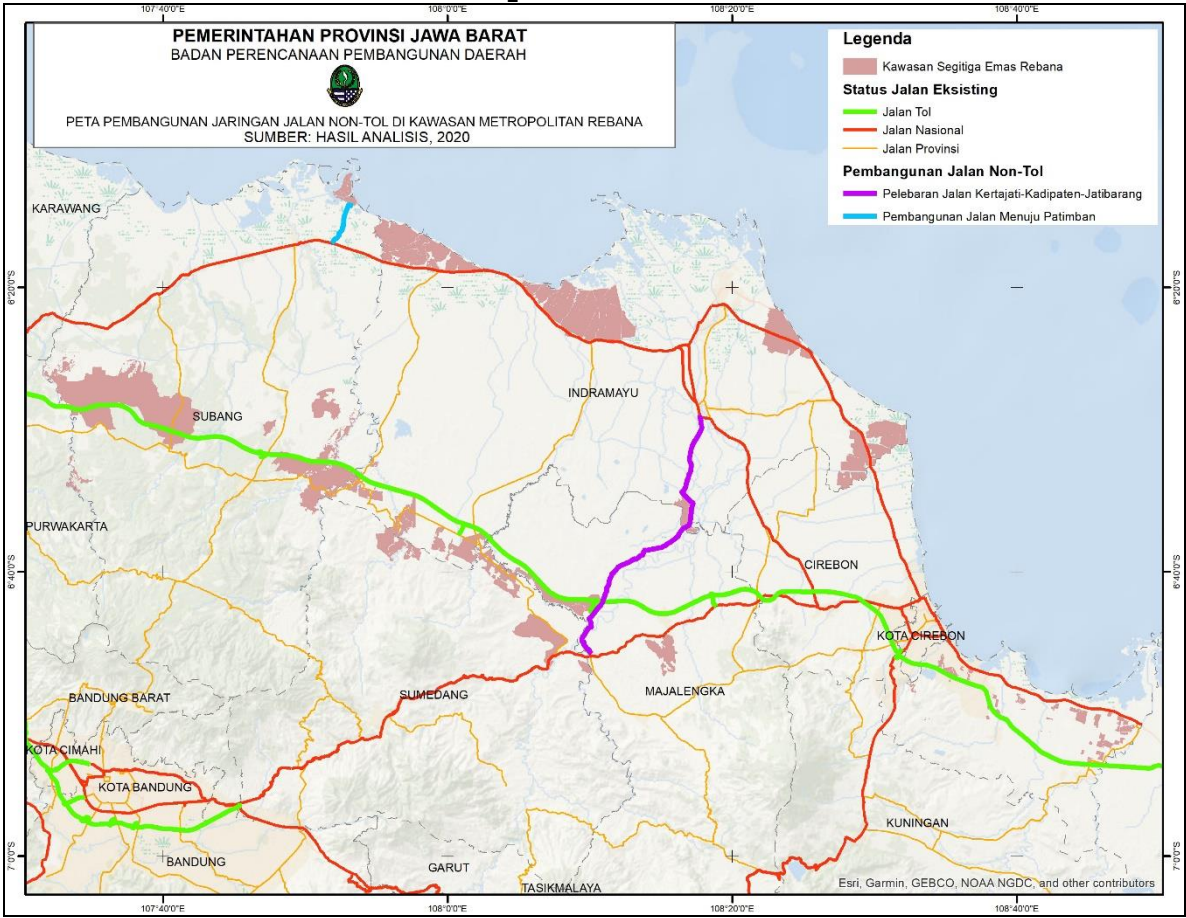
Sumber: Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Jalan Tol Cisumdawu Porsi Pemerintah (Seksi 1 Dan 2), 2020

Skema pengusahaan jalan tol Cisumdawu yaitu *Supported Build Operate Transfer* (SBOT). Kemudian, pengusahaan (konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan) dilakukan oleh BUJT. Sedangkan pembebasan tanah akan diambil alih seluruhnya oleh APBN berdasarkan SK PPK pembebasan tanah. Pembangunan konstruksi seksi 1 dan 2 dilakukan oleh pemerintah, sedangkan seksi 3, 4,5, dan 6 dikerjakan oleh investor melalui skema *Public Private Partnership* (PPP). Seksi 1 ditargetkan siap beroperasi tahun 2020, seksi 2 ditargetkan siap beroperasi tahun 2019, dan seksi 3 – 6 ditargetkan beroperasi tahun 2020.

- b. Jalan Non-Tol yang Sedang Dibangun di Kawasan Metropolitan  
REBANA

Selain jalan tol Cisumdawu, ada beberapa pengerjaan jalan non-tol yang sedang dilaksanakan. Pengerjaan jalan non-tol ada yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan ada pula kewenangan provinsi.

Gambar 4.20 Peta Jalan Non-Tol yang Sedang Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

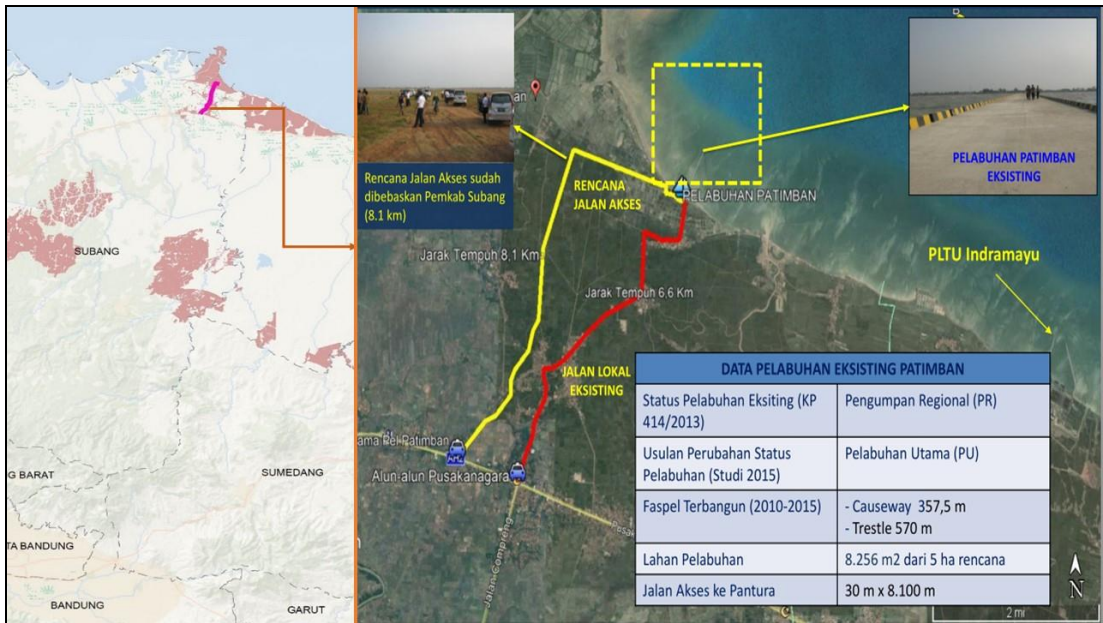


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, jalan non-tol yang sedang dikerjakan ada 2, pengerjaan ini meliputi pembangunan akses jalan non-tol ke Pelabuhan Patimban dan pelebaran jalan Provinsi Kadipaten – Jatibarang.

- 1) Pembangunan Akses Jalan Non-Tol Menuju Pelabuhan Patimban  
Pembangunan akses jalan non-tol menuju Pelabuhan Patimban merupakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dari jalan nasional menuju ke Pelabuhan Patimban. Saat ini jalan yang dapat dilalui untuk menuju ke Pelabuhan Patimban menggunakan jalan akses dari Kecamatan Pusakanagara. Jalan akses saat ini hanya memiliki lebar 6 meter yang dapat dilewati oleh dua jalur kendaraan kecil. Untuk rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, jalan akses ke Pelabuhan tidak menggunakan jalan akses saat ini. Jalan akses baru akan dibuat sepanjang ± 8,1 km dengan lebar 30 meter yang terdiri dari 4 lajur oleh Kementerian PUPR.

Gambar 4.21 Pembangunan Akses Jalan Non-Tol Menuju Pelabuhan Patimban



Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan akses non-tol menuju Pelabuhan Patimban memiliki panjang 8,1 Km. Progress pembangunan jalan akses menuju patimban saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pembangunan ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang ditargetkan selesai pada tahun 2020.

- 2) Pelebaran Jalan Provinsi Kadipaten – Jatibarang
- Jalan Provinsi Jatitujuh – Kadipaten – Jatibarang merupakan jalan provinsi yang terletak di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara KPI Jatiwangi, KPI Kertajati-Jatitujuh, dan KPI Tukdana. Dengan ditingkatkannya jalan provinsi ini diharapkan mampu menampung arus perjalanan kendaraan penumpang maupun kendaraan logistik yang bermobilisasi di daerah ini. Pelebaran jalan provinsi Jatitujuh – Kadipaten – Jatibarang direncanakan selesai pada tahun 2020.

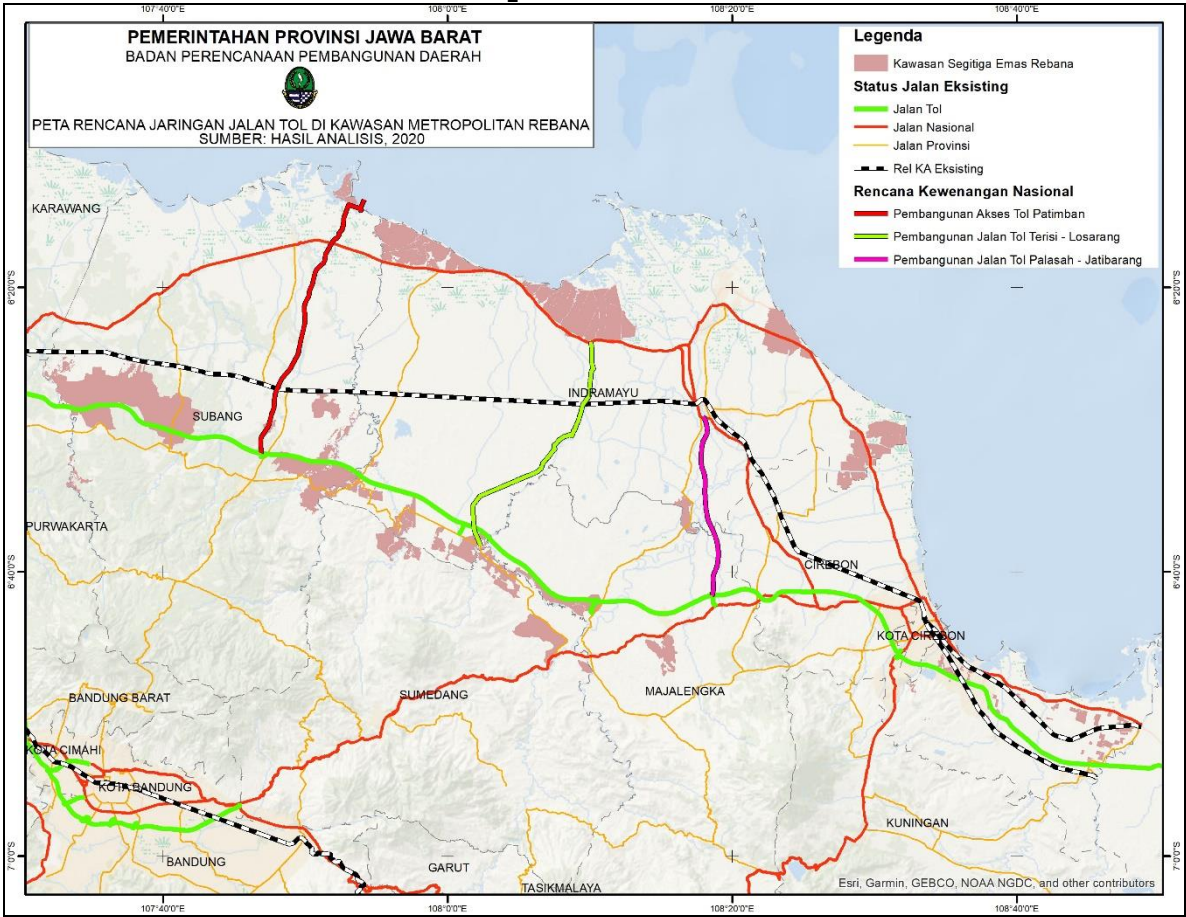
3. Jaringan Jalan yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

Jaringan jalan yang akan dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

Berikut merupakan peta rencana pembangunan Infrastruktur jalan tol yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA:

Gambar 4.22 Peta Jalan Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan jalan tol yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA yaitu pembangunan Jalan Tol Patimban, Jalan Tol Terisi – Losarang, dan Jalan Tol Palasah – Jatibarang.

- 1) Rencana Pembangunan Akses Tol Patimban  
Akses tol menuju Pelabuhan Patimban merupakan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jalan Tol Cipali menuju ke Pelabuhan Patimban.

Gambar 4.23 Pembangunan Akses Tol Patimban



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, trase jalan tol menuju Pelabuhan Patimban yaitu berlokasi di KM109 Jalan Tol Cipali. Trase tersebut dipilih oleh PUPR antara 2 alternatif trase yang tersedia. Trase ini memiliki panjang 29,80 Km dan lebarnya 21 m. Pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Patimban berfungsi untuk membuka akses menuju Pelabuhan Patimban via Tol Cipali sehingga *loading factor* menjadi optimal. Selain itu, pembangunan jalan ini juga mendukung perkembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Penanggung jawab pembangunan jalan akses tol menuju Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Rencana mitra konsorsium pada pembangunan tol ini yaitu:

- PT. Jasa Marga (Persero) Tbk: 55%
- PT. Surya Semesta Internusa: 25%
- PT. Daya Mulia Turangga: 10%
- PT. Jasa Sarana: 10%

Total estimasi biaya konstruksi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Patimban yaitu Rp 3,87 Triliun. *Progress* pembangunan tol ini sudah melakukan *Feasibility Study* (FS), DED, dan kajian lingkungan.

2) Rencana Pembangunan Jalan Tol Terisi – Losarang

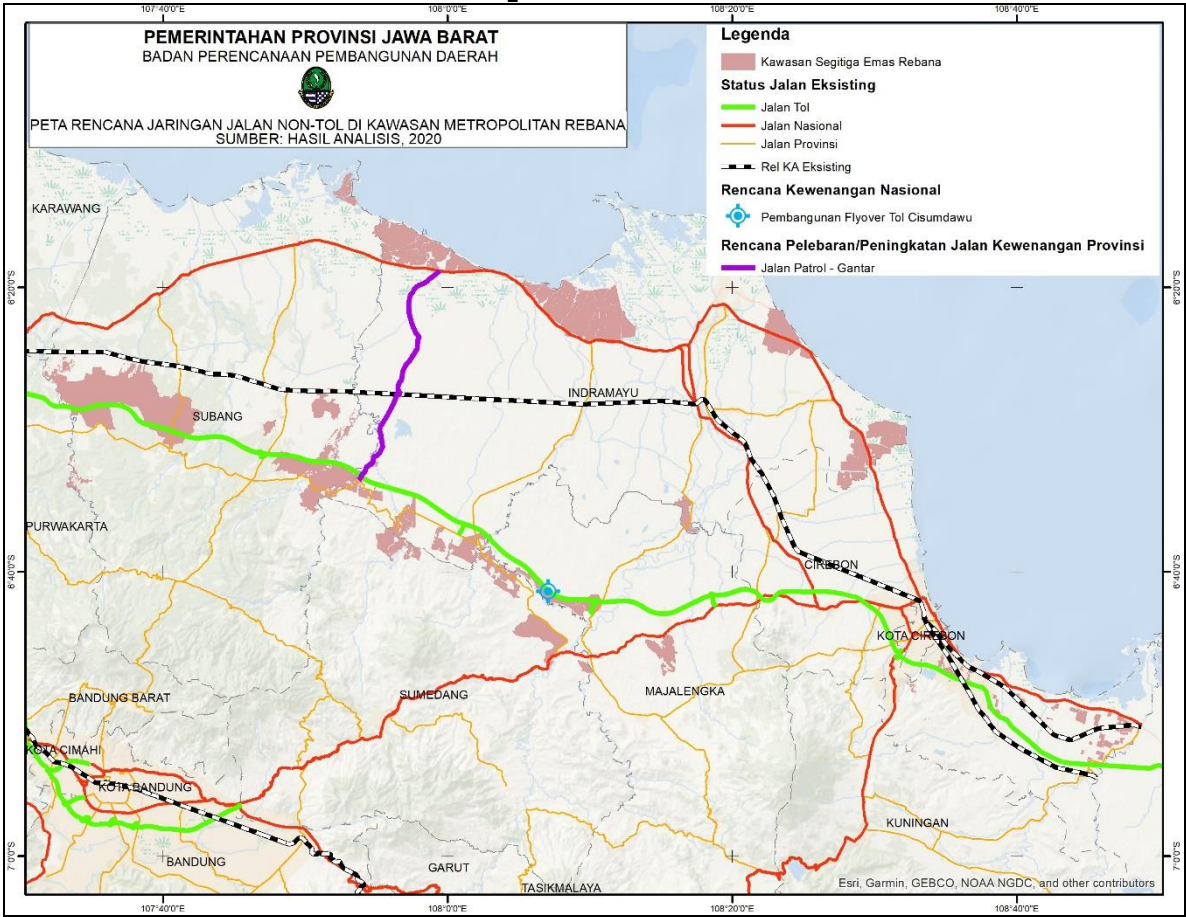
Program pembangunan Jalan Tol Terisi – Losarang merupakan program untuk meningkatkan konektivitas dari Tol Cipali menuju Kabupaten Indramayu. Program ini masih berupa usulan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, lebih mengefisienkan waktu tempuh dari KPI Cipali Indramayu menuju KPI losarang yang ada di Kabupaten Indramayu. Sementara trase pembangunan Jalan Tol Terisi – Losarang masih mengikuti Jalan Provinsi Terisi – Losarang. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut kedepannya.

3) Pembangunan Jalan Tol Palasah – Jatibarang

Program pembangunan Jalan Tol Palasah – Jatibarang merupakan program untuk meningkatkan konektivitas dari Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Majalengka. Program ini juga masih berupa usulan seperti halnya Rencana Jalan Tol Terisi – Losarang. Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, perjalanan dari Kabupaten Indramayu ke arah Kabupaten Majalengka khususnya ke Bandara Internasional Jawa Barat menjadi lebih singkat. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut kedepannya.

- b. Jalan Non-Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA  
Berikut merupakan peta rencana pembangunan Infrastruktur jalan non-tol yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA

Gambar 4.24 Peta Jalan Non-Tol yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

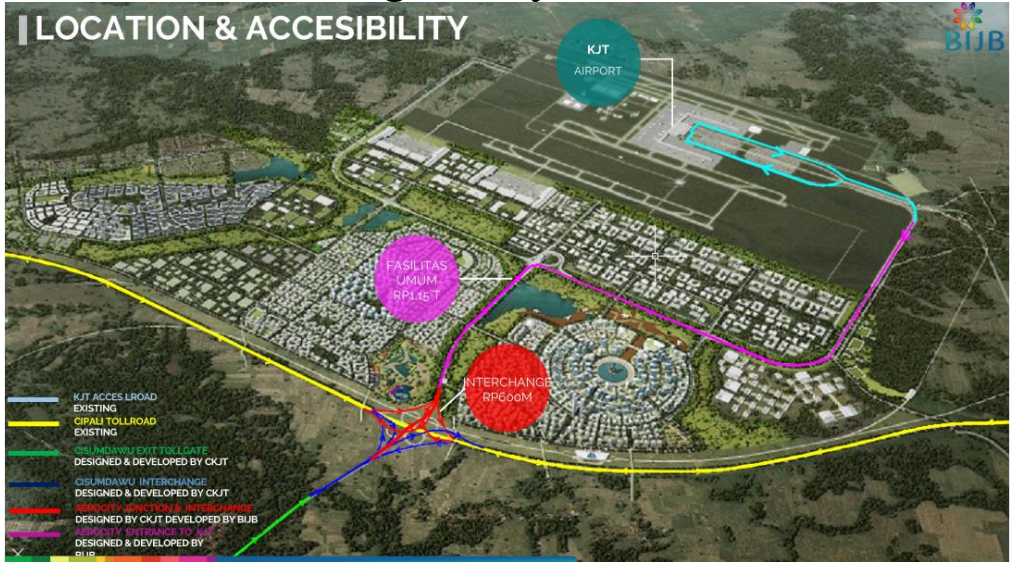


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, rencana infrastruktur jalan non-tol yang akan dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA yaitu pembangunan *flyover* tol Cisumdawu dan pelebaran jalan Patrol – Gantar.

- 1) Pembangunan Flyover Tol Cisumdawu  
Pembangunan *Flyover* Tol Cisumdawu merupakan bagian dari rangkaian pembangunan tol Cisumdawu. *Flyover* ini nantinya akan menghubungkan ujung tol Cisumdawu dengan area *Aerocity* Kertajati.

Gambar 4.25 Pembangunan Flyover Tol Cisumdawu



Sumber: Pengembangan Kertajati Aerocity, BIJB 2020

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan *Flyover* Tol Cisumdawu berlokasi di pintu masuk *Aerocity* Kertajati. *Flyover* ini akan membuat sistem akses dari tol Cisumdawu menuju ke Bandara Internasional Jawa Barat. Biaya yang diperlukan untuk membangun *flyover* ini yaitu Rp 600 Miliar. Biaya tersebut dilakukan dengan pola pendanaan obligasi daerah, penyertaan modal, investor, atau pinjaman.

## 2) Pelebaran Jalan Patrol – Haurgeulis - Bantarwaru

Pelebaran Jalan Patrol – Haurgeulis – Bantarwaru merupakan program untuk menghubungkan KPI Cipali Subang Timur menuju KPI Patimban dan KPI Patrol. Rencana ini merupakan usulan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Trase yang akan digunakan yaitu trase Patrol – Haurgeulis, dan trase Haurgeulis – Bantarwaru. Rencana pembangunan ini akan dikaji lebih lanjut.

### 4.5.2.2 Jaringan Rel Kereta Api

Infrastruktur Jaringan Rel Kereta Api di Kawasan Metropolitan REBANA diklasifikasikan menjadi Jaringan Rel Kereta Api eksisting dan Jaringan Rel Kereta Api yang akan dibangun.

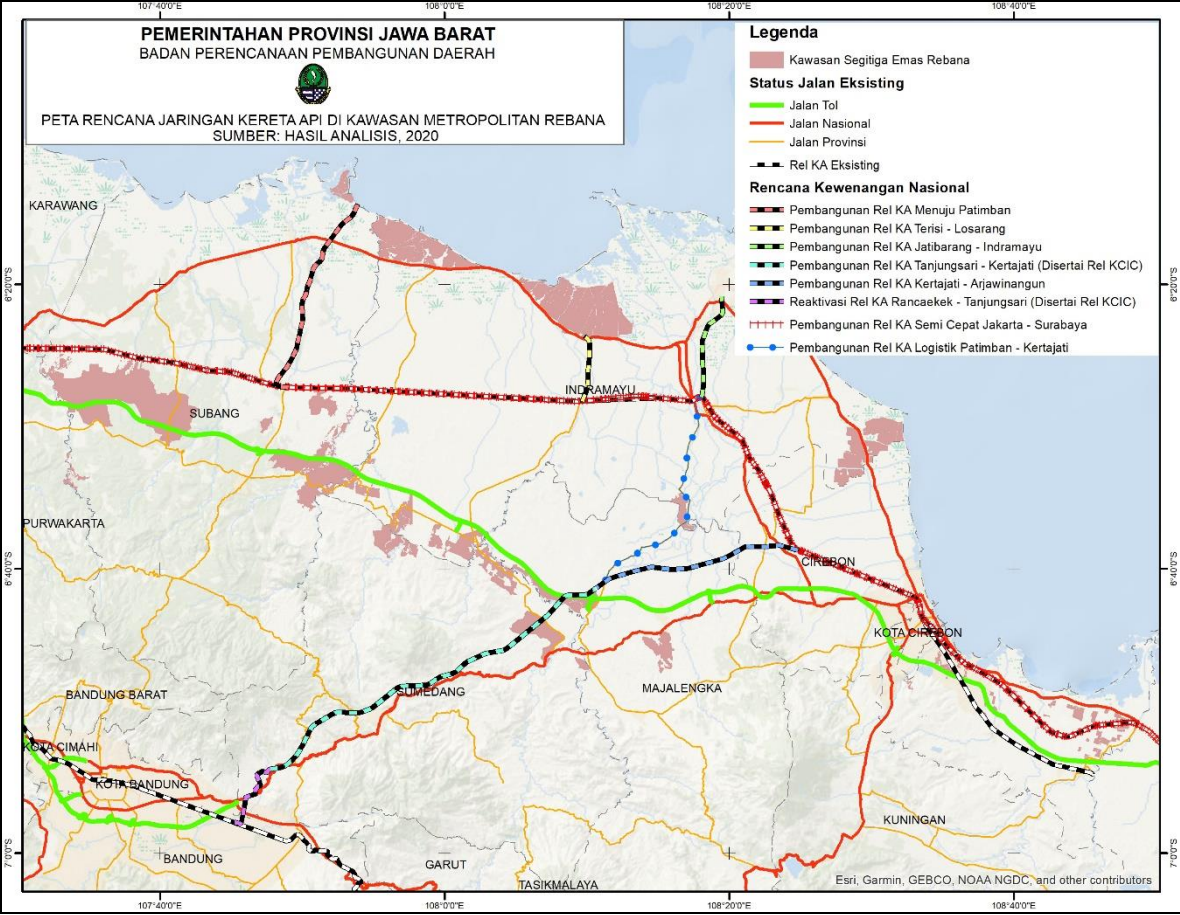
#### 1. Jaringan Rel Kereta Api Eksisting

Jaringan rel kereta api eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA merupakan bagian dari sistem jaringan rel kereta api jalur utara yakni dari Jakarta hingga ke Surabaya. Jalur kereta api yang melintasi Kawasan Metropolitan REBANA yaitu jalur kereta Cikampek – Kota Cirebon – Kabupaten Cirebon. Jalur kereta api ini membuat masing-masing KPI memiliki konektivitas yang tinggi. Hal tersebut membuat mobilitas antar KPI menjadi lebih efektif dan efisien.

#### 2. Jaringan Rel Kereta Api yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

Berikut merupakan peta rencana pembangunan Infrastruktur perkeretaapian yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA

Gambar 4.26 Jaringan Rel Kereta Api yang Akan Dibangun di Kawasan Metropolitan REBANA

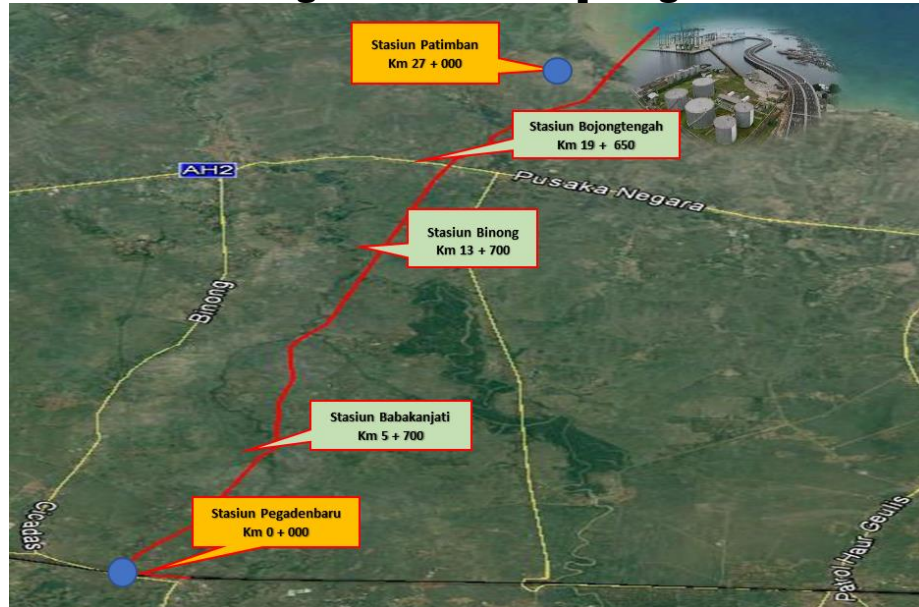


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa pengerjaan jaringan rel kereta api di Kawasan Metropolitan REBANA. Pengerjaan tersebut meliputi pembangunan dan reaktivasi rel kereta api.

- Pembangunan Rel Kereta Api Pagaden – Patimban  
Pembangunan rel kereta api Pagaden – Patimban merupakan program pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Stasiun Pagaden ke Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang. Pembangunan rel kereta api ini bertujuan untuk mendukung pergerakan moda angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Patimban. Selain itu, pembangunan tersebut bisa mengurangi beban angkutan barang yang menggunakan akses jalan raya/jalan tol khususnya pada lintas jalan raya nasional pantai utara (Pantura).

**Gambar 4.27 Jaringan Rel Kereta Api Pagaden – Patimban**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, rute kereta api yang akan dibangun sepanjang  $\pm 25$  Km. rute tersebut akan melalui beberapa stasiun antara lain Stasiun Pagadenbaru – Babakan Jati – Binong – Bojong Tengah – Patimban. Penanggung jawab pembangunan rel kereta api ini adalah Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Estimasi biaya program tersebut sekitar Rp 1,5 Triliun dengan skema pembiayaan APBN dan Investasi. Program pembangunan ini sudah memiliki dokumen kelengkapan yaitu:

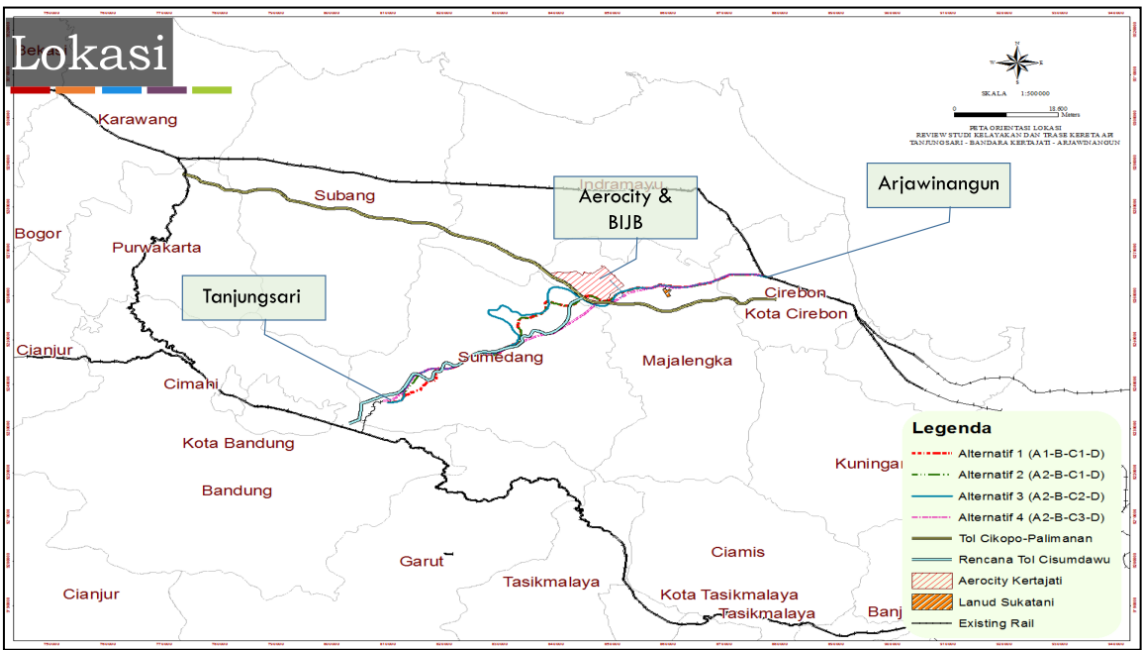
- *Feasibility Study* (FS) tahun 2017;
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2017; dan
- *Detail Engineering Design* (DED) tahun 2018.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan rel kereta api Pagaden – Patimban yaitu 133 Ha. Rencana konstruksi dimulai pada tahun 2019 dan ditargetkan beroperasi tahun 2023.

- b. **Pembangunan Rel Kereta Api Terisi – Losarang**  
Pembangunan Rel Kereta Api Terisi – Losarang merupakan upaya untuk menghubungkan rel kereta api menuju Losarang, Kabupaten Indramayu. Rencana pembangunan ini diusulkan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan alur mobilitas Kawasan Metropolitan REBANA. Trase ini masih merupakan alternatif pilihan yang perlu dikaji lebih lanjut tentang studi kelayakannya.
- c. **Pembangunan Rel Kereta Api Jatibarang – Indramayu**  
Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Jatibarang – Indramayu berlokasi di Kabupaten Indramayu. Rencana pembangunan rel ini akan mengkoneksikan KPI Balongan menuju ke pusat Kabupaten Indramayu dan menuju ke Bandara Internasional Kertajati. Usulan tersebut sudah masuk dalam rancangan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Trase ini masih merupakan usulan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat yang membutuhkan kajian lebih lanjut dan penentuan trase yang dipilih.

d. Pembangunan Rel Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun

Pembangunan Rel Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun merupakan program pembangunan rel yang menghubungkan Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian Utara dan Timur.



Gambar 4.28 Jaringan Rel Kereta Api Pagaden – Patimban

Sumber: Review Konsep Akhir Trase Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun, 2020

Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa alternatif trase rel kereta api yang direncanakan. Setelah dilakukan *Scoring* maka trase yang dipilih adalah alternatif 4 karena memiliki jarak paling pendek, segmen landai paling banyak, dan paling sedikit memotong jalan tol. Biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan Rel Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun dibagi menjadi 2 segmen yaitu:

- 1) Segmen Tanjungsari – Kertajati: biaya pembebasan lahan senilai Rp 64,9 Miliar dan biaya konstruksi sebesar Rp 1,4 Triliun
- 2) Segmen Kertajati – Arjawinangun: biaya pembebasan lahan senilai Rp 85,7 Miliar dan biaya konstruksi sebesar Rp 1,1 Triliun.

e. Reaktivasi Rel Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari

Program reaktivasi rel kereta api Rancaekek – Tanjungsari merupakan program untuk menghubungkan kota/kabupaten Bandung menuju Bandara Internasional Jawa Barat. Program ini memiliki beberapa bertujuan antara lain:

- 1) Mengefisiensikan perpindahan orang dan barang Jawa Barat bagian tengah
- 2) Komuter bandung bagian timur, Jatinangor dan Sumedang
- 3) Meningkatkan nilai ekonomi angkutan barang dan penumpang (jalur jawa barat bagian tengah)
- 4) Pengembangan wilayah Bandung timur, Jatinangor & Sumedang untuk perumahan, industri, dan perdagangan serta menciptakan lapangan kerja baru.
- 5) TOD & *Park and Ride* sangat potensial untuk dikembangkan sepanjang trase

- 6) Potensi Penumpang komuter yang tinggi (pelajar/mahasiswa, pekerja, dan wisata belanja/komersial di Bandung)

**Gambar 4.29 Jaringan Rel Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, rute reaktivasi rel kereta api Rancaekek – Tanjungsari dimulai dari Stasiun Rancaekek ke Stasiun Jatinangor, hingga Stasiun Tanjungsari. Reaktivasi ini memiliki panjang 11,5 Km. Estimasi biaya program reaktivasi rel kereta api Rancaekek – Tanjungsari sekitar Rp 1,11 Miliar. Program ini sudah memiliki beberapa dokumen kajian antara lain:

- 1) Studi Penyusunan Perencanaan Jalur Reaktivasi KA tahun 2009
- 2) Studi Dampak Sosial tahun 2016
- 3) *Detail engineering Design* (DED) tahun 2015
- 4) Kajian Lingkungan tahun 2019

f. Pembangunan Rel Kereta Cepat Bandung – Kertajati

Rencana Pembangunan Rel Kereta Cepat Bandung – Kertajati merupakan rencana penyambungan dari Kereta Cepat Jakarta – Bandung menuju tujuan akhir Kertajati, Kabupaten Majalengka. Rencana ini diharapkan akan memudahkan mobilisasi barang dan orang dari Kota Bandung menuju Kabupaten Majalengka. Pembangunan rel ini direncanakan langsung terkoneksi dengan Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka. Rencana Pembangunan Rel Kereta Cepat Bandung – Kertajati sudah termasuk dalam usulan di revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mewujudkan pembangunan tersebut.

g. Pembangunan Rel Kereta Semi Cepat Jakarta – Surabaya

Program Pembangunan Rel Kereta Api Semi Cepat Jakarta – Surabaya merupakan program pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Jawa bagian barat hingga Jawa bagian timur. Program ini bertujuan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan nasional/regional salah satunya di Cirebon Raya. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk memperkuat konsep pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

**Gambar 4.30 Pembangunan Rel Kereta Semi Cepat Jakarta – Surabaya**



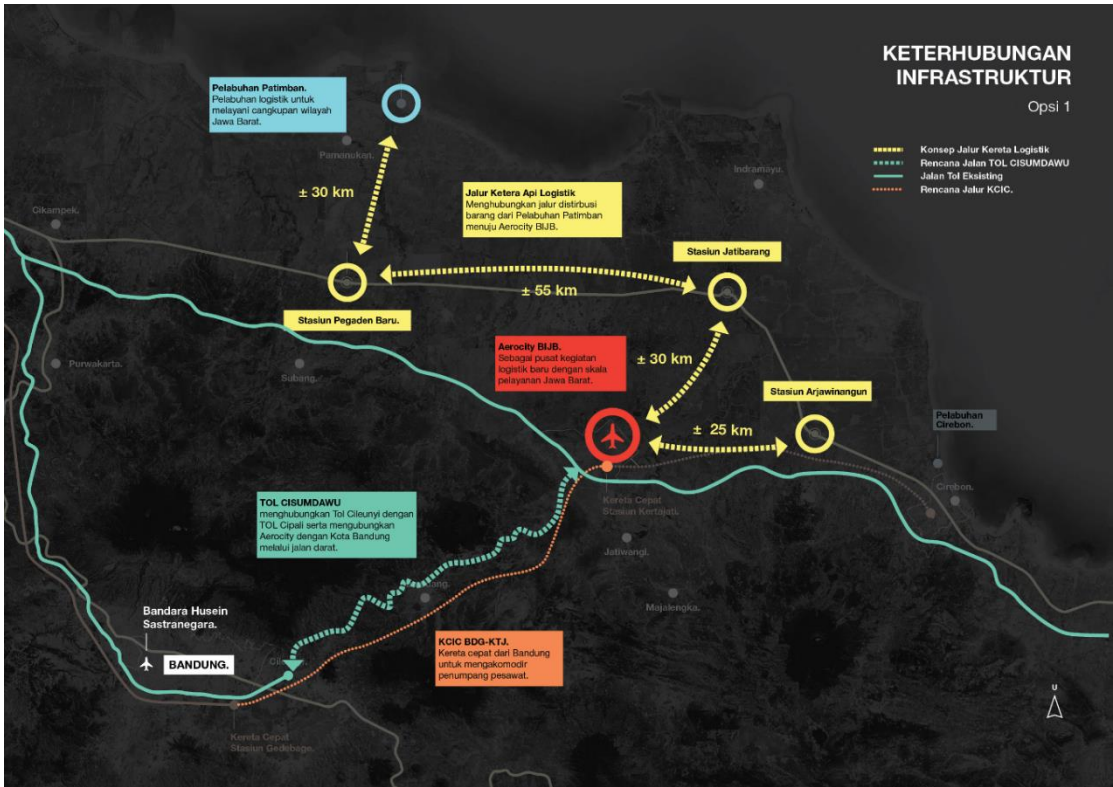
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, rute dari pembangunan rel kereta api semi cepat Jakarta – Surabaya terdiri dari beberapa stasiun utama yaitu: Manggarai, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Pasarturi. Sedangkan stasiun untuk naik-turun penumpang lainnya berjumlah 25 stasiun yang tersebar sepanjang trase rel. kebutuhan lahan sekitar 1.248 Ha dan perkiraan biaya untuk pembebasan lahan yaitu Rp 17,11 Triliun. Jadi total estimasi biaya pembangunan rel kereta api semi cepat Jakarta – Surabaya yakni Rp 104,81 Triliun.

h. Pembangunan Rel Kereta Api Logistik Patimban – Kertajati

Program Pembangunan Rel Kereta Api Logistik Patimban – Kertajati merupakan program pembangunan rel kereta api yang menghubungkan antara Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat. Pembangunan rel kereta api ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Pelabuhan Patimban dan Bandara internasional Jawa Barat sebagai *hub* dalam kegiatan industri yang ada di Kawasan Metropolitan REBANA. Ada beberapa alternatif trase antara lain:

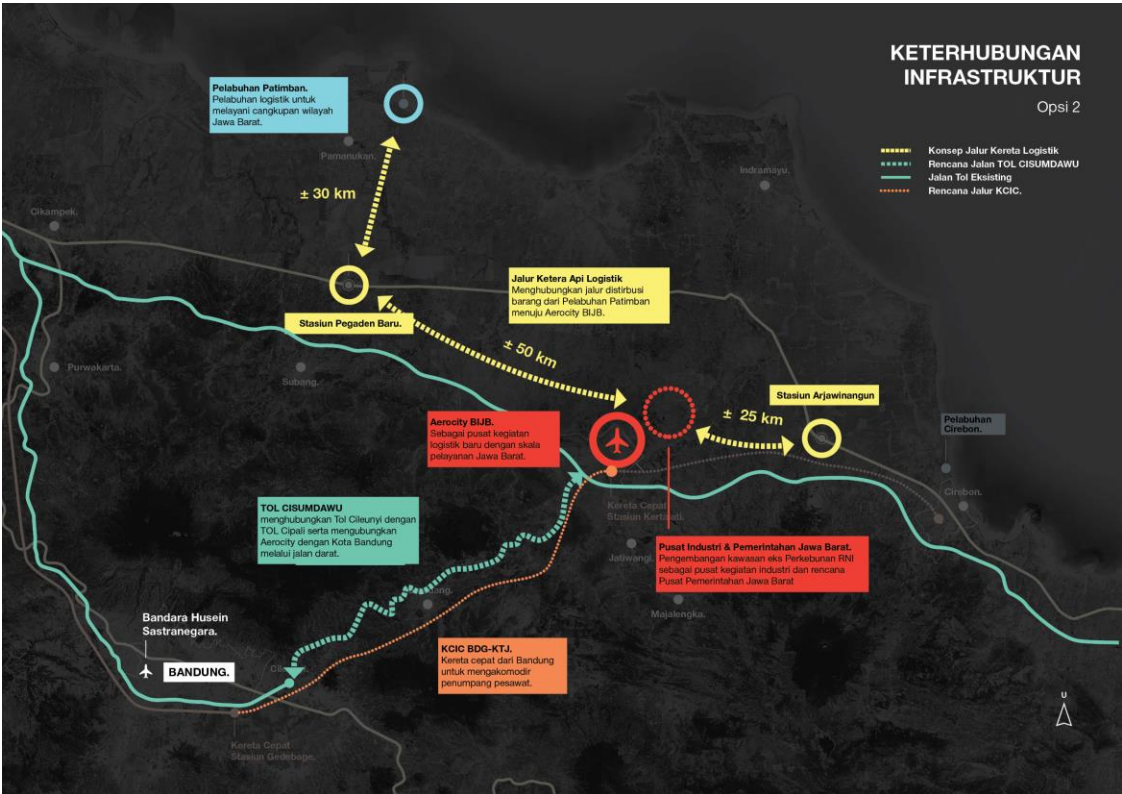
Gambar 4.31 Rel Kereta Api Logistik Patimban–Kertajati Alternatif 1



Sumber: Pengembangan Kertajati Aerocity, BIJB 2020

Gambar di atas menunjukkan alternatif 1 Pembangunan Rel Kereta Api Logistik dengan jarak 140 Km. kebutuhan investasi sepanjang 85 Km dengan jumlah Rp 2,1 Triliun.

Gambar 4.32 Rel Kereta Api Logistik Patimban–Kertajati Alternatif 2



Sumber: Pengembangan Kertajati Aerocity, BIJB 2020



industri adalah 100 tenaga kerja. Kemudian, setiap 1.000 Ha kawasan industri terdiri dari 7 Ha kawasan industri kecil dan menengah;

3. Jumlah tenaga kerja pada setiap 1 Ha kawasan komersial adalah 100 tenaga kerja;
4. Mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang, luas persil perumahan adalah 55% dari luas kawasan perumahan;
5. Total luas bangunan rumah diasumsikan sebesar 65% dari total luas persil perumahan mengacu pada KDB rumah berkepadatan sedang pada Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh. Kemudian berdasarkan SNI 03-1733-2004, 1 penduduk kawasan perumahan membutuhkan minimal 9 m<sup>2</sup> dari luas bangunan rumah.

Berikut adalah rencana guna lahan, jumlah penduduk, dan tenaga kerja pada KPI Metropolitan REBANA pada tahun 2030.

**Tabel 4.13 Tata Guna Lahan, Jumlah Penduduk Perumahan, Dan Tenaga Kerja di KPI Metropolitan REBANA**

| No | Nama                          | Kabu-<br>paten          | Luas<br>(Ha)  | Luas<br>RTH (Ha) | Luas<br>Terba-<br>ngun (Ha) | Luas<br>Kawa-<br>san<br>Industri<br>(Ha) | Jumlah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Industri | Luas<br>Kawasan<br>komersi-<br>al (Ha) | Jumlah<br>Tenaga<br>Kerja<br>komer-<br>sial | Luas<br>Kawasan<br>Perumahan<br>dan PSU (Ha) | Luas<br>Persil<br>(Ha) | Luas<br>Bangunan<br>Rumah<br>(Ha) | Jumlah<br>Pendu-<br>duk<br>Peruma-<br>han |
|----|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | KPI Patimban                  | Kab,<br>Subang          | 541,61        | 162,48           | 379,13                      | 227,48                                   | 54.161                                | 75,83                                  | 7.583                                       | 75,83                                        | 41,70                  | 27,11                             | 30.119                                    |
| 2  | KPI Cipali<br>Subang Barat    | Kab,<br>Subang          | 10.407,6<br>2 | 3.122,28         | 7.285,33                    | 4.371,20                                 | 1.040.762                             | 1.457,07                               | 145.707                                     | 1.457,07                                     | 801,39                 | 520,90                            | 578.779                                   |
| 3  | KPI Cipali<br>Subang<br>Timur | Kab,<br>Subang          | 4.806,25      | 1.441,87         | 3.364,37                    | 2.018,62                                 | 480.625                               | 672,87                                 | 67.287                                      | 672,87                                       | 370,08                 | 240,55                            | 267.281                                   |
| 4  | KPI Jatiwangi                 | Kab,<br>Majaleng-<br>ka | 971,58        | 291,47           | 680,10                      | 408,06                                   | 97.158                                | 136,02                                 | 13.602                                      | 136,02                                       | 74,81                  | 48,63                             | 54.030                                    |
| 5  | KPI Cirebon                   | Kab,<br>Cirebon         | 1.815,29      | 544,59           | 1.270,70                    | 762,42                                   | 181.529                               | 254,14                                 | 25.414                                      | 254,14                                       | 139,78                 | 90,86                             | 100.950                                   |
| 6  | KPI Patrol                    | Kab,<br>Indramayu       | 4.140,82      | 1.242,25         | 2.898,57                    | 1.739,14                                 | 414.082                               | 579,71                                 | 57.971                                      | 579,71                                       | 318,84                 | 207,25                            | 230.275                                   |
| 7  | KPI Losarang                  | Kab,<br>Indramayu       | 6.710,08      | 2.013,02         | 4.697,05                    | 2.818,23                                 | 671.008                               | 939,41                                 | 93.941                                      | 939,41                                       | 516,68                 | 335,84                            | 373.155                                   |
| 8  | KPI Tukdana                   | Kab,<br>Indramayu       | 563,04        | 168,91           | 394,13                      | 236,48                                   | 56.304                                | 78,83                                  | 7.883                                       | 78,83                                        | 43,35                  | 28,18                             | 31.311                                    |
| 9  | KPI Cipali<br>Indramayu       | Kab,<br>Indramayu       | 2.874,77      | 862,43           | 2.012,34                    | 1.207,40                                 | 287.477                               | 402,47                                 | 40.247                                      | 402,47                                       | 221,36                 | 143,88                            | 159.869                                   |
| 10 | KPI Balongan                  | Kab,<br>Indramayu       | 2.122,06      | 636,62           | 1.485,44                    | 891,27                                   | 212.206                               | 297,09                                 | 29.709                                      | 297,09                                       | 163,40                 | 106,21                            | 118.010                                   |
| 11 | KPI<br>Krangkeng              | Kab,<br>Indramayu       | 3.452,39      | 1.035,72         | 2.416,67                    | 1.450,00                                 | 345.239                               | 483,33                                 | 48.333                                      | 483,33                                       | 265,83                 | 172,79                            | 191.991                                   |
| 12 | KPI Kertajati -<br>Jatitujuh  | Kab,<br>Majaleng-<br>ka | 1.415,20      | 424,56           | 990,64                      | 594,38                                   | 141.520                               | 198,13                                 | 19.813                                      | 198,13                                       | 108,97                 | 70,83                             | 78.701                                    |
| 13 | KPI Butom                     | Kab,<br>Sumedang        | 4.092,25      | 1.227,68         | 2.864,58                    | 1.718,75                                 | 409.225                               | 572,92                                 | 57.292                                      | 572,92                                       | 315,10                 | 204,82                            | 227.575                                   |
|    | TOTAL                         |                         | 43.912,95     | 13.173,88        | 30.739,06                   | 18.443,4                                 | 4.391.295                             | 6.147,81                               | 614.781                                     | 6.147,81                                     | 3.381,30               | 2.197,84                          | 2.442.048                                 |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5.3.1 Infrastruktur Penyediaan Air Bersih

1. Sumber Air Baku Eksisting

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten, berikut adalah debit sumber air baku eksisting:

a. Kabupaten Cirebon

Total sumber air baku di Kabupaten Cirebon adalah 550,8 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Sumber Air Baku Kabupaten Cirebon**

| No    | Sumber Air Baku | Nama Sistem                    | Lokasi                                            | Kapasitas (L/Det) |
|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | MA Bojong       | Sistem CSC                     | Ds. Cikalahang, Dukupuntang Kab. Cirebon          | 100               |
| 2     | MA Cibodas      | Sistem Cibodas                 | Ds. Kaduella, Pasawahan Kab. Kuningan             | 70                |
| 3     | MA Bebelan      | Sistem Cibodas                 | Ds. Kaduella, Pasawahan Kab. Kuningan             | 25                |
| 4     | MA Cigusti      | Sistem Cigusti                 | Ds. Padamatang, Pasawahan Kab. Kuningan           | 50                |
| 5     | MA Cipujangga   | Sistem CSC                     | Ds. Padabeunghar, Pasawahan Kab. Kuningan         | 50                |
| 6     | MA Cipaniis     | Tapping dari PDAM Kota Cirebon | Plangon, Cirebon                                  | 18                |
| 7     | MA Cibulakan    | Sistem Beber                   | Ds. Linggarjati Kab. Kuningan                     | 12                |
| 8     | MA Telaga Nilem | KPS (CV TNS)                   | Ds. Kaduella, Pasawahan Kab. Kuningan             | 8                 |
| 9     | Air Permukaan   | Sistem IPA Losari              | Bendung Karet Tawang Sari Sungai Cisanggarung     | 70                |
| 10    | Air Permukaan   | Sistem IPA Kapetakan           | Bendung Rentang Sungai Kumpul Kuista              | 100               |
| 11    | Air Permukaan   | Sistem IPA Ciwaringin          | Bendung Walahar Sungai Ciwaringin Kab. Majalengka | 20                |
| 12    | Air Permukaan   | Sistem IPA Ciwaringin          | Sungai Cimanuk Kertasmaya Kab. Indramayu          | 10                |
| 13    | Sumur Dalam     | Sistem Perum Bumi Asri         | Perum Bumi Arum Asri                              | 7,2               |
| 14    | Sumur Dalam     | Sistem Sumber                  | Taman Tukmudal Indah                              |                   |
| 15    | Sumur Dalam     | 1 (satu) Titik                 | Beber                                             | 3                 |
| 16    | Sumur Dalam     | Sistem Lemah Abang             | Lemah Abang                                       | 5,6               |
| 17    | Sumur Dalam     | Sistem Karang Sembung          | Karang Sembung                                    | 1                 |
| 18    | Sumur Dalam     | Sistem Slendra                 | Slendra                                           | 1                 |
| TOTAL |                 |                                |                                                   | 550,8             |

Sumber: RISPAM Kabupaten Cirebon

b. Kabupaten Indramayu

Total sumber air baku di Kabupaten Indramayu adalah 770 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Sumber Air Baku Kabupaten Indramayu

| No.   | Nama Ipa        | Kapasitas (L/Dt) | Sumber Air Baku                        |
|-------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| 1     | IPA Kepandaian  | 150              | S Cimanuk                              |
| 2     | IPA Jatibarang  | 70               | S Cimanuk                              |
| 3     | IPA Lohbener    | 300              | S Cimanuk                              |
| 4     | IPA Pamayahan   | 60               | S Cimanuk                              |
| 5     | IPA Kertasemaya | 50               | S Cimanuk                              |
| 6     | IPA Jatisawit   | 10               | S Cimanuk                              |
| 7     | IPA Kandanghaur | 60               | Irigasi Wanguk/Irigasi Jatiluhur       |
| 8     | IPA Anjatan     | 50               | Irigasi Salam Darma/ Irigasi Jatiluhur |
| 9     | IPA Losarang    | 5                | Irigasi Cipanas/S Cipanas              |
| 10    | IPA Bangodua    | 5                | Irigasi Cipelang/S Cimanuk             |
| 11    | IPA Gabuswetan  | 10               | Air Tanah Dalam                        |
| Total |                 | 770              |                                        |

Sumber: RISPAM Kabupaten Indramayu

c. Kabupaten Majalengka

Total sumber air baku di Kabupaten Majalengka adalah 140 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.16 Sumber Air Baku Kabupaten Majalengka

| No.   | Nama               | Tahun Pembuatan | Kapasitas Terpasang (lt/detik) |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1     | IPA Cab. Kadipaten | 1991/1992       | 20                             |
| 2     | IPA Cab. Jatitujuh | 2009            | 20                             |
| 3     | IPA Cab. Dawuan    | 2011            | 20                             |
| 4     | IPA Cab. Kertajati | 2012            | 40                             |
| 5     | IPA Cab. Ligug     | 2012            | 40                             |
| Total |                    |                 | 140                            |

Sumber: RISPAM Kabupaten Majalengka

d. Kabupaten Subang

Total sumber air baku di Kabupaten Subang adalah 684,04 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.17 Sumber Air Baku Kabupaten Subang

| No,    | Cabang/Unit         | Sumber Air Baku               | Kapasitas Terpasang (L/det) |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Subang              | Mata Air                      | 155                         |
| 2      | Pagaden             | Air Tanah Dalam               | 5,84                        |
| 3      | Cipunagara          | Air Tanah Dalam               | 6                           |
| 4      | Ciasem              | Air Permukaan                 | 50                          |
| 5      | Blanakan            |                               |                             |
| 6      | Pusakanagara        | Air Tanah Dalam               | 5,7                         |
| 7      | Pamanukan           | Air Permukaan                 | 100                         |
|        |                     | Air Tanah Dalam               | 11,2                        |
| 8      | Binong              | Air Tanah Dalam               | 3,7                         |
| 9      | Comprenng           | Air Tanah Dalam               | 18,6                        |
| 10     | Pabuaran-Patokbeusi | Air Permukaan                 | 50                          |
| 11     | Purwadadi           | Air Tanah Dalam               | 8                           |
| 12     | Kalijati            | Air Tanah Dalam+Air Permukaan | 63,5                        |
| 13     | Jalancagak          | Air Tanah Dangkal             | 34                          |
| 14     | Sagalaherang        | Air Tanah Dalam               | 15,5                        |
| 15     | Cisalak-Kasomalang  | Mata Air Pompa                | 142                         |
| 16     | Tanjungsiang        | Air Permukaan                 | 15                          |
| Jumlah |                     |                               | 684,04                      |

Sumber: Masterplan Air Minum Kabupaten Subang

e. Kabupaten Sumedang

Total sumber air baku di Kabupaten Sumedang adalah 620,8 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18 Sumber Air Baku Kabupaten Sumedang

| No | Cabang (Unit)    | Air Baku      | Lokasi Sumber Air Baku | Debit Sumber Air Baku (L/Dt) |
|----|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| 1  | Sumedang Utara   | Mata Air      | Cipanteuneun           | 120,00                       |
| 2  | Sumedang Selatan | Mata Air      | Cipongkor              | 8,00                         |
|    |                  | Air Permukaan | Citekin                | 120,00                       |
| 3  | Situraja         | Mata Air      | Cicaneang              | 148,50                       |
| 4  | Darmaraja        | Mata Air      | Cikukulu               | 2,30                         |
|    |                  |               | Cipaniis               | 0,50                         |
| 5  | Cimalaka         | Sumur Dalam   | Citimun                | 10,00                        |
|    |                  |               | Sukatani               | 7,00                         |
| 6  | Tanjung Kerta    | Mata Air      | Cibuntu                | 1,50                         |
| 7  | Paseh            | Sumur Dalam   | Nagrak I               | 0,50                         |
|    |                  |               | Bongkok II             | 18,00                        |
| 8  | Tanjungsari      | Air Permukaan | Goa Walet              | 70,00                        |
|    |                  |               | Cigendel               | 40,00                        |
|    |                  |               | Cigendel               | 4,50                         |
| 9  | Jatinangor       | Air           | Gua Walet              | 70,00                        |

| No     | Cabang (Unit) | Air Baku      | Lokasi Sumber Air Baku | Debit Sumber Air Baku (L/Dt) |
|--------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------|
|        |               | Permukaan     | 2 Sumur Bor            | 10,00                        |
| 10     | Tomo          | Mata Air      | Cioray Gede            | 35,00                        |
| 11     | Ujungjaya     | Mata Air      | Cioray Gede            | 37,00                        |
| 12     | Wado          | Air Permukaan | Cimanuk/Cikareo        | 12,00                        |
|        |               |               | Citamba                | 4,00                         |
| Jumlah |               |               |                        | 620,80                       |

Sumber: RISPAM Kab Sumedang

f. Kabupaten Kuningan

Total sumber air baku di Kabupaten Kuningan adalah 140 liter/detik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.19 Sumber Air Baku Kabupaten Kuningan

| No     | Cabang (Unit)       | Air Baku      | Lokasi Sumber Air Baku | Debit Sumber Air Baku (L/Dt) |
|--------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| 1      | Telaga Nilem        | Mata Air      | Pasawahan              | 340                          |
| 2      | Pagaden Telaga Bogo | Mata Air      | Pasawahan              | 150                          |
|        |                     | Mata Air      | Pasawahan              | 49                           |
| 3      | Cisamaya            | Mata Air      | Pasawahan              | 280                          |
| 4      | Waduk Darma         | Air Permukaan | Darma                  | 60                           |
| Jumlah |                     |               |                        | 879                          |

Sumber: RISPAM Kab Sumedang

Berdasarkan sumber air baku eksisting di atas, berikut adalah total debit sumber air baku per kabupaten di Kawasan Metropolitan REBANA berdasarkan RISPAM Kabupaten:

Tabel 4.20 Total Sumber Air Baku Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA

| Total Sumber Air Baku | Kapasitas (L/Det) |
|-----------------------|-------------------|
| Kabupaten Cirebon     | 550,8             |
| Kabupaten Indramayu   | 770,0             |
| Kabupaten Majalengka  | 140,0             |
| Kabupaten Subang      | 684,0             |
| Kabupaten Sumedang    | 620,8             |
| Kabupaten Kuningan    | 879,0             |
| Total                 | 3.644,6           |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4. Alternatif Sumber Air Baku

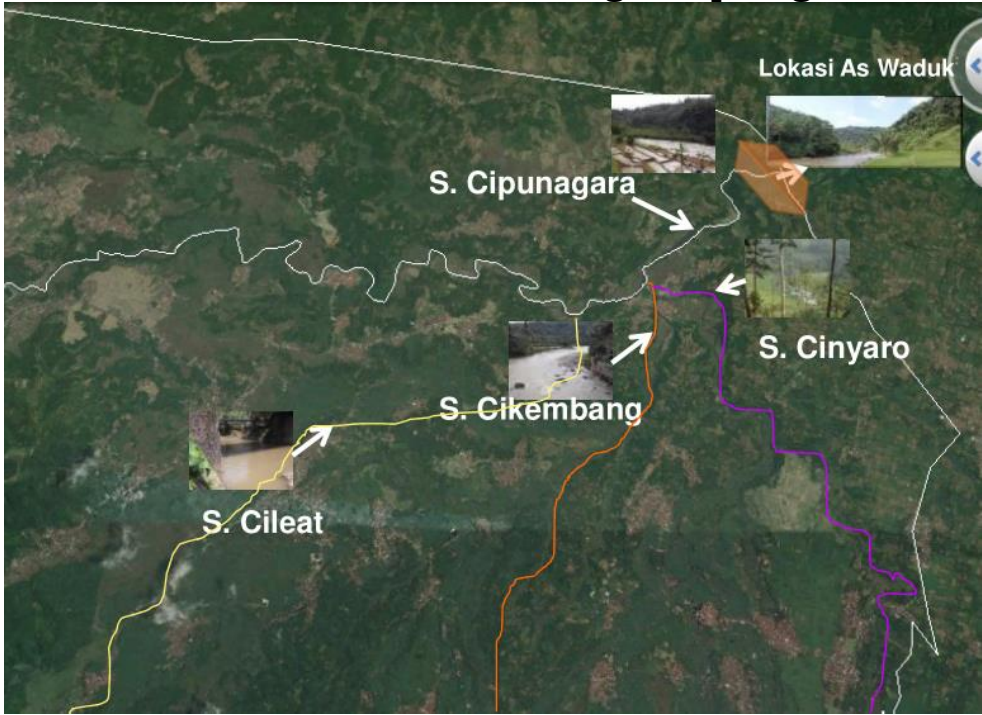
Berikut adalah beberapa rencana pengembangan alternatif sumber air baku:

a. Pembangunan Waduk/Bendungan Cipunagara

Pembangunan Waduk/Bendungan Cipunagara termasuk dalam program pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA untuk menyediakan pasokan air bersih. Selain itu, pembangunan Waduk/Bendungan ini

dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 4.34 Waduk/Bendungan Cipunagara**



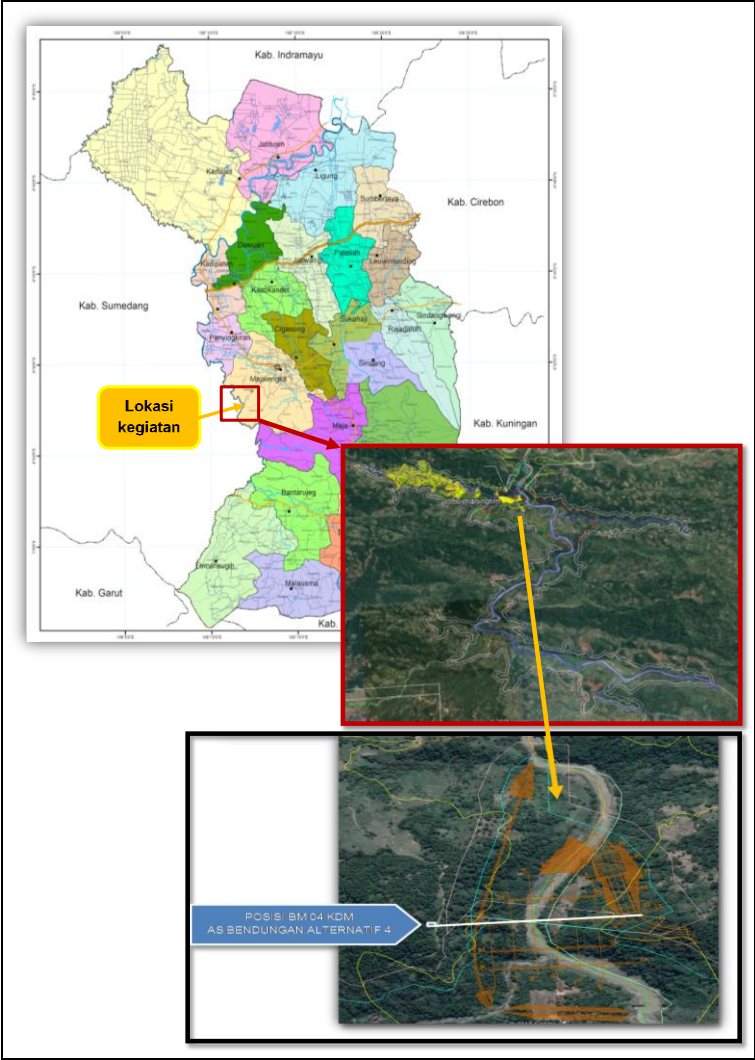
Sumber: Draft Akhir Waduk Cipunagara, 2015

Berdasarkan gambar di atas, Waduk/Bendungan Cipunagara memiliki sumber air dari Sungai Cipunagara, Sungai Cinyaro, Sungai Cikembang, dan Sungai Cileat. Fungsi dari Waduk/Bendungan Cipunagara ini adalah sebagai suplai bagi kekurangan air baku dan sebagai pemenuhan kebutuhan air irigasi yang belum tercukupi oleh Waduk/Bendungan Sadawarna dan Waduk/Bendungan Cipancuh. Pembangunan Waduk/Bendungan Cipunagara sudah memiliki dokumen *Feasibility Study* (FS) yang telah dilakukan pada tahun 2015.

b. Waduk/Bendungan Kadumalik

Bendungan Kadumalik merupakan proyek strategis nasional yang berada di dua Kabupaten, yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang dengan tujuan pembangunan untuk kebutuhan air irigasi, penyediaan air baku Kabupaten Majalengka dan PLTA. Bendungan yang rencananya akan dialiri dari sungai Cilutung tersebut memiliki luas keseluruhan 941,8 hektar yang mencakupi 3 Kecamatan di Majalengka (Maja, Lemah Sugih dan Bantarujeg) dengan luas 571,01 ha dan 1 Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Jatinunggal) dengan luas 370,8 ha. Untuk Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, akan ada tiga desa yang terkena dampak pembangunan Bendungan Kadumalik tersebut. Salah satunya adalah Desa Cimanintin.

Gambar 4.35 Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik



Sumber: Laporan Akhir Sementara Kadumalik, 2019

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, biaya untuk pembebasan lahan sekitar Rp 102,43 Miliar. Sedangkan *progress* pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik saat ini sampai pengerjaan LARAP pada tahun 2019.

c. Waduk/Bendungan Sadawarna

Pembangunan Waduk/Bendungan Sadawarna merupakan program upaya mengatasi permasalahan terkait kebutuhan air yang semakin meningkat dan seringnya terjadi banjir di daerah Pamanukan dan sekitarnya.

**Gambar 4.36 Pembangunan Waduk/Bendungan Sadawarna**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, lokasi Waduk/Bendungan Sadawarna di Sungai Sadawarna yang terletak di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang dan Desa Tanjung, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Nilai kontrak Waduk/Bendungan Sadawarna dibagi menjadi 2 paket yaitu:

1. Paket 1 bernilai Rp 970,32 Miliar. Paket ini meliputi pekerjaan bendungan, saluran pengelak, bangunan pengambilan, dan hidromekanikal. *Progress* pekerjaan paket 1: 4,96%
2. Paket 2 bernilai Rp 898,92 Miliar. Paket ini meliputi pekerjaan jalan masuk, pelimpah (*Spilway*), bangunan fasilitas, dan pekerjaan lain-lain. *Progress* pekerjaan paket 2: 11,52%

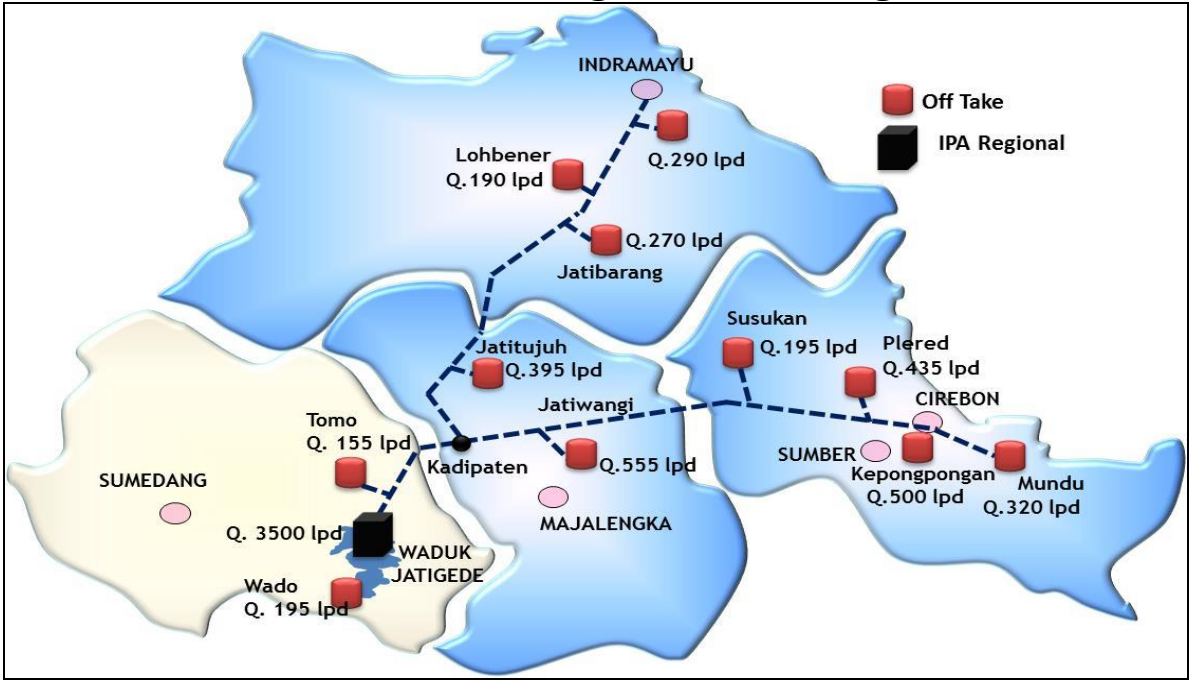
d. Pembangunan SPAM Cipanas

Pembangunan SPAM Cipanas merupakan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang bersumber dari waduk/bendungan Cipanas yang berlokasi di Desa Cibuluh, Kec. Ujung jaya Kab. Sumedang dan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Rencana SPAM ini bertujuan untuk memberikan akses air minum di Kawasan Metropolitan REBANA khususnya untuk daerah KPI Butom, KPI Cipali Indramayu dan KPI Kertajati-Jatitujuh.

e. Pembangunan SPAM Jatigede

Pembangunan SPAM Jatigede merupakan program akses air minum di Jawa Barat khususnya di Kawasan Metropolitan REBANA.

Gambar 4.37 Pembangunan SPAM Jatigede



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, sumber air baku SPAM Jatigede bersumber dari Waduk/Bendungan Jatigede. SPAM Jatigede memiliki kapasitas sebesar 1.500 Liter/detik. Pembangunan SPAM Jatigede bisa berdampak pada 1,4 juta penduduk yang mendapatkan akses air minum. Pembangunan SPAM Jatigede ditargetkan sudah beroperasi pada tahun 2023. Perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan SPAM Jatigede sebesar Rp 2,04 Triliun yang terdiri dari *intake*, transmisi air baku, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi utama, dan reservoir tetap. Kelengkapan dokumen SPAM Jatigede antara lain:

- Rencana induk regional tahun 2016
- Studi kelayakan tahun 2014
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2019
- *Detail Engineering Design* (DED) tahun 2017
- Kesepakatan Bersama

f. Waduk Cileuweung

Pembangunan Waduk Cileuweung dilakukan di lahan seluas 285 Ha dengan kapasitas air sebanyak 300 l/d. Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk sumber pengairan lahan sawah di Kabupaten Kuningan bagian timur. Selain itu, waduk ini juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang diprediksi mampu menghasilkan 941 Kwh. Pembangunan Waduk Cileuweung direncanakan akan selesai pada awal tahun 2021.

Gambar 4.38 Pembangunan Waduk Cileuweung



Sumber: kuningankab.go.id

Kemudian, berikut adalah total debit alternatif sumber air baku per kabupaten di Kawasan Metropolitan REBANA:

Tabel 4.21 Total Debit Alternatif Sumber Air Baku di Kawasan Metropolitan REBANA

| Kabupaten            | Sumber Air Baku  | Kapasitas (L/Detik) |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Kabupaten Cirebon    | SPAM Jatigede    | 950                 |
| Kabupaten Indramayu  | Waduk Sadawarna  | 2.000               |
|                      | Waduk Cipanas    | 850                 |
|                      | SPAM Jatigede    | 750                 |
| Kabupaten Majalengka | SPAM Jatigede    | 950                 |
|                      | Waduk Kadumalik  | 1.500               |
| Kabupaten Subang     | Waduk Sadawarna  | 2.300               |
|                      | Waduk Cipunagara | 3.000               |
| Kabupaten Sumedang   | SPAM Jatigede    | 350                 |
|                      | Waduk Sadawarna  | 200                 |
| Kabupaten Kuningan   | Waduk Cileuweung | 300                 |
| Total                |                  | 13.150              |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Maka total debit sumber air baku di Kawasan Metropolitan Rebana meliputi eksisting dan alternatif adalah **16.794,6 liter/detik.**

5. Kebutuhan Air Baku di Kawasan Metropolitan REBANA

Berdasarkan standar Ditjen Cipta Karya (1997) jumlah kebutuhan air minum pada kawasan industri adalah 0,8 liter/detik/ha, pada kawasan komersial adalah 10 liter/pekerja/hari, dan kebutuhan air domestik adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air baku yang dianalisis tidak dapat dibandingkan dengan data *supply* karena pada saat perencanaan sumber air baku dilakukan belum memperhitungkan adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan kajian infrastruktur penyediaan sumber air baku secara kewilayahan. Berikut adalah analisis kebutuhan air baku di Kawasan Metropolitan REBANA pada tahun 2030:

**Tabel 4.22 Kebutuhan Air Baku di Kawasan Metropolitan REBANA**

| No | Nama                      | Kebutuhan Air Industri<br>(liter/detik) | Kebutuhan Air Komersial<br>(liter/hari) | Kebutuhan Air Komersial<br>(liter/detik) | Kebutuhan Air Domestik<br>(liter/hari) | Kebutuhan Air Domestik<br>(liter/detik) | Total Kebutuhan Air (liter/detik) |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | KPI Patimban              | 181,98                                  | 75.825,30                               | 0,88                                     | 1.807.169,55                           | 20,92                                   | 203,77                            |
| 2  | KPI Cipali Subang Barat   | 3.496,96                                | 1.457.066,11                            | 16,86                                    | 34.726.742,30                          | 401,93                                  | 3.915,75                          |
| 3  | KPI Cipali Subang Timur   | 1.614,90                                | 672.874,41                              | 7,79                                     | 16.036.840,18                          | 185,61                                  | 1.808,30                          |
| 4  | KPI Jatiwangi             | 326,45                                  | 136.020,65                              | 1,57                                     | 3.241.825,43                           | 37,52                                   | 365,54                            |
| 5  | KPI Cirebon               | 609,94                                  | 254.139,98                              | 2,94                                     | 6.057.002,87                           | 70,10                                   | 682,98                            |
| 6  | KPI Patrol                | 1.391,31                                | 579.714,51                              | 6,71                                     | 13.816.529,24                          | 159,91                                  | 1.557,94                          |
| 7  | KPI Losarang              | 2.254,59                                | 939.410,57                              | 10,87                                    | 22.389.285,18                          | 259,14                                  | 2.524,59                          |
| 8  | KPI Tukdana               | 189,18                                  | 78.826,08                               | 0,91                                     | 1.878.688,35                           | 21,74                                   | 211,84                            |
| 9  | KPI Cipali Indramayu      | 965,92                                  | 402.468,30                              | 4,66                                     | 9.592.161,06                           | 111,02                                  | 1.081,60                          |
| 10 | KPI Balongan              | 713,01                                  | 297.088,80                              | 3,44                                     | 7.080.616,41                           | 81,95                                   | 798,40                            |
| 11 | KPI Krangkeng             | 1.160,00                                | 483.334,69                              | 5,59                                     | 11.519.476,77                          | 133,33                                  | 1.298,92                          |
| 12 | KPI Kertajati - Jatitujuh | 475,51                                  | 198.128,00                              | 2,29                                     | 4.722.050,67                           | 54,65                                   | 532,45                            |
| 13 | KPI Butom                 | 1.375,00                                | 572.915,00                              | 6,63                                     | 13.654.474,17                          | 158,04                                  | 1.539,66                          |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>14.754,75</b>                        | <b>6.147.812,40</b>                     | <b>71,16</b>                             | <b>146.522.862,18</b>                  | <b>1.695,87</b>                         | <b>16.521,77</b>                  |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5.3.2 Infrastruktur Pengolahan Air limbah

1. Pengolahan Air Limbah Eksisting

Terdapat 2 jenis pengolahan air limbah yaitu IPAL untuk *grey water* dan IPLT untuk *black water*. Di Kawasan Metropolitan REBANA, terdapat IPAL di Kota Cirebon yang melayani Metropolitan Cirebon termasuk wilayah KPI Cirebon.

**Tabel 4.23 Kapasitas IPAL Metropolitan Cirebon**

| No     | Kecamatan    | SP & IPAL        | IPAL (liter/detik) |          | Selisih (liter/detik) |
|--------|--------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|
|        |              |                  | Terpasang          | Terpakai |                       |
| 1      | Kejaksan     | Kesenden         | 75                 | 11       | 64                    |
| 2      | Kesambi      |                  |                    |          |                       |
| 3      | Pekalipan    | Ade Irma         | 80                 | 45       | 35                    |
| 4      | Lemahwungkuk |                  |                    |          |                       |
| 5      | Harjamukti   | Perumnas Utara   | 40                 | 30       | 10                    |
|        |              | Perumnas Selatan | 40                 | 30       | 10                    |
| Jumlah |              |                  | 235                | 116      | 119                   |

Sumber: Rencana Induk Air Limbah Domestik Perkotaan di Metropolitan Cirebon

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa masih terdapat selisih antara kapasitas IPAL terpakai dan terpasang sebesar 119 liter/detik

**Tabel 4.24 Kapasitas IPLT Eksisting**

| No    | Kabupaten            | Unit | Kapasitas (m³/hari) |
|-------|----------------------|------|---------------------|
| 1     | Kabupaten Cirebon    | -    | -                   |
| 2     | Kabupaten Indramayu  | 1    | 3.640               |
| 3     | Kabupaten Majalengka | 1    | 315                 |
| 4     | Kabupaten Subang     | 1    | 17                  |
| 5     | Kabupaten Sumedang   | 1    | 10                  |
| Total |                      |      | 3.982               |

Sumber: Roadmap Sanitasi di Provinsi Jawa Barat

2. Produksi Air Limbah

Berdasarkan SK-SNI Air Minum (2000), total air limbah yang dihasilkan adalah 80% dari kebutuhan air bersih. Sementara itu, 75% dari total produksi air limbah tersebut adalah *grey water* dan 25% adalah *black water*. Produksi air limbah yang dianalisis tidak dapat dibandingkan dengan data *supply* karena pada saat perencanaan infrastruktur pengolahan limbah dilakukan belum memperhitungkan adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan kajian infrastruktur pengolahan air limbah secara kewilayahan. Berikut adalah analisis produksi air limbah di Kawasan Metropolitan REBANA pada tahun 2030:

Tabel 4.25 Produksi Air Limbah di Kawasan Metropolitan REBANA (liter/detik)

| No    | Nama                      | INDUSTRI         |            |             | KOMERSIAL        |            |             | DOMESTIK         |            |             | TOTAL            |            |             |
|-------|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|       |                           | Total Air Limbah | Grey Water | Black Water | Total Air Limbah | Grey Water | Black Water | Total Air Limbah | Grey Water | Black Water | Total Air Limbah | Grey Water | Black Water |
| 1     | KPI Patimban              | 145,58           | 109,19     | 36,40       | 0,70             | 0,53       | 0,18        | 16,73            | 12,5       | 4,2         | 163,02           | 122,26     | 40,75       |
| 2     | KPI Cipali Subang Barat   | 2.797,57         | 2.09818    | 699,39      | 13,49            | 10,12      | 3,37        | 321,54           | 241,2      | 80,4        | 3.132,60         | 2.349,45   | 783,15      |
| 3     | KPI Cipali Subang Timur   | 1.291,92         | 968,94     | 322,98      | 6,23             | 4,67       | 1,56        | 148,49           | 111,4      | 37,1        | 1.446,64         | 1.084,98   | 361,66      |
| 4     | KPI Jatiwangi             | 261,16           | 195,87     | 65,29       | 1,26             | 0,94       | 0,31        | 30,02            | 22,5       | 7,5         | 292,44           | 219,33     | 73,11       |
| 5     | KPI Cirebon               | 487,95           | 365,96     | 121,99      | 2,35             | 1,76       | 0,59        | 56,08            | 42,1       | 14,0        | 546,39           | 409,79     | 136,60      |
| 6     | KPI Patrol                | 1.113,05         | 834,79     | 278,26      | 5,37             | 4,03       | 1,34        | 127,93           | 95,9       | 32,0        | 1.246,35         | 934,76     | 311,59      |
| 7     | KPI Losarang              | 1.803,67         | 1.352,75   | 450,92      | 8,70             | 6,52       | 2,17        | 207,31           | 155,5      | 51,8        | 2.019,67         | 1.514,76   | 504,92      |
| 8     | KPI Tukdana               | 151,35           | 113,51     | 37,84       | 0,73             | 0,55       | 0,18        | 17,40            | 13,0       | 4,3         | 169,47           | 127,10     | 42,37       |
| 9     | KPI Cipali Indramayu      | 772,74           | 579,55     | 193,18      | 3,73             | 2,79       | 0,93        | 88,82            | 66,6       | 22,2        | 865,28           | 648,96     | 216,32      |
| 10    | KPI Balongan              | 570,41           | 427,81     | 142,60      | 2,75             | 2,06       | 0,69        | 65,56            | 49,2       | 16,4        | 638,72           | 479,04     | 159,68      |
| 11    | KPI Krangkeng             | 928,00           | 696,00     | 232,00      | 4,48             | 3,36       | 1,12        | 106,66           | 80,0       | 26,7        | 1.039,14         | 779,35     | 259,78      |
| 12    | KPI Kertajati - Jatitujuh | 380,41           | 285,30     | 95,10       | 1,83             | 1,38       | 0,46        | 43,72            | 32,8       | 10,9        | 425,96           | 319,47     | 106,49      |
| 13    | KPI Butom                 | 1.100,00         | 825,00     | 275,00      | 5,30             | 3,98       | 1,33        | 126,43           | 94,8       | 31,6        | 1.231,73         | 923,80     | 307,93      |
| TOTAL |                           | 11.803,80        | 8.852,85   | 2.950,95    | 56,92            | 42,69      | 14,23       | 1.356,69         | 1.017,2    | 339,17      | 13.217,42        | 9.913,06   | 3.304,35    |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5.3.3 Infrastruktur Persampahan

1. Infrastruktur Persampahan Eksisting

Berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat, berikut adalah kapasitas TPS kabupaten-kabupaten di Kawasan Metropolitan REBANA:

**Tabel 4.26 Kapasitas TPS Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA**

| No.   | Kabupaten            | Kapasitas pengangkutan (m <sup>3</sup> /hari) | Kapasitas TPS (m <sup>3</sup> /hari) |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Kabupaten Cirebon    | 349                                           | 1.600                                |
| 2     | Kabupaten Indramayu  | 283                                           | 1.240                                |
| 3     | Kabupaten Majalengka | 67                                            | 1.040                                |
| 4     | Kabupaten Subang     | 300                                           | 1.200                                |
| 5     | Kabupaten Sumedang   | 166                                           | 1.040                                |
| Total |                      | 1.165                                         | 6.120                                |

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah jumlah TPA kabupaten-kabupaten di Kawasan Metropolitan REBANA:

**Tabel 4.27 TPA Eksisting di Kawasan Metropolitan REBANA**

| No | Kabupaten            | Jumlah TPA | Lokasi                                           |
|----|----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Kabupaten Cirebon    | 4          | Gunung santri, Ciledug Lor, Ciawijapura, Gegesik |
| 2  | Kabupaten Indramayu  | 4          | Pecuk, Kertawinangun                             |
| 3  | Kabupaten Majalengka | 2          | Heuleut                                          |
| 4  | Kabupaten Subang     | 2          | Penembong                                        |
| 5  | Kabupaten Sumedang   | 1          | Cibereum Wetan, Cijeruk                          |

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat, diketahui Kabupaten Cirebon, Majalengka, Subang, dan Sumedang dilayani oleh infrastruktur TPA/TPA regional yang dioperasikan secara *open dumping*, atau melayani kurang dari 80% timbulan sampah. Sementara itu, Kabupaten Indramayu dilayani oleh infrastruktur TPA/TPA regional dengan desain *sanitary landfill/controlled landfill*, dioperasikan mengikuti standar *sanitary landfill/controlled landfill*, sisa umur TPA > 5 tahun, melayani lebih 80% timbulan sampah, dan dikelola oleh SKPD.

2. Rencana Infrastruktur Persampahan

Pembangunan TPPAS Ciayumajakuning atau TPPAS Regional Cirebon Raya merupakan program pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang berada di Ciwaringin, Kab. Cirebon. Layanan TPPAS ini akan mencakup tiga wilayah (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu). TPPAS ini akan diterapkan teknologi RDF dan kompos untuk memproses limbah.

**Gambar 4.39 Pembangunan TPPAS Ciayumajakuning**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, TPPAS memiliki luas lahan sebesar 64 ha. Lahan tersebut merupakan lahan milik PERHUTANI yang eksistingnya berupa kebun. Penanggung jawab pembangunan TPPAS ini yaitu Kementerian PUPR. Kebutuhan investasi program ini sekitar Rp 269 Miliar yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah. Dokumen perencanaan yang sudah ada antara lain *Feasibility Study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED), Kajian Lingkungan, *MoU* dan PKS Pengelolaan Persampahan Regional, dan kerjasama Pemanfaatan Lahan Perhutani.

### 3. Produksi Timbulan Sampah

Berdasarkan standar JICA (1994) produksi timbulan sampah industri kecil sebesar 25 liter/unit/hari, industri menengah sebesar 35 liter/unit/hari, dan industri kecil sebesar 45 liter/unit/hari. Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, 1 unit industri besar memiliki luas 50 Ha serta terdapat 7 Ha kawasan industri kecil dan menengah untuk setiap 1.000 Ha Kawasan Industri. Produksi timbulan sampah yang dianalisis tidak dapat dibandingkan dengan data *supply* karena pada saat perencanaan infrastruktur persampahan dilakukan belum memperhitungkan adanya rencana pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan kajian infrastruktur persampahan secara kewilayahan. Berikut adalah analisis persampahan di Kawasan Metropolitan REBANA pada tahun 2030:

**Tabel 4.28 Timbunan Sampah Industri di Kawasan Metropolitan REBANA**

| No | Nama                      | Luas (Ha)        | Luas Kawasan Industri (Ha) | Luas Industri Kecil (Ha) | Luas Industri Menengah (Ha) | Luas Industri Besar (Ha) | Jumlah Unit Industri Kecil | Jumlah Unit Industri Sedang | Jumlah Unit Industri Besar | Timbunan Sampah Industri Kecil (Liter/Hari) | Timbunan Sampah Industri Sedang (Liter/Hari) | Timbunan Sampah Industri Besar (Liter/Hari) | Total Timbunan Sampah Industri (Liter/Hari) |
|----|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | KPI Patimban              | 541,61           | 227,48                     | 0,80                     | 0,80                        | 225,88                   | 16                         | 5                           | 5                          | 398,08                                      | 185,77                                       | 203,30                                      | 787,15                                      |
| 2  | KPI Cipali Subang Barat   | 10.407,62        | 4.371,20                   | 15,30                    | 15,30                       | 4.340,60                 | 306                        | 102                         | 87                         | 7.649,60                                    | 3.569,81                                     | 3.906,54                                    | 15.125,95                                   |
| 3  | KPI Cipali Subang Timur   | 4.806,25         | 2.018,62                   | 7,07                     | 7,07                        | 2.004,49                 | 141                        | 47                          | 40                         | 3.532,59                                    | 1.648,54                                     | 1.804,04                                    | 6.985,18                                    |
| 4  | KPI Jatiwangi             | 971,58           | 408,06                     | 1,43                     | 1,43                        | 405,21                   | 29                         | 10                          | 8                          | 714,11                                      | 333,25                                       | 364,68                                      | 1.412,04                                    |
| 5  | KPI Cirebon               | 1.815,29         | 762,42                     | 2,67                     | 2,67                        | 757,08                   | 53                         | 18                          | 15                         | 1.334,23                                    | 622,64                                       | 681,37                                      | 2.638,25                                    |
| 6  | KPI Patrol                | 4.140,82         | 1.739,14                   | 6,09                     | 6,09                        | 1.726,97                 | 122                        | 41                          | 35                         | 3.043,50                                    | 1.420,30                                     | 1.554,27                                    | 6.018,07                                    |
| 7  | KPI Losarang              | 6.710,08         | 2.818,23                   | 9,86                     | 9,86                        | 2.798,50                 | 197                        | 66                          | 56                         | 4.931,91                                    | 2.301,56                                     | 2.518,65                                    | 9.752,12                                    |
| 8  | KPI Tukdana               | 563,04           | 236,48                     | 0,83                     | 0,83                        | 234,82                   | 17                         | 6                           | 5                          | 413,84                                      | 193,12                                       | 211,34                                      | 818,30                                      |
| 9  | KPI Cipali Indramayu      | 2.874,77         | 1.207,40                   | 4,23                     | 4,23                        | 1.198,95                 | 85                         | 28                          | 24                         | 2.112,96                                    | 986,05                                       | 1.079,06                                    | 4.178,06                                    |
| 10 | KPI Balongan              | 2.122,06         | 891,27                     | 3,12                     | 3,12                        | 885,03                   | 62                         | 21                          | 18                         | 1.559,72                                    | 727,87                                       | 796,52                                      | 3.084,11                                    |
| 11 | KPI Krangkeng             | 3.452,39         | 1.450,00                   | 5,08                     | 5,08                        | 1.439,85                 | 102                        | 34                          | 29                         | 2.537,51                                    | 1.184,17                                     | 1.295,87                                    | 5.017,55                                    |
| 12 | KPI Kertajati - Jatitujuh | 1.415,20         | 594,38                     | 2,08                     | 2,08                        | 590,22                   | 42                         | 14                          | 12                         | 1.040,17                                    | 485,41                                       | 531,20                                      | 2.056,79                                    |
| 13 | KPI Butom                 | 4.092,25         | 1.718,75                   | 6,02                     | 6,02                        | 1.706,71                 | 120                        | 40                          | 34                         | 3.007,80                                    | 1.403,64                                     | 1.536,04                                    | 5.947,49                                    |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>43.912,95</b> | <b>18.443,44</b>           | <b>64,55</b>             | <b>64,55</b>                | <b>18.314,33</b>         | <b>1.291</b>               | <b>430</b>                  | <b>366</b>                 | <b>32.276,02</b>                            | <b>15.062,14</b>                             | <b>16.482,90</b>                            | <b>63.821,06</b>                            |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Kemudian berdasarkan SNI 03-3242-1994, standar timbulan sampah untuk kawasan komersial adalah 3 liter/pekerja/hari dan timbulan sampah domestik adalah 2,5 liter/orang/hari. Berikut adalah timbulan sampah di Kawasan Metropolitan REBANA pada tahun 2030.

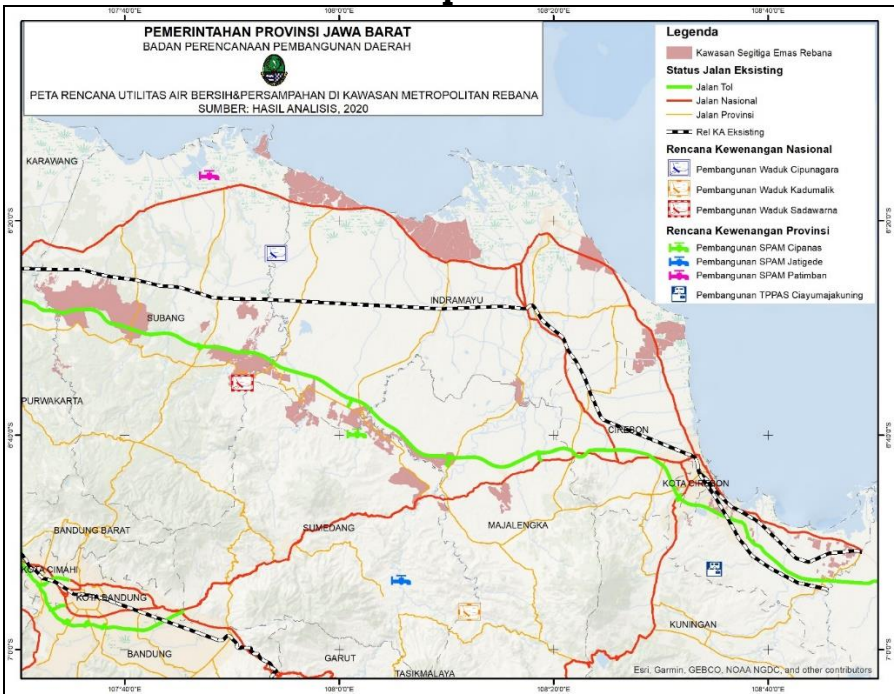
Tabel 4.29 Timbulan Sampah di Kawasan Metropolitan REBANA

| No    | Nama                      | Total Timbulan Sampah Industri (Liter/Hari) | Timbulan Sampah Komersial (liter/hari) | Timbulan Sampah Domestik (liter/hari) | Total Timbulan Sampah (liter/hari) |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | KPI Patimban              | 787,15                                      | 22.747,59                              | 75.298,73                             | 98.833,47                          |
| 2     | KPI Cipali Subang Barat   | 15.125,95                                   | 437.119,83                             | 1.446.947,60                          | 1.899.193,38                       |
| 3     | KPI Cipali Subang Timur   | 6.985,18                                    | 201.862,32                             | 668.201,67                            | 877.049,17                         |
| 4     | KPI Jatiwangi             | 1.412,04                                    | 40.806,19                              | 135.076,06                            | 177.294,30                         |
| 5     | KPI Cirebon               | 2.638,25                                    | 76.241,99                              | 252.375,12                            | 331.255,37                         |
| 6     | KPI Patrol                | 6.018,07                                    | 173.914,35                             | 575.688,72                            | 755.621,15                         |
| 7     | KPI Losarang              | 9.752,12                                    | 281.823,17                             | 932.886,88                            | 1.224.462,17                       |
| 8     | KPI Tukdana               | 818,30                                      | 23.647,83                              | 78.278,68                             | 102.744,81                         |
| 9     | KPI Cipali Indramayu      | 4.178,06                                    | 120.740,49                             | 399.673,38                            | 524.591,93                         |
| 10    | KPI Balongan              | 3.084,11                                    | 89.126,64                              | 295.025,68                            | 387.236,43                         |
| 11    | KPI Krangkeng             | 5.017,55                                    | 145.000,41                             | 479.978,20                            | 629.996,15                         |
| 12    | KPI Kertajati - Jatitujuh | 2.056,79                                    | 59.438,40                              | 196.752,11                            | 258.247,30                         |
| 13    | KPI Butom                 | 5.947,49                                    | 171.874,50                             | 568.936,42                            | 746.758,41                         |
| TOTAL |                           | 63.821,06                                   | 1.844.343,72                           | 6.105.119,26                          | 8.013.284,03                       |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berikut merupakan peta rencana utilitas air bersih dan persampahan di Kawasan Metropolitan REBANA

Gambar 4.40 Peta Rencana Utilitas Air Bersih dan Persampahan di Kawasan Metropolitan REBANA



Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.5.3.4 Infrastruktur Kelistrikan

Berikut adalah pengembangan kelistrikan di Kawasan Metropolitan REBANA.

**Tabel 4.30 Pengembangan kelistrikan di Kawasan Metropolitan REBANA**

| No | Nama GI/Transmisi                 | Tegangan (kV) | Kapasitas (MVA)     | Tahun COD | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1  | Patimban                          | 150           | 2 x 60              | 2022      | On Progres |
|    | Ext                               | 150           | 60                  | 2026      | Rencana    |
| 2  | Kadipaten Baru II /Kertajati      | 150           | 2 x 60              | 2020      | On Progres |
|    | Ext                               | 150           | 60                  | 2023      | Rencana    |
| 3  | Subang Baru                       | 150           | 2 x 60              | 2020      | On Progres |
|    | Ext                               | 150           | 60                  | 2026      | Rencana    |
| 4  | Indramayu                         | 500           | 500                 | 2021      | Rencana    |
| 5  | Inc. (PLTU Indramayu - Sukamandi) | 150           | ACSR 2xZebra 20 kMs | 2022      | On Progres |
| 6  | Kadipaten Baru                    | 150           | ACSR 2xZebra 32 kMs | 2020      | On Progres |
| 7  | Inc. (Sukamandi - Haurgeulis)     | 150           | ACSR 2xZebra 20 kMs | 2020      | On Progres |

Sumber: PLN, 2019

Berdasarkan Standar Konsumsi Listrik yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022 berikut:

- Rumah tangga mengkonsumsi listrik sebesar 170 watt/jiwa;
- Industri mengkonsumsi listrik sebesar 250 KVA/Ha;
- Perdagangan dan jasa mengkonsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha

Berikut adalah kebutuhan daya listrik di Kawasan Metropolitan REBANA.

**Tabel 4.31 Kebutuhan Listrik di Kawasan Metropolitan REBANA**

| N o | Nama                      | Kebutuhan Listrik Industri (MVA) | Kebutuhan Listrik Komersial (MVA) | Kebutuhan Listrik Domestik (MVA) | Total Kebutuhan Listrik (MVA) |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1   | KPI Patimban              | 56,87                            | 6,07                              | 5,12                             | 68,06                         |
| 2   | KPI Cipali Subang Barat   | 1.092,80                         | 116,57                            | 98,39                            | 1.307,76                      |
| 3   | KPI Cipali Subang Timur   | 504,66                           | 53,83                             | 45,44                            | 603,92                        |
| 4   | KPI Jatiwangi             | 102,02                           | 10,88                             | 9,19                             | 122,08                        |
| 5   | KPI Cirebon               | 190,60                           | 20,33                             | 17,16                            | 228,10                        |
| 6   | KPI Patrol                | 434,79                           | 46,38                             | 39,15                            | 520,31                        |
| 7   | KPI Losarang              | 704,56                           | 75,15                             | 63,44                            | 843,15                        |
| 8   | KPI Tukdana               | 59,12                            | 6,31                              | 5,32                             | 70,75                         |
| 9   | KPI Cipali Indramayu      | 301,85                           | 32,20                             | 27,18                            | 361,23                        |
| 10  | KPI Balongan              | 222,82                           | 23,77                             | 20,06                            | 266,65                        |
| 11  | KPI Krangkeng             | 362,50                           | 38,67                             | 32,64                            | 433,81                        |
| 12  | KPI Kertajati - Jatitujuh | 148,60                           | 15,85                             | 13,38                            | 177,83                        |
| 13  | KPI Butom                 | 429,69                           | 45,83                             | 38,69                            | 514,21                        |
|     | <b>TOTAL</b>              | 4.610,86                         | 491,82                            | 415,15                           | 5.517,83                      |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total kebutuhan listrik di Kawasan Metropolitan REBANA adalah 5.517,83 MVA.

4.6 Arahan Pengembangan Kelembagaan Kawasan

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagai salah satu bentuk inovasi pengembangan wilayah memerlukan sistem kelembagaan yang handal untuk dapat mewujudkan tujuan pengembangan kawasan yang diinginkan. Keberhasilan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA akan sangat ditentukan oleh hasil kerjasama dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk pengelolaan kawasan diusulkan pembentukan kelembagaan kawasan sebagai kolaborator. Kelembagaan Kawasan ini diberikan delegasi wewenang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengoordinasikan pengembangan wilayah di Kawasan Metropolitan REBANA.

Pembentukan badan pengelola Kawasan Metropolitan REBANA dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap Pertama adalah pembentukan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA yang merupakan Lembaga non-struktural. Tahap kedua dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada fase pengembangan kawasan. Tahap ketiga, ketika pengembangan kawasan masuk pada fase *mature* dibentuk konsorsium BUMD. Pada gambar berikut dapat dilihat fase pembentukan badan pengelola beserta tugas dan fungsi nya:

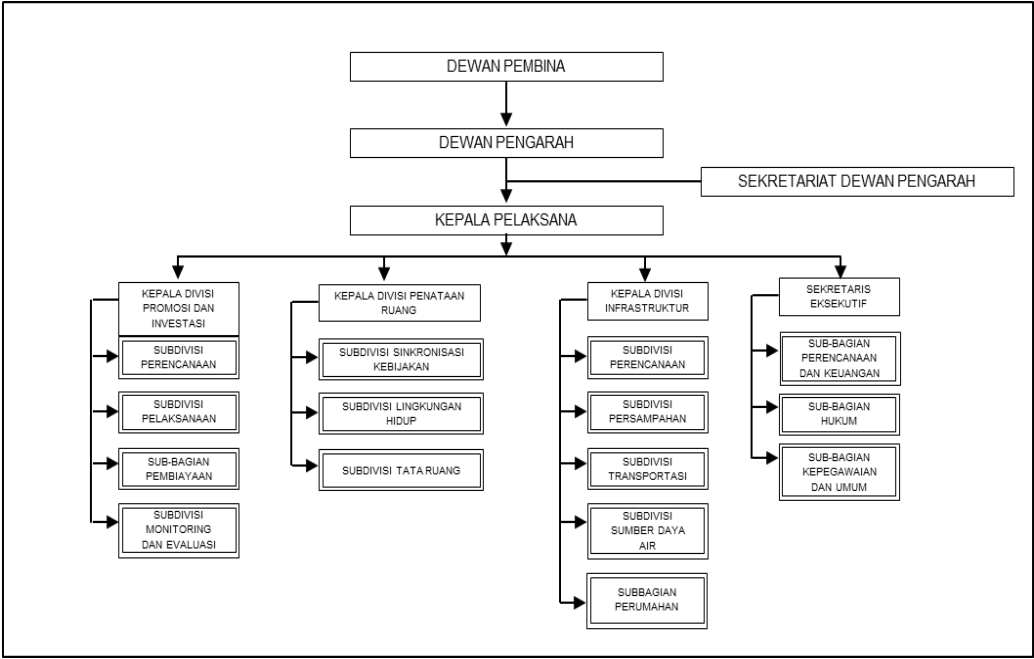
Gambar 4.41 Fase Pengembangan Kelembagaan Kawasan Metropolitan



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sebagai lembaga kolaborator, Kelembagaan Kawasan Metropolitan REBANA perlu mengkoordinasikan para pemangku kepentingan. Gambaran skema koordinasi antara Badan Pengelola dengan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.42 Struktur Organisasi Badan Pengelola Kawasan Metropolitan



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Para pemangku kepentingan tersebut mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan kawasan. Lebih lengkapnya mengenai peran para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.32 Peran Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Metropolitan REBANA

A. BADAN PENGELOLA, R&D CENTRE, DAN SEKTOR PRIVAT

| PEMANGKU KEPENTINGAN                        | PERAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA | <ul style="list-style-type: none"><li>Menjadi institusi kolaborator antar <i>stakeholder</i></li><li>Mengelola Kawasan Memfasilitasi kemudahan berusaha para pelaku usaha</li><li>Menyusun <i>Business Plan</i> Pengembangan Kawasan</li><li>Mengkoordinasikan pembangunan di REBANA untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan</li><li>Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan</li></ul>         |
| R&D Centre                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Menjadi pusat pertukaran pengetahuan dan informasi pengembangan kawasan</li><li>Menjadi wadah pertemuan antara para peneliti/akademisi dengan pelaku industri</li><li>Menjadi motor pengembangan inovasi kawasan</li><li>Menyediakan peralatan lab pengujian/ pengembangan produk yang dapat dimanfaatkan bersama untuk peningkatan kualitas dan standar produk</li></ul> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan<br>Tenant/Calon<br>Tenant              | ▪ Menjadi pelaku utama pada Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                                   |
| Pengelola KEK                                     | ▪ Menyiapkan Persyaratan pengusulan KEK<br>▪ Melakukan pengelolaan KEK<br>▪ Mengelola pembangunan dan manajemen KEK                                                                       |
| Pengembang<br>Kawasan                             | ▪ Melaksanakan bisnis pengembangan kawasan industri<br>▪ Menyediakan lahan untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA                                                                 |
| IKM/UMKM                                          | ▪ Menjadi pelaku utama pada Kawasan Metropolitan REBANA yang bersinergi dengan pengembangan kawaasn industri                                                                              |
| Perusahaan<br>Supplier                            | ▪ Menjadi penyedia input barang/jasa bagi pelaku usaha di Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                     |
| Perusahaan<br>Penunjang<br>Lainnya                | ▪ Menjadi penyedia barang/jasa penunjang kebutuhan para pelaku usaha di Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                       |
| Asosiasi<br>Pengusaha dan<br>Asosiasi<br>IKM/UMKM | ▪ Menjadi wadah kerjasama antar pengusaha dan antar pelaku IKM/UMKM<br>▪ Menjadi representasi perusahaan untuk menyuarakan kepentingan bersama dan bekerjasama dengan stakeholder lainnya |

B. PEMERINTAH PUSAT

| PEMANGKU<br>KEPENTINGAN                            | PERAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN<br>METROPOLITAN REBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</b> | ▪ Mengoordinasikan kementerian terkait untuk pengembangan ekonomi di Kawasan Metropolitan REBANA<br>▪ Memfasilitasi Pembentukan KEK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kementerian Ketenagakerjaan</b>                 | Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal di Kawasan Metropolitan REBANA |
| <b>Kementerian Perindustrian</b>                   | ▪ Merumuskan dan menetapkan aturan-aturan pengembangan kawasan industri di tingkat nasional yang dapat diacu untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA<br>▪ Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan industri di Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                         |
| <b>Kementerian Perdagangan</b>                     | Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri dan ekspor impor di Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>                                     | Melakukan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air, perumahan dan permukiman yang memiliki kepentingan nasional di dalam dan sekitar Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                                                      |
| <b>Kementerian Perhubungan</b>                                                             | Mengeluarkan rencana pengembangan infrastruktur perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (bandara, pelabuhan, dan kereta api) dan mendukung bagi pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                         |
| <b>Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyusun rencana tata ruang nasional dan memberikan ijin subtansi terhadap rencana tata ruang provinsi dan kabupaten (terutamanya di kabupaten dimana Kawasan Metropolitan REBANA berada)</li><li>▪ Menyusun perencanaan kawasan yang memiliki tingkat kepentingan nasional</li></ul> |
| <b>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</b> | Mengkoordinasi pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di dalam Kawasan Metropolitan REBANA (Kertajati) dan/atau keseluruhan Kawasan Metropolitan REBANA                                                                                                                                                          |

C. PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA

| PEMANGKU KEPENTINGAN                                                    | PERAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biro PMKS, Biro BUMD, dan Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memfasilitasi Penyusunan Rapergub dan Produk Hukum lain terkait pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>▪ Memfasilitasi Kerjasama KSDD</li><li>▪ Memfasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta</li><li>▪ Memfasilitasi Penyiapan BUMD</li></ul> |
| <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>▪ Menyelenggarakan koordinasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                  |
| <b>Badan Pendapatan Daerah</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan pengelolaan pendapatan daerah yang diperoleh melalui aktivitas di dalam Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                      |
| <b>Dinas Pendidikan</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyiapkan SMK dan sekolah vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang dikembangkan di dalam Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                     |
| <b>Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyiapkan rencana detail tata ruang untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>▪ Menyiapkan infrastruktur untuk pendukung Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                 |

| PEMANGKU KEPENTINGAN                                   | PERAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Sumber Daya Air                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan infrastruktur sumber air baku untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| Dinas Perumahan dan Permukiman                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan infrastruktur pengembangan permukiman di Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Dinas Lingkungan Hidup                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Menjaga kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan REBANA agar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan</li><li>Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri di dalam Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                   |
| Dinas Perhubungan                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan sarana dan prasarana perhubungan yang dapat meningkatkan konektivitas inter dan intra Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                     |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan sarana prasarana komunikasi dan informatika di Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>Menyelenggarakan program promosi investasi kawasan</li><li>Menjadi admnistratur KEK</li></ul>                                                         |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan tenaga kerja lokal yang dapat memenuhi kebutuhan industri di Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Merumuskan rencana pengembangan pariwisata di Kawasan Metropolitan REBANA sebagai daya tarik pendukung</li></ul>                                                                                                                                                                           |
| Dinas Kelautan dan Perikanan                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan rencana pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk industri-industri pengolahan yang akan dikembangkan di Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                       |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan sumber daya energi untuk menunjang aktivitas yang dikembangkan di Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan rencana pengembangan industri di Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>Menyiapkan kebijakan pengelolaan industri di Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>Menyelenggarakan promosi produk kawasan</li><li>Memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan pelaku di sentra IKM</li></ul> |
| Dinas KUKM                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan pelaku UMKM</li><li>Memfasilitasi Kerjasama UMKM dan Industri Menengah-Besar</li><li>Penyiapan Wirausaha Baru Mandiri dan Startup</li></ul>                                                                                                     |

| PEMANGKU<br>KEPENTINGAN | PERAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN<br>METROPOLITAN REBANA                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah<br>Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyiapkan lahan untuk pengembangan</li><li>▪ Bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melakukan koordinasi untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li><li>▪ Mendukung penyiapan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA</li></ul> |

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai rencana aksi pengembangan kawasan. Rencana aksi pengembangan kawasan memuat mengenai rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2030. Rencana program dan kegiatan tersebut mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, terdiri dari:

1. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
2. Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan;
3. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif;
4. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung.

#### **5.1 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi**

Rencana aksi pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi berupa program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program renaksi ini yaitu:

1. Mengembangkan KPI, Kota Baru, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan
2. Mengembangkan sistem rantai logistik terintegrasi antara industri besar dan IKM

Penyusunan program disertai dengan indikator *output*, lokasi tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, beserta sumber dana. Program rencana aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.1**

**Tabel 5.1 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi**

| No. | Program                                                                                                   | Lokasi          | Besaran   | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana | Biaya (Rupiah)      | Sumber Dana      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|---------------------|------------------|
|     |                                                                                                           |                 |           | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                    |                     |                  |
|     | INDIKATOR UTAMA : Peningkatan LPE kawasan hingga 6,83% pada tahun 2030                                    |                 |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                     |                  |
|     | KEBIJAKAN UTAMA : Integrasi pengembangan wilayah antar KI/KPI dengan SIKM dan Kawasan perkotaan-perdesaan |                 |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                     |                  |
|     | Strategi 1.A. Mengembangkan KI/KPI, Kota Baru, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan             |                 |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                     |                  |
| 1   | Pengembangan Lahan KPI Cipali Subang Barat                                                                | Kab. Subang     | 10.408 Ha |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 376,769,600,000,000 | Swasta/BUMN/BUMD |
| 2   | Pengembangan Lahan KPI Cipali Subang Timur                                                                | Kab. Subang     | 4.806 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 173,977,200,000,000 | Swasta/BUMN/BUMD |
| 3   | Pengembangan Lahan KPI Balongan                                                                           | Kab.. Indramayu | 2.122 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 88,699,600,000,000  | Swasta/BUMN/BUMD |
| 4   | Pengembangan Lahan KPI Cirebon                                                                            | Kab. Cirebon    | 1.816 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 58,656,800,000,000  | Swasta/BUMN/BUMD |
| 5   | Pengembangan Lahan KPI Jatiwangi                                                                          | Kab. Majalengka | 972 Ha    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 26,244,000,000,000  | Swasta/BUMN/BUMD |
| 6   | Pengembangan Lahan KPI Cipali Indramayu                                                                   | Kab.. Indramayu | 2.874 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 120,133,200,000,000 | Swasta/BUMN/BUMD |
| 7   | Pengembangan Lahan KPI Patrol                                                                             | Kab.. Indramayu | 4.141 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 173,093,800,000,000 | Swasta/BUMN/BUMD |
| 8   | Pengembangan Lahan KPI Losarang                                                                           | Kab.. Indramayu | 6.710 Ha  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 280,478,000,000,000 | Swasta/BUMN/BUMD |
| 9   | Pengembangan Lahan KPI Tukdana                                                                            | Kab.. Indramayu | 563 Ha    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/BUMD   | 23,533,400,000,000  | Swasta/BUMN/BUMD |

| No. | Program                                                                   | Lokasi          | Besaran                | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana              | Biaya (Rupiah)      | Sumber Dana          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
|     |                                                                           |                 |                        | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                 |                     |                      |
| 10  | Pengembangan Lahan KPI Krangkeng                                          | Kab.. Indramayu | 3.452 Ha               |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/ BUMD               | 144,293,600,000,000 | Swasta/BUMN/ BUMD    |
| 11  | Pengembangan Lahan KPI Kertajati                                          | Kab. Majalengka | 1.415 Ha               |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/ BUMD               | 63,675,000,000,000  | Swasta/BUMN/ BUMD    |
| 12  | Pengembangan Lahan KPI Butom                                              | Kab. Sumedang   | 4.092 Ha               |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/ BUMD               | 110,484,000,000,000 | Swasta/BUMN/ BUMD    |
| 13  | Pengembangan Lahan KPI Patimban                                           | Kab. Subang     | 542 Ha                 |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMN/ BUMD               | 19,620,400,000,000  | Swasta/BUMN/ BUMD    |
| 14  | Pelatihan Intensif dan Pendampingan Pelaku Usaha / IKM Industri ILMATE    | Jawa Barat      | 25 IKM dan 13 Industri |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.                  | 778,295,544         | APBD Prov.*          |
| 15  | Fasilitasi Desain dan Kemasan produk IKM                                  | Jawa Barat      | 150 Pelaku usaha       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.                  | 355,183,070         | APBD Prov.*          |
| 16  | Fasilitasi manajemen, standarisasi, sertifikasi dan akses permodalan UMKM | Jawa Barat      | 900 UMKM               |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DKUKM Prov.                     | 18,571,436,480      | APBD Prov            |
| 17  | Pelatihan pengembangan akses pemasaran IKM berbasis e-commerce            | 7 Kab/Kota      | 35 Kegiatan            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenperin / Disindag /Asosiasi | 8,750,000,000       | APBD Kota/Kabupate n |
| 18  | Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi IKM                               | 7 Kab/Kota      | 210 Paket              |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag / DPMD                 | 10,500,000,000      | PBD Kota/Kabupate n  |



| No. | Program                                                                                                                         | Lokasi                          | Besaran                                                         | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana    | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                                                 |                                 |                                                                 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                       |                |             |
| 1   | Kajian Master Plan dan Business Plan Pengembangan Sistem Kawasan Industri Terpadu REBANA                                        | Kaw. Metropolitan REBANA        | 2 dokumen, 1 Keg. Pengembangan Kapasitas, dan MoU               |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.        | 4,500,000,000  | APBD Prov.  |
| 2   | Pengembangan Sistem Logistik Digital Terintegrasi Industri Besar-IKM untuk Kawasan Metropolitan REBANA                          | Kaw. Metropolitan REBANA        | 1 unit Platform Digital, 2 Keg. Pengembangan Kapasitas, dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.        | 2,400,000,000  | APBD Prov.  |
| 3   | Pengembangan Pusat Distribusi Provinsi (PDP)                                                                                    | Kec. Jatitujuh, Kab. Majalengka | 1 unit                                                          |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.        | 25,000,000,000 | APBD Prov   |
| 4   | Kerjasama Industri Besar dengan IKM dan Pembinaan IKM Penghasil Alat Kesehatan                                                  | Jawa Barat                      | 25 IKM                                                          |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.        | 218,500,000    | APBD Prov.* |
| 5   | Link and Match, Pendampingan Pelaku, dan Workshop Digitalisasi Bisnis Usaha/IKM Industri AKTA                                   | Jawa Barat                      | 100 IKM                                                         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov.        | 492,526,554    | APBD Prov.* |
| 6   | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Perikanan (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha, Lab | KPI Cirebon                     | 1 Kegiatan dan MoU                                              |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/ Swasta | 1,500,000,000  | APBD Prov   |

| No. | Program                                                                                                                                 | Lokasi                            | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana    | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                                                         |                                   |                    | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                       |                |             |
|     | Kerjasama)                                                                                                                              |                                   |                    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                |             |
| 7   | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Pangan (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha)                | KPI Subang-Barat                  | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/ Swasta | 1,500,000,000  | APBD Prov   |
| 8   | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Perkapalan (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha)            | KPI Patrol                        | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/ Swasta | 1,500,000,000  | APBD Prov   |
| 9   | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Kimia-Garam (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha)           | KPI Losarang                      | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/ Swasta | 1,500,000,000  | APBD Prov   |
| 10  | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Tekstil dan Furniture (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha) | KPI Kertajati-Jatiwangi-Ujungjaya | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/ Swasta | 1,500,000,000  | APBD Prov   |

| No. | Program                                                                                                                                               | Lokasi               | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana   | Biaya (Rupiah)        | Sumber Dana |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-----------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                       |                      |                    | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                      |                       |             |
| 11  | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Otomotif (MoU, E-commerce, Fasilitasi Ruang Usaha, Lab Kerjasama) | KPI Cipali-Indramayu | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/Swasta | 1,500,000,000         | APBD Prov   |
| 12  | Pengembangan Kemitraan Kolaboratif Industri Besar-IKM pada Klaster terpadu berbasis Logam Mesin dan Elektronika (MoU, Fasilitasi Ruang Usaha)         | KPI Subang Timur     | 1 Kegiatan dan MoU |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov/Swasta | 1,500,000,000         | APBD Prov   |
|     | KEBUTUHAN INVESTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN 1 - INTEGRASI                                                                                              |                      |                    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                      | 1,659,876,465,941,650 |             |

Ket: \* Telah tercantum dalam SIPD RKPD Provinsi Tahun 2021  
\*\* Termasuk kedalam program Simpul KPBU Jawa Barat  
\*\*\* Usulan Program dari Kabupaten/Kota  
\*\*\* Usulan Program dari Kabupaten/ Kota

## **5.2 Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan;**

Rencana aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan berupa program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program renaksi ini yaitu:

1. Promosi dan Pengembangan Kerjasama Kawasan
2. Mengembangkan aglomerasi industri yang terkoneksi satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing berupa 13 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
3. Mengembangkan infrastruktur pendukung konektivitas kawasan

Penyusunan program disertai dengan indikator *output*, lokasi tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, beserta sumber dana. Program rencana aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.2**

## **5.3 Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif**

Rencana aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif berupa program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program renaksi ini yaitu:

1. Mengembangkan kurikulum dan sistem vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*)
2. Mengembangkan kewirausahaan, *start-up*, dan SDM inovatif

Penyusunan program disertai dengan indikator *output*, lokasi tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, beserta sumber dana. Program rencana aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.3**

## **5.4 Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung**

Rencana aksi Pengembangan Sistem Pendukung berupa program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program renaksi ini yaitu:

1. Pengembangan tata ruang, industri ramah lingkungan dan konservasi lahan pangan berkelanjutan
2. Pengembangan fasilitas kesehatan dan utilitas pendukung
3. Pengembangan kelembagaan, riset dan teknologi

Penyusunan program disertai dengan indikator *output*, lokasi tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, beserta sumber dana. Program rencana aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Pendukung untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.4**



| No. | Program                                                                     | Lokasi                                                                                                                                                                                                                       | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana        | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |             | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |                |             |
| 1   | Penyiapan badan usaha pengusul, pembangun dan pengelola KEK                 | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 paket    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Biro BUMD, Setda Prov.    | 325,000,000    | APBD Prov.  |
| 2   | Penyepakatan usulan lokasi KEK dengan Pemerintah Kab                        | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 formulir |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola KEK | 650,000,000    | APBD Prov   |
| 3   | Penyiapan dokumen dan peta detail deskripsi rencana pengembangan KEK REBANA | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 dokumen  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola KEK | 650,000,000    | APBD Prov   |

| No. | Program                                                             | Lokasi                                                                                                                                                                                                                      | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana        | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |                |             |
| 4   | Penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial KEK REBANA         | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang,KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 peta    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola KEK | 6,500,000,000  | APBD Prov   |
| 5   | Penyusunan dokumen amdal pengembangan KEK REBANA                    | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang,KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 dokumen |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola KEK | 7,800,000,000  | APBD Prov   |
| 6   | Penyiapan dokumen rencana bisnis dan rencana strategis pengembangan | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang,KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 dokumen |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola KEK | 6,500,000,000  | APBD Prov   |

| No. | Program                                                                                                                                       | Lokasi                                                                                                                                                                                                                       | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana                   | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                      |                |                    |
| 7   | Penyiapan dokumen izin lokasi/ penetapan lokasi bukti hak atas tanah                                                                          | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 dokumen |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Bappeda / DBMPPR/ DPMPTSP Jawa Barat | 3,900,000,000  | APBD Prov.         |
| 8   | Peningkatan Kapasitas DPMPTSP Kabupaten sebagai Administratur KEK                                                                             | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 Paket   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DPMPTSP Prov. Jabar                  | 7,800,000,000  | APBD Prov.         |
| 9   | Penyiapan regulasi dari Pemerintah Provinsi mengenai rencana pemberian insentif dan retribusi daerah serta kemudahan terkait pengembangan KEK | Provinsi Jawa Barat                                                                                                                                                                                                          | 1 dokumen  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DPMPTSP Prov.                        | 345,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |

| No.      | Program                                                                                                                                        | Lokasi                                                                                                                                                                                                                       | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana       | Biaya (Rupiah)     | Sumber Dana |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                          |                    |             |
| 10       | Penyiapan regulasi dari Pemerintah Kabupaten mengenai rencana pemberian insentif dan retribusi daerah serta kemudahan terkait pengembangan KEK | KEK Patimban, KEK Cipali Subang Barat, KEK Cipali Subang Timur, KEK Cirebon, KEK Patrol, KEK Losarang, KEK Tukdana, KEK Cipali Indramayu, KEK Balongan, KEK Krangkeng, KEK Jatiwangi, KEK Kertajati-Jatitujuh, dan KEK Butom | 13 Dokumen |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DPMPTSP Kab.             | 5,850,000,000      | APBD Kab.   |
| <b>C</b> | <b>Strategi 2.C</b> Mengembangkan infrastruktur pendukung konektivitas kawasan                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                          |                    |             |
| 1        | Pembangunan Pelabuhan Patimban                                                                                                                 | Kab. Subang                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenhub / Swasta / BUMN | 34,940,000,000,000 | APBN        |
| 2        | Pengembangan bandara internasional Kertajati                                                                                                   | Kab. Majalengka                                                                                                                                                                                                              |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | BUMN / BUMD              | 14,990,628,866,557 | BUMN / BUMD |
| 3        | Pengembangan Pelabuhan Cirebon                                                                                                                 | Kota Cirebon                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | BUMN / BUMD              | 25,000,000,000,000 | BUMN / BUMD |
| 4        | Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan                                                                                             | Kab. Sumedang, Kab. Majalengka                                                                                                                                                                                               | 51,84 Km   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta / BUMN / BUMD     | 9,331,200,000,000  | KPBU        |
| 5        | Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban                                                                                                     | Kab. Subang                                                                                                                                                                                                                  | 8 Km       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | KemenPUPR                | 1,120,000,000,000  | APBN        |
| 6        | Peningkatan kelas Jalan Sarengseng – Pabuaran                                                                                                  | Kab. Subang                                                                                                                                                                                                                  | 3,36 Km    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DPUPR Kab. Subang        | 11,760,000,000     | APBN        |

| No. | Program                                                       | Lokasi                                                           | Besaran                   | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana   |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|---------------|
|     |                                                               |                                                                  |                           | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                    |                |               |
| 7   | Peningkatan kelas Jalan Cipeundeuy – Pabuaran                 | Kab. Subang                                                      | 7,99 Km                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DPUPR Kab. Subang  | 27,965,000,000 | APBN          |
| 8   | Pelebaran Jalan Provinsi (Kertajati – Kadipaten - Jatibarang) | Kab. Indramayu, Kab. Majalengka                                  | 17,61 Km                  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 56,352,000,000 | APBD Prov     |
| 9   | Pelebaran Jalan Provinsi (Sumber – Cigasong)                  | Kab. Cirebon, Kab. Majalengka                                    | 19,53 Km                  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 62,496,000,000 | APBD Prov     |
| 10  | Peningkatan Jalan Conggeang Ujungjaya                         | Kec. Conggeang, Kec. Ujungjaya                                   |                           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 61,750,800,000 | APBN          |
| 11  | Peningkatan Jalan Buahdua-Ciawitali                           | Kec. Buahdua                                                     |                           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 53,254,200,000 | APBD Prov.*** |
| 12  | Peningkatan Jalan Ujungjaya - Palasah                         | Kec. Ujungjaya                                                   | 2,83 Km                   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 4,921,470,500  | APBN          |
| 13  | Pembangunan Jembatan Patimban - Ujung Gebang                  | Kec. Pusakanagara, Kab. Subang, Kec. Ujunggebang, Kab. Indramayu | Panjang 60 m<br>Lebar 9 m |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 70,000,000,000 | APBD Prov     |
| 14  | Rehabilitasi Jembatan Cilutung Kadu Sumedang - Majalengka     | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                                     | 1 unit                    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 15,000,000,000 | APBD Prov.*** |
| 15  | Peningkatan Ruas Jalan Cimanintin batas Kabupaten Majalengka  | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                                     | 1,8 Km                    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 2,819,231,400  | APBD Prov.*** |

| No. | Program                                             | Lokasi                                                     | Besaran   | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                     |                                                            |           | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                    |                |                    |
| 16  | Peningkatan Ruas Jalan Cisumur-Nangerang/Kab Subang | Kab.Sumedang,Kab. Subang                                   | 14,915 Km |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 17,231,180,800 | APBN               |
| 17  | Peningkatan Jalan Burujul - Sanca                   | Kab.Sumedang,Kab. Indramayu                                | 4,36 Km   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 8,815,738,400  | APBN               |
| 18  | Peningkatan Jalan Lebaksiuh - Kadu                  | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                               | 3.36 Km   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 5,011,216,600  | APBN               |
| 19  | Pembangunan Ruas Jalan Cijurey-Darmawangi           | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                               | 700 m     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 6,000,000,000  | APBN               |
| 20  | Pembangunan Jembatan Cijurey-Darmawangi             | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                               | 70 m      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 12,000,000,000 | APBD Prov          |
| 21  | Peningkatan Jalan Syahbandar                        | Kab.Sumedang,Kab. Majalengka                               | 1 Km      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov.        | 5,600,000,000  | APBN               |
| 23  | Flyover Cikuya Pagaden                              | Kec. Pagaden, Kab. Subang                                  |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | KemenPUPR          | 50,000,000,000 | PBD Kota/Kabupaten |
| 24  | Pelebaran Akses Jalan Pusakanagara - Patimban       | Desa Pusakanagara dan Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | KemenPUPR          | 62,400,000,000 | APBN               |

| No. | Program                                               | Lokasi                                | Besaran  | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana    | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana           |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|     |                                                       |                                       |          | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                       |                |                       |
| 25  | Pembangunan Jalan Lingkar Pamanukan                   | Desa Pamanukan<br>Kecamatan Pamanukan |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR             | 35,000,000,000 | PBD<br>Kota/Kabupaten |
| 26  | Pelebaran jalan kabupaten (pusakanagara – patimban)   | Kab. Subang                           | 6,6 Km   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Subang     | 62,400,000,000 | APBN                  |
| 27  | Peningkatan kelas Jalan Pusakanagara – Tanjung        | Kab. Subang                           | 19,68 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Subang     | 68,880,000,000 | APBN                  |
| 28  | Peningkatan kelas Jalan Kamarung – Tanjung            | Kab. Subang                           | 8,78 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Subang     | 30,730,000,000 | APBN                  |
| 29  | Optimalisasi Jalan Subang-Pamanukan                   | Kab. Subang                           | 29,71 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Subang     | 26,739,000,000 | PBD<br>Kota/Kabupaten |
| 30  | Pembangunan Jalan Provinsi Haurgeulis – Gantar        | Kab.. Indramayu                       | 12,04 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                 | 38,528,000,000 | APBD Prov             |
| 31  | Pembangunan Jalan Provinsi Patrol – Haurgeulis        | Kab.. Indramayu                       | 20,04 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                 | 64,128,000,000 | APBD Prov             |
| 32  | Pembangunan Jalan Jatitujuh - Ligung                  | Kab. Majalengka                       | 10,87 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Majalengka | 21,740,000,000 | APBN                  |
| 33  | Pembangunan Jalan Lingkar Sumber ke Sunan Gunung Jati | Kab. Cirebon                          | 18,63 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Cirebon    | 59,616,000,000 | PBD<br>Kota/Kabupaten |

| No. | Program                                                                        | Lokasi                          | Besaran  | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana    | Biaya (Rupiah)    | Sumber Dana        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                                |                                 |          | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                       |                   |                    |
| 34  | Pembangunan Fly Over Kadipaten                                                 | Kab. Majalengka                 | 225 m    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | BPJN                  | 40,500,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |
| 35  | Pembangunan Interchange Akses Tol Cipali (Subang KM109 – Patimban)             | Kab. Subang                     | 34,98 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Swasta / BUMN / BUMD  | 4,845,600,000,000 | APBN               |
| 36  | Pembangunan Jalan Tol Cipali (Terisi – Losarang)                               | Kab.. Indramayu                 | 26,92 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Swasta / BUMN / BUMD  | 4,012,200,000,000 | KPBU               |
| 37  | Peningkatan Jalan Provinsi (Kertajati – Jatitujuh – Losarang)                  | Kab. Indramayu, Kab. Majalengka | 22,75 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                 | 6,296,400,000,000 | APBD Provinsi      |
| 38  | Pembangunan Jalan Tol Cipali (Palasah – Jatibarang)                            | Kab. Indramayu, Kab. Majalengka | 22,29 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Swasta / BUMN / BUMD  | 204,750,000,000   |                    |
| 39  | Pelebaran Jalan Cigasong – Maja                                                | Kab. Majalengka                 | 15,85 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPUPR Kab. Majalengka | 150,575,000,000   | APBN               |
| 40  | Peningkatan kelas jalan menjadi jalan provinsi (Kanci – Pabuaran)              | Kab. Cirebon                    | 21,55 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                 | 19,395,000,000    | APBD Prov          |
| 41  | Peningkatan kelas jalan menjadi jalan provinsi Gebang Ilir-Waled) Kab. Cirebon | Kab. Cirebon                    | 20,59 Km |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                 | 18,531,000,000    | APBD Prov          |

| No. | Program                                                                               | Lokasi                                                  | Besaran   | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana         | Biaya (Rupiah)     | Sumber Dana |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------|-------------|
|     |                                                                                       |                                                         |           | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                            |                    |             |
| 42  | Peningkatan kelas jalan menjadi jalan provinsi (Pelayangan – Bojonegara) Kab. Cirebon | Kab. Cirebon                                            | 15,87 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR                      | 14,283,000,000     | APBD Prov   |
| 43  | Revisi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat                               | Jawa Barat                                              | 1 Dokumen |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dishub Prov. Jabar         | 500,000,000        | APBD Prov.* |
| 44  | Reaktivasi Rel KA (Rancaekek Kab. Bandung – Tanjungsari Kab. Sumedang)                | Kab. Sumedang                                           | 52,43 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 1,040,000,000,000  | KPBU        |
| 45  | Pembangunan Rel KA Tanjungsari - Akses Bandara Kertajati                              | Kab. Sumedang, Kab. Majalengka                          | 19,75 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 2,700,000,000,000  | APBN        |
| 46  | Reaktivasi Rel KA (Kota Cirebon – Kadipaten Kab. Majalengka)                          | Kab. Cirebon, Kab. Majalengka                           | 39,82 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 3,623,620,000,000  | APBN        |
| 47  | Pembangunan Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya                                    | Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Subang | 727 Km    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Swasta/BUMN                | 60,000,000,000,000 | Swasta/BUMN |
| 48  | Pembangunan Rel KA Subang - Akses Pelabuhan Patimban                                  | Kab. Subang                                             | 19,72 Km  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 1,100,000,000,000  | APBN        |

| No.                                                                 | Program                                                    | Lokasi                          | Besaran  | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana         | Biaya (Rupiah)      | Sumber Dana |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                     |                                                            |                                 |          | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                            |                     |             |
| 49                                                                  | Pembangunan Rel KA (Jatibarang – Kertajati) Kab. Indramayu | Kab. Indramayu, Kab. Majalengka | 13,89 Km |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 1,416,780,000,000   | APBN        |
| 50                                                                  | Pembangunan Rel KA Subang-Kertajati                        | Kab. Subang                     | 20 Km    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenhub / Pemkab / PT.KAI | 2,040,000,000,000   | APBN        |
| 51                                                                  | Pembangunan LRT Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati        | 4 Kabupaten                     | 1 Paket  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta / BUMN / BUMD       | 45,000,000,000,000  | KPBU        |
| 52                                                                  | Pembangunan SAUM Metropolitan Cirebon Raya                 | Cirebon Raya                    | 1 Paket  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta / BUMN / BUMD       | 120,000,000,000,000 | KPBU        |
| KEBUTUHAN INVESTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN 2 - DAYA SAING INVESTASI |                                                            |                                 |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | 570,892,410,704,257 |             |

Ket: \* Telah tercantum dalam SIPD RKPD Provinsi Tahun 2021  
\*\* Termasuk kedalam program Simpul KPBU Jawa Barat  
\*\*\* Usulan Program dari Kabupaten/Kota

**Tabel 5.3 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM inovatif**

| No. | Program                                                                                                       | Lokasi                      | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana                         | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                               |                             |             | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                            |                |             |
|     | INDIKATOR UTAMA : Penambahan jumlah kesempatan kerja di kawasan hingga 4,39 juta tenaga kerja                 |                             |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                |             |
|     | KEBIJAKAN UTAMA : Pengembangan sistem vokasi yang terhubung dengan industri, kewirausahaan, dan SDM inovatif  |                             |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                |             |
| A   | Strategi 3.A Mengembangkan kurikulum dan sistem vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri (link and match) |                             |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                |             |
| 1   | Pengembangan kurikulum sekolah vokasi SMK dan Politeknik                                                      | Kawasan Metropolitan REBANA | 7 Kegiatan  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disdik Provinsi dan Swasta                 | 2,100,000,000  | APBD Prov   |
| 2   | Pembentukan Kemitraan Industri dengan SMK dan Politeknik                                                      | Kawasan Metropolitan REBANA | 7 Kegiatan  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disdik Provinsi dan Swasta                 | 1,750,000,000  | APBD Prov   |
| 3   | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Siswa/Siswi SMK Yang Akan Memasuki Dunia Kerja                               | Jawa Barat                  | 1400 Orang  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disnaker Prov.                             | 207,000,000    | APBD Prov.* |
| 4   | Pengembangan sistem antar kerja industri dengan BBPLK, BLK Provinsi dan BLK Kabupaten/Kota                    | Kawasan Metropolitan REBANA | 10 Kegiatan |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenaker / Disnaker Prov, Kab dan Swasta. | 1,000,000,000  | APBD Prov   |

| No. | Program                                                                                                                               | Lokasi                        | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana                           | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                       |                               |            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                              |                |                    |
| 5   | Upgrading Peralatan dan SDM BLK Provinsi Jawa Barat                                                                                   | Jawa Barat                    | 1 Paket    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disnaker Prov.                               | 3,500,000,000  | APBD Prov          |
| 6   | Upgrading Peralatan dan SDM BLK Kabupaten                                                                                             | 6 Kabupaten dan 1 Kota        | 7 Paket    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disnaker Kab.                                | 7,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 7   | Pembangunan SMK dan Sekolah Tinggi Maritim dan Logistik                                                                               | Kec Pusakanagara, Kab. Subang | 1 unit     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disdik Provinsi                              | 5,000,000,000  | APBN               |
| B   | Strategi 3.B. Mengembangkan kewirausahaan, start-up, dan SDM inovatif                                                                 |                               |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                              |                |                    |
| 1   | Pembentukan Roadmap Produk Industri Kreatif berbasis inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global. | Jawa Barat                    | 1 Kegiatan |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov                                | 2,000,000,000  | APBD               |
| 2   | Pengembangan Talent Pool dan pusat pelatihan kerja berbasis kompetensi industri teknologi tinggi                                      | Seluruh KPI                   | 6 Kab/Kota |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenperin/ Disnakertrans/ Disindag Prov&Kab | 2,750,000,000  | APBD Prov          |

| No. | Program                                                                    | Lokasi                                                   | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana                  | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                                            |                                                          |            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                     |                |                    |
| 3   | Pembangunan Pusat creative-hubs REBANA berbasis pengembangan ekonomi lokal | Kota Baru Aerocity & Kota Baru Patimban                  | 2 Kegiatan |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diskominfo/ Disindag Prov           | 20,000,000,000 | APBD Prov          |
| 4   | Pembangunan Creative Center Kota Cirebon                                   | Kota Cirebon                                             | 1 lokasi   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disperkim Jawa Barat                | 32,000,000,000 | APBD Prov          |
| 5   | Pembangunan Creative Center Kab. Indramayu                                 | Kec. Indramayu, Kab. Indramayu                           | 1 lokasi   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disperkim Jawa Barat                | 20,000,000,000 | APBD Prov          |
| 6   | Pembangunan Creative Center Kab. Cirebon                                   | Kec. Weru, Kab. Cirebon                                  | 1 lokasi   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disperkim Jawa Barat                | 32,000,000,000 | APBD Prov          |
| 7   | Pembangunan Creative Center Kab. Sumedang                                  | Kelurahan Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang | 1 lokasi   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disperkim Jawa Barat                | 25,000,000,000 | APBD Prov          |
| 8   | Pencetakan wirausaha dan start-up baru                                     | Kawasan Metropolitan REBANA                              | 6 Kab/Kota |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Swasta/BUMD Pengelola Kawasan       | 42000000000    | APBD Prov          |
| 9   | Pengembangan Material Center IKM                                           | 3 lokasi                                                 | 3 lokasi   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenperin / BUMD Pengelola Kawasan | 7,500,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |

| No. | Program                                            | Lokasi   | Besaran  | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana                  | Biaya (Rupiah)  | Sumber Dana |
|-----|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |                                                    |          |          | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                     |                 |             |
| 10  | Pengembangan Testing Lab                           | 3 lokasi | 3 lokasi |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Kemenperin / BUMD Pengelola Kawasan | 7,500,000,000   | APBN        |
|     | KEBUTUHAN INVESTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN 3 - SDM |          |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                     | 211,307,000,000 |             |

Ket: \* Telah tercantum dalam SIPD RKPD Provinsi Tahun 2021  
\*\* Termasuk kedalam program Simpul KPBU Jawa Barat  
\*\*\* Usulan Program dari Kabupaten/Kota

Tabel 5.4 Program dan Indikator Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung

| No. | Program                                                                                                      | Lokasi                                 | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana              | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                                                                              |                                        |             | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                 |                |                    |
|     | KEBIJAKAN PENDUKUNG : Pengembangan Sistem Pendukung (Infrastruktur, Kelembagaan, R&D, Konservasi Lingkungan) |                                        |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |                |                    |
| A   | Strategi 4.A Pengembangan tata ruang, industri ramah lingkungan dan konservasi lahan pangan berkelanjutan    |                                        |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |                |                    |
| 1   | Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Subang                                                                      | Kab. Subang                            | 2 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Bappeda / DPUPR Kab.            | 1,200,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 2   | Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Indramayu                                                                   | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Bappeda / DPUPR Kab.            | 1,200,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 3   | Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka                                                                  | Kab.. Majalengka                       | 2 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Bappeda / DPUPR Kab.            | 1,200,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 4   | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota                                     | 13 KLHS RDTR KPI, dan 3 RTRW Kabupaten | 16 Rekomgub |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DBMPR Prov                      | 2,400,000,000  | APBD Prov.*        |
| 5   | Fasilitasi Legislasi RDTR Kertajati-Jatitujuh                                                                | Kab. Majalengka                        | 1 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ATR/BPN/ DBMPR Prov/DPUPR Kab.  | 300,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |
| 6   | Fasilitasi Legislasi RDTR Patmban                                                                            | Kab. Subang                            | 1 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ATR/BPN/ DBMPR Prov/DPUPR Kab.  | 300,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |
| 7   | Fasilitasi Legislasi RDTR berbasis OSS KPI Butom                                                             | Kab. Sumedang                          | 1 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ATR/BPN/ DBMPR Prov/DPUPR Kab.  | 300,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |
| 8   | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Cipali Subang Barat                                                | Kab. Subang                            | 2 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ATR/BPN/ DBMPR Prov/ DPUPR Kab. | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |

| No. | Program                                                       | Lokasi                                 | Besaran    | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana              | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana        |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                               |                                        |            | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                 |                |                    |
| 9   | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Cipali Subang Timur | Kab. Subang                            | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ATR/BPN/ DBMPR Prov/ DPUPR Kab. | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 10  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Balongan            | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ATR/BPN/ DBMPR Prov/ DPUPR Kab. | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 11  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Cipali Indramayu    | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ATR/BPN/ DBMPR Prov/ DPUPR Kab. | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 12  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Cirebon             | Kab. Cirebon                           | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ATR/BPN/ DBMPR Prov/ DPUPR Kab. | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 13  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Patrol              | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR Prov/ DPUPR Kab.          | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 14  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Losarang            | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR Prov/ DPUPR Kab.          | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 15  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Krangkeng           | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR Prov/ DPUPR Kab.          | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 16  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Tukdana             | Kab.. Indramayu                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR Prov/ DPUPR Kab.          | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 17  | Penyusunan RDTR dan KLHS berbasis OSS KPI Jatiwangi           | Kab. Majalengka                        | 2 Paket    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DBMPR Prov/ DPUPR Kab.          | 2,000,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 18  | Fasilitasi Pembuatan, Pelaksanaan, dan Validasi KLHS          | 13 KLHS RDTR KPI, dan 3 RTRW Kabupaten | 16 Dokumen |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar                 | 500,000,000    | APBD Prov.*        |

| No. | Program                                                                                                               | Lokasi                      | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                                       |                             |             | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                    |                |             |
|     | Rencana Tata Ruang                                                                                                    |                             |             |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                |             |
| 19  | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup melalui PROPERDA Industri                                                      | Kawasan Metropolitan REBANA | 70 Industri |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar    | 550,000,000    | APBD Prov.* |
| 20  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                             | Kawasan Metropolitan REBANA | 7 dokumen   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar    | 557,820,000    | APBD Prov.* |
| 21  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar                                                                | Kawasan Metropolitan REBANA | 5 dokumen   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar    | 1,392,775,000  | APBD Prov.* |
| 22  | Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Kawasan Metropolitan REBANA | 3 Dokumen   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar    | 255,980,000    | APBD Prov.* |
| 23  | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                       | Kawasan Metropolitan REBANA | 15 Dokumen  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar    | 175,000,000    | APBD Prov.* |

| No. | Program                                                                                                                   | Lokasi                      | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana     | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                                           |                             |                    | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                        |                |             |
| 24  | Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Kawasan Metropolitan REBANA | 50 Industri        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar        | 400,000,000    | APBD Prov.* |
| 25  | Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH                                        | Kawasan Metropolitan REBANA | 2 Dokumen          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar        | 300,000,000    | APBD Prov.* |
| 26  | Penyusunan regulasi insentif disinsentif industri ramah lingkungan                                                        | Provinsi Jawa Barat         | 2 Kegiatan dan MoU |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar        | 250,000,000    | APBD Prov.  |
| 27  | Pengembangan pola dan sistem informasi pengendalian limbah B3 berbasis daring dalam <i>circular economic</i>              | Provinsi Jawa Barat         | 1 kajian           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar        | 300,000,000    | APBD Prov.  |
| 28  | Diseminasi penerapan produksi bersih di industri agro, kimia, tekstil dan aneka                                           | Provinsi Jawa Barat         | 150 industri       |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperindag Jawa Barat | 540,000,000    | APBD Prov.  |
| 29  | Diseminasi produk bersih di industri logam, mesin, alat transportasi dan                                                  | Provinsi Jawa Barat         | 100 industri       |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperindag Jawa Barat | 386,241,789    | APBD Prov.  |



| No. | Program                                                                            | Lokasi                                                       | Besaran        | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana                    | Biaya (Rupiah)  | Sumber Dana |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |                                                                                    |                                                              |                | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                       |                 |             |
| 1   | Pembangunan Rumah Sakit Paru Sidawangi                                             | Kab. Cirebon                                                 | 1 paket        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dinkes Prov. Jabar/ BUMD/ Swasta      | 400,000,000,000 | KPBU**      |
| 2   | Pembangunan Rumah Sakit Kesehatan Kerja                                            | Kab. Majalengka                                              | 1 paket        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dinkes Prov. Jabar/ BUMD/ Swasta      | 350,000,000,000 | KPBU        |
| 3   | Pembangunan RSUD Pantura                                                           | Kecamatan Pusakanagara, Kab. Subang                          | 1 paket        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dinkes Prov. Jabar/ BUMD/ Swasta      | 500,000,000,000 | APBD Prov   |
| 4   | Pengembangan RSUD Linggarjati                                                      | Kec. Cilimus, Kab. Kuningan                                  | 1 paket        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dinkes Prov. Jabar                    | 75,000,000,000  | APBD Prov.  |
| 5   | Pembangunan gardu induk                                                            | Patimban, Cibogo, Sukamandi-Haurgeulis, Indramayu, Kadipaten | 500/150 kV     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | PLN, Dinas ESDMProv./Kab.             | 116,721,000,000 | APBN        |
| 6   | Pembangunan gardu hubung sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan listrik pada KPI | Kawasan Metropolitan REBANA                                  | 3 gardu        |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | PLN, Dinas ESDMProv                   | 31,273,000,000  | APBD Prov.  |
| 7   | Pembangunan SUTT                                                                   | Kawasan Metropolitan REBANA                                  | 150 kV         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kementerian PUPR, Dinas ESDMProv./Kab | 271,000,000,000 | APBN        |
| 8   | Pembangunan pembangkit listrik                                                     | Kawasan Metropolitan REBANA                                  | 500 kV/ 2 unit |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | PLN, Dinas ESDMProv./Kab              | 331,273,000,000 | APBN        |

| No. | Program                                                                                                | Lokasi                                               | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana                 | Biaya (Rupiah)  | Sumber Dana |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |                                                                                                        |                                                      |                    | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                    |                 |             |
| 9   | Penyediaan insentif bagi industri yang menyediakan energi terbarukan secara mandiri                    | Seluruh KPI                                          | 1 Pergub           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Dinas ESDM Prov./<br>Bappeda Prov. | 289,774,122     | APBD Prov.  |
| 10  | Pengembangan Sistem <i>Ducting</i> jaringan serat optik dan <i>microcell pole</i> bersama 5G           | Kertajati Aerocity, Kota Baru Patimban               | 2 Paket            |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | BUMD/ Swasta                       | 800,000,000,000 | APBN        |
| 11  | Pengembangan ICT Data Centre                                                                           | Kertajati Aerocity, Kota Baru Patimban, Kota Cirebon | 3 Paket            |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | BUMD/ Swasta                       | 65,000,000,000  | APBD Prov.  |
| 12  | Review dan Penyusunan Masterplan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Metropolitan REBANA | Kawasan Metropolitan REBANA                          | 2 Paket dan Pergub |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar              | 2,400,000,000   | APBD Prov.  |
| 13  | FS dan DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Metropolitan REBANA                       | Kawasan Metropolitan REBANA                          | 3 Paket            |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar              | 2,100,000,000   | APBD Prov.  |

| No. | Program                                                                 | Lokasi                                                                                                      | Besaran                 | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana                 | Biaya (Rupiah)    | Sumber Dana        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                             |                         | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                    |                   |                    |
| 14  | Pembangunan Rumah Susun Pekerja                                         | KPI Cipali Subang Barat                                                                                     | 4 TB                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR                          | 16,200,000,000    | APBN               |
| 15  | Pembangunan Rumah Susun Sewa                                            | Kota Cirebon                                                                                                | 4 TB                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR                          | 20,000,000,000    | APBN               |
| 16  | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                         | WS Cimanuk-Cisanggarung                                                                                     | 4 waduk lapangan 5 situ |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPSDA Prov. Jabar                  | 69,000,000,000    | APBN               |
| 17  | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cirebon Raya (Jatigede) | Metropolitan Cirebon Raya                                                                                   | 1500 l/dtk              |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR/ Disperkim/ BUMD/ Swasta | 2,100,000,000,000 | KPBU               |
| 18  | Pembangunan SPAM IKK                                                    | Patimban Kab. Subang; Cipanas Kab. Sumedang; Tarum timur;                                                   | 3 SPAM                  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR/ Disperkim/ BUMD/ Swasta | 27,000,000,000    | PBD Kota/Kabupaten |
| 19  | Pembangunan waduk untuk mendukung air baku kegiatan indusri             | Cipunagara, Kab. Subang; Sadawarna, Kab. Subang; Kadumalik, Kab. Majalengka; Cilame; Cipanas, Kab. Sumedang | 5 waduk                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Kementerian PUPR                   | 5,645,000,000,000 | APBN               |

| No. | Program                                                                                | Lokasi                      | Besaran       | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana           | Biaya (Rupiah)    | Sumber Dana |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                                                                                        |                             |               | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                              |                   |             |
| 20  | Pengkajian pra studi kelayakan pemenuhan sumber air baku alternatif                    | Kawasan Metropolitan REBANA | 1 dokumen     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DPSPDA/ Disperkim Jawa Barat | 1,700,000,000     | APBD Prov.  |
| 21  | Pengembangan SPAM dari sumber air baku alternatif                                      | Kawasan Metropolitan REBANA | 4.738 1/dtk   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov/ BUMD/ Swasta | 6,633,200,000,000 | KPBU        |
| 22  | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                    | Kawasan Metropolitan REBANA | 1 Dokumen     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar              | 250,000,000       | APBD Prov.* |
| 23  | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                       | Ciayumajakuning             | 1 Dokumen     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar              | 992,494,060       | APBD Prov.* |
| 24  | Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning                                             | Ciwaringin, Kab. Cirebon    | 1000 ton/hari |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov / BUMD / Swasta     | 484,000,000,000   | APBD Prov   |
| 25  | Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional                 | Ciayumajakuning             | 1 Paket       |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar              | 34,172,933,034    | APBD Prov   |
| 26  | Bantuan teknis dan fasilitas pengurangan timbulan sampah dan sampah tercampur kab/kota | Provinsi Jawa Barat         | 1 dokumen     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar              | 350,000,000       | APBD Prov.  |

| No. | Program                                                                   | Lokasi                              | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana                | Biaya (Rupiah)  | Sumber Dana        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
|     |                                                                           |                                     |             | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                   |                 |                    |
| 27  | Bantuan teknis pengolahan sampah organik di kab/kota                      | Provinsi Jawa Barat                 | 1 dokumen   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar                   | 350,000,000     | PBD Kota/Kabupaten |
| 28  | Pembangunan TPST Patimban                                                 | Kecamatan Pusakanagara, Kab. Subang | 1 Unit      |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | DLH Prov. Jabar                   | 1,500,000,000   | PBD Kota/Kabupaten |
| 29  | Penegmbangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Cirebon Raya   | Metropolitan Cirebon Raya           | 1.200 l/dtk |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Jawa Barat              | 116,500,000,000 | APBD Prov.         |
| 30  | Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik                       | Kota Baru Patimban                  | 1 IPAL      |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Jawa Barat              | 4,500,000,000   | PBD Kota/Kabupaten |
| 31  | Perencanaan Teknis Drainase Permukiman di Metropolitan Cirebon Raya       | Metropolitan Cirebon Raya           | 2 Dokumen   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar             | 600,000,000     | APBD Prov.*        |
| 32  | Pengembangan sistem drainase metropolitan cirebon raya                    | Metropolitan Cirebon Raya           | 3 Paket     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar             | 7,500,000,000   | APBN               |
| 33  | Pengembangan prasarana instalasi pengelolaan limbah terpadu IPAL industri | 13 KPI                              | 13 IPAL     |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | BUMD / Swasta                     | 65,000,000,000  | BUMD / Swasta      |
| 34  | Pengembangan IPLT Kab. Cirebon                                            | Kab. Cirebon                        | 1 lokasi    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | KemenPUPR/ Disperkim Kab. Cirebon | 3,500,000,000   | APBN               |

| No.      | Program                                                                                                                                 | Lokasi                                                      | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana              | Biaya (Rupiah)  | Sumber Dana        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                         |                                                             |                    | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                 |                 |                    |
| 35       | Pembangunan IPAL Komunal SIKM                                                                                                           | Desa Cipanas, Kec. Dukupuntang                              | 1 lokasi           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar           | 31,544,000,000  | PBD Kota/Kabupaten |
| 36       | Penyediaan fasilitas pengolahan limbah terpadu pada SIKM                                                                                | Kab. Subang, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang | 4 unit             |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disperkim Prov. Jabar           | 120,000,000,000 | PBD Kota/Kabupaten |
| <b>C</b> | <b>Strategi 4.C</b> Pengembangan kelembagaan, riset dan teknologi                                                                       |                                                             |                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                 |                 |                    |
| 1        | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Rapergub Renaksi REBANA                                                                     | Kawasan Metropolitan REBANA                                 | 1 Kegiatan         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. | 220,000,000     | APBD Prov.*        |
| 2        | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (KSDD) di Kawasan Metropolitan REBANA                                                      | Kawasan Metropolitan REBANA                                 | 3 Kegiatan dan MoU |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro PMKS, Setda Prov.          | 600,000,000     | APBD Prov.*        |
| 3        | Penyusunan Naskah akademik rancangan Peraturan Pembentukan kelembagaan badan pengelola kawasan dan kerjasama antar pemangku kepentingan | Kawasan Metropolitan REBANA                                 | 1 Kegiatan         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disindag Prov&Kab               | 300,000,000     | APBD Prov.         |
| 4        | Fasilitasi BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dalam                                                                                     | Kawasan Metropolitan REBANA                                 | 3 Kegiatan dan MoU |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro BUMD, Setda Prov.          | 600,000,000     | APBD Prov.*        |

| No. | Program                                                                                              | Lokasi                      | Besaran            | Tahun Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Instansi Pelaksana                  | Biaya (Rupiah) | Sumber Dana |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                      |                             |                    | 20<br>21          | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |                                     |                |             |
|     | Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA                                                             |                             |                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                     |                |             |
| 5   | Fasilitasi BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi dalam Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA | Kawasan Metropolitan REBANA | 3 Kegiatan dan MoU |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro BUMD, Setda Prov.              | 600,000,000    | APBD Prov.* |
| 6   | Penyiapan kelembagaan BLUD & BUMD untuk pengelolaan Kawasan                                          | Kawasan Metropolitan REBANA | 2 Dokumen dan MoU  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro BUMD, Setda Prov.              | 300,000,000    | APBD Prov.  |
| 7   | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah (KSDD) di Kawasan Metropolitan REBANA        | Kawasan Metropolitan REBANA | 1 Kegiatan         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Biro PMKS, Setda Prov.              | 300,000,000    | APBD Prov.  |
| 8   | Peningkatan Kapasitas SDM BUMD Pengelola Kawasan                                                     | Kawasan Metropolitan REBANA | 2 Kegiatan         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Bappeda Kab./ Provinsi/ Setda Prov. | 300,000,000    | APBD Prov.  |
| 9   | Pembentukan Kemitraan Perbankan dan lembaga permodalan                                               | Seluruh KPI                 | 1 Kegiatan         |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Disindag Prov                       | 150,000,000    | APBD Prov.  |

| No. | Program                                                                                          | Lokasi                      | Besaran     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Instansi Pelaksana      | Biaya (Rupiah)        | Sumber Dana |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|     |                                                                                                  |                             |             | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                         |                       |             |
| 10  | pengembangan lembaga technopark atau R&D kawasan sebagai think-tank                              | Kota Baru Kertajati         | 1 Paket     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Badan Pengelola kawasan | 4,500,000,000         | APBD Prov   |
| 11  | Peningkatan Skema Pembiayaan HAKI, Modal Ventura, dan Hibah untuk industri kreatif               | Seluruh KPI                 | 3 Kegiatan  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Disindag Prov           | 1,500,000,000         | APBN        |
| 12  | Pembentukan Kemitraan dengan Universitas/Lembaga Pendidikan Berbasis Penelitian dan pengembangan | Kawasan Metropolitan REBANA | 1 Kegiatan  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Badan Pengelola kawasan | 500,000,000           | APBD Prov   |
| 13  | Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan CSR                                                      | Kawasan Metropolitan REBANA | 10 kegiatan |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Badan Pengelola kawasan | 500,000,000           | BUMD/Swasta |
|     | KEBUTUHAN INVESTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN 4 - SISTEM PENDUKUNG                                  |                             |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         | 18,376,885,173,516    |             |
|     | TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI RENCANA AKSI KAWASAN METROPOLITAN REBANA                               |                             |             |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         | 2,249,357,068,819,420 |             |

Ket: \* Telah tercantum dalam SIPD RKPD Provinsi Tahun 2021  
\*\* Termasuk kedalam program Simpul KPBU Jawa Barat  
\*\*\* Usulan Program dari Kabupaten/Kota

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi dari rencana aksi pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA. Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan kawasan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Bupati atau Walikota melalui Bappeda Kabupaten/kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator utama pembangunan kawasan di Kawasan Metropolitan REBANA yang dinilai berdasarkan pelaksanaan program dalam rencana aksi pengembangan kawasan Metropolitan REBANA. Indikator utama yang dijadikan acuan penilaian pencapaian pengembangan kawasan terdiri dari 3 (tiga), yaitu :

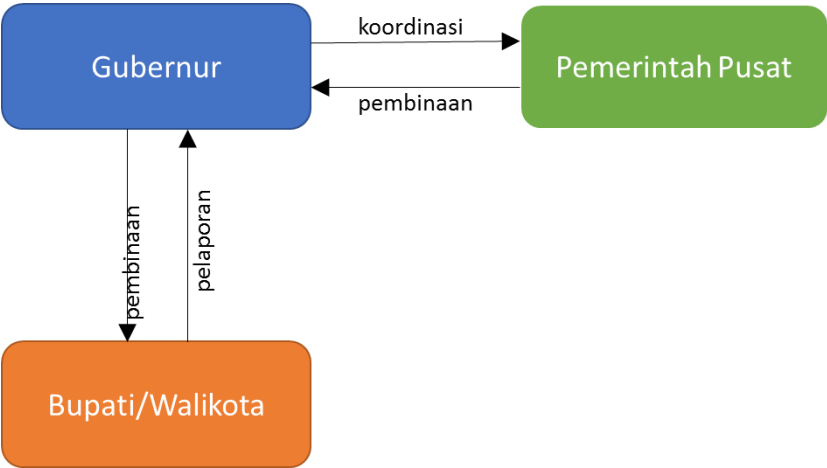
1. Laju pertumbuhan ekonomi per tahun  
Indikator laju pertumbuhan ekonomi per tahun yang pada tahun 2030 ditargetkan mencapai 6,83 persen dievaluasi melalui pelaksanaan program turunan dari kebijakan utama integrasi pengembangan wilayah antar KPI dan SIKM dan Kawasan Perkotaan Perkotaan – Perdesaan; serta kebijakan pendukung berkaitan dengan pengembangan tata ruang, industri ramah lingkungan dan konservasi lahan pangan berkelanjutan. Program dan indikator penilaian laju pertumbuhan ekonomi secara lebih detail terlampir pada Tabel 5.1.
2. Laju investasi per tahun  
Indikator laju pertumbuhan investasi per tahun yang ditargetkan mencapai 6,07 persen pada tahun 2030 dievaluasi melalui pelaksanaan program turunan dari kebijakan utama peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan aglomerasi industri yang terkoneksi satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing berupa 13 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan pengembangan konektivitas tinggi antar kawasan; serta strategi pendukung berkaitan dengan pengembangan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendukung. Program dan indikator penilaian laju investasi secara lebih detail terlampir pada Tabel 5.2.
3. Serapan Jumlah Tenaga Kerja  
Indikator jumlah serapan tenaga kerja yang ditargetkan mencapai 4,39 juta jiwa dievaluasi melalui pelaksanaan program turunan dari kebijakan utama pengembangan sistem vokasi yang terhubung dengan industri, kewirausahaan, dan SDM inovatif; serta strategi pendukung berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, riset, dan teknologi. Program dan indikator penilaian serapan tenaga kerja secara lebih detail terlampir pada Tabel 5.3.

Bupati atau Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pencapaian indikator utama pengembangan kawasan Metropolitan REBANA yang menjadi daerah administratifnya kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi setiap tahun, dan setiap tiga tahun melaporkan hasil rekapitulasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan implementasi program dalam Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA pada tahun-tahun berikutnya. Hasil pemantauan dan evaluasi memungkinkan mengurangi dan atau menambahkan program sesuai dengan kriteria berikut.

- 1. Kontribusi pada ketercapaian indikator utama Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA  
Kriteria ini menilai sejauh mana program akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator utama pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.
- 2. *Feasibility* implementasi  
Kriteria ini menilai sejauh mana program tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang, rencana pembangunan, rencana aksi pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA; kesiapan lahan; kesesuaian dengan peraturan perundangan; serta kelayakan finansial.
- 3. Kontribusi pada pembangunan kawasan dan regional  
Kriteria ini menilai sejauh mana program dapat berkontribusi pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di dalam kawasan Metropolitan REBANA dan Jawa Barat.

Gubernur melaksanakan pengarahannya kepada kabupaten/kota agar arah pembangunan di Kawasan Metropolitan REBANA sesuai dengan arah pembangunan di dalam Peraturan Gubernur ini. Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait membina pelaksanaan pembangunan di Kawasan Metropolitan REBANA sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Gambar 6.1 Skema Pemantauan dan Evaluasi**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi REBANA harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga pengalokasian sumber daya (pendanaan, kelembagaan, regulasi, dan aktivitas) akan efektif dan efisien. Pemangku kepentingan diluar pemerintah dapat menjadikan Rencana Aksi ini sebagai referensi dalam berkolaborasi membangun Kawasan Metropolitan REBANA menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Pada akhirnya kolaborasi menjadi kunci sukses pencapaian visi Kawasan Metropolitan REBANA.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL